



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI KEGIATAN SIMPAN PINJAM
UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) DALAM
PNPM MANDIRI PERDESAAN
(STUDI KASUS PADA KELOMPOK SPP NURUL IMAN DI
DESA TULEHU UPK KECAMATAN SALAHUTU
KABUPATEN MALUKU TENGAH)**

TESIS

**STELLA A. TANASALE
0906501200**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI KEGIATAN SIMPAN PINJAM
UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) DALAM
PNPM MANDIRI PERDESAAN
(STUDI KASUS PADA KELOMPOK SPP NURUL IMAN DI
DESA TULEHU UPK KECAMATAN SALAHUTU
KABUPATEN MALUKU TENGAH)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
magister Ilmu kesejahteraan sosial (M.Kesos)**

**STELLA A. TANASALE
0906501200**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
JANUARI 2012**

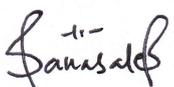
i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Stella A. Tanasale

NPM : 0906501200

Tanda Tangan : 

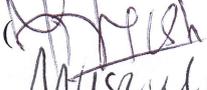
Tanggal : 30 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Stella A. Tanasale
NPM : 0906501200
Program Studi : Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : Evaluasi Kegiatan Simpan Pinjam Untuk
Kelompok Perempuan (SPP) Dalam PNPM
Mandiri Perdesaan (Studi Kasus pada Kelompok
SPP Nurul Iman di Desa Tulehu UPK Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arif Wibowo S.Sos, S.S, M.Hum ()
Penguji : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D ()
Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si ()
Penguji : Dra. Wisni Bantarti, M.Kes ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Desember 2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Ada ungkapan syukur dari hati yang terdalem kepada Tuhan yang maha baik, karena atas kasih dan penyertaanNya, karya sederhana ini dapat saya selesaikan pada waktunya. Tesis dengan judul “Evaluasi Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) Dalam PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus pada Kelompok SPP Nurul Iman di Desa Tulehu UPK Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah)” ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Bagi saya merupakan sebuah pengalaman yang tiada duanya ketika melaksanakan penelitian tesis ini, ada berbagai tantangan dalam prosesnya, akan tetapi karena penyertaan tangan Tuhan melalui berbagai pihak yang membantu dari awal penelitian hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan dari:

- (1) Arif Wibowo, S.Sos, S.S, M.Hum selaku dosen pembimbing tesis yang telah membagi ilmu dan waktu serta mencurahkan dedikasi dan kesabaran yang tinggi kepada saya, dari awal hingga akhir penyusunan tesis ini.
- (2) Pihak Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia yang telah memfasilitasi ijin penelitian dan mendukung dalam pelaksanaan penelitian.
- (3) Pihak Sekretariat Nasional PNPM Mandiri Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah memfasilitasi saya dalam melakukan penelitian terkait Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.
- (4) Pihak NMC PNPM Mandiri Perdesaan yang telah membantu menyediakan data yang saya perlukan.
- (5) Pemerintah Provinsi Maluku yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan studi dengan memfasilitasi dalam perijinan dan biaya pendidikan.
- (6) Ibu Vety Salakay selaku Penanggung Jawab Operasional Provinsi Maluku yang telah membantu saya dengan memberikan data awal bagi penelitian ini.

- (7) Badan Kesbang Linmas pada Kantor Gubernur Maluku yang telah memberikan ijin bagi pelaksanaan penelitian ini.
- (8) Pihak Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang telah memfasilitasi dalam perijinan dan proses penelitian.
- (9) Pemerintah Negeri Tulehu
- (10) Seluruh Informan dalam penelitian ini: PJO Provinsi Maluku, RMC 5 Maluku, PJOK Kecamatan Salahutu, Fasilitator Kecamatan Saluhutu, Ketua UPK Kecamatan Salahutu, Kepala desa Tulehu, Ketua TPK desa Tulehu, Pendamping Lokal Desa Tulehu, dan anggota kelompok SPP Nurul Iman.
- (11) Suami tercinta, Bastian Seimahuira yang telah sabar membantu dan mendoakan dalam proses penelitian sampai penyelesaian tesis ini. Terima kasih untuk kasihmu yang luar biasa yang telah memberi saya semangat sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- (12) Orang tua dan keluarga saya (adik-adik, Oma dan mami Ne) yang telah mendukung saya dalam doa dan cinta selama saya melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan penelitian tesis ini.
- (13) Keluarga Seimahuira di Manado dan Keluarga Titahena di Passo karena telah mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- (14) Sahabat terbaikku Tineke Riry dan keluarga baruku di Depok (kak Tonggo, kak Rosie, kak Mey dan kak Rumi) yang telah membagi hidup kalian serta memberi semangat untuk menjalani perkuliahan dan mengakhirinya dengan baik.
- (15) Teman-teman magister Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2009 yang telah memberi inspirasi semasa perkuliahan.

Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati setiap pihak dan pribadi yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan tesis ini hingga selesai. Besar harapan saya, karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bahan informasi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan pemberdayaan yaitu kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan dan dapat memberikan informasi mengenai salah satu bentuk usaha kesejahteraan sosial.

Depok, Desember 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stella A. Tanasale
NPM : 0906501200
Program Studi : Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

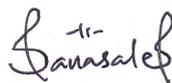
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) Dalam PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus pada Kelompok SPP Nurul Iman di Desa Tulehu UPK Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Desember 2011
Yang menyatakan



(Stella A. Tanasale)

ABSTRAK

Nama : Stella A. Tanasale
Program Studi : Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Evaluasi Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) Dalam PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus pada Kelompok SPP Nurul Iman di Desa Tulehu UPK Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah)

Tesis ini membahas mengenai kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh Kelompok SPP Nurul Iman di Desa Tulehu selama periode tahun 2009. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan merupakan penelitian terapan berupa penelitian evaluatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya pengawasan dari para pelaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang lain dan Fasilitator Kabupaten dalam pelaksanaan pendampingan oleh pendamping di kecamatan maupun di desa, perlu adanya perhatian khusus dari pembuat program kepada proses penguatan kelembagaan khususnya kepada kelompok SPP dan memanfaatkan faktor pendukung dan meminimalkan faktor penghambat yang ada.

Kata kunci:

Kelompok Perempuan, Kegiatan Simpan Pinjam, Pendampingan.

ABSTRACT

Name : Stella A. Tanasale
Study Program : Social Welfare Science
Title : Evaluation of saving and loan activity in women group in PNPM Mandiri Perdesaan (case study in SPP group Nurul Iman in Tulehu village UPK sub district Salahutu Central Maluku Regency)

This thesis discusses about a saving and loan activity in women group in PNPM Mandiri Perdesaan, in SPP group Nurul Iman in Tulehu village which was done during the year 2009. Qualitative approach is used in this research with descriptive design and it is an applied research that is evaluative research. The result of this research suggests that supervision is necessary by doers in PNPM and regency facilitator in conducting mentorship by mentors in sub district and village, there should be a special attention by program planner for institutional reinforcement process particularly for SPP group and promoting existing supporting factors and minimizing inhibiting ones.

Keywords:

Women group, saving and loan activity, mentorship

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Tujuan Evaluasi	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Praktis	7
1.4.2. Manfaat Akademis	8
1.5. Metodologi Penelitian	8
1.5.1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	8
1.5.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	13
1.5.3. Teknik Pemilihan Informan	14
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	15
1.5.4.1. Studi kepustakaan	16
1.5.4.2. Wawancara Mendalam	16
1.5.4.3. Observasi/Pengamatan	16
1.5.4.4. Pengambilan Foto	17
1.5.5. Teknik Analisis Data	17
1.5.5.1. Penelaahan Seluruh Data	17
1.5.5.2. Reduksi Data	17
1.5.5.3. Koding	17
1.5.6. Teknik untuk Meningkatkan Kualitas Penelitian	18
1.6. Sistematika Penulisan Tesis	19
2. TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Kesejahteraan Sosial	21
2.2. Kemiskinan	23
2.3. Pembangunan Sosial dan Perkembangan Strategi Pengentasan Kemiskinan	27
2.4. Pemberdayaan	30
2.5. Pendampingan Sebagai Strategi Pemberdayaan	32
2.5.1. Peranan Fasilitatif	32
2.5.2. Peranan Edukasional	35
2.5.3. Peranan Perwakilan	37
2.5.4. Peranan Teknis	37

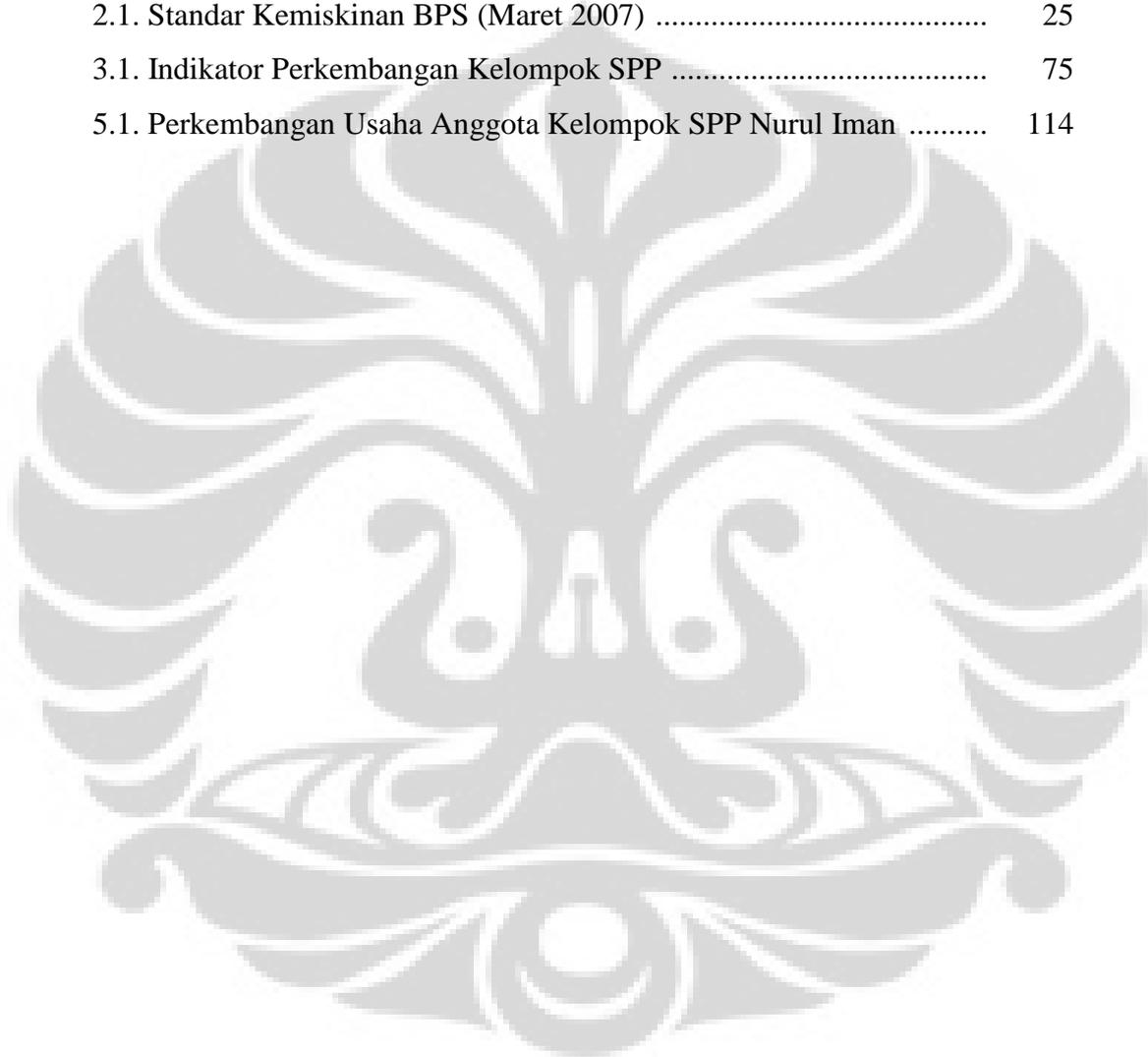
2.6. Pendanaan berupa Dana Bergulir dalam Strategi Pemberdayaan	38
2.7. Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan Di bidang Ekonomi	40
2.8. Model dan Skema Penelitian	49
3. GAMBARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	50
3.1. PNPM Mandiri	50
3.2. PNPM Mandiri Perdesaan	55
3.3. Simpan Pinjam untuk Keluarga Perempuan (SPP)	67
3.3.1. Tujuan	68
3.3.2. Ketentuan Dasar dan Pendanaan BLM	69
3.3.3. Alur Kegiatan SPP	71
4. HASIL PENELITIAN	83
4.1. Profil Kelompok SPP Nurul Iman	83
4.2. Profil Usaha Anggota Kelompok SPP Nurul Iman	84
4.3. Gambaran Pencapaian Tujuan Jangka Menengah Kegiatan SPP	86
4.3.1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan Pendanaan usaha ataupun sosial dasar	86
4.3.2. Memberikan kesempatan kaum perempuan Meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha	95
4.3.3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam Oleh kaum perempuan	98
4.4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan SPP pada Kelompok Nurul Iman	103
4.4.1. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman	103
4.4.2. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman	106
5. ANALISIS	109
5.1. Penilaian Hasil Tujuan Jangka Menengah Program sesuai Perencanaan yang telah dibuat	109
5.1.1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan Pendanaan usaha ataupun sosial dasar	109
5.1.2. Memberikan kesempatan kaum perempuan Meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha	116
5.1.3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam Oleh kaum perempuan	118
5.2. Gambaran Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman	124
5.2.1. Gambaran Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan SPP Pada Kelompok SPP Nurul Iman	124
5.2.2. Gambaran Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan SPP Pada Kelompok SPP Nurul Iman	126

6. KESIMPULAN DAN SARAN	128
6.1. Kesimpulan	128
6.2. Saran	130
DAFTAR REFERENSI	132



DAFTAR TABEL

1.1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia	2
1.2. Lima Provinsi dengan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2007-2009	4
1.3. Jenis Informan dan Data yang dibutuhkan	14
2.1. Standar Kemiskinan BPS (Maret 2007)	25
3.1. Indikator Perkembangan Kelompok SPP	75
5.1. Perkembangan Usaha Anggota Kelompok SPP Nurul Iman	114



DAFTAR GAMBAR

1.1. Model Perencanaan Kegiatan SPP	12
2.1. Peran Pendamping	37
2.2. Skema Penelitian	49
3.1. Struktur Organisasi PNPM Mandiri	54
3.2. Rancangan Mekanisme Pelaksanaan PNPM Mandiri	54
3.3. Alur Kegiatan SPP	71
3.4. Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK	80
4.1. Kondisi rumah tinggal YI	92
4.2. Kondisi rumah tinggal WJ	93
4.3. Kondisi rumah tinggal HL	93
4.4. Kondisi rumah tinggal FK	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara

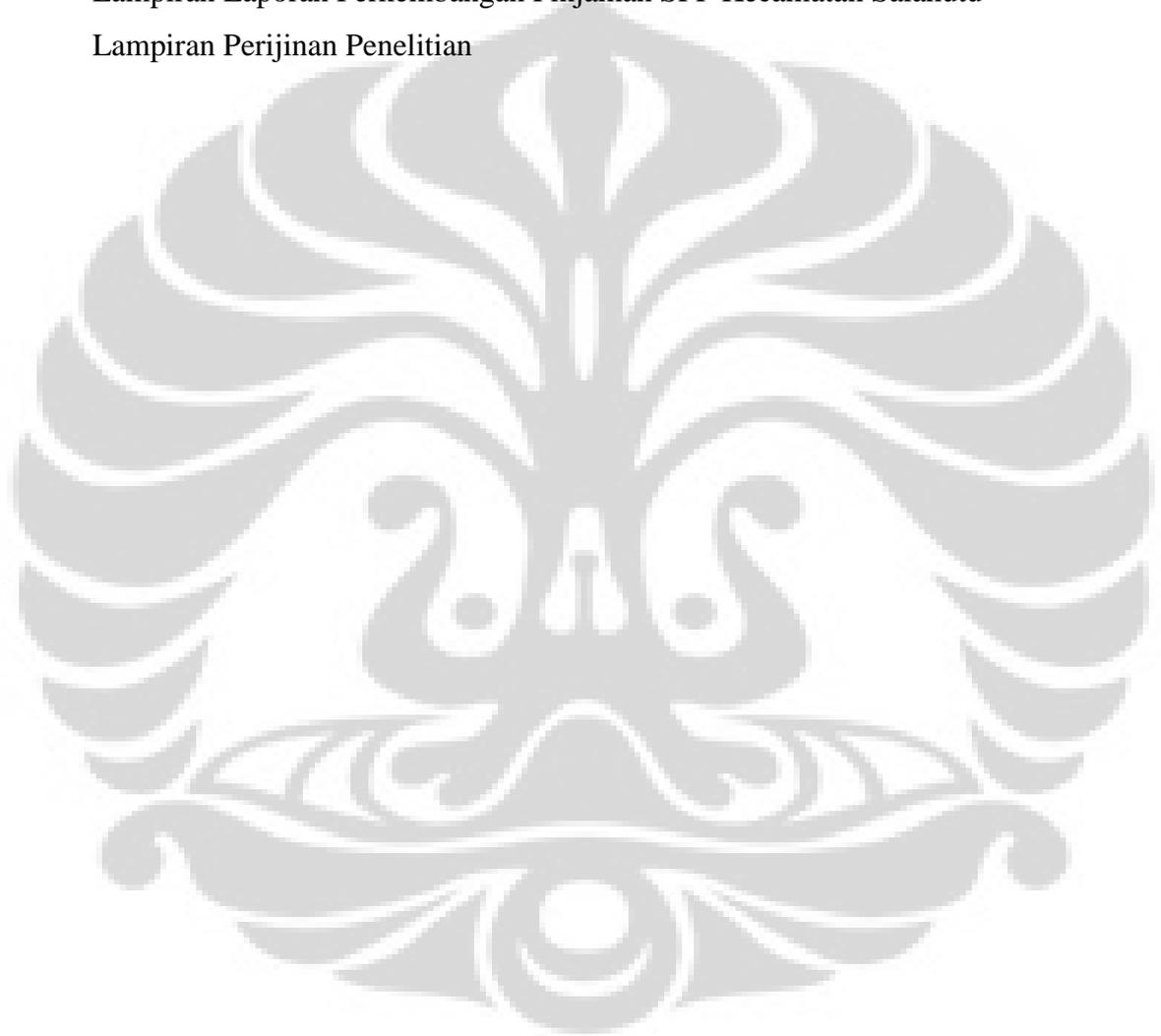
Lampiran Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran Instrumen Supervisi Monitoring Kegiatan SPP

Lampiran Instrumen Audit Proses Pelaksanaan Kegiatan SPP

Lampiran Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Kecamatan Salahutu

Lampiran Perijinan Penelitian



BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Cita-cita negara Indonesia seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan nasional ini dilaksanakan pembangunan nasional dalam berbagai aspek antara lain pembangunan dalam aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Di negara berkembang seperti Indonesia berbagai model pendekatan pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi selama ini pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia lebih berpusat pada pembangunan ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang akan berdampak pada Pendapatan Nasional Bruto. Pada perkembangannya pendekatan ini menghasilkan berbagai masalah sosial dalam masyarakat seperti kesenjangan kelas sosial yang besar, kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Salah satu model pendekatan pembangunan tersebut antara lain: Pendekatan pertumbuhan (*Growth approach*) yang dirumuskan Rostow, intinya terkait dengan investasi 'modal besar' atau mengenai suntikan investasi yang padat modal untuk mendongkrak sumber daya dan potensi yang ada pada masyarakat (Adi, 2008:h.8). Dengan pendekatan ini pemerintah Indonesia membuka ruang bagi masuknya investor asing untuk mengembangkan usaha mereka di bidang ekonomi di seluruh wilayah nusantara. Hal ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan dalam perekonomian yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh para ahli ekonomi pembangunan bahwa secara teoritis pandangan Rostow mengasumsikan bahwa bila terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagai konsekuensinya akan terjadi *trickle down effect* atau tetesan rezeki ke bawah. (Adi, 2008:h.11). Tetesan ini diharapkan bukan saja mencapai masyarakat sekitar lingkungan perusahaan asing ini berada akan tetapi diharapkan dapat mencapai lapisan rakyat kecil sampai di pedesaan. Pada

perkembangannya yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, pembangunan ekonomi semakin menguat dan prinsip tetesan rejeki ke bawah ini tidak mencapai rakyat miskin, melainkan terjadi penumpukan kapital pada beberapa kelompok-kelompok.

Dalam perkembangannya timbul pemikiran akan adanya pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara ekonomi akan tetapi tanpa melupakan aspek sosial dari masyarakat tersebut. Midgley (1995) merumuskan model ini sebagai pembangunan sosial yang adalah sebuah proses perubahan sosial secara terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh. Proses ini saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi.(h.25).

Tujuan dari pembangunan sosial menurut UN-ESCAP yaitu pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, sehingga penekanan dari model pembangunan sosial ini yaitu pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia yang merupakan upaya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dengan berorientasi pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri. Diharapkan dengan adanya pembangunan sosial ini dapat menurunkan angka kemiskinan secara nasional. (Adi, 2008:h.67)

Data dari BPS memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia bukan hanya dari jumlah penduduk miskin yang besar namun juga ketimpangan antara jumlah penduduk miskin di desa dan di kota.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	di kota (000)	di desa (000)
Maret 2007	13 559.3	23 609.0
Maret 2008	12 768.5	22 194.8
Maret 2009	11 910.5	20 619.4
Maret 2010	11 097.8	19 925.6

Sumber: <http://www.bps.go.id/>

Mencermati persoalan tersebut pemerintah melalui beberapa departemen terkait telah melakukan intervensi berupa kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dan telah menjangkau sampai ke desa-desa tertinggal di seluruh Indonesia. Di dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dijelaskan bahwa PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang tujuan umumnya meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. PNPM Mandiri merupakan payung program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia, yang dikoordinir oleh kantor Menteri Kesejahteraan Rakyat/ Kesra. Intervensi melalui program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah ini sesuai dengan pendapat Shardlow yang mencermati pemberdayaan sebagai program, dilihat dalam tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan dengan periode waktu tertentu. (Adi, 2008:h.78)

Selanjutnya pelaksanaan program pemberdayaan tersebut juga menunjukkan peran pemerintah dalam manajemen pembangunan mendasar yang menurut Sedarmayanti (2004) termasuk dalam penyelenggaraan fungsi pembangunan sosial ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam menjalankan fungsi pembinaan, fasilitator, pengawasan dan pemberdayaan. (h.24)

Terkait dengan proses pembangunan, Hubeis (2010), menyatakan bahwa fakta empiris membuktikan bahwa dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi dengan menyertakan perempuan sebagai aset sumberdaya manusia strategis telah banyak dilakukan oleh berbagai negara di dunia. *The Asia Foundation* menyatakan bahwa perempuan di Indonesia merupakan pemilik dari 35% usaha kecil dan mikro yang secara pasti turut memacu percepatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya menurut data BPS, persentase penduduk perempuan pada tahun 2004 adalah sebanyak 49,84% yang berarti bahwa sebagai aset sumberdaya manusia maka perempuan tetap mempunyai peran strategis dalam kelangsungan ekonomi keluarga, karena selain berperan sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak, mereka juga berperan mencari nafkah.(h.181).

Salah satu komponen program dalam PNPM Mandiri yaitu, Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang

direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. Ruang lingkup kegiatannya yaitu penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini. Salah satunya melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam yang dikelola kelompok Perempuan (UEP-SPP).

Propinsi Maluku yang dikenal dengan propinsi seribu pulau sampai saat ini sementara melaksanakan pembangunan pasca konflik kemanusiaan 1999-2004 yang merengut banyak korban jiwa dan kerugian sarana prasarana fisik di seluruh wilayah Maluku. Salah satu dampak konflik kemanusiaan tersebut yaitu meningkatnya jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Maluku. Data secara nasional dari BPS menunjukkan bahwa presentase tingkat kemiskinan di propinsi Maluku masih menunjukkan angka yang signifikan dibandingkan propinsi lainnya di Indonesia karena dalam perkembangan dari tahun 2007 sampai dengan 2009 Propinsi Maluku merupakan peringkat ketiga teratas dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Lima Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin (dari total penduduknya) tertinggi di Indonesia tahun 2007-2009

NO	PROVINSI	TAHUN		
		2007	2008	2009
1.	Papua	40.78	37,08	37,53
2.	Papua Barat	39.31	35,12	35,71
3.	Maluku	31.14	29,66	28,23
4.	Gorontalo	27.35	24,88	25,01
5.	Nusa Tenggara Timur	27.51	25,65	23,31

Sumber: Data BPS (telah diolah kembali)

Perhitungan presentase penduduk oleh BPS ini dilakukan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Kebutuhan dasar bukan makanan seperti kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Dilihat dari persebaran penduduk miskin di Indonesia (Berdasarkan data Podes 2005), salah satu kecamatan di Maluku yaitu kecamatan Salahutu yang memiliki 6 desa menempati urutan kedua terbesar setelah kecamatan Ambon Baguala di kota Ambon, yang memiliki jumlah keluarga miskin. Dari total keluarga miskin di provinsi Maluku sebesar 143.601, sebanyak 7.687 diantaranya berada di kecamatan Salahutu.

Kondisi di Kecamatan Salahutu tersebut telah membuatnya menjadi sasaran program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, dimulai dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun 1998 (PPK I) tetapi sempat terhenti akibat konflik horizontal yang melanda Maluku ditahun 1999, Kemudian kembali berpartisipasi di tahun 2004 sampai dengan saat ini telah mendapat alokasi BLM PPK II (siklus 5,6), PPK III (siklus 7,8). Memasuki tahun 2007 kecamatan ini tidak berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan karena masih dalam kegiatan PPK III, dan pada tahun 2008 sudah masuk PNPM Mandiri Perdesaan dengan BLM sebesar Rp 1.000.000.000. (Profil Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Salahutu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku, 2009).

Berdasarkan diskusi dengan staf *National Management Consultant* (NMC) PNPM Mandiri Perdesaan selaku konsultan dalam PNPM Mandiri, dicermati bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan selama ini, instrumen evaluasi yang ada yaitu evaluasi audit dana (pengucuran dan pengelolaan dana oleh masyarakat) dan instrumen supervisi monitoring terhadap kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan hanya sampai pada evaluasi tahapan *output* atau evaluasi berhenti ketika program/ kegiatan berakhir sehingga belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengukur dampak program ketika kegiatan telah berakhir.

Khusus kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan di kecamatan Salahutu dalam pelaksanaannya telah memasuki tahun ke-3.

Kecamatan Salahutu menjadi salah satu lokasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan karena sesuai dengan kelompok sasaran dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang menjangkau masyarakat miskin di perdesaan, dan berdasarkan alur kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap persiapan, sosialisasi awal dan perencanaan yang di dalamnya terdapat proses musyawarah desa khusus perempuan dan musyawarah prioritas dan penetapan usulan maka dana BLM sebanyak maksimal 25% dari alokasi BLM kecamatan Salahutu diberikan kepada kelompok SPP Nurul Iman di desa Tulehu. Pemilihan kelompok yang menerima BLM tersebut didasarkan pada penilaian bahwa sesuai dengan sasaran kegiatan SPP bahwa Kelompok Simpan Pinjam tersebut memiliki anggota dari rumah tangga miskin (RTM) yang produktif dan Kelompok Simpan Pinjam tersebut telah memenuhi proses verifikasi. Selanjutnya berdasarkan data dari UPK Kecamatan Salahutu, Laporan Perkembangan kelompok dan Rekapitulasi Laporan Penilaian Kesehatan UPK Propinsi Maluku TA.2009 serta diskusi dengan anggota Satuan Kerja Propinsi Maluku, terlihat bahwa desa Tulehu di kecamatan Salahutu merupakan wilayah dimana kegiatan SPP ini dianggap cukup berhasil hal tersebut dinilai berdasarkan Evaluasi Audit Internal yang dilakukan. Akan tetapi apakah kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan ini, telah memberikan dampak bagi anggota kelompok sesuai tujuan yang diharapkan maka perlu dilakukan penelitian evaluasi yang lebih komprehensif.

1.2 Permasalahan

Program yang dilakukan lebih dari 3 tahun ini, dan secara khusus kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) yang terakhir kali telah dilaksanakan pada periode tahun 2009 dan sampai tahun 2012 ini belum diadakan lagi, diharapkan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, baik itu kegiatannya, sumber daya manusia maupun pengalokasian dananya. Semua diarahkan pada pencapaian hasil yang maksimal. Namun apakah hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Audit Internal per tahun anggaran oleh Satuan Kerja PNPM Mandiri Propinsi Maluku telah secara komprehensif menunjukkan pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman. Karena itu diperlukan evaluasi yang komprehensif dan sesuai dengan kaidah evaluasi program yang ada.

Pertanyaan dalam penelitian adalah :

1. Apakah kegiatan SPP yang dijalankan telah memberikan hasil sesuai dengan tujuan jangka menengah kegiatan SPP yang telah direncanakan?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) pada kelompok Nurul Iman?

1.3 Tujuan Evaluasi

Suatu program dibuat untuk menanggapi suatu keadaan dan menyelesaikan suatu masalah. Tujuan atau hasil dari suatu program merupakan hal yang penting bagi stakeholder untuk mengarahkan kegiatan dan alokasi dana serta melihat keefektifan suatu program demi keberlanjutan program ke depannya.

Evaluasi ini bertujuan untuk :

1. Menilai hasil jangka menengah kegiatan SPP sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
2. Menggambarkan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) pada kelompok Nurul Iman.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada:

1. Pihak Sekretariat Nasional PNPM Mandiri Perdesaan
 Penelitian evaluasi ini diharapkan akan memberikan masukan yang berdasarkan fakta untuk upaya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program khususnya dalam pelaksanaan kegiatan SPP dalam PNPM Perdesaan.
2. Pihak NMC PNPM Mandiri Perdesaan selaku Konsultan Pusat PNPM Mandiri Perdesaan

Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberi masukan bagi peningkatan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan khususnya terhadap kegiatan SPP.

3. Pihak Pemerintah Provinsi Maluku selaku pelaksana program

Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dari Pemerintah Daerah Maluku untuk diusulkan kepada pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan desa sebagai masukan untuk upaya perbaikan dan peningkatan perencanaan dan pelaksanaan program khususnya dalam pelaksanaan kegiatan SPP dalam PNPM Perdesaan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Hasil evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan pemberdayaan yaitu kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan serta memberikan informasi mengenai salah satu bentuk usaha kesejahteraan.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menurut Sugiyono (2008) merupakan metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. (h.8-9). Hal ini sejalan dengan pendapat Alston dan Bowles (2003) yang mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah pendekatan dimana peneliti memulai penelitiannya tanpa membawa ide praduga terhadap sebuah realitas, penelitian dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan teknik lainnya yang dapat membangun teori dari hasil penelitian/pendekatan induktif. (h.9).

Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi sebagai dampak pelaksanaan sebuah program. Menurut Suhartono (2002) penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. (h.35). Dengan kata lain, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan sejauh mana kegiatan ini telah

mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan sejak awal pelaksanaan kegiatan SPP di UPK Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Berdasarkan kemanfaatannya penelitian ini merupakan penelitian terapan berupa penelitian evaluatif terhadap suatu kelompok masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat desa Tulehu sebagai anggota dari kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan di desa Tulehu UPK Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam setiap rancangan program terdapat tahap evaluasi. Kenyataan itu menunjukkan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam rangkaian sebuah program. Cesley dan Kumar (1987) mengatakan bahwa “*evaluation is a periodic assessment of relevance, performance, efficiency and impact of the project in context of its stated objective*”. (Oakley dan Clayton,2001:h.5). Hal ini berarti evaluasi merupakan suatu penilaian berkala terhadap relevansi, kinerja, efisiensi dan dampak dari suatu proyek dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Fink dan Kosecoff (1988) mengungkapkan bahwa “*evaluation is a set of procedures to appraise a program’s merit and to provide information about it’s goal,activities,outcomes,impact and cost*” (h.1) yang berarti bahwa evaluasi adalah serangkaian prosedur untuk menilai mutu sebuah program dan menyediakan informasi tentang tujuan, aktivitas, hasil,dampak dan biaya program tersebut.

Menurut *Toolkit Save the Children* (2006) yang dimaksud evaluasi adalah penilaian pada suatu waktu untuk menilai hasil dari suatu proyek atau program dan sejauh mana tujuan proyek tersebut telah tercapai. Apakah terdapat perubahan sebagai hasil dari proses dalam proyek tersebut. (h.108). Definisi lainnya oleh para ahli evaluasi dalam Shaw et al (2006:h.6) adalah:

a. Lincoln dan Guba (1986)

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai (manfaat dan kegunaan) dari beberapa entitas. Evaluasi menilai program, fasilitas, kinerja dan sejenisnya dalam rangka untuk meningkatkan atau memperbaiki (evaluasi formatif) atau untuk menilai dampak (evaluasi sumatif).

b. Scriven (1991)

Suatu proses penentuan manfaat dan kegunaan atau nilai dari sesuatu atau produk dari proses tersebut. Dalam proses evaluasi pada umumnya terdapat proses identifikasi standar dari kegunaan, manfaat atau nilai.

c. Patton (1997)

Evaluasi Program adalah proses pengumpulan informasi yang sistematis tentang kegiatan, karakteristik dan hasil-hasil dari program untuk membuat penilaian tentang program, meningkatkan efektivitas program dan menginformasikan keputusan bagi masa depan program.

Selanjutnya pengertian evaluasi program menurut Patton (1997) adalah, "*Program evaluation is the systematic collection of information about the activities, characteristics and outcomes of programs to make judgements about the program, improve program effectiveness, and/or inform decisions about the future programming*"(h.23). Yang berarti bahwa evaluasi program merupakan kumpulan informasi yang sistematis tentang aktivitas, karakteristik dan hasil program untuk membuat penilaian tentang program, untuk meningkatkan efektivitas program dan/atau menginformasikan keputusan tentang program masa yang akan datang.

Menurut Rossi dan Freeman (1982) penelitian evaluatif adalah penerapan prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam rangka menilai konseptualisasi, desain, implementasi dan kegunaan sebuah program intervensi sosial.(h.18). Tujuan penelitian evaluatif menurut Iskandar dan Nitimiharjo (1990), untuk mengukur pengaruh suatu program terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuatan keputusan tentang suatu program dan untuk meningkatkan (memperbaiki) program di masa yang akan datang.(h.129).

Pietrzak dkk (1990) memandang evaluasi program merupakan salah satu tipe yang khusus dari penelitian ilmu sosial terapan. Sebagai sebuah penelitian, pelaksanaan evaluasi program mengikuti pola-pola aktivitas atau tugas-tugas yang standar. Aktivitas ini ada dalam setiap tipe evaluasi yang meliputi *input*, *process* dan *outcome*. Karena evaluasi terhadap hasil ini bisa memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan program. (h. 21).

Tipe evaluasi yang digunakan adalah evaluasi sumatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto (1999) adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sejumlah materi/program kepada sasaran program. Evaluasi ini disebut pula dengan evaluasi hasil akhir.(h.36 dan 39)

Pengertian Evaluasi sumatif menurut Patton (1997) adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektifitas dari keseluruhan pelaksanaan program yang diperlukan bagi pengambilan keputusan akan keberlanjutan atau penghentian sebuah program.(h.67). Selanjutnya Scriven (1991) mendefinisikan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan program atau setelah program berakhir.(Patton, 1997:h.67)

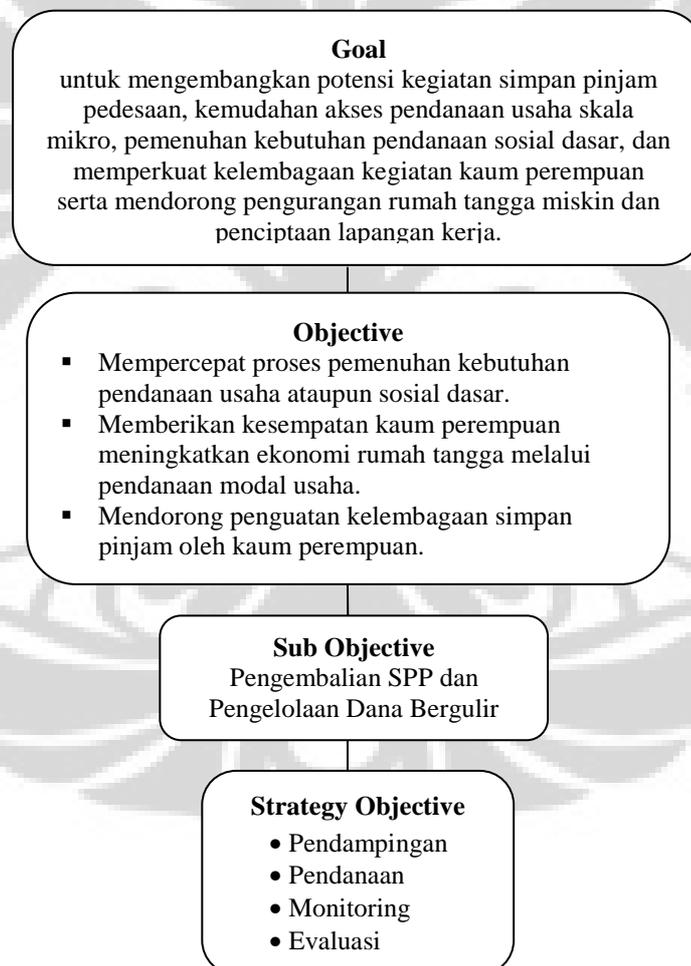
Selanjutnya Dunn (2003) menjelaskan bahwa tipe evaluasi sumatif, meliputi usaha utk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif digunakan untuk menilai produk-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan mantap.(h.614). Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang menggambarkan dampak dari kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Menurut Patton (1997) dalam penelitian evaluatif, seorang evaluator juga bertindak sebagai peneliti, fasilitator dan konsultan ataupun akuntan sesuai dengan informasi yang ingin didapat dan siapa *user* dari evaluasi tersebut. Hal ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan tujuan dan indikator program yang dievaluasi.(h.25)

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi terhadap tujuan jangka menengah. Model evaluasi ini menurut Bank Dunia (2004) adalah evaluasi *outcomes* yang merupakan teknik yang tepat untuk melihat keterkaitan sebuah program dengan tujuan jangka menengah yang diharapkan. Komponen-komponen dalam evaluasi *outcomes* antara lain: *Inputs*, yang adalah sumber daya dalam program; *Activities*, yang menunjukkan bagaimana program tersebut dijalankan; *Outputs*, adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan; *Outcomes*, adalah tujuan jangka menengah yang merupakan hasil dari *activities* dan *outputs*; sedangkan *Impact*, adalah tujuan jangka panjang yang timbul akibat dari program tersebut.(h. 2–7).

Sedangkan menurut Hawe (1995) *impact evaluation* merupakan evaluasi terhadap dampak jangka menengah sebuah program dan berhubungan dengan pengukuran *objective* program tersebut. Sedangkan *outcome evaluation* merupakan evaluasi yang mengukur dampak jangka panjang dan untuk menjawab apakah *goal* telah tercapai.(h.102)

Berdasarkan teori dan data yang telah dibahas di atas serta hasil diskusi dengan staf satker PNPM Mandiri Perdesaan, maka model perencanaan kegiatan SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan memodifikasi dari perencanaan program kesehatan dalam buku Hawe dkk (1995) maka model perencanaan kegiatan simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Model perencanaan kegiatan SPP

Sumber: telah diolah kembali

Berdasarkan model perencanaan di atas maka penelitian ini akan mengevaluasi pencapaian *objective* (tujuan jangka menengah) dari kegiatan SPP.

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian Studi Kasus (*Case-study Research*) yang menurut Neuman (2006), dimana peneliti akan meneliti secara mendalam banyak bagian dari sebuah kasus (individu, kelompok, organisasi, gerakan, kegiatan atau unit dalam wilayah tertentu) dalam satu periode waktu. Penelitian studi kasus ini secara mendalam akan meneliti satu atau dua kasus atau membandingkan beberapa kasus yang ada untuk menilai faktor-faktor tertentu. Peneliti secara teliti memilih satu atau beberapa kasus kunci untuk menggambarkan isu tertentu dan menganalisa kasus tersebut. Studi kasus dapat membantu peneliti untuk menghubungkan level mikro atau aksi dari individu dengan level makro atau struktur dan proses sosial dalam skala yang lebih besar.(h.40-41).

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu kelompok SPP Nurul Iman di desa Tulehu. Penelitian akan menilai pencapaian tujuan jangka menengah/*objective* kegiatan SPP ini yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pendampingan dan pendanaan yang merupakan *strategy objective* kegiatan SPP serta menggambarkan faktor pendukung dan penghambat kegiatan SPP.

1.5.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan Nurul Iman di desa Tulehu UPK Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan SPP yang diteliti dibatasi pada aktivitas program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2009, yang merupakan periode terakhir kalinya kegiatan SPP dilaksanakan di desa Tulehu, karena sampai tahun 2011 kegiatan SPP ini belum kembali dilaksanakan di desa Tulehu. Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan latar belakang penelitian dan berdasarkan diskusi dengan staf Satuan Kerja PNPM Mandiri Propinsi Maluku, dapat dicermati bahwa Kelompok SPP di desa Tulehu ini dinilai cukup berhasil dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi audit pengembalian dana pinjaman. Evaluasi audit pengembalian dana pinjaman ini merupakan bentuk evaluasi *output* yang selama ini dilakukan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan, akan tetapi evaluasi terhadap pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP belum pernah dilakukan oleh pelaksana program

karena program tidak memiliki instrumen untuk menilai pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP dimaksud. Hal ini membuat peneliti ingin melakukan evaluasi secara lebih komprehensif untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Juni 2011.

1.5.3 Teknik Pemilihan Informan

Menurut Moleong (2001:h.90) informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang masalah yang dicakup dalam penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pelaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Tabel 1.3. Jenis Informan dan Data yang dibutuhkan

No	Informan	Informasi Yang Ingin Diperoleh	Jumlah Informan
1.	Aparat Pemerintahan	Tentang Pelaksanaan kegiatan SPP di desa Tulehu.	2 orang
2.	Penanggung Jawab Operasional di Provinsi	Tentang pelaksanaan kegiatan SPP serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan.	1 orang
3.	Konsultan Provinsi	Tentang pelaksanaan kegiatan SPP serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan	1 orang
4.	Pendamping	Tentang proses pendampingan yang dilakukan kepada anggota SPP Nurul Iman selama kegiatan.	2 orang
5.	TPK dan UPK	Tentang pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok Nurul Iman.	2 orang

6.	Anggota kegiatan SPP	Tentang hasil sesuai tujuan jangka menengah kegiatan SPP yang dirasakan.	6 orang
----	----------------------	--	---------

Dalam penelitian ini, informan yang digunakan dipilih berdasarkan teknik *Non Probability Sampling* yaitu *Purposive Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Hal ini sejalan dengan pendapat Aston dan Bowles (2003) dimana *purposive sampling* digunakan dengan mengambil sampel dengan suatu tujuan bagi penelitian. Peneliti terlebih dahulu harus memiliki kemampuan untuk mengindikasikan bahwa bagian dari kelompok tertentu penting bagi penelitiannya atau pemilihan subyek penelitian dirasakan merupakan sampel yang sesuai dengan topik penelitiannya. Informan yang dipilih ialah para pelaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang terlibat langsung dan dianggap cukup memahami pelaksanaan kegiatan SPP, yaitu :

1. Aparat pemerintahan yang terdiri dari, Kepala desa Tulehu dan PJOK Kecamatan Salahutu.
2. Penanggung Jawab Operasional Provinsi selaku tenaga ahli dalam PNPM Mandiri Perdesaan
3. Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi
4. Pendamping PNPM Mandiri Perdesaan yang terdiri dari, Pendamping Lokal dan Fasilitator Kecamatan.
5. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Salahutu dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Tulehu
6. Anggota kelompok SPP Nurul Iman sebagai penerima manfaat kegiatan. Dari 21 anggota kelompok SPP Nurul Iman, dipilih 6 informan berdasarkan variasi jumlah pinjaman dan jenis usaha anggota kelompok SPP Nurul Iman.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan penelitian evaluatif ini dalam upaya pengumpulan data, berikut ini metode–metode yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan penelitian.

1.5.4.1 Studi Kepustakaan

Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui literatur–literatur ilmiah pustaka dan landasan hukum berkaitan dengan masalah penelitian yaitu kesejahteraan, pemberdayaan, pendampingan, dana bergulir, kegiatan SPP, evaluasi program dan metode penelitian sosial yang dibahas oleh peneliti. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan dokumen berupa laporan-laporan hasil pelaksanaan kegiatan SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan di desa Tulehu.

Berbagai teori dalam literatur-literatur tersebut membantu peneliti untuk melakukan analisis terhadap hasil penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Guba dan Lincoln (1981) bahwa dokumen ini berguna karena merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian dan hasil dari pengkajian terhadap dokumen dapat membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.(Moleong,2001:h.161).

1.5.4.2 Wawancara Mendalam

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah teknik pengambilan data dengan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.(Sugiyono,2008:h.231).

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) yang menurut Sugiyono (2008), sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana pelaksanaannya lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta pendapat/ idenya terhadap topik penelitian.(h.233).

Aston dan Bowles (2003) berpendapat bahwa dalam wawancara semi terstruktur, peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang akan ditanyakan, berupa pertanyaan terbuka dengan banyak *prompts* dan *probes*.(h.116).

1.5.4.3 Observasi/ Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif pasif yang menurut Stainback (1988), “*passive participation means the researcher is present at the scene of action but does not interact or participate*”

hal ini berarti bahwa peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak terlibat dalam aktivitasnya.(Sugiyono,2008:h.227). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan pada aktivitas usaha anggota kelompok SPP Nurul Iman tetapi tidak terlibat dalam aktivitas tersebut. Hasil pengamatan tersebut dapat digunakan untuk melengkapi data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

1.5.4.4. Pengambilan Foto

Pengambilan foto dalam penelitian ini digunakan untuk memperkaya hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap anggota kelompok Nurul Iman. Berbagai foto dalam penelitian ini membantu pembaca untuk memahami kondisi usaha maupun kondisi ekonomi rumah tangga para informan.

1.5.5 Teknik Analisis Data

1.5.5.1 Penelaahan Seluruh Data

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dokumen resmi, foto dan sebagainya. (Moleong,2001:h.13)

1.5.5.2 Reduksi Data

Seluruh data direduksi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono,2008:h.52)

1.5.5.3 Koding

Peneliti menyusun data mentah ke dalam kategori konseptual dan memberi nama tema atau konsep. Aktivitas yang dilakukan bersamaan dalam proses koding yaitu reduksi data dan analisis kategorisasi data. Strauss (1987) membagi tiga tahapan koding dalam kualitatif (Neuman,2006:h.461-464) yaitu:

a. Open Coding

Dilakukan pada awal ketika data telah terkumpul. Peneliti menempatkan tema dan menetapkan kode inisial sebagai tahap pertama untuk merangkum data dalam kategori analisis atau kode.

Peneliti mempelajari seluruh data yang terkumpul kemudian menandai data yang penting dengan memberi kode, dalam hal ini peneliti dapat dengan terbuka menambah tema baru dan dapat mengubah kode inisial.

b. *Axial Coding*

Setelah data diberi kode-kode tertentu kemudian peneliti menyusun secara sistematis kode-kode yang ada dan menghubungkan satu dengan yang lain serta menemukan kunci analisis kategori.

c. *Selective Coding*

Tahap terakhir dalam proses koding, peneliti memeriksa kembali seluruh data dan kode-kode yang ada dan mencari dengan selektif, kasus sesuai dengan tema penelitian dan membuat perbandingan dan perbedaan setelah sebagian besar atau seluruh data telah terkumpul. Peneliti mempelajari data yang telah diberi kode dan memilih data yang dapat mendukung tema penelitian.

1.5.6 Teknik untuk Meningkatkan Kualitas Penelitian

Guba dan Lincoln (1981) membagi dalam 4 (empat) kriteria untuk penelitian kualitatif (Krefting, 1991: h. 217-222) yaitu:

1. *Credibility*

Informasi yang diperoleh berdasarkan penemuan terhadap pengalaman informan sebagaimana yang dialaminya dan dirasakan, dilihat, didengar oleh informan. Hal ini juga memperlihatkan realitas ganda yang dialami oleh informan. Informasi dapat dipercaya (*credible*) bila hal tersebut ditunjukkan sebagai deskripsi/gambaran yang tepat atau interpretasi dari pengalaman hidup manusia dimana orang lain yang mengalami hal yang sama dapat langsung mengenali deskripsi tersebut.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan dilakukan melalui pengecekan rekan sejawat yaitu sesama informan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terhadap kegiatan SPP dan pengecekan terhadap anggota kelompok SPP Nurul Iman.

2. *Transferability*

Sebuah hasil penelitian dapat digunakan oleh orang lain bergantung pada kesamaan antara konteks dan subyek penelitian. Teknik yang digunakan yaitu

mengambarkan nominasi sampel, membandingkan sampel dengan data demografi dan deskripsi atau penggambaran yang rinci atau padat sehingga pembaca dapat memahami penemuan yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah kelompok perempuan dalam kegiatan simpan pinjam pada PNPM Mandiri Perdesaan, yang digambarkan pada pedoman kegiatan SPP dan secara khusus yaitu kelompok SPP Nurul Iman di desa Tulehu dapat dicermati secara rinci pada profil kelompok dan anggota dalam hasil penelitian.

3. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif yang penting bukanlah reliabilitas tetapi mengapa suatu perubahan/ perbedaan terjadi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, deskripsi atau penggambaran secara rinci dan padat tentang hasil kegiatan SPP pada kelompok Nurul Iman, triangulasi dan pengecekan terhadap informan penelitian.

4. *Confirmability*

Dalam penelitian ini peneliti mementingkan pertemuan yang panjang dengan para informan serta bersikap netral terhadap semua data yang didapatkan dalam penelitian terhadap kegiatan SPP ini.

1.6 **Sistematika Penulisan Tesis**

Penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, yaitu bab 1 merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dan perumusannya. Kemudian dibuat pertanyaan penelitian yang dijawab dalam tujuan penelitian. Terdapat pula manfaat penelitian baik akademis maupun praktis serta metode penelitian yang digunakan yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu pengumpulan data, sumber data (informan), teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik untuk meningkatkan kualitas penelitian.

Bab 2 memuat kerangka pemikiran yang berisi teori dan konsep yang digunakan untuk memperluas wawasan dan menganalisis data. Yang terdiri dari pengertian kesejahteraan sosial, kemiskinan, kemiskinan dan perempuan, perkembangan strategi pengentasan kemiskinan, pembangunan sosial, pemberdayaan, pendampingan sebagai strategi pemberdayaan, pendanaan berupa

dana bergulir sebagai strategi pemberdayaan, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam.

Bab 3 memuat gambaran umum PNPM Mandiri, PNPM Mandiri Perdesaan dan kegiatan SPP

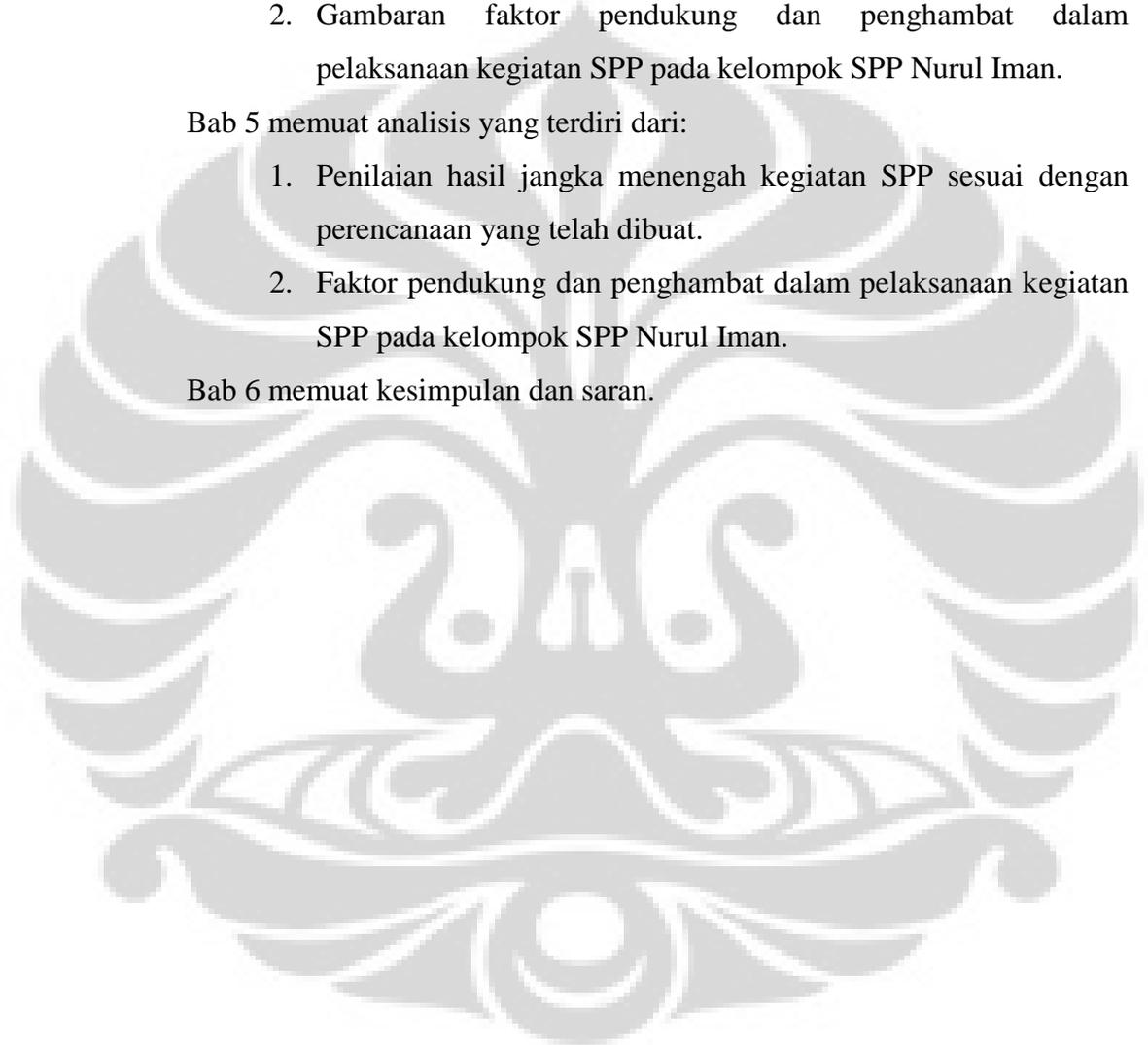
Bab 4 berisi hasil penelitian yang terdiri dari:

1. Gambaran pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP
2. Gambaran faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman.

Bab 5 memuat analisis yang terdiri dari:

1. Penilaian hasil jangka menengah kegiatan SPP sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman.

Bab 6 memuat kesimpulan dan saran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan mengenai teori dan landasan berpikir yang berhubungan dengan Kesejahteraan sosial, Kemiskinan, Pembangunan Sosial dan Perkembangan Strategi Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan, Pendampingan, Pendanaan sebagai Strategi Pemberdayaan, Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi.

2.1 Kesejahteraan Sosial

Cita-cita negara Indonesia seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan nasional ini dilaksanakan pembangunan nasional dalam berbagai aspek antara lain pembangunan dalam aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Pembangunan dalam berbagai aspek tersebut demi mencapai kesejahteraan sosial Indonesia.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat 1 yaitu,

“Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan lagi bahwa kesejahteraan sosial adalah, kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Friedlander (1980) yaitu, “*Social welfare is a system of laws, programs, benefits, and services which strengthen or assure provisions for meeting social needs recognized as basic for the welfare of the population and for the functioning of the social order.*” (h.4). Hal tersebut berarti bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem hukum, program, manfaat, dan layanan yang meningkatkan atau memberikan ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan sosial yang merupakan dasar bagi kesejahteraan penduduk dan fungsi tatanan sosial.

Pendapat lainnya dari Midgley (1995:h.13) melihat kesejahteraan dalam 3 elemen dasar yaitu terciptanya suatu kondisi kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, terpenuhinya kebutuhan hidup dan ketika manusia dapat memaksimalkan kesempatan sosialnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Midgley, pada elemen pertama dijelaskan bahwa setiap keluarga dan komunitas memiliki masalah sosial, akan tetapi berbeda dalam penanganannya. Contoh sederhana misalnya sebuah konflik dalam sebuah keluarga dapat diselesaikan dengan baik tetapi pada keluarga yang lain konflik tersebut dapat merusak hubungan keluarganya. Contoh lain secara umum bentuk-bentuk kejahatan dan kekerasan dalam sebuah komunitas dapat dikontrol dengan baik dibandingkan dengan komunitas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas yang mampu mengelola masalahnya dengan baik, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada komunitas lainnya. Elemen kesejahteraan yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dimaksud berhubungan dengan kebutuhan dasar untuk dapat bertahan hidup, misalnya, makanan, air bersih, rumah tinggal dan rasa aman. Pada perkembangannya kebutuhan komunitas secara umum dirumuskan yaitu, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai, interaksi sosial yang harmonis, persediaan air bersih yang cukup dan perlindungan sosial. Komunitas dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sosialnya dinilai telah mencapai kesejahteraan.

Pada akhirnya dalam elemen ketiga, kesejahteraan tercapai jika komunitas mampu menciptakan kesempatan sosial untuk anggotanya dalam mengetahui dan mengembangkan potensi dirinya. Secara sederhana dapat terlihat bahwa komunitas yang gagal untuk menyediakan pendidikan, kesempatan kerja dan berbagai kesempatan lainnya yang dapat digunakan anggota komunitas untuk

mengembangkan potensinya memiliki tingkat kejahatan dan kekerasan yang lebih tinggi. Kekerasan dan kejahatan serta berbagai masalah sosial lainnya sering disebabkan karena tidak tersedianya kesempatan sosial bagi anggota masyarakat dalam mengembangkan potensinya.

Tiga elemen kesejahteraan di atas pada prakteknya saling melengkapi dalam mencapai kondisi sejahtera. Ketika tiga elemen tersebut telah terdapat pada sebuah komunitas maka dapat disimpulkan bahwa komunitas tersebut telah mencapai kesejahteraan.

Dalam konteks pembangunan, kondisi kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan pembangunan kesejahteraan sosial yang menurut Jones adalah segenap kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah bersama dengan dunia usaha dan *civil society* dalam rangka mengatasi masalah sosial yang ada dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerjaan sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang utama yaitu, penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (Suharto, 2007: 108)

Mencermati berbagai pendapat ahli dan cita-cita negara di atas, maka tujuan dari pembangunan bangsa yaitu kesejahteraan sosial seluruh rakyatnya salah satunya dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

2.2 Kemiskinan

Menurut Bakhit et al (2001), Kemiskinan dapat dipandang dari sudut mekanis sebagai rendahnya tingkat pendapatan (per kapita) dan dapat juga dipandang sebagai deprivasi dalam arti rendahnya atau tidak memadainya akses terhadap sumber daya atau karena hidup di lingkungan alam yang semakin buruk atau rusak, serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Kemiskinan dapat dilihat dari perspektif mental atau budaya, sebagai perasaan terisolasi, kehilangan arah, keputusasaan, apatisme dan sikap pasif terhadap penderitaan. Perspektif kemiskinan yang telah disebutkan merupakan tahapan-tahapan dari fenomena kemiskinan dalam pengertian tidak mampu hidup menurut martabat manusia atau kemiskinan absolut dalam pengertian tidak mampu untuk sekedar bertahan hidup. Lebih lanjut pengertian kemiskinan yang dirumuskan

pada konferensi dunia untuk pembangunan sosial (*World Summit for Social Development*) di Kopenhagen, Maret 1995 yaitu :

“Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang bersinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.” (Bakhtit et al.,2001:h.5)

World Bank mendefinisikan kemiskinan adalah kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial. Kekurangan fisik adalah ketidakcukupan kebutuhan dasar materi dan biologis (*basic material and biological needs*), termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Di sisi lain, ketidakcukupan sosial adalah adanya resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang. (Batubara,2008:h.276)

Pendapat lain mengenai arti atau definisi kemiskinan datang dari salah satu peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen. Professor dari Harvard University itu mengatakan bahwa ada beberapa cara pendekatan untuk mengetahui apa itu kemiskinan. Sen menawarkan pendekatan melalui kelaparan atau akses seseorang terhadap pangan. Menurut Sen (1982), Seseorang akan mendapatkan makanan jika dia dikenal secara sosial dan legal. Jadi, walaupun ketersediaan pangan melimpah, Sen berpendapat “*Starvation is seen as the result of his inability to establish entitlement to enough food*”. (Batubara,2008:h.276)

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2007), BPS menggunakan 14 variabel/ kriteria untuk mengkategorikan penduduk miskin. Variabel-variabel atau kriteria-kriteria itu adalah: luas lantai bangunan; jenis lantai bangunan yang digunakan; jenis dinding yang digunakan; ada tidaknya jamban/toilet; ada tidaknya sumber penerangan rumah tangga; sumber air minum; jenis bahan bakar

yang digunakan untuk memasak sehari-hari; jumlah konsumsi daging, susu, ayam; pengeluaran untuk barang sandang; tingkat konsumsi makanan; pengeluaran untuk kesehatan; jumlah penghasilan kepala rumah tangga dalam sebulan; tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; dan jumlah tabungan yang dimiliki. Seseorang akan dikategorikan miskin oleh BPS jika memenuhi minimal 8 dari 14 kriteria/variabel tersebut. (Batubara, 2008: 277)

Tabel 2.1. Standar Kemiskinan BPS (Maret 2007)

NO	PARAMETER	SATUAN
1	Pendapatan	Rp.167.000,-/bulan/orang atau Rp.5.500,-/hari/orang
2	Rumah	Kurang dari 8 m ² ; lantai tanah/bambu; dinding bambu/rumbia
3	Jamban/toilet	Tidak ada
4	Penerangan	Lampu templok (minyak), tanpa listrik
5	Sumber air	Sumur/air hujan
6	Bahan bakar memasak	Kayu/minyak tanah
7	Makan	1 atau maksimum 2 kali/hari
8	Konsumsi	Daging/ayam/susu sebanyak 1 kali/minggu
9	Asupan kalori	2100/hari
10	Pakaian	Membeli satu stel/tahun
11	Kesehatan	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan Puskesmas
12	Pendidikan tertinggi	Sekolah Dasar (SD)
13	Sumber penghasilan kepala rumah tangga	Kurang dari (<) Rp.600.000,-/bulan
14	Tabungan	Tidak ada

Sumber : BPS (disadur dari Batubara, 2008, h.277)

Selanjutnya kemiskinan dapat dicermati melalui perbedaan gender, menurut Whitehead (2003), lebih dari separuh penduduk miskin di negara berkembang adalah perempuan. Ini menguatkan terjadinya feminisasi kemiskinan yakni sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh kaum

perempuan.(Cahyono,2005:h.11). Lebih lanjut menurut Cahyono, ada beberapa faktor kompleks penyebab kemiskinan yang terjadi pada kaum perempuan. *Pertama*, dari perspektif ekonomi yaitu perempuan yang senantiasa kesulitan untuk mendapat akses sumber daya ekonomi. Dalam bekerja perempuan tidak diakui dan dihargai, dibandingkan laki-laki, perempuan sering mendapat upah separoh. Perempuan lebih banyak memberikan waktunya untuk memproduksi barang dan pelayanan untuk keluarga dengan jam kerja yang lebih panjang dibandingkan laki-laki.

Dalam berbagai kasus perceraian, perempuan cenderung mengambil beban untuk membesarkan anak-anak, dengan atau tanpa sumbangan mantan suami. Beban sebagai kepala rumah tangga miskin ini menghadapi resiko besar karena perempuan tidak punya akses kepemilikan tanah dan modal, informasi, dan pasar kerja. Hal ini ditambah lagi dengan tingkat pendidikan perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki, hal ini membebani ibu rumah tangga yang miskin.

Kedua, dari perspektif politik, dalam hal ini perempuan yang tidak dapat terwakili secara proporsional di antara kelompok miskin dan tak punya kekuatan. Kemiskinan perempuan ini antara lain, kerentanan hidup (*vulnerability*), kesempatan dan suara (*voicelessness and powerness*), serta didukung pemerintah yang sangat bias gender (*male-biased governance system*). Dalam hal kerentanan hidup, perempuan sangat rentan terhadap kekerasan, terutama kekerasan domestik. Dalam hal partisipasi dan akses kekuasaan, keterlibatan perempuan dalam pembangunan juga masih rendah. Dalam upaya memberantas kemiskinan secara integral perempuan tidak dilibatkan sepenuhnya sehingga langkah pemberantasan kemiskinan pada akhirnya tidak sensitif gender. (h.12)

Bakhit et al. (2001) mengungkapkan bahwa,

“kemiskinan perempuan haruslah dipandang sebagai akibat dari kesempatan kerja yang terbatas, baik di sektor formal maupun informal. Meskipun tergantung pada aspek agama, budaya, sosial dan pembangunan yang berbeda-beda, namun akibat rendahnya perolehan penghasilan perempuan menjadi pergulatan hidup yang senantiasa merongrong kaum perempuan”. (h.152)

Hal tersebut ditegaskan Noerdin et al. (2006) bahwa berbagai persoalan ketidakadilan gender yang dirasakan perempuan karena konstruksi sosial yang melekat pada peran, tanggung jawab, dan perilakunya sebagai perempuan sangat berpengaruh pada kesejahteraan perempuan dan mengakibatkan kemiskinan berbasis gender. Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan di ranah publik. Termasuk di antaranya strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan membuat kebijakan dan program intervensi untuk membantu kaum miskin, khusus perempuan dalam mengatasi persoalan yang dapat dilihat pada setiap dimensi kemiskinan seperti perluasan kesempatan, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.(h.26).

2.3 Pembangunan Sosial dan Perkembangan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Di negara berkembang seperti Indonesia berbagai model pendekatan pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi selama ini pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia lebih berpusat pada pembangunan ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang akan berdampak pada Pendapatan Nasional Bruto. Pada perkembangannya pendekatan ini menghasilkan berbagai masalah sosial dalam masyarakat salah satunya yaitu kemiskinan.

Pada perkembangannya timbul pemikiran akan adanya pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara ekonomi akan tetapi tanpa melupakan aspek sosial dari masyarakat tersebut. Midgley (1995) merumuskan model pembangunan ini sebagai pembangunan sosial diharapkan saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi. Pendekatan ini mencoba mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial seperti 2 sisi koin, yaitu bahwa pembangunan sosial tidak dapat berlangsung tanpa dukungan pembangunan ekonomi, juga sebaliknya pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan lancar tanpa didukung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu kesatuan. (h.25)

Midgley (1995:h.13,26-28) kemudian menjelaskan 8 (delapan) aspek dalam pembangunan sosial yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pembangunan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan sosial memiliki fokus yang interdisipliner yang berasal dari berbagai jenis ilmu sosial.
3. Konsep pembangunan sosial menunjukkan sebuah proses yang dinamis.
4. Dalam pendekatan pembangunan sosial, proses perubahannya bersifat progresif.
5. Proses pembangunan sosial adalah *interventionist*, yaitu bahwa perubahan dalam masyarakat dapat terjadi jika pelaku perubahan melakukan berbagai upaya yang terencana atau adanya intervensi sosial.
6. Untuk mencapai tujuan pembangunan sosial melalui berbagai strategi.
7. Pembangunan sosial lebih memusatkan perhatiannya pada populasi sebagai kesatuan yang bersifat inklusif dan universalistik.
8. Tujuan dari pembangunan sosial yaitu peningkatan kesejahteraan sosial.

Mendukung pengertian di atas, Conyers (1982) mengemukakan bahwa pembangunan sosial memiliki 3 karakteristik utama yaitu, pemberian pelayanan sosial dasar, pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). (Suharto, 2006:6-7)

Dalam pembangunan sosial terlihat adanya perubahan paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada manusia bukan saja sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Mencermati pengertian pembangunan sosial di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengentasan kemiskinan dengan konsep pembangunan sosial ini menempatkan orang miskin sebagai peran utama yang secara aktif menggunakan potensi yang dimilikinya untuk diberdayakan untuk mengubah kehidupannya. Di Indonesia, pemerintah melalui departemen-departemen terkait telah melakukan intervensi berupa kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu PNPM Mandiri Perdesaan yang di dalamnya terdapat kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan.

Peran Negara dalam menangani masalah kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan tersebut sebenarnya sudah sangat jelas diamanatkan dalam konstitusi kita. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak

telantar dipelihara oleh negara. Makna dari pasal ini adalah bahwa negara melindungi sepenuhnya orang-orang miskin di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tak terkecuali orang miskin.

Sumodiningrat (2009:h.46) menjelaskan bahwa sejak tahun 1960-an pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang dilanjutkan pada tahun 1970-an dengan ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Di akhir 1980-an, pemerintah menggunakan strategi khusus untuk menuntaskan masalah kesenjangan sosial-ekonomi. Selanjutnya pada tahun 1997, akibat krisis ekonomi, dengan Keppres No. 190 tahun 1998, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Selama 40 tahun terakhir ini berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan pemerintah antara lain P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam–Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah) dan program pembangunan sektoral lainnya. Akan tetapi penurunan kemiskinan masih bergantung terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik nasional, konflik sosial, serta bencana alam yang terjadi.

Selanjutnya menurut Sumodiningrat (2009:h.47), berbagai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut pada implementasinya kadang-kadang belum sinergi dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga berdasarkan pemikiran tersebut pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) melalui Keppres 124 tahun 2001 yang bertujuan untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan pendapatan rakyat miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin secara signifikan. Komite ini mengkoordinir berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan

melibatkan unsur masyarakat, lembaga swadaya masyarakat/ organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

2.4 Pemberdayaan

Shardlow mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol hidup mereka dan mengusahakan masa depan sesuai keinginan mereka sendiri. Selanjutnya pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu program dan proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat dalam tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan dengan periode waktu tertentu. (Adi,2008:h.78) Lain halnya dengan Hogan melihat pemberdayaan sebagai proses yang terus berkesinambungan sepanjang usia manusia dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja.(Adi,2008:h.84)

Idealnya suatu bentuk pemberdayaan memadukan kedua hal ini yaitu sebagai program dan proses yang berarti bahwa dalam pelaksanaan sebuah program pemberdayaan masyarakat dalam prosesnya juga harus menekankan aspek kemandirian masyarakat dengan membantu masyarakat agar lebih pandai mengelola sumber daya dan juga meningkatkan komunikasi di antara mereka sehingga walaupun program pemberdayaan tersebut telah selesai, masyarakat mampu secara mandiri untuk menghadapi persoalan-persoalan baru yang timbul.

Menurut Ife (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah *“empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and effect the life of their community.”*(h.182). Pengertian tersebut berarti bahwa Pemberdayaan berarti melengkapi orang dengan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pengertian lainnya menurut Payne (1997) yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) yaitu,

“to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing

power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power the environment to client.”(Adi,2008:h.77).

(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.)

Pakar lainnya Shardlow mencermati bahwa berbagai definisi tentang pemberdayaan, intinya membahas usaha individu, kelompok ataupun komunitas untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengupayakan masa depan sesuai keinginan mereka. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa makna pemberdayaan dapat lebih dari satu interpretasi sesuai dengan variasi pembangunan yang ada, dimana pembangunan dapat memunculkan bentuk dan tujuan pemberdayaan yang berbeda. Misalnya dalam bidang pembangunan ekonomi yang bertujuan agar kelompok sasaran mampu mengelola usahanya. Tujuannya pemberdayaan ini tentu berbeda dalam pembangunan di bidang pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya.(Adi,2008:78)

Menurut Sumodiningrat (2009:h.102), pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.

Dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan intervensi terhadap masyarakat, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Intervensi yang dilakukan lebih bersifat pendampingan yang berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat sebagai subyek pembangunan agar dapat mengakses segala sumber daya yang ada dalam masyarakat, selama program pemberdayaan berlangsung.

2.5 Pendampingan Sebagai Strategi Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan terdapat pengertian sebagai suatu proses seperti yang dikemukakan oleh Hogan (2003), yang mengutip pandangan Rotter (1966),

Selignan (1975), Hopson dan Scally (1995) yang mencermati pemberdayaan masyarakat sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan tidak berhenti pada suatu masa saja. Hal ini juga berlaku pada suatu masyarakat dimana proses pemberdayaan pada suatu komunitas akan berakhir dengan selesainya program, baik itu program pemerintah maupun lembaga non pemerintah. (Adi, 2008: h. 84).

Adanya pandangan tentang pemberdayaan di atas dapat menunjukkan bahwa dalam sebuah usaha pemberdayaan dibutuhkan juga pendampingan yang dilakukan oleh pelaku perubahan dalam membantu masyarakat untuk mandiri.

Menurut Midgley (1995: h. 117), dalam melakukan pengembangan masyarakat pada umumnya dapat menggunakan tenaga profesional yang terlatih (*trained profesional personnel*) yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Namun demikian dimungkinkan juga menggunakan tenaga pendamping dari petugas-petugas lokal, dalam rangka meningkatkan partisipasi lokal, mengorganisir kegiatan dan menghubungkannya dengan lembaga-lembaga pengembangan masyarakat.

Ife, (2006: h. 287) menyatakan bahwa pendamping masyarakat merupakan suatu pekerjaan yang menuntutnya dapat melakukan beragam kegiatan dan menjalankan berbagai peran yang dibutuhkan dalam suatu waktu, sehingga dalam prakteknya seorang pendamping dapat berubah dari satu peran ke peran yang lain.

Selanjutnya Ife, membagi 4 peran utama yang harus dimainkan seorang agen perubahan (*community worker*) yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat tertentu yaitu, peran fasilitatif (*facilitative roles*), peran edukasional (*educational roles*), peran perwakilan (*representational roles*) dan peran teknis (*technical roles*). Ife kemudian menguraikan peran-peran tersebut dengan lebih rinci (h. 278-312) yaitu:

2.5.1 Peranan fasilitatif

Pendamping bertindak sebagai katalis dalam memfasilitasi proses-proses kelompok dengan berbagai teknik fasilitatif. Peran khusus yang harus ditampilkannya adalah:

- **Animasi sosial**

Pendamping memungkinkan masyarakat untuk bersedia terlibat aktif dalam proses perubahan dalam komunitasnya, hal ini dilakukan dengan memberikan inspirasi, menyemangati, mengaktifkan, merangsang, memberikan energi, serta memotivasi orang lain untuk melakukan bertindak. Dalam melakukan proses animasi sosial ini pendamping perlu memiliki enam sikap dalam dirinya yaitu, antusiasme, komitmen, integritas, komunikasi, pemahaman dan analisis serta kepribadian.

- **Mediasi dan Negoisasi**

Pendamping dapat bertindak sebagai mediator dan negosiator dalam menghadapi konflik yang pasti terjadi dalam masyarakat. Pendamping perlu untuk memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami serta mampu merefleksikan pandangan masyarakat yang berbeda-beda. Pendamping kemudian dapat membantu kelompok-kelompok dalam komunitas tersebut untuk respek terhadap pandangan yang berbeda-beda sehingga dapat menengahi dan mencari titik temu dengan musyawarah bagi kepentingan bersama.

- **Pemberi dukungan**

Pendamping menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dengan menghargai kontribusinya. Pendamping selalu bersedia ketika dimintai pendapat atau diminta membicarakan dan membahas sesuatu permasalahan. Dukungan yang diberikan dapat berupa materiil maupun non materiil seperti pujian, penghargaan, sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan terhadap apa yang dilakukan anggota komunitas tersebut.

- **Pembuatan konsesus**

Pembuatan konsensus ini merupakan kelanjutan dari peran mediasi, dengan membantu masyarakat mengidentifikasi landasan yang sama yang mengarah ke pencapaian sebuah konsensus atau sebuah kesepakatan untuk melakukan sebuah aksi dalam memperbaiki kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan keragaman budaya dalam masyarakat tersebut.

Hal penting yang perlu dipahami oleh pendamping bahwa dalam pembuatan konsensus ini tidak berarti bahwa seluruh anggota masyarakat harus setuju, karena selalu ada perbedaan pandangan dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari.

- **Fasilitasi kelompok**

Pendamping dapat melaksanakan peran yang berorientasi tugas (*task oriented roles*) atau peran yang berorientasi proses (*process-oriented roles*). Peran berorientasi tugas dilakukan dengan membantu kelompok untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan misalnya membantu merenovasi rumah warga, sedangkan peran yang berorientasi pada proses berkaitan dengan bagaimana agar anggota kelompok mau berpartisipasi dan bagaimana perasaan mereka terhadap kelompok tersebut.

- **Pemanfaatan keahlian dan sumber daya**

Pendamping dapat mengidentifikasi sumber daya yang ada dan membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat bermanfaat.

- **Mengorganisasi**

Pendamping berperan sebagai organisator, yang menuntunya untuk merencanakan hal-hal yang perlu dilakukan, hal mana yang dapat dilakukan sendiri atau dilakukan bersama, dan memikirkan kemungkinan hal tersebut dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya pendamping memerlukan komitmen seluruh anggota kelompok untuk bertanggung jawab dan saling membantu. Dan kepada anggota kelompok yang kurang berkomitmen, pendamping perlu memberikan peringatan dan dorongan.

- **Komunikasi pribadi**

Sangatlah penting bagi seorang pendamping untuk menyediakan waktunya berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam hal ini kapasitas yang dibutuhkan untuk berkomunikasi yaitu: kapasitas untuk memprakarsai/memulai komunikasi atau pembicaraan; menyimpulkan suatu pembicaraan; mampu menciptakan dan memelihara suasana saling mempercayai dan menerima; mampu mengarahkan pembicaraan sesuai tujuan; peka terhadap kondisi lingkungan (posisi duduk, situasi formal/informal); menjadi pendengar;

mampu memahami dan menginterpretasi apa yang dibicarakan; mampu membuat lawan bicara menjadi nyaman; menanyakan hal-hal yang penting; mampu mendorong orang untuk merefleksikan apa yang telah dibicarakan; mampu menyatakan suatu pesan dengan jelas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti; memberikan saran yang sesuai; memastikan bahwa percakapan berlangsung alami dan tidak dalam tekanan; sadar akan perbedaan budaya dan peka terhadap pola komunikasi (verbal dan non verbal; menggunakan bahasa tubuh untuk mendukung komunikasi; menyadari akan prioritas dan keterbatasan waktu dari orang lain).

2.5.2 Peranan Edukasional

Pendamping berperan tidak hanya membantu pada tahap proses pemberdayaan tetapi juga memberikan *input* atau masukan yang positif dan terarah sesuai dengan pengetahuan, ketrampilan dan pengalamannya. peran edukasional/ mendidik ini dilakukan pendamping dengan cara:

- **Membangkitkan kesadaran**

Pendamping berupaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap struktur dan perubahan sosial dimana masyarakat dapat terlibat dan memberikan tindakan yang efektif. Pendamping selalu mencari kesempatan membangkitkan kesadaran dan berdialog dengan masyarakat untuk menghubungkan pengalaman masyarakat dengan konteks sosial, ekonomi, budaya dan politik yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk menolong masyarakat melihat permasalahan yang mereka hadapi dari perspektif yang lebih luas.

- **Memberikan informasi**

Pendamping memberikan informasi yang diperlukan masyarakat seperti data demografi dan struktur sosial yang dapat digunakan untuk membangun profil komunitas. Informasi ini sangat penting bagi komunitas dalam perencanaan untuk memenuhi kebutuhannya, dan untuk melibatkan sebanyak anggota masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pendamping juga menyediakan informasi tentang program yang dilaksanakan di daerah lain sehingga komunitas setempat dapat belajar keberhasilan dan kegagalan komunitas lain. Dalam hal lain pendamping juga

menginformasikan tentang persoalan ekonomi atau realitas politik yang perlu diketahui komunitas. Selanjutnya pendamping perlu juga memberikan informasi tentang kondisi dalam komunitas itu sendiri.

- **Mengkrofontasikan**

Seringkali pendamping dihadapkan pada keputusan untuk mengkonfrontasikan komunitas atau kelompok dalam komunitas tersebut. Akan tetapi penting bagi pendamping untuk memikirkan kemungkinan terburuk sebelum menggunakan teknik konfrontasi ini karena dapat merugikan relasi dalam komunitas.

Pendamping dapat mengkonfrontasi komunitas dengan konsekuensi dari tindakannya. Pada kesempatan lain konfrontasi dibutuhkan karena akibat secara hukum dari tindakan anggota ataupun komunitasnya. Seringkali perlu untuk mengkrofontasi isu-isu moral atau hal yang prinsip dibandingkan dengan isu legal. Konfrontasi juga seringkali digunakan pendamping sebagai bentuk dari dinamika kelompok/ komunitas tersebut.

Semua teknik kronfontasi tersebut digunakan jika pendamping yakin bahwa krofontasi sangat diperlukan bagi komunitasnya.

- **Memberikan pelatihan**

Pendamping memberikan pelatihan bagi komunitas bagaimana untuk melakukan sesuatu hal. Pelatihan yang dilaksanakan akan efektif jika merupakan permintaan dari komunitas sendiri. Pelatihan dapat berupa ketrampilan yang mendukung proses-proses pemberdayaan atau manajemen komunitas, dapat pula berorientasi pada tugas/ tindakan dari komunitas tersebut, selanjutnya pelatihan yang berfokus pada kebutuhan khusus dari anggota atau komunitas, di kesempatan lain pelatihan yang dibutuhkan bersifat rekreasional atau budaya untuk menambah/ memperkaya gaya hidup (*lifestyles*), pelatihan juga dapat berorientasi pada pemberdayaan ekonomi untuk memperlengkapi orang dengan ketrampilan yang dapat digunakan untuk mendapat pekerjaan dan mampu bekerja secara produktif atau ketrampilan yang dapat mereka gunakan untuk memulai proyek ekonomi komunitas.

2.5.3. Peranan Perwakilan

Peran perwakilan ini digunakan untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga di luar komunitas atas nama dan bagi kepentingan komunitas. Teknik yang digunakan dalam peran perwakilan ini yaitu, penggalian sumber daya, hubungan masyarakat dan presentasi publik, jaringan kerjasama (*networking*), saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

2.5.4. Peranan teknis

Pendamping mampu mengaplikasikan ketrampilan teknis seperti, mengumpulkan dan menganalisa data (*research*), menggunakan komputer, presentasi laporan secara tertulis maupun lisan, manajemen dan pengendalian keuangan. Selanjutnya Ife menggambarkan peran-peran tersebut dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1. Peran Pendamping

Sumber: Jim Ife, 2006:312

Berbagai peran pendamping yang dikemukakan oleh Ife di atas memiliki kemiripan dengan pendapat Mayo (1994) yang menyatakan beberapa ketrampilan dasar yang perlu dikuasai oleh pendamping (Adi,2008:h.103) yaitu:

1. Menjalin relasi
2. Melakukan penilaian (*assessment*) dan penilaian kebutuhan
3. Melakukan riset atau investigasi
4. Melakukan dinamika kelompok

5. Bernegosiasi
6. Berkomunikasi
7. Melakukan konsultasi
8. Manajemen termasuk manajemen dana dan waktu
9. Mencari sumber dana, termasuk pembuatan permohonan bantuan
10. Penulisan dan pencatatan kasus dan laporan
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi

2.6. Pendanaan berupa Dana Bergulir dalam Strategi Pemberdayaan

Pada perkembangan berbagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan usaha menengah, kecil, mikro, koperasi juga usaha simpan pinjam. Penyediaan dana bergulir ini diharapkan dapat dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Berdasarkan Buletin Teknis akuntansi Dana Bergulir (2008) yang dimaksud Dana Bergulir ialah “Dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya” (h.10-11). Karakteristiknya adalah:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan
3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA)
4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir)
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir

Lebih lanjut dijelaskan dalam Buletin Teknis akuntansi Dana Bergulir, (2008:h.11) bahwa penyaluran dana bergulir oleh pemerintah (satuan kerja) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA)

2. Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada bendahara umum negara/bendahara umum daerah (BUN/BUD)
3. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executive agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah. Jika berfungsi sebagai *executive agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.
4. Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja, baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah yang bersangkutan.
5. Satuan kerja melakukan pengelolaan dana, melakukan pengendalian, penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggung jawabkan dan tersebut.

Pemberian bantuan modal usaha melalui dana bergulir sebagai strategi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan filosofi program penanggulangan kemiskinan pada klaster 2 yang dibahas dalam Sumodiningrat (2009:h.72-73). Pembagian klaster dimulai dari klaster pertama dengan bantuan dan perlindungan sosial (PKH, raskin, BOS, Jamkesmas, BLT) pada fakir miskin dimana masyarakat “diberi ikan” untuk bertahan hidup; pada klaster kedua dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri dimana masyarakat “diajari memancing”; dan pada tahap akhir di klaster ketiga, masyarakat diberi kail, jala dan perahu melalui program penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Pada klaster kedua masyarakat diberikan akses langsung terhadap sumber daya kapital atau penyediaan modal ekonomi kemudian dilengkapi dengan upaya pendampingan/fasilitasi oleh para fasilitator dari kalangan mereka sendiri. Hal ini

merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dalam mengembangkan prakarsa dan inovasi untuk pembangunan sosial. Inti dari klaster kedua ini adalah pembentukan masyarakat miskin menjadi modal sosial atau kelompok masyarakat yang terlatih, terbina dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, modal ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, serta kewirausahaan sosial, yaitu adanya tokoh atau penggerak-penggerak di kalangan masyarakat yang terus menerus mengembangkan prakarsa untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Inilah upaya untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan Sumodiningrat juga bahwa pembelajaran dengan mengelola dana bergulir (*revolving funds*) merupakan skema pendanaan yang digunakan pada klaster kedua ini. Masyarakat dipandang mandiri secara ekonomi bilamana mereka mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber keuangan atau dana formal, misalnya melalui koperasi, bank, dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mengakses sumber daya kapital di lembaga-lembaga keuangan formal.

Pembahasan mengenai PNPM mandiri, khususnya PNPM Mandiri Perdesaan dan kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) yang di dalamnya dilakukan strategi pemberdayaan melalui pendampingan dan pendanaan berupa dana bergulir akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2.7. Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi

Menurut Hubies (2010:h.89) membicarakan persoalan gender berarti membahas persoalan relasi sosial antara perempuan dan lelaki yang dipertautkan dengan pembagian kerja dan tanggung jawab. Pembahasan tersebut kerap diacu pada perbedaan biologis yang merupakan produk kodrati yang dibawa oleh setiap manusia dan menurut acuan pembelajaran sosial.

1. Menurut acuan biologis, perbedaan peran antara perempuan dan lelaki merupakan sesuatu yang terberi (*as a given*) dan tidak dapat diubah dan tidak perlu diubah. Sebagai contoh, perempuan mengalami menstruasi, memiliki rahim, mengandung dan melahirkan.

2. Menurut acuan pembelajaran sosial, perbedaan peran antara lelaki dan perempuan merupakan cerminan hasil konstruksi sosial dan bersifat sesuatu yang terberi (*not as a given*) dan karenanya dapat diubah. Sebagai contoh dari dulu perempuan seperti halnya lelaki harus bekerja.

Membedakan relasi sosial antara lelaki dan perempuan dari acuan biologis dan acuan pembelajaran sosial merupakan sesuatu yang sulit dicari garis pemisah secara jelas karena keduanya saling melengkapi. Namun perbedaan peran antara perempuan dan lelaki, apapun wujudnya merupakan pusat perhatian analisis gender.

Lebih lanjut disampaikan Hubies (2010:h.83-84)) secara universal peran gender untuk perempuan dan lelaki diklasifikasikan dalam tiga peran pokok yaitu:

1. Peran Reproduktif (Domestik)
 - a. Peran reproduktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumberdaya insani (SDI) dan tugas kerumahtanggaan seperti menyiapkan makanan, mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak.
 - b. Kegiatan reproduktif sangat penting dalam melestarikan kehidupan keluarga, tetapi jarang dipertimbangkan sebagai bentuk pekerjaan yang konkret.
 - c. Dalam masyarakat miskin, sebagian besar pekerjaan reproduktif dilakukan perempuan secara manual (menggunakan tangan).
 - d. Kegiatan reproduktif pada umumnya memerlukan waktu yang lama, bersifat rutin, cenderung sama dari hari ke hari, dan hampir selalu merupakan tanggungjawab perempuan dan anak perempuan.
 - e. Pekerjaan reproduktif yang dilakukan di dalam rumahtangga tidak diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif (karena tidak dibayar).
2. Peran Produktif
 - a. Pekerjaan produktif menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan (petani, nelayan, konsultasi, jasa, pengusaha, dan wirausaha)

- b. Pembagian kerja dalam peran produktif dapat memperlihatkan dengan jelas perihal perbedaan tanggungjawab antara lelaki dan perempuan. Misalnya kegiatan di bidang pertanian, maka kegiatan membajak akan dilakukan oleh lelaki sedangkan perempuan mengerjakan kegiatan menanam, menyiangi dan sebagainya.
 - c. Jenis pekerjaan yang dinilai sebagai pekerjaan produktif terkait pada pekerjaan yang dapat diperhitungkan melalui sistem perhitungan nasional (GNP ataupun statistik sosial ekonomi)
 - d. Pekerjaan produktif dapat dilakukan oleh gender lelaki maupun gender perempuan, dan diimbali (dibayar) dengan uang (tunai) atau natura.
3. Peran Masyarakat
- a. Peran masyarakat terkait dengan kegiatan jasa dan partisipasi politik
 - b. Kegiatan jasa masyarakat banyak bersifat relawan dan biasanya dilakukan oleh perempuan.
 - c. Peran politik di masyarakat adalah peran yang terkait dengan status atau kekuasaan seseorang pada organisasi tingkat desa/ lebih tinggi. Sebagian besar kegiatan yang terkait dengan politik umumnya dilakukan oleh lelaki.

Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 27 ayat 1 telah diatur tentang kesamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara, yang ditegaskan dalam undang-undang. Akan tetapi dalam perkembangannya masih banyak terjadi diskriminasi gender dalam berbagai aspek pembangunan sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satunya yang tercantum dalam Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Tanggal 19 Desember 2000. Yang menjelaskan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Dalam Keputusan Mendagri no. 132 tahun 2003 pasal 7 ayat 1 tentang alokasi anggaran untuk pengarusutamaan gender, mengamanahkan minimal 5% dari total anggaran dialokasikan untuk pengarusutamaan gender. Landasan hukum tersebut mencerminkan dukungan pemerintah akan peningkatan kesetaraan gender di Indonesia terutama dalam pembangunan. Menurut Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (2010), isu gender dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya perempuan dan laki-laki. Mereka mempunyai kebutuhan, kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses, peranserta dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Perbedaan dan peran gender sebenarnya bukan masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Perlu ditekankan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan dari sisi biologis berbeda, namun dari sisi sosial, laki-laki dan perempuan idealnya mempunyai peran dan tanggungjawab yang sama. Namun demikian kondisi yang ideal itu belum tercipta karena masih terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan atau diskriminasi gender (Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bidang Kesehatan, 2010). Selanjutnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat terjadi dalam beberapa bentuk atau manifestasi, yakni:

1. Stereotip: menempatkan wanita sebagai makhluk lemah, makhluk yang perlu dilindungi, tidak penting, tidak punya nilai ekonomi, orang rumah, bukan pengambil keputusan, dsb;
2. Subordinasi: akibat bentuk stereotipi menempatkan perempuan pada posisi dibawah laki-laki, tidak mempunyai tempat yang sama untuk bekerja atau berproduksi, pendidikan dan lain-lain.
3. Marginalisasi: terpinggirkan, tidak diperhatikan atau diakomodasi dalam berbagai hal yang menyangkut kebutuhan, kepedulian, pengalaman;
4. Beban Majemuk: perempuan bekerja lebih beragam daripada laki-laki, dan lebih panjang waktu kerjanya, misalnya fungsi reproduktif dan peran sebagai pengelola rumah tangga termasuk bekerja diluar rumah.

Implementasi kesetaraan gender dalam pembangunan tersebut perlu dilakukan di segala bidang pembangunan termasuk dalam pemberdayaan masyarakat. Perempuan sebagai faktor penting dalam pembangunan perlu dilibatkan secara aktif dalam pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah yaitu melalui program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan.

Dalam <http://www.microcreditsummit.org>, Susy Cheston dan Lisa Kuhn mengungkapkan beberapa alasan perempuan penting dalam pemberian bantuan kredit mikro antara lain, adanya pengakuan perempuan sebagai pasar dan berfungsi sebagai kekuatan dalam pengembangan komunitas mereka sendiri; perempuan dapat memberikan perspektif yang berharga bagi aset, kebutuhan dan tantangan, hal ini menjadi penting dalam merancang produk yang sesuai yang akan diterima oleh pasar; pembangunan komunitas perempuan menciptakan kesejahteraan bagi keluarganya karena pendapatan yang diterima perempuan umumnya menguntungkan keluarga mereka dalam meningkatkan gizi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya; Industri keuangan mikro telah menunjukkan bahwa perempuan cenderung menjadi kreditur yang lebih baik dan meningkatkan perkembangan lembaga keuangan mikro; Hal ini juga menunjukkan bahwa wanita bekerja lebih baik dalam kelompok dan dengan demikian membantu menciptakan efisiensi bagi lembaga.

Berdasarkan peraturan perundangan oleh pemerintah yang menunjukan komitmen akan kesetaraan gender dalam pembangunan dan konsep kredit mikro oleh perempuan di atas maka penting adanya akses keuangan berupa kegiatan simpan pinjam oleh perempuan sebagai bentuk fasilitasi dari pemerintah melalui program pemberdayaan.

Sejalan dengan itu menurut Hubeis (2010:h.114) pada keluarga miskin, peran wanita sebagai penunjang ekonomi rumahtangga menjadi sangat penting. Dalam situasi kemiskinan seperti itu seorang wanita yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarga terpaksa harus berusaha mencari nafkah. Di sini wanita berperan sebagai aset ekonomi rumahtangga menjadi penting, karena secara batin dan etos pengorbanan ibu, mereka akan memaksa diri bekerja menghidupi anaknya, paling tidak. Karena itu dukungan dan kesempatan bagi

wanita untuk memperoleh pekerjaan sangat strategis dalam memampukan wanita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya dikatakan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan di bidang ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan berikut.

1. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme, etos dan produktivitas kerja, kewirausahaan, manajemen dan kepemimpinan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif agar wanita dapat berperan dalam pembangunan secara optimal.
3. Meningkatkan akses modal/ kredit, informasi pasar, dan jaringan produksi serta pemasaran.
4. Memperoleh dukungan berbagai pihak dalam dunia usaha, dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kemandirian, antara lain melalui kemitraan usaha.

Dalam hal ini penyediaan kesempatan kerja pada wanita tidak hanya bersifat manusiawi, tetapi memiliki nilai tambah dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa (di perkotaan dan perdesaan), mengingat besarnya jumlah angkatan kerja wanita perdesaan dan semakin banyaknya pria perdesaan yang pergi ke kota (urbanisasi) untuk mencari pekerjaan.

Keberhasilan pemberdayaan (pemampudayaan) perempuan melalui peningkatan peran wanita akan bergantung pada interaksi tiga unsur yaitu:

1. *Motivasi wanita* untuk memberdayakan diri. Hal ini memerlukan bantuan sarana dan prasarana (manusia, kelembagaan, tatanan kerja) yang mampu memotivasi wanita untuk memberdayakan diri, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk keluarga.
2. *Program-program tepatguna dan berdayaguna* yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi pemberdayaan wanita. Berarti kepedulian kalangan perguruan tinggi, swasta dan LSM selain pemerintah merupakan elemen penting yang perlu dimantapkan dalam bentuk tatanan mekanisme kelembagaan pemberdayaan sumberdaya wanita secara terstruktur.
3. *Dukungan berdedikasi* dari seluruh aparat terlibat. Dalam hal ini, pelibatan wanita untuk pemberdayaan sumberdaya wanita dibuat secara spesifik menurut segmen khalayak sasaran, menurut status dan segmen ekonomi:

misalnya, wanita pekerja dan non pekerja, wanita berkeluarga dan non berkeluarga, wanita sekolah dan non sekolah (putus sekolah), wanita miskin (dari keluarga miskin yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi, wanita miskin dari keluarga sangat miskin dan tidak memiliki pekerjaan, wanita miskin berstatus janda), dan remaja.

4. *Peran aktif* masyarakat. Dalam hal ini kesamaan pemahaman akan makna pemampudayaan wanita merupakan prasyarat tercapainya hasil optimal penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran wanita. (h.119-120)

Dalam pengembangan ekonomi rakyat khusus wanita menurut Hubies (2010:h.120) tidak cukup diiming-imingi oleh bantuan modal, tapi perlu diimbangi dengan pembekalan sains dan teknologi (iptek) yang mampu memberdayakan wanita untuk mengubah nasibnya sendiri. Tanpa adanya komitmen seperti itu dari pemerintah maka yang terjadi hanyalah slogan kosong yang gemanya hanya bersifat sementara. Pemberdayaan perempuan dalam bidang sains dan teknologi jelas merupakan alternatif untuk mengatasi berbagai kesenjangan yang dialami oleh wanita.

Lebih lanjut menurut Hubies (2010:h.150) ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan sumberdaya wanita yang dapat digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan/*skill* (psikomotorik), dan mental (afektif) merupakan ramuan komponen yang mengejawantahkan perilaku sosok seorang wanita. Karena itu sangat penting bagi wanita untuk mengenyam pendidikan yang diperlukan, mengasah keterampilan yang dapat mendukungnya di tengah masyarakat, dan menempa mentalitasnya sebagai wanita mandiri dalam menyambut peran strategisnya sebagai istri, ibu, warga masyarakat dan tenaga kerja yang potensial.

Sedangkan faktor eksternal diperlukan sebagai penentu keberhasilan dalam memberdayakan faktor-faktor internal. Faktor eksternal dapat berupa lingkungan eksternal yang diharapkan merupakan sesuatu yang kondusif bagi upaya pemberdayaan sumberdaya wanita. Misalnya keberanian dan kesadaran dari lingkungan terdekat wanita, terutama suami, dalam mendukung pemberdayaan

tersebut. Juga kebijakan dan peraturan pemerintah yang memberikan keleluasaan bagi wanita untuk mengembangkan diri, fisik-mental-spiritual, dan berpartisipasi aktif di berbagai sektor dan kegiatan pembangunan berwawasan gender.

Pendapat Hubies (2010) diatas sesuai dengan yang disampaikan Kartika dalam Jurnal Perempuan (2005) bahwa pintu masuk pemberdayaan perempuan melalui ruang ekonomi ini sebenarnya berangkat dari persoalan nyata perempuan, dimana perlu pemenuhan kebutuhan keluarga serta kesinambungan usaha mereka. Akan tetapi penguatan ekonomi ini perlu dikombinasikan dengan penguatan gender dengan membuka akses perempuan untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan seperti pendidikannya, kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan itu sendiri.

2.8. Model dan Skema Penelitian

Penelitian ini akan mengukur tujuan jangka menengah dari kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan. Tujuan jangka menengah kegiatan SPP berdasarkan tujuan khususnya yaitu, (a) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar; (b) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha; (c) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Penjabaran akan ketiga tujuan jangka menengah kegiatan SPP yang akan diteliti pencapaiannya dalam penelitian ini yaitu:

1. **Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar** yang dimaksud dalam PNPM Mandiri Perdesaan yaitu, berdasarkan ketentuan dasar kegiatan SPP yaitu bahwa masyarakat miskin dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan tanpa syarat agunan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dana/modal bagi usaha atau bagi kebutuhan sosial dasar.

Tujuan ini dapat dikatakan tercapai bilamana anggota SPP dapat memenuhi kebutuhan bagi pendanaan usaha mereka dan ataupun bagi pemenuhan kebutuhan sosial dasar. Kebutuhan sosial dasar dimaksud sesuai dengan kriteria dalam tahap pembuatan peta sosial PNPM Mandiri

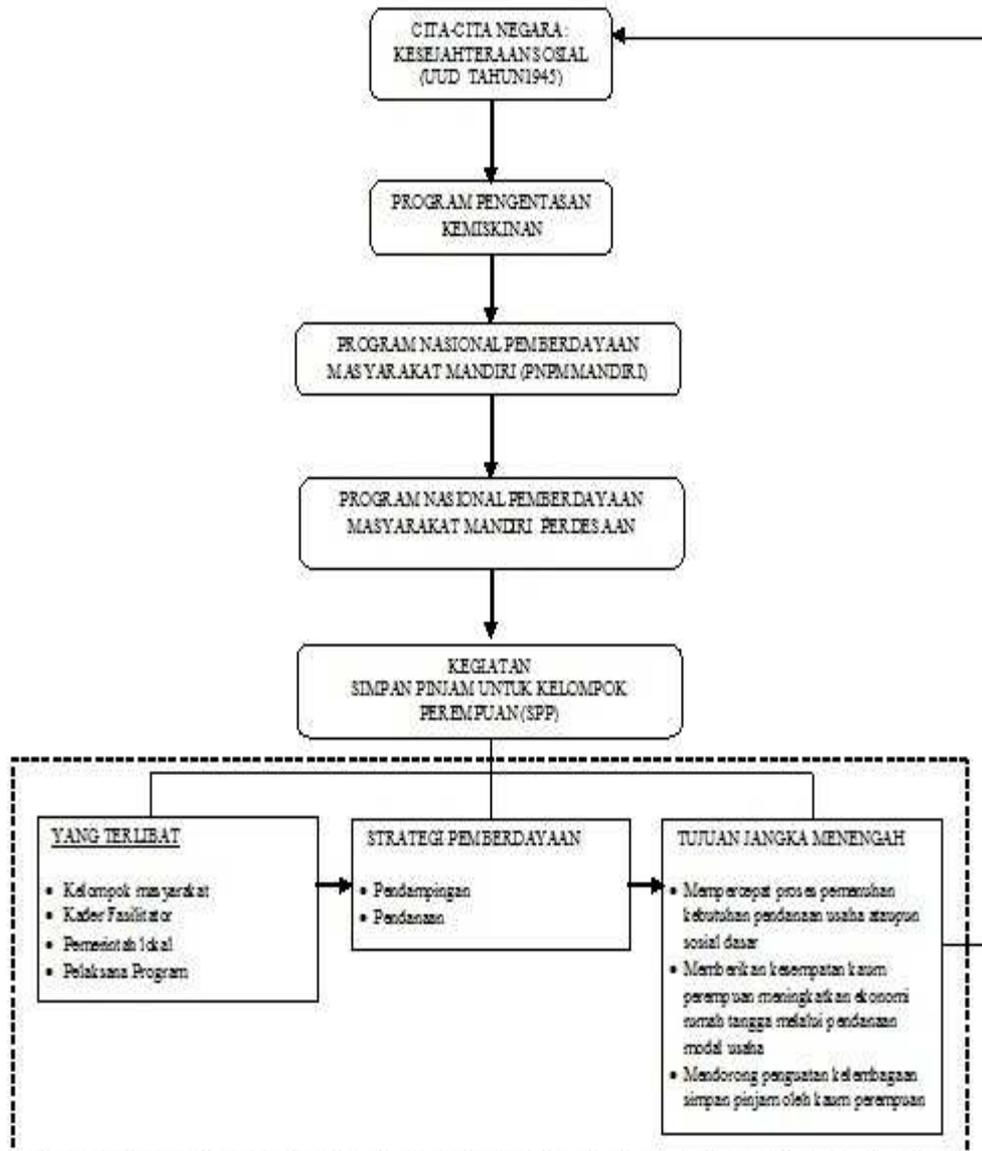
Perdesaan, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan: kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan.

- 2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha** yang dimaksud dalam PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, bahwa dalam setiap tahapan alur kegiatan program, keterlibatan perempuan sangat diperhatikan. Hal ini sangat terlihat dari salah satu tahapan yaitu Musyawarah Desa Khusus Perempuan dimana salah satu hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah usulan kegiatan SPP.

Pentingnya kehadiran perempuan dalam tahapan alur kegiatan PNPM Mandiri merupakan salah satu bentuk upaya memberikan kesempatan perempuan terlibat dalam program pemberdayaan. Dan khususnya dalam kegiatan SPP, tujuan jangka menengah yang kedua ini dapat dikatakan tercapai bilamana dalam pelaksanaan kegiatan SPP, seluruh anggota kelompok diberikan kesempatan seluas-luasnya mendapatkan dana/modal bagi usahanya dan anggota mendapatkan kemudahan untuk mengakses modal tersebut (dalam pengurusan administrasi dan persyaratan).

- 3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan** yang dimaksud dalam PNPM Mandiri Perdesaan yaitu, sesuai dengan ketentuan dasar dalam kegiatan SPP, bahwa dana kegiatan SPP disalurkan kepada kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman, dan kelompok tersebut telah diverifikasi. Mencermati hal tersebut maka tujuan jangka menengah yang ketiga ini dapat dikatakan tercapai bilamana melalui kegiatan SPP ini, Kelompok Simpan Pinjam tersebut mengalami penguatan dalam kelembagaan dan peningkatan dalam pelayanan dan pengelolaan simpan pinjam. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, diharapkan ke depannya secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam.

Dengan memperhatikan pembahasan teori dari berbagai literatur di atas maka skema penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2. Skema Penelitian

BAB 3

GAMBARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. PNPM Mandiri

Di Indonesia, pemerintah melalui departemen-departemen terkait telah melakukan intervensi berupa kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, salah satunya yaitu program PPK dan UEDSP yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri sekarang dilanjutkan dengan PNPM Mandiri oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Pedoman Umum PNPM Mandiri 2008 yaitu bahwa pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah menjangkau sampai ke desa-desa tertinggal di seluruh Indonesia. PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah perdesaan di tanah air. PNPM Mandiri merupakan payung program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia, yang dikoordinir oleh Kantor Menteri Kesejahteraan Rakyat/ Kesra.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah :

1. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok

masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*)
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) 2007, Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK.
- b. PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu.

Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri. Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

a. Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

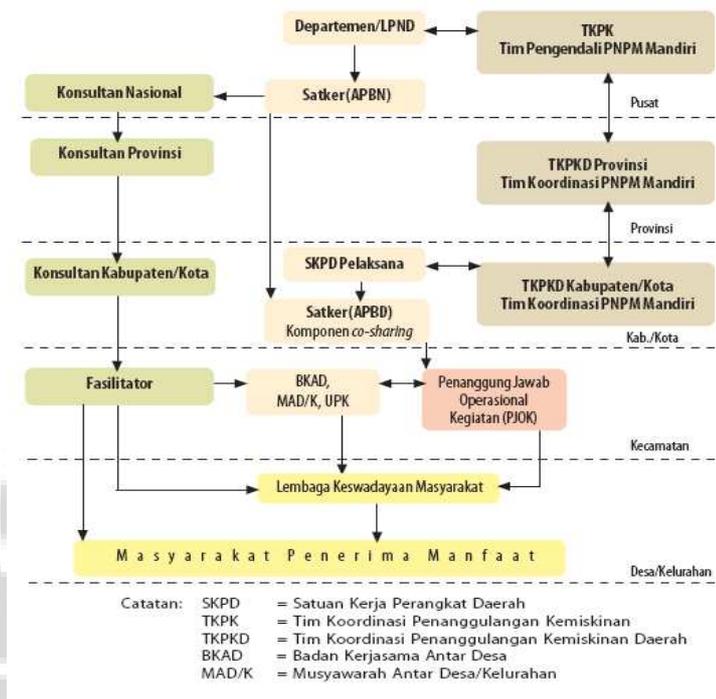
d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

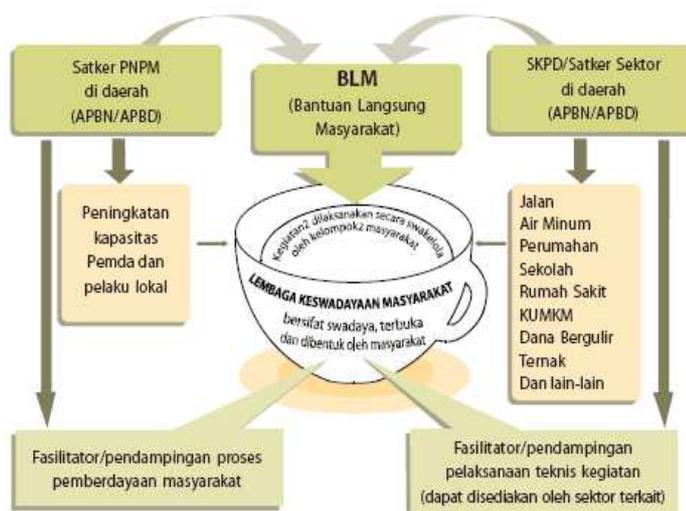
- a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya;
- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggungjawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik di pusat maupun daerah. Secara umum, struktur organisasi PNPM Mandiri digambarkan berikut ini.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PNPM Mandiri

Sumber : Pedoman Umum PNPM Mandiri tahun 2007



Gambar 3.2. Rancangan Mekanisme Pelaksanaan PNPM Mandiri 2009-2015

Sumber: Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007

3.2 PNPM Mandiri Perdesaan

Data dari Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, mulai tahun 2009 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Sasaran dalam PNPM mandiri perdesaan berdasarkan lokasi sasaran dengan kriteria pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan kelompok Sasaran:

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan,
- b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
- c. Kelembagaan pemerintahan lokal.

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. Lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal
- b. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
- c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat

- d. Didukung oleh sumber daya yang ada
- e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM,
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal)
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)

Untuk mekanisme usulan kegiatan, setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah:

- a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan
- b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok
- c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.

Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan

usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga. Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM Perdesaan adalah sebesar Rp 350 juta. Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, masyarakat adalah pelaku utama. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Pelaku di perdesaan yaitu, Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, Tim Pemelihara, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Tugas pendampingan secara mandiri pada pelaku di perdesaan ini dilakukan oleh KPMD/K yang adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk memfasilitasi dan membantu TPU membuat penulisan usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader dari perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan, terutama meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan. Kualifikasi

kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan membantu FK dalam tahapan kegiatan dan pendampingan kelompok masyarakat.

KPMD/K dipilih dalam Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan. Kemudian setelah Musdes Sosialisasi kegiatan selanjutnya yaitu Pelatihan KPMD/K. KPMD/K yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPMD/K akan mendapat pelatihan. Hasil yang diharapkan dalam pelatihan KPMD/K adalah:

- a. Dipahaminya latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan,
- b. Dipahaminya peran dan tugas KPMD/K,
- c. Bertambahnya keterampilan melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk perencanaan secara partisipatif,
- d. Bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri,
- e. Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan,
- f. Bertambahnya kemampuan KPMD/K dalam menyusun rencana kerja,
- g. Dipahaminya langkah-langkah fasilitasi dalam rangka MMDD,
- h. Dipahaminya instrumen pemetaan RTM basis dusun secara partisipatif,
- i. Dipahaminya materi diagram Venn kelembagaan masyarakat,
- j. Dipahaminya pola penyampaian informasi,
- k. Dipahaminya pola penanganan pengaduan dan masalah,
- l. Dipahaminya pola pemantauan dan evaluasi.

Sedangkan pendanaan atas penyelenggaraan pelatihan Kader berasal dari DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, swadaya desa atau masyarakat, serta dari APBD.

Sebagai pendamping masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan, secara umum tugas dan tanggung jawab KPMD adalah :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pada saat musyawarah dusun.
- b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan, seperti : data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan data pendukung lainnya.
- c. Menyebarkan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa.
- d. Memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
- e. Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
- f. Mengikuti pertemuan bulanan dengan PL yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- g. Membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa.
- h. Mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa dan dusun.
- i. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.
- j. Mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah desa kepada masyarakat.

Tahapan Tugas KPMD/K

- Tahap Perencanaan
 - a. Menggali gagasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
 - b. Mencatat dan menginventarisir gagasan masyarakat pada waktu penggalian gagasan sebagai bahan untuk pembahasan di Musyawarah desa perencanaan usulan desa.
 - c. Membantu Tim Pengelola Kegiatan dan Kepala Desa mulai dari persiapan sampai selesainya penyelenggaraan pertemuan musyawarah di desa.
 - d. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah desa.

- e. Menyusun usulan desa bersama Tim Penulis Usulan.
 - f. Melakukan survey dan mengumpulkan data pendukung usulan termasuk: kesediaan swadaya, perkiraan jumlah penerima manfaat, perkiraan besarnya biaya kegiatan sebagai bahan penulisan usulan.
 - g. Menginformasikan kepada masyarakat hasil keputusan Musyawarah Antar Desa prioritas usulan dan penetapan usulan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan.
 - h. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam memfasilitasi proses penyusunan desain dan rencana anggaran biaya kegiatan yang masuk prioritas untuk didanai.
- Tahap Pelaksanaan
 - a. Membantu Tim Pengelola Kegiatan dalam Penyelenggaraan Musdes Pertanggung jawaban dan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST).
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam Musdes Pertanggung jawaban dan MDST.
 - c. Memberikan masukan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 - d. Membantu TPK dalam pembuatan administrasi yang tertib dan benar.
 - e. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk dalam kesediaan adanya swadaya dan pengembalian pinjaman dalam kaitan kelompok SPP maupun pinjaman bergulir.
 - f. Membantu TPK dalam melakukan pengawasan dan pengembalian mutu pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan, pendidikan, kesehatan dan pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kelompok.
 - g. Membantu TPK dalam pengawasan pekerjaan di lapangan, pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan kegiatan prasarana.
 - h. Membantu TPK untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan alat.
 - i. Membantu mengawasi pekerjaan di lapangan, terutama pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan, seperti mencatat pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dan melaporkan kepada TPK dan Fasilitator Kecamatan.

- Tahap Pelestarian
 - a. Memfasilitasi masyarakat desa dalam pengajuan usulan dari dana pengembalian pinjaman bergulir.
 - b. Memfasilitasi masyarakat desa agar tetap berpedoman pada prinsip dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dalam memanfaatkan dana bergulir.
 - c. Membangkitkan motivasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan.
 - d. Membantu TPK dalam pembentukan tim pemelihara dan kelompok pemeliharaan.
 - e. Memantau hasil dan operasional kegiatan serta kondisi kegiatan prasarana yang telah dibangun terutama bagian mana yang membutuhkan pemeliharaan.
 - f. Memfasilitasi proses pemeliharaan terhadap prasarana yang dibangun.

Selain KPMD/K, pada tingkat kecamatan terdapat fasilitator kecamatan dan pendamping lokal. Fasilitator kecamatan mendampingi masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Peran fasilitator kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan.

Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Kecamatan :

- a. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan .
- b. Memfasilitasi KPMD dalam pendataan RTM.
- c. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan.
- d. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.

- e. Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPMD, PL, Tim Pengelola Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/UPK, Tim Penulis Usulan, Tim Pengawas).
- f. Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintah lokal baik di desa dan antar desa (BPD, kepala desa, aparat kecamatan).
- g. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).
- h. Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sebenarnya.
- i. Memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana).
- j. Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan.
- k. Mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
- l. Mengadakan pelatihan sederhana dan mudah dimengerti masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan.
- m. Membantu Fasilitator Kabupaten Keuangan dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam.
- n. Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri.
- o. Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa.

- p. Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganan Fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PjOK.
- q. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan.
- r. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan.
- s. Menjunjung tinggi kode etika fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etika tersebut.
- t. Memastikan pengelolaan dana di UKP sesuai prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.
- u. Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten.

Pendamping lokal (PL) adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa sesuai dengan dengan pengaturan tugas dari Fasilitator Kecamatan.
- b. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan di lapangan.
- c. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melakukan bimbingan pada KPMD mengenai kegiatan pemberdayaan, trnsparansi dan manajemen.
- d. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pelatihan kepada TPK dan masyarakat.
- e. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun non teknis kepada Tim Pengelola Kegiatan.
- f. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT-Kec dan membantu dalam pembuatan gambar desain dan gambar purna laksana.

- g. Membimbing dan member penjelasan kepada masyarakat mengenai cara-cara menjaga kelestarian lingkungan.
- h. Memberikan bimbingan dan masukan tentang cara-cara administrasi, pembukuan serta pengarsipan Tim Pengelola Kegiatan.
- i. Membantu dan membimbing Tim Pengelola Kegiatan dalam penyiapan serta proses pra audit
- j. Mengumpulkan informasi tentang aspek non tekis antara lain: partisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada Fasilitator Kecamatan.
- k. Membimbing KPMD dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakat dalam kaitan dengan rencana jangka panjang masyarakat.
- l. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangan dan pelestarian, serta pengembalian pinjaman dana bergulir

Pendampingan yang dilakukan oleh KPMD/K, fasilitator desa dan Pendamping lokal tersebut merupakan bentuk fasilitasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat dan mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan fasilitator kecamatan, fasilitator kabupaten dan aparat berperan sebagai fasilitator dari luar masyarakat, sehingga dalam pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai Pendamping Masyarakat. Sedangkan pendamping lokal, KPMD/K serta seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan. Pendamping masyarakat dituntut memandirikan para kader pemberdayaan dan pada waktu tertentu harus siap mundur dari perannya.

Agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik maka seorang fasilitator perlu menyadari dan memahami 4 (empat) fungsi seorang fasilitator di masyarakat, yaitu:

1. Sebagai Narasumber

Seorang fasilitator dituntut kemampuan menyediakan dan kesiapan memberikan informasi-informasi termasuk pendukungnya yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Fasilitator dituntut mampu menjawab

pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis maupun memberikan saran atau nasehat konkrit dan realistis agar mudah diterapkan.

2. Sebagai Pelatih

Fasilitator seringkali dibutuhkan untuk membantu masyarakat mempelajari dan memahami ketrampilan atau pengetahuan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program. Fasilitator harus mampu menyampaikan materi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat serta mudah diterapkan tahap demi tahap. Dalam hal tertentu fasilitator dapat mencari dan menghubungkan masyarakat dengan kolega lain dari dalam maupun dari luar masyarakat, yang tepat dan kompeten untuk melatih masyarakat.

3. Sebagai Mediator

a. Mediasi Potensi

Fasilitator dapat membantu masyarakat memediasi sehingga masyarakat bisa mengakses potensi-potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pengembangan dirinya, misalnya: sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, peluang pasar.

b. Mediasi berbagai kepentingan

fasilitator diharapkan dapat berperan sebagai orang yang menengahi apabila diantara kelompok atau individu di masyarakat terjadi perbedaan kepentingan. Untuk itu seorang fasilitator harus netral dan tidak memihak kepada salah satu kelompok saja.

4. Penggerak

Fasilitator harus mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan dan mengenali potensi dan kapasitasnya sendiri sehingga masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan secara mandiri. Tetapi di satu sisi, seorang fasilitator harus dapat berfungsi sebagai animator yakni ketika masyarakat sudah secara penuh/mandiri dapat memutuskan segala sesuatu tanpa bayang-bayang intervensi fasilitatornya.

Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi di atas maka seorang fasilitator perlu dibekali dan memiliki beberapa kemampuan, antara lain:

1. Kepemimpinan

Seorang fasilitator diharapkan memiliki kapasitas membuka visi, membimbing, memberi motivasi, menggerakkan sekaligus berperan sebagai mediator antar warga dan pihak lain yang diperlukan.

2. Konseptual

Fasilitator diharapkan memiliki kemampuan konseptual yaitu kemampuan menerjemahkan pemikiran dan konsep yang rumit menjadi mudah diterima/dipahami masyarakat serta merangsang lahirnya ide-ide baru untuk perubahan yang positif.

3. Komunikasi

- a. Kemampuan menyampaikan pesan atau informasi
- b. Menjadi pendengar yang aktif
- c. Bertanya efektif dan terarah

4. Kemampuan dalam pengembangan masyarakat

- a. Mengenal isu-isu lokal yang berkaitan dengan pemberdayaan sehingga mengenal apa yang harus dan dapat dilakukan oleh masyarakat
- b. Kemampuan identifikasi akan potensi, masalah, hambatan dan fenomena yang ada dalam masyarakat.
- c. Kemampuan analitis untuk dapat mengurai dan mengkaji masalah, menyusun alternatif penyelesaian dan membuat prakarsa kreatif dan kontekstual dalam upaya pemberdayaan.
- d. Adaptasi partisipatif yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, harapan dan karakteristik masyarakat.
- e. Berpandangan positif ke depan (*visioner*)
- f. Kemampuan melakukan aksi sebagai akumulasi kemampuan teknis.
- g. Kemampuan menjalin hubungan sosial antar manusia.

3.3 Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan

dalam bentuk salah satu kegiatannya yaitu Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Tujuan dari kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program
3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan
4. Menyiapkan kelembagaan UPK dan lembaga pendukung lainnya sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan
5. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah Kelompok Simpan Pinjam (KSP) yaitu kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.

Gambaran kegiatan SPP yang dijabarkan dalam penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 2009 adalah sebagai berikut. Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok Perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

3.3.1 Tujuan

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala

mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Tujuan khusus kegiatan ini adalah:

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

3.3.2 Ketentuan Dasar dan Pendanaan BLM

1. Ketentuan Dasar

- a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- b. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- c. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- d. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- e. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Ketentuan Pendanaan BLM

Dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.

1. Sasaran Program

Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

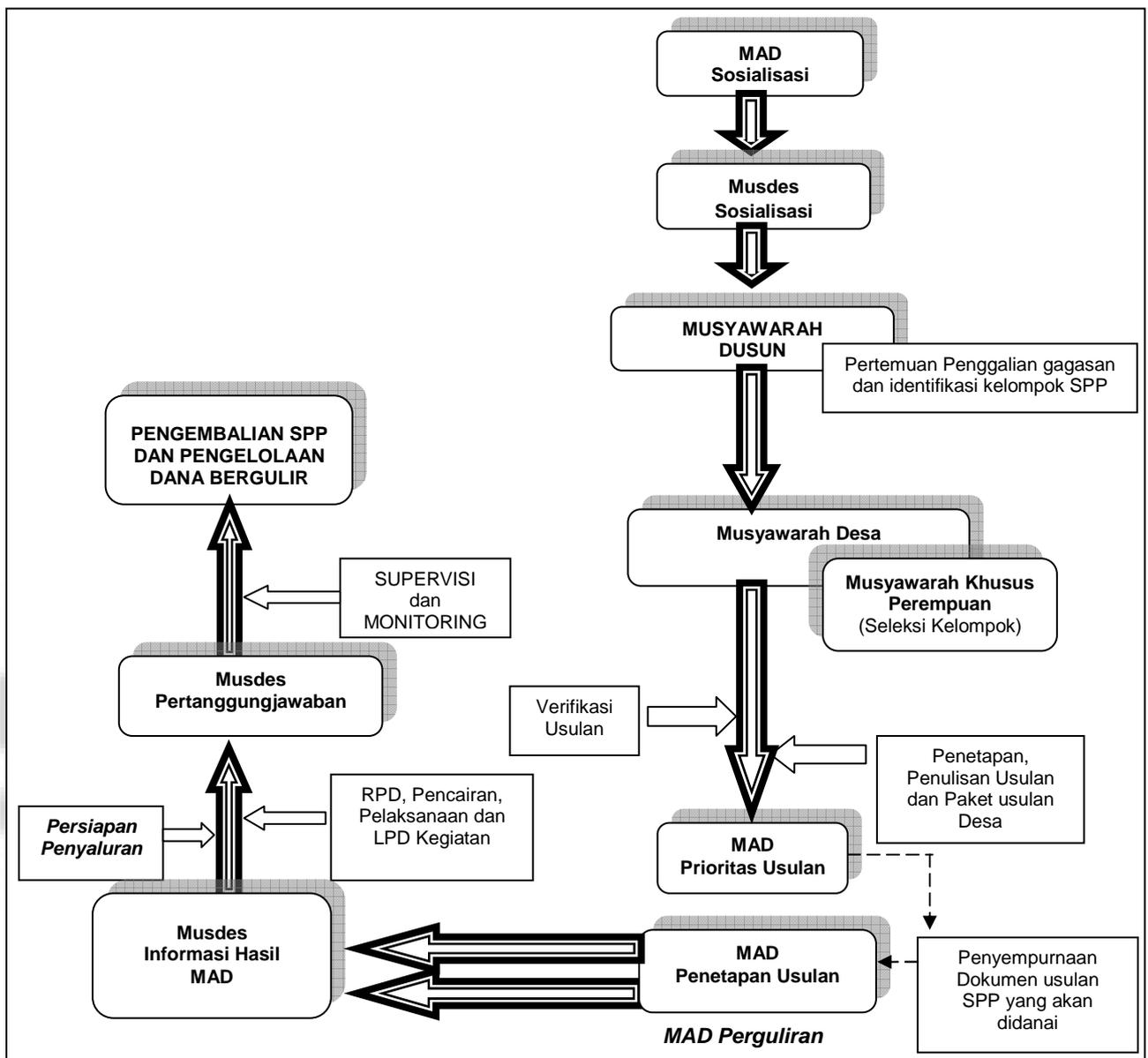
2. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

3. Ketentuan kelompok SPP

- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

3.3.3. Alur Kegiatan SPP



Gambar 3.3. Alur Kegiatan SPP

Sumber: Penjelasan IV PTO PNPM Mandiri Perdesaan (h.64)

Mekanisme pengelolaan kegiatan SPP mengacu pada alur kegiatan program di atas dengan beberapa penjelasan antara lain:

1. MAD Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan. Peserta: Camat dan staf terkait, Wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK), Kades di lingkungan kecamatan, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil RTM dari setiap

desa, Wakil perempuan dari setiap desa, Komite Sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas), Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

2. Musdes Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan. Peserta: Kepala desa dan aparat desa, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil RTM desa, Wakil perempuan, LSM/ormas, Tokoh masyarakat, tokoh agama, Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Pada tahap ini dilakukan pemilihan dan penetapan terhadap KMPD/K dan PL

3. Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung:

- a. Identifikasi kelompok sesuai ketentuan kelompok SPP termasuk kondisi anggota.

Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari kelompok yang terdiri dari: kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin yang akan menjadi pemanfaat.

- b. Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.
- c. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri:
 1. Daftar kelompok yang diidentifikasi
 2. Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan
 3. Peta sosial dan peta rumah tangga miskin
 4. Rekap kebutuhan pemanfaat

Pada tahap Musyawarah Dusun ini ditetapkan juga Peta Sosial yang di dalamnya dirumuskan tentang Peta Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan kriteria: kondisi rumah, kondisi penghuni rumah, kemampuan memenuhi kebutuhan

pokok, pendidikan dan kesehatan. Unsur ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lokal.

4. Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa adalah:

- a. Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.
- b. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.
- c. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang akan menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan.
- d. Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut:
 1. Sekilas kondisi kelompok SPP
 2. Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, perhitungan rencana kebutuhan dana.
 3. Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

Peserta: wakil-wakil perempuan dari dusun-dusun, wakil-wakil dari kelompok perempuan yang ada di desa dan perempuan desa lainnya yang berminat untuk hadir.

5. Verifikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah:

- a. Penetapan Formulir Verifikasi

Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (*Capital, Assets,*

Management, Earning dan Liquidity) yaitu, penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas.

b. Proses Pelaksanaan Verifikasi

1. Pengalaman kegiatan simpan pinjam
2. Persyaratan kelompok
3. Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian:
 - Permodalan
 - Kualitas Pinjaman
 - Administrasi dan Pengelolaan
 - Pendapatan
 - Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
4. Penilaian khusus rencana kegiatan
5. Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diversifikasi dengan daftar rumah tangga miskin
6. Penilaian kategorisasi kelompok

Kategorisasi tingkat perkembangan kelompok dinilai berdasarkan 6 indikator yaitu: Ikatan pemersatu, Kegiatan anggota untuk tujuan bersama, Pengurus, Aturan kelompok, Iuran Anggota, Administrasi kelompok. Berdasarkan indikator tersebut kelompok dinilai dengan nilai berkisar dari nilai terendah yaitu angka 1 sampai dengan nilai tertinggi yaitu angka 4.

Dengan memperhatikan indikator tersebut dan nilai total dari setiap indikator maka kelompok dapat dikategorisasi menjadi:

- a. Kelompok Pemula, jika nilai total indikator sampai dengan 9 (sembilan).
- b. Kelompok Berkembang, jika nilai total indikator antara 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas)
- c. Kelompok Siap/Matang, jika nilai total indikator di atas 18 (delapan belas)

TABEL 3.1. INDIKATOR PERKEMBANGAN KELOMPOK SPP				
Indikator	Nilai = 1	Nilai = 2	Nilai = 4	Nilai = 4
Ikatan Pemersatu	Ikatan pemersatu adalah domisili/geografis/keluarga	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan/ekonomi/ simpan pinjam kurang dari 1 tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam antara 1 tahun – 3 tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam lebih dari 3 tahun
Kegiatan anggota untuk tujuan bersama	Belum mempunyai kegiatan secara rutin	Mempunyai kegiatan tetapi belum terencana dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang masih berjalan dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang terus berkembang dengan baik
Pengurus	Belum mempunyai pengurus yang disepakati oleh anggota	Pengurus mempunyai pertemuan tetapi belum secara rutin	Pengurus mempunyai pertemuan rutin tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana	Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik
Aturan Kelompok	Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama	Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis	Mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan	Mempunyai AD/ART yang telah dilaksanakan dengan baik
Iuran Anggota	Belum mempunyai iuran anggota secara wajib/tetap	Mempunyai iuran tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib, iuran sukarela dan simpanan sebagai modal usaha kelompok
Administrasi Kelompok	Belum mempunyai administrasi secara tertulis	Mempunyai administrasi tertulis tetapi belum mempunyai laporan tertulis	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggung-jawabkan	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggung-jawabkan

Sumber: Penjelasan IV PTO PNPM Mandiri Perdesaan (h.60)

7. Pembuatan Berita Acara (BA) hasil verifikasi, dalam BA tersebut mencatatkan rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok.

Tahap Pelaksanaan Verifikasi

- a. Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan di kecamatan

Hari ke 1-2

Anggota tim verifikasi berkumpul di kecamatan untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau administrasi usulan kegiatan. Pemeriksaan dengan menggunakan ceklis yang sudah di sediakan.

Hari ke 3-8

Semua anggota tim verifikasi berkumpul untuk membahas dan membuat catatan serta rekomendasi terhadap semua usulan dari sisi kelengkapan dokumentasi serta kesesuaian dengan kriteria/prosedur yang sudah ditentukan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Pada tahap ini sengaja diberi kelonggaran waktu untuk antisipasi pengembalian usulan ke desa untuk dilengkapi kekurangannya, kemudian diserahkan kembali ke tim verifikasi dan dicek kembali kelengkapannya.

Hari ke 9

Dokumen usulan berikut catatan/rekomendasi hasil pemeriksaan tim verifikasi diserahkan kepada Fasilitator Kabupaten untuk mendapatkan pengecekan kembali sehingga lebih dapat dipastikan usulan telah sesuai dengan kriteria dan prinsip prosedur PNPM Mandiri Perdesaan.

b. Pengecekan kembali oleh Fasilitator Kabupaten

Hari 10-15

Fasilitator Kabupaten memeriksa kembali semua dokumen usulan dan mempelajari catatan dan rekomendasi yang telah diberikan oleh tim verifikasi.

c. Kunjungan lapangan (pemeriksaan lapangan)

Hari ke 16-22

Berdasarkan hasil catatan-catatan pada waktu pemeriksaan dokumen dan pengecekan ulang oleh Fasilitator Kabupaten, tim verifikasi menyusun jadwal dan melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam kunjungan lapangan ke desa tidak harus semua anggota tim verifikasi bersamaan ke satu desa, tetapi dapat dibagi beberapa tim kecil dengan komposisi yang disesuaikan dengan jenis usulan yang akan diverifikasi oleh tim tersebut.

Fasilitator Kecamatan memfasilitasi pembagian anggota tim agar dapat dipastikan setiap jenis usulan diverifikasi oleh anggota tim verifikasi yang mempunyai keahlian atau pengalaman di bidang usulan diverifikasi.

Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan metode atau cara observasi/ pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat pengusul dan informan lainnya. Hal-hal yang diamati dan ditanyakan melalui wawancara antara lain yaitu:

- Apakah usulan sesuai dengan Musdes Perencanaan
- Kebenaran daftar calon penerima manfaat. (termasuk nilai kebutuhan yang diajukan untuk kegiatan simpan pinjam)
- Masyarakat atau kelompok penerima manfaat dilibatkan atau mengetahui pada waktu penulisan usulan
- Bagaimana proses sosialisasi PNPM Mandiri perdesaan yang telah dilaksanakan di masyarakat, alasan apa masyarakat mengajukan usulan dan manfaat apa yang diambil jika kegiatan yang diusulkan dilaksanakan, dan apa rencana masyarakat selanjutnya setelah kegiatan dilaksanakan
- Khusus kegiatan SPP verifikasi kelompok dilakukan dengan menggunakan Form. Lembar verifikasi kelompok simpan pinjam dengan menjumlah hasil penilaian (*scoring*)

6. MAD Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin.

Dalam tahapan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi.

Pemeringkatan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa memperhatikan asal desanya, sehingga ranking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket usulan desa.

Hasil pemeringkatan kelompok SPP sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai dari BLM. Untuk kelompok yang layak

dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya: KTP dan Perjanjian Pinjaman.

Prioritas kebutuhan kelompok SPP agar mempertimbangkan:

- a. Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat.
- b. Kategori tingkat perkembangan kelompok
- c. Hasil penilaian kelayakan kelompok pengusul dituangkan dalam berita acara tim verifikasi.
- d. Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/ usaha.

Peserta: camat dan staf terkait, instansi dinas terkait tingkat kecamatan, tim pengamat, enam orang wakil per desa: kepala desa, ketua tim pelaksana, dan 4 orang wakil masyarakat, calon pengurus upk, anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

7. MAD Penetapan Usulan

Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD Prioritas Usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada kelompok terakhir maka agar diputuskan melalui musyawarah. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD perguliran.

Peserta: Camat dan staf terkait, Ketua dan sekretaris MAD, Instansi dinas terkait tingkat kecamatan, Tim Pengamat, Enam orang wakil per desa: Kepala desa, Ketua Tim Pelaksana, dan 4 orang wakil masyarakat, Pengurus UPK, Seluruh KPMD dan PL, Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

8. Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman paling tidak mencakup hal-hal:

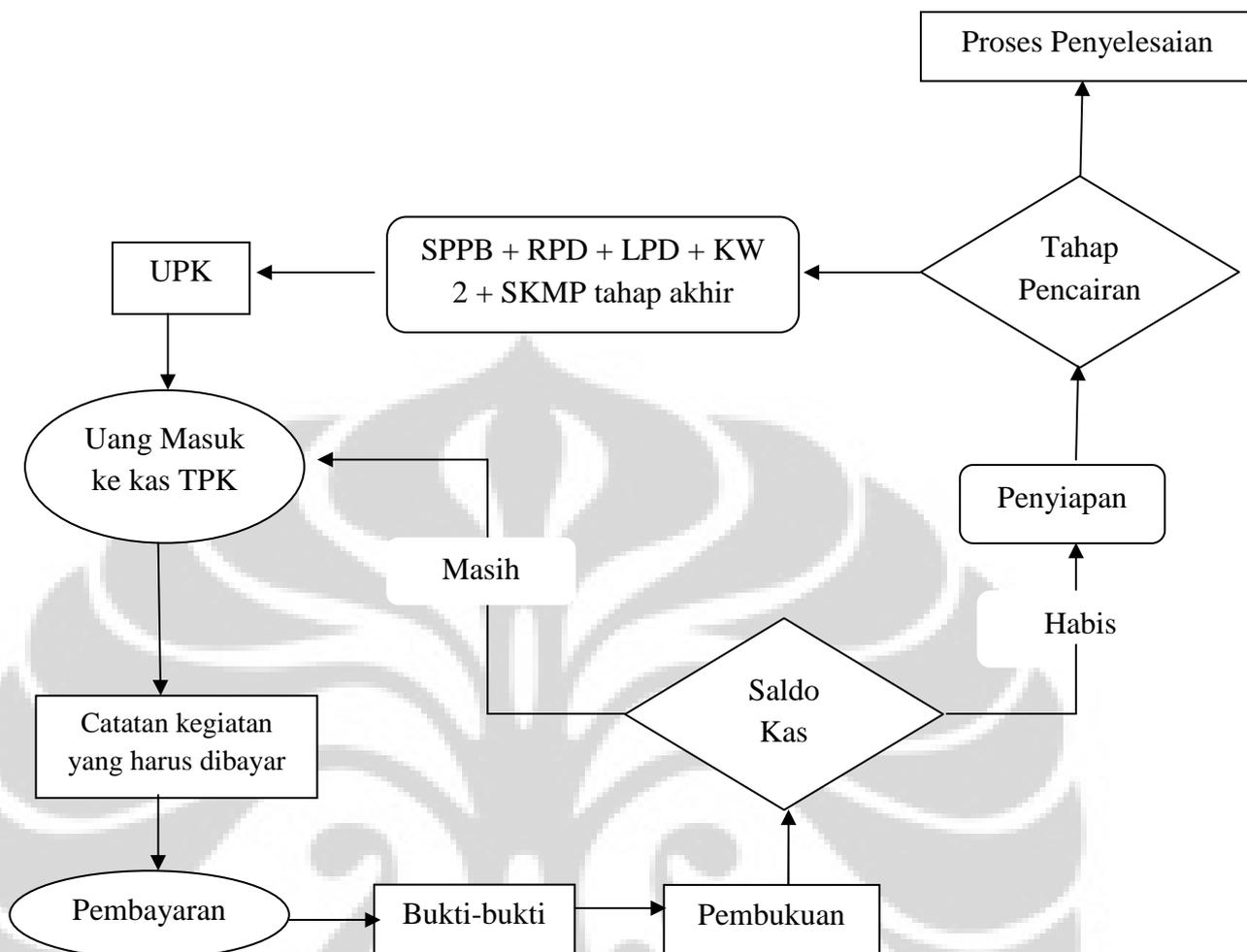
- a. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.
- b. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.
- c. Jadwal angsuran dan BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
- d. Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.

9. Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.
- b. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
- c. Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional desa 3% dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.
- d. Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.
- e. Kelompok menyerahkan kuitansi/ tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.

Alur pencairan dana dari UPK sampai ke kelompok SPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.4. Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK

Sumber: Penjelasan IX PTO PNPM Mandiri Perdesaan (h.11)

10. Pengelolaan Dokumen dan administrasi di UPK

Pengelolaan kegiatan di tingkat UPK meliputi:

- a. Pengelolaan dokumen UPK mencakup beberapa hal sebagai berikut: pengelolaan data kelompok dan peminjam/ pemanfaat, pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta sosial, pengelolaan dokumen penyaluran: kuitansi, SPPB.
- b. Pengelolaan administrasi meliputi: rekening pengembalian SPP, buku bantu bank SPP, buku kas harian SPP, kartu pinjaman.
- c. Pengelolaan pelaporan sebagai berikut: laporan realisasi penyaluran, laporan perkembangan pinjaman SPP, laporan kolektibilitas SPP, neraca, laporan operasional.

11. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di kelompok

Hal-hal yang dikelola di tingkat kelompok meliputi: data-data peminjam, dokumen pendanaan/ kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/ kartu pinjaman pemanfaat dan administrasi pinjaman pemanfaat.

12. Penetapan Daftar Tunggu

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdani oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan berita acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

13. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup:

a. Pelestarian Kegiatan

Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah:

1. Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.
2. Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri-Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi.
3. Penguatan kelembagaan baik dalam sapek permodalan ataupun kelembagaan kelompok.
4. Pengembangan layanan kepada masyarakat.
5. Pengembangan permodalan.

b. Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu

menarik minat kerjasama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.



BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Kelompok SPP Nurul Iman

Kelompok SPP Nurul Iman pada awalnya yaitu kelompok pengajian yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengajar ibu-ibu di RT 01 Desa Tulehu yang tidak bisa mengaji. Dalam perkembangannya kelompok pengajian ini memiliki 35 anggota yang aktif mengikuti pengajian yang dilakukan. Kelompok Pengajian ini diketuai oleh FK. Pada tahun 2009 suami dari FK yaitu Bapak K yang mengelola KSU (Koperasi Serba Usaha) Lima Jaya di desa Tulehu membuat proposal untuk KSU Lima Jaya dan membawa langsung proposal tersebut ke beberapa kementerian di Jakarta. Salah satu kementerian yang didatangi yaitu kementerian Kesejahteraan Rakyat. Oleh kementerian Kesra saat itu, Bapak K difasilitasi agar mendapat bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan di desa Tulehu.

Fasilitator Kecamatan Salahutu, HF saat itu memfasilitasi KSU Lima Jaya agar dalam rapat penggalan gagasan untuk mendapatkan bantuan modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Hal tersebut dinyatakan oleh HF, selaku Fasilitator Kecamatan, yaitu:

“Jadi prosesnya itu dari dusun, jadi kelompok Nurul Iman itu kan dia berawal dari proses pengambilan gagasan di tingkat dusun kebetulan di dusun Mangga, jadi karena KPMD/Knya juga masih baru jadi kita juga membantu untuk mendampingi, dengan ketua UPK juga hadir memberikan penjelasan pada saat KPMD/K melakukan pengambilan gagasan dengan kelompok ibu-ibu yang notabene juga ada dari Pengajian Nurul iman itu. Jadi bagaimana prosesnya mereka mengusulkan ya membentuk sesuai persyaratan-persyaratan yang dari pogram, pembentukan dari kelompok, kemudian mengisi formulir dan sebagainya sampai pembuatan proposal. Kemudian menerima dana.” (HF, Juni 2011)

Akan tetapi karena PNPM Mandiri Perdesaan tidak mengakomodir KSU maka FK diarahkan untuk membentuk kelompok simpan pinjam. Hal ini disampaikan FK sebagai berikut :

“Karena tidak bisa koperasi, beliau (Fasilitator Kecamatan) mencari jalan untuk mengakomodir kami di SPP, beliau mengatakan bahwa nanti beliau akan memasukan kami, tapi karena skop koperasi terlalu luas jadi kalau ada kelompok di lingkungan seperti kelompok pengajian misalnya, maka bisa bentuk kelompok simpan pinjam.” (FK, Juni 2011)

Pernyataan FK diperkuat dengan YI yang menyatakan bahwa:

“Lalu ibu HF bertanya tentang kegiatan sehari-hari kami, sekiranya ada kelompok bentukan. Lalu kami menjawab kalau disini kami kelompok Wanita Islam, kami lupa memberitahu tentang Majelis Nurul Iman. Kemudian seorang teman saya mengatakan bahwa kalau Wanita Islam terlalu luas, bukan hanya di RT 1 ini saja. Lalu kami mengusulkan kepada HF agar kiranya diganti dengan pengajian Nurul Iman RT 1. Akhirnya kami mendapat pinjaman dari HF” (YI, Juni 2011)

Berdasarkan saran dari Fasilitator Kecamatan HF tersebut maka pada tahun 2009, FK kemudian membentuk kelompok simpan pinjam dari kelompok pengajian Nurul Iman yang dipimpinnya. Dari 35 anggota aktif dalam pengajian Nurul Iman, 21 anggota di antaranya bersedia menjadi anggota kelompok simpan pinjam yang kemudian bernama kelompok SPP Nurul Iman.

Kelompok SPP Nurul Iman ini selanjutnya diverifikasi dan memenuhi syarat serta masuk dalam daftar penerima bantuan dana bergulir. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua UPK Negeri Tulehu, AK :

“Proses Nurul Iman sebenarnya berkasnya sudah masuk hanya ditunda sampai beberapa bulan begitu, nah akhirnya, sebenarnya prosesnya sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Artinya setelah diverifikasi oleh tim verifikasi karena awalnya mereka memang sudah diverifikasi pada saat tahun kegiatan 2009, hanya mereka belum masuk dalam kelompok yang dikucurkan dana, walaupun sudah diverifikasi dulu. Mereka masuk daftar antri. Nah setelah tahun 2009 itu baru kami mengucurkan dana. Waktu itu persyaratannya belum terlalu ini mendetil seperti sekarang. Dulu mungkin rencana usaha anggota dengan, hanya memerlukan surat perjanjian kelompok dan surat tanggung renteng itu saja. Dan yang membuat lolos juga proposal yang mereka telah buat”. (AK, Juni 2011).

Selanjutnya kelompok SPP Nurul Iman masuk menjadi penerima BLM dalam kegiatan SPP periode tahun 2009 dengan jumlah dana yang diterima kelompok sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dibagi kepada 21 anggota kelompok.

4.2. Profil Usaha Anggota Kelompok SPP Nurul Iman

1. FK, 56 tahun, berprofesi sebagai guru pada Madrasah Tsanawiyah Tulehu. Suaminya mengelola KSU Lima Jaya di Tulehu. Usaha yang dilakukan yaitu, menjual beras yang dibeli dari Kopisonta Kabupaten Seram, menjual minyak tanah, menjual es batu eceran, menjual pulsa telepon, menjual seprei dan

pakaian dan menerima jasa pengetikan di rumahnya. Seluruh usahanya tersebut dilakukan di rumahnya. Usaha menjual pulsa, pakaian dan jasa pengetikan dilakukan oleh anak-anaknya.

Modal yang diterima dari PNPM Mandiri Perdesaan melalui kelompok SPP Nurul Iman yaitu sebesar Rp. 4.000.00,-

2. DH, 47 tahun, berprofesi sebagai guru pada SD III Negeri Tulehu. Suaminya pegawai pada PLN. Usaha yang dilakukan yaitu, menjual minyak tanah eceran, menjual pulsa dan mengelola rumah kos. Modal yang diterima dari PNPM Mandiri Perdesaan melalui kelompok SPP Nurul Iman yaitu sebesar Rp. 4.000.000,-
3. UW, 53 tahun, ibu rumah tangga. Suaminya pensiunan TNI. Usaha yang dilakukan yaitu, menjahit dan membuat kue-kue/ jajanan pasar yang dititipkan ke warung-warung untuk dijual. Modal yang diterima dari PNPM Mandiri Perdesaan melalui kelompok SPP Nurul Iman yaitu sebesar Rp. 4.000.000,-
4. WJ, 32 tahun, ibu rumah tangga. Suaminya berprofesi sebagai tukang ojek. Usaha yang dilakukan, memiliki warung kecil yang menjual rokok, mi instan, permen, jajanan anak, sabun mandi, sampo dan lain-lain. Modal yang diterima dari PNPM Mandiri Perdesaan melalui kelompok SPP Nurul Iman yaitu sebesar Rp. 2.000.000,-
5. YI, 38 tahun, ibu rumah tangga. Suaminya berprofesi sebagai tukang ojek. Usaha yang dilakukan, membuat roti dan kue-kue yang dijual keliling. Modal yang diterima dari PNPM Mandiri Perdesaan melalui kelompok SPP Nurul Iman yaitu sebesar Rp. 1.500.000,-
6. HL, 80 tahun, ibu rumah tangga. Menjadi orang tua tunggal bagi keponakannya yang memiliki keterbatasan. Memiliki usaha warung kecil di depan rumahnya yang menjual rokok, mi instan, mainan anak-anak. Modal yang diterima dari PNPM Mandiri Perdesaan melalui kelompok SPP Nurul Iman yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-

4.3. Gambaran Pencapaian Tujuan Jangka Menengah Kegiatan SPP

Sebagaimana tujuan dilaksanakannya evaluasi pada penelitian ini yang sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan SPP terlebih khusus yaitu tujuan jangka menengah, maka beberapa hal penting yang ditemui di lapangan adalah sebagai berikut :

4.3.1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.

Pemenuhan akan kebutuhan dalam mendanai usaha maupun sosial dasar merupakan salah satu tujuan yang ingin dipenuhi dalam kegiatan SPP. Terkait dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha dan sosial dasar para anggota SPP, maka perlu untuk mencermati pelaksanaan pendanaan dari tahap pencairan dana dan pengembalian dana, yang merupakan *strategy objective* dalam pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP ini maka di lapangan ditemui beberapa hal, bahwa pada tahap penentuan jumlah pinjaman yang akan diterima tiap anggota, ditentukan oleh pengurus kelompok. Hal ini dinyatakan oleh ketua kelompok, FK bahwa:

“Bahkan tim verifikasi sampai mengatakan bahwa: ibu kami tidak perlu turun lapangan lagi karena kedua ibu ini (ketua dan bendahara kelompok SPP Nurul Iman) sudah kami percayai.” (FK, Juni 2011)

Hal ini didukung oleh pernyataan YI bahwa:

“Ada yang terima 1 juta, ada 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Pembagian tersebut yang mengatur adalah bendahara dengan ketua. Memang anggota pernah mengeluhkan tapi menurut ketua, jumlah pinjaman ketua, bendahara dan sekretaris tidak bisa sama dengan anggota” (YI, Juni 2011)

DH, selaku pengurus kelompok juga menceritakan pertemuan pengurus dengan tim verifikasi untuk membicarakan hal tersebut:

“Awal mulanya kita dipanggil mendadak ikuti rapat di kantor desa, ketemu dengan tim verifikasi. Ada yang dari pihak kecamatan sendiri, ada juga dari pihak kabupaten Maluku Tengah. Kemudian dipanggil lagi ke kecamatan. Di sana ada-badan apa yang gabungan dalam tim verifikasi dari kecamatan dengan desa, pokoknya kecamatanlah. Mereka memberikan arahan tentang dana yang pada saat itu memang ada sekitar 50 juta rupiah tapi yang diperuntukan bagi 1 kelompok SPP saja. Kemudian kami membuat rencana pembagian dana tersebut bagi anggota kelompok.” (DH, Juni 2011)

Anggota kelompok HL juga menceritakan pengalamannya terkait pemberian dana, bahwa jumlah dana yang diterimanya kemudian ditambahkan oleh pengurus:

“Lama kelamaan setelah dana keluar dan dibagi, mereka (pengurus) memberi saya Rp.500.000, lalu saya bilang uang itu untuk beli apa. Lalu mereka (pengurus) menambahkannya menjadi Rp.1.000.000,-.” (HL, Juni 2011)

Bertolak belakang dengan kedua pernyataan di atas, di lain kesempatan menurut FK, jumlah pinjaman tersebut ditentukan oleh tim verifikasi.

“Tim verifikasi sebelumnya sudah menentukan jumlah pinjaman tiap anggota jadi pembayaran dilakukan nanti berdasarkan catatan dari tim verifikasi.” (FK, Juni 2011)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fasilitator Kecamatan, HF yaitu:

“Mereka sendiri yang mengisi Ruang, rencana usaha anggota masing-masing. Jadi diukur dengan modal dan keuntungan perbulan misalnya jadi pada saat tim verifikasi turun dia memverifikasi hal-hal seperti itu.” (HF, Juni 2011)

Terkait dengan penentuan dana pinjaman anggota kelompok, ketua kelompok SPP Nurul Iman, FK menceritakan masalah yang pernah terjadi di dalam kelompok Nurul Iman, bahwa:

“Ada salah satu anggota yang oleh tim verifikasi, diberikan modal sebanyak dua juta rupiah. Tapi dikarenakan masukan dari anggota yang lain, bahwa anggota ini juga memiliki tunggakan pinjaman di tempat lain maka kita (pengurus) menunda pinjaman kepada dia, dann hanya memberikan satu juta sebagai langkah awal. Kita beri dia satu juta rupiah, dan lihat perkembangannya, jangan sampai tambah sulit. lalu dia (anggota tersebut) melapor kepada kepala dusun dan tim verifikasi. Kemudian kita pengurus laporkan ke TPK di desa, menurut TPK, Kepala dusun itu hanya perlu mengetahui. Sedangkan yang mengolah dana ini kami semua. Susah senangnya kami semua yang akan tanggung. Dari situlah, kalo kami anggap tidak dapat diberikan pinjaman dalam jumlah besar, maka kami tidak perlu berikan sejumlah itu.”(FK, Juni 2011)

Pada tahap pencairan dana ditemui di lapangan bahwa anggota kelompok merasa proses pencairan dana tersebut memakan waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari YI, yaitu:

“Pertama kali itu susah, bolak-balik urus di kantor desa bukan hanya sekali. Sampai pada pencairan uang saja kami harus duduk menunggu di baileo. Syarat-syaratnya yaitu KTP kami, kami harus mengisi semua formulir. Jika salah kami harus diperbaiki kembali.” (YI, Juni 2011)

Pernyataan di atas didukung dengan pernyataan WJ, yaitu :

”Waktu itu urusan pencairan tidak susah karena cuma fotokopi KTP saja, hanya menunggunya yang lama. Saya selalu diberitahu anggota yang lain kalau harus fotokopi dan urusan yang lain.” (WJ, Juni 2011)

Terkait dengan proses pencairan dana, dijelaskan oleh Fasilitator Kecamatan, HF sebagai berikut :

“Setelah proposal masuk, akan ada verifikasi. Kita bentuk tim dari kecamatan beranggotakan orang-orang yang paham dari sisi verifikasi ke kelompok-kelompok itu, kelayakan orang-orang itu sesuai dengan modal yang diminta atau tidak. Setelah verifikasinya dinyatakan layak, kemudian dimusyawarahkan di antara musyawarah antar desa kedua atau musyawarah desa perantingan. Disitulah kelompok dinyatakan layak dan siap didanai. Jadi setelah rencana penggunaan dana itu masuk ke rekening kecamatan kita fasilitator dengan UPK lalu siap untuk mencairkan. Kemudian kita mengambil dana di BRI sesuai dengan permintaan itu, lalu kita serahkan dari UPK dari kecamatan dan FK bersama-sama ke desa disaksikan masyarakat dan kelompok. Kita serahkan ke TPK, TPK menyerahkan ke kelompok selanjutnya kelompok menyerahkan ke bendahara, bendahara menyerahkan ke anggota sesuai yang dibutuhkan”. (HF, Juni 2011)

Hal lain yang menjadi permasalahan ketika proses pencairan dana dilaksanakan adalah adanya ketidakpercayaan dari pihak desa terhadap kelompok Nurul Iman karena anggotanya sebagian besar bukan orang pribumi (penduduk asli Desa Tulehu). Hal ini sejalan dengan pernyataan dari DH, bahwa :

“Agak lama karena kelompok di sini termasuk kelompok yang istilahnya kan di setiap desa punya sistem yang ada jadi kami kan hanya pedagang yang terdiri dari orang Buton dan saya sendiri orang Bugis. Ada juga FK orang Arab dan orang Tulehu mungkin hanya satu atau dua orang saja. Terkadang ada hambatan pemerintahan yang sepertinya masih memikirkan perlu hadirnya orang pribumi”. (DH, Juni 2011)

Walaupun demikian terlihat juga dari beberapa pernyataan di atas bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal cukup mudah, namun dalam kenyataannya pada saat dilakukan pencairan terasa memakan waktu lama. Bahkan pada kesempatan lain terdapat anggota yang hanya menggunakan tanda tangan saja tanpa melampirkan persyaratan lain seperti KTP. Hal ini dinyatakan oleh HL yaitu:

“Saya hanya tanda tangan, tidak pakai KTP. Tidak susah, gampang saja. Karena saya tidak bisa berjalan, YI yang bawa ke bendahara, kalau sudah dicairkan dananya saya siap terima”. (HL, Juni 2011).

Pernyataan anggota kelompok di atas didukung oleh pernyataan dari PJO Provinsi, VS yaitu :

“Perempuan sangat antusias, di Tulehu itu khususnya sudah banyak yang mengantri, menunggu untuk mendapat giliran bantuan dana berikut, karena tidak perlu agunan/surat jaminan, tidak perlu KTP, kemudian mereka senang karena terjadi interaksi di antara mereka dan kelompok, dengan pengurus di tingkat desa, kecamatan”. (VS, Juni 2011).

Pada bagian lain yang berkaitan pengembalian dana pinjaman oleh para anggota pada setiap bulan, diperoleh gambaran bahwa para anggota kelompok tidak merasa kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan SPP. Hal ini sesuai dengan pendapat WJ, bahwa :

“Saya belum pernah kesulitan dalam melunasi setoran tiap bulan, karena tiap hari saya sisipkan uang 3 ribu rupiah sampai 5 ribu rupiah jadi kalau misalnya 3 hari lagi mau penyetoran, saya ambil dan hitung jika kurang saya ambil dari keuntungan belanja hari itu dulu.” (WJ, Juni 2011)

Pernyataan sebagaimana Ibu WJ di atas, juga disampaikan oleh HL dan UW, yang mengatakan bahwa:

“Biasa setor Rp.105.000, kami biasa bayar sebelum tanggal 8. Biasanya tanggal 5, tidak pernah mau utang, pokoknya tiap bulan bayar.” (HL, Juni 2011)

“Setiap bulannya tanggal jatuh tempo pengembalian modal itu tanggal 7, saya selalu menyetor sebelum tanggal tersebut misalnya pada tanggal 1.” (UW, Juni 2011)

Sehubungan dengan proses pengembalian dana ini, pada tiap awal bulan para anggota kelompok mengumpulkan dana kepada pengurus yang kemudian menyetor langsung kepada bendahara UPK. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh FK dan DH, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap bulan kami antar langsung ke bendahara UPK.”(FK, Juni 2011)

“Sudah disepakati bahwa setiap tanggal 5 bagi anggota untuk setor pinjaman. Dan saya kemudian langsung menyetornya ke bendahara UPK.” (DH, Juni 2011)

Terkait pendanaan, DH selaku bendahara menceritakan salah satu pengalaman yang terjadi dalam kelompok, yaitu:

“Pernah ada anggota yang terlambat menyetor dan harus saya kunjungi. Karena ibu-ibu itu adalah orang dewasa, jadi saya membujuk dengan halus sehingga mereka sadar bahwa bulan lalu itu mereka sudah melakukan kesalahan dengan tidak menyetor. Lalu kami menyelesaikan masalahnya. Saya jelaskan bahwa yang penting bulan depan, penagihannya jangan

seperti ini lagi. Saya ini orangnya tegas tetapi saya juga manusia yang punya perasaan. Saya ingin agar dana yang sudah dibagi dengan baik ini dikembalikan dengan baik, dan sebelumnya di kelompok sudah ada perjanjian bahwa tidak ada paksaan (penagihan). Dari kami 21 orang hanya satu atau dua orang saja seperti itu. Yang lain Alhamdulillah tidak.
(DH, Juni 2011)

Temuan lapangan terkait pelaksanaan Selanjutnya dalam pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha, ditemui beberapa hal penting di lapangan bahwa secara umum para anggota merasa dana pinjaman yang diberikan cukup untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan UW yang menyebutkan bahwa :

“Dulu saya tidak bisa membeli terigu 1 sak, sekarang saya bisa beli sekali 2 sak, sisanya untuk membeli gula dan bahan lain. Hasilnya juga lumayan untuk menambah uang sekolah anak”. (UW, Juni 2011)

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dicermati bahwa sehari-hari UW melakukan aktivitas usahanya membuat roti/ kue dan menjahit di rumahnya. Kondisi rumah UW berdinding beton dan berlantai keramik dan beratap senk dengan luas sekitar 15x20 Meter. Di dalam rumahnya UW memiliki sebuah kamar untuk melakukan aktivitas menjahit.

Selanjutnya pendapat WJ juga serupa bahwa dana pinjaman dapat mengembangkan usahanya yaitu :

“Sebelum ada bantuan dari PNPM saya mulai usaha roti, permen dan biskuit, saya taruh di dalam toples dan taruh di meja kecil di depan rumah. Lalu bantuan modal dimulai ketika itu saya mulai jualan mi instan, rokok”.
(WJ, Juni 2011)

Berdasarkan pengamatan di lapangan, WJ melakukan aktivitas usahanya di dalam sebuah kios kecil ukuran 2x2 Meter yang berdinding papan dengan lantai tanah dan terlihat kosong karena diisi dengan sedikit barang dagangan.

Selanjutnya FK , YI dan HL juga menyatakan hal yang sama:

“sampai di tahun 2009 setelah mendapat bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan, lalu kami mulai berjualan beras eceran yang kami beli dari pulau Seram. Kami juga menjual es batu eceran. Lalu modal itu juga kami bagi ke anak-anak untuk digunakan menjual pulsa telepon, dan karena ada komputer anak juga menerima pengetikan.”
(FK, Juni 2011)

Berdasarkan pengamatan, semua aktivitas usaha FK dilakukan di rumahnya dengan luas 15x20 Meter yang berdinding beton dengan lantai keramik dan beratap senk.

“Waktu belum mendapat dana kami hanya bisa membeli terigu kiloan, tapi setelah mendapat dana bantuan, kami sudah bisa membeli terigu 1 kardus, terigu 1 sak dan minyak kelapa 1 gen. Modal 1,5 juta itu tidak saya habiskan, saya simpan jika ada yang kurang maka bisa ditambahkan. Sekarang setelah mendapat modal, kalau beli 1 sak, 3 hari sudah habis. syukurlah Alhamdulillah penghasilan roti bagus. Kalau saya jualan pagi dan sore, penghasilan saya 300 ribu dengan keuntungan 100 ribu lebih. Kalau sudah capek, saya menjual roti sehari 1 kali saja. Kalau sudah sehat maka saya jual roti 2 kali sehari. Itu tiap hari. Bisa kalo pas lebaran dapat sampai 2 juta lebih paling sedikit. Biasanya saya tolak separuhnya, sehingga saya bisa dapat 1 juta lebih.”
(YI, Juni 2011)

Berdasarkan pengamatan, aktivitas pembuatan kue/ roti oleh YI dilakukan di rumahnya, dibantu oleh kedua putrinya.

“Semua sudah diolah untuk beli rokok, macam-macam, mainan anak-anak, sarimi. Kira-kira satu hari yah lumayan, dari pagi sampai malam 300 ribu lebih, cukup lumayan.” (HL, Juni 2011)

Berdasarkan pengamatan, aktivitas usaha HL dilakukan di kios kecilnya yang berukuran 2x2 meter dengan dinding papan dan beratap senk. Di dalam kios terdapat kompor dan peralatan makan HL, karena keterbatasan fisiknya sehingga aktivitas makan juga dilakukan di dalam kiosnya. Selain itu kompor tersebut juga digunakan untuk membuat mi instan dan minuman hangat untuk dijual.

Selain hal di atas ada juga anggota yang memulai usaha baru dengan menggunakan dana pinjaman yang ditambah dengan modal pribadi. Hal ini dinyatakan oleh DH, bahwa :

“Sebelum saya mendapatkan bantuan PNPM ini, saya belum menjual minyak tanah. Setelah saya memperolehnya, saya sudah bisa menjual minyak tanah. Hanya saya perlu tetap mengolah modalnya agar tidak habis. Tapi untuk keuntungan belum terlalu terlihat karena modal masih diputar. Tapi yang penting sudah ada pinjaman ini. Kalau saya ada sedikit modal pribadi, saya akan tambahkan sekedar untuk melengkapi modal yang sudah berjalan agar tidak habis di tengah jalan.” (DH, Juni 2011)

Berdasarkan pengamatan, aktivitas usaha DH menjual minyak tanah eceran dilakukan di halaman rumah tinggalnya. Terdapat beberapa drum minyak dan puluhan jerigen yang digunakan dalam aktivitas usahanya.

Hal lainnya yang terkait dengan pendanaan usaha yaitu dapat dicermati bahwa walaupun program telah selesai dilaksanakan dengan adanya pengembalian modal akan tetapi dana pinjaman tersebut masih dapat diolah oleh anggota. Hal tersebut disampaikan oleh FK yaitu :

“Setelah selesai cicilan sekitar lebih tujuh bulan ini. Tapi modalnya (modal dari SPP) masih tetap kami putar terus”. (FK, Juni 2011)

Hal serupa disampaikan oleh YI bahwa :

“Kemarin setelah mengembalikan dana, sampai sekarang usaha masih lumayan lancar dibandingkan sebelum mendapat pinjaman.”
(YI, Juni 2011)

HL juga menyatakan hal yang sama yaitu :

“Iya, sudah lama berhenti dapat pinjaman dari SPP tapi tetap masih bisa dikelola”. (HL, Juni 2011)

Hal lain terkait dengan pemenuhan kebutuhan sebagai tujuan jangka menengah SPP ini, yaitu pemenuhan kebutuhan sosial dasar para anggota SPP telah ditemukan beberapa pendapat sebagaimana penjelasan berikut ini.

Ada anggota yang menggunakan dana tersebut untuk mengelola usaha yang hasilnya digunakan untuk membayar uang sekolah dan keperluan anaknya yaitu YI. Ia mengatakan bahwa :

“Pertama kali hidup kami masih susah dan anak masih kecil. Setelah berjualan dan ambil sedikit modal, syukur alhamdulillah sudah ada modal sedikit jadi bisa mencukupi keperluan anak-anak sehingga kami tidak terlalu susah”. (YI, Juni 2011)



Gambar 4.1. Kondisi rumah tinggal YI

Selain untuk membayar uang sekolah anak, hasil usaha anggota juga digunakan untuk makan sehari-hari. Hal ini dinyatakan oleh WJ:

“Hasil kios bisa untuk tambah uang sekolah anak (2 orang), lalu keuntungan roti untuk beli ikan, jajan anak-anak”.

(WJ, Juni 2011)



Gambar 4.2. Kondisi rumah tinggal WJ

Selain itu Ibu WJ juga menggunakan hasil usahanya untuk membangun rumah :

“Lalu bantuan modal dimulai ketika itu saya mulai jualan mi instan, rokok dan alhamdulillah, bisa membantu bapak untuk beli bahan untuk bangun pondasi rumah”. (WJ, Juni 2011)

Begitu juga HL, yang menggunakan dana hasil usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari :

“Jadi pinjaman kelompok ini Cuma untuk makan sehari-hari saja. Lumayan”. (HL, Juni 2011)



Gambar 4.3. Kondisi rumah tinggal HL

Hal yang sama juga disampaikan oleh FK, bahwa :

“Jadi setelah PNPM Mandiri ini kami bisa merenovasi rumah, anak-anak saya sudah kerja jadi mereka sudah bisa mandiri”
(FK, Juni 2011)



Gambar 4.4. Kondisi rumah tinggal FK

Paralel dengan pemenuhan kebutuhan dasar, anggota kelompok juga menysihkan hasil usaha mereka dalam bentuk tabungan di Bank maupun disimpan di rumah yang akan dipergunakan ketika anggota keluarga mereka mengalami sakit. Hal tersebut disampaikan oleh WJ yang menyebutkan bahwa :

“Untuk tabungan, Alhamdulillah, biasanya saya menysihkan sedikit dari hasil jualan tiap hari, tapi jika perlu banyak, biasanya saya ambil di bank. Misalnya saja ketika suami sakit selama 2 minggu sehingga tidak bisa mengojek”. (WJ, Juni 2011)

YI, juga menyimpan uangnya di bank, Ia menyebutkan bahwa :

“Modal 1,5 juta itu tidak saya habiskan, saya simpan jika ada yang kurang maka bisa ditambahkan. Belum tentu pada waktu berjualan kami selalu sehat. Kalau kami tidak setor tiap bulan itu kira-kira bagaimana, kami pikir-pikir lagi. Kalau sakit, alhamdulillah ada walaupun hanya sedikit ada simpanan di bank” (YI, Juni 2011)

HL, juga mengatakan hal yang sama, yaitu :

“Saya juga mempunyai simpanan uang. Pernah simpan di bank, tapi sudah diambil karena tidak sanggup. Karena saya suka sakit jadi kalau tiba-tiba sakit bakal susah kalau mengurusnya di bank, nanti lama. Jadi saya simpan saja di rumah”. (HL, Juni 2011)

4.3.2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

Pada tujuan jangka menengah yang kedua ini, peneliti juga mencermati pelaksanaan pendampingan/ *strategy objective* kegiatan SPP kepada para anggota kelompok SPP Nurul Iman yang mempengaruhi pencapaian tujuan jangka menengah/*objective* kegiatan SPP. Terkait dengan pelaksanaan pendampingan yang dilaksanakan pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kelompok Nurul Iman, Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, ditemukan beberapa hal penting antara lain: informasi tentang adanya musyawarah-musyawarah pada awal pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan, hanya diketahui oleh beberapa pengurus dan beberapa anggota saja dan secara umum tidak diinformasikan kepada seluruh anggota, sehingga musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh pengurus dan beberapa anggota. Informasi ini biasanya disampaikan oleh Fasilitator Kecamatan langsung kepada pengurus. Hal ini sesuai dengan pernyataan langsung oleh ketua kelompok, FK yaitu :

“Yang memberitahu jika ada pertemuan itu HF (Fasilitator Kecamatan) lalu ketua, bendahara, sekretaris terkadang juga satu atau dua anggota mengikuti rapat atau pertemuan di tingkat desa”. (FK, Juni 2011)

Pernyataan FK di atas diperkuat dengan pernyataan dari salah satu anggota kelompok yaitu WJ yang menyebutkan bahwa :

“Rapat pertama kelompok dengan HF, saya tidak ikut, cuma pengurus saja yang ikut, nanti setelah uangnya sudah dicairkan kami semua anggota ikut rapat”. (WJ, Juni 2011)

Terkait dengan pendapat di atas, Ketua TPK Negeri Tulehu, HT menyatakan bahwa dalam berbagai musyawarah yang dilaksanakan di desa maupun di dusun dihadiri oleh perwakilan masyarakat :

“Sebelum musyawarah perencanaan biasanya ada penggalan gagasan di kampung maupun di dusun, dalam penggalan itulah TPK bersama KPMD/K melaksanakan musyawarah di dusun untuk mencari usulan apa di dusun untuk dibawa pada musyawarah perencanaan di desa sekaligus kami mengundang perwakilan masyarakat di dusun untuk berpartisipasi dalam perencanaan di desa”. (HT, Juni 2011)

Hal lainnya terkait dengan pelaksanaan pendampingan adalah ditemukan bahwa jika terdapat kesulitan yang ditemui dalam hal ini permasalahan

administrasi, pembukuan maka pengurus kelompok langsung melaksanakan konsultasi dengan Fasilitator Kecamatan tanpa melaksanakan koordinasi lebih awal dengan Pendamping lokal dan atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau KPMD/K. Konsultasi sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan di luar pertemuan/ musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua kelompok yaitu FK bahwa :

“Malah di luar pertemuan itu saya selalu berkonsultasi dengan ibu HF tentang penyusunan administrasi jika saya tidak mengerti. Saya sampai ke rumah ibu HF. Beliau melayani kami dengan baik”. (FK, Juni 2011)

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa :

”Jika ada yang kurang kami mengerti, ibu HF akan memberikan hal-hal yang perlu dibaca. Kami jarang bertanya di forum rapat karena keterbatasan waktu dan jika rapat terlalu lama maka jika berkaitan dengan kelelahan fisik maka kami juga bosan dan menganggap itu membuang waktu. Di musyawarah ada pembahasan sedikit mengenai SPP tapi menyangkut administrasi tidak dibahas. setelah uang sudah dicairkan dan kami peroleh maka kami melakukan pendekatan untuk menanyakan mengenai penyusunan laporan”. (FK, Juni 2011)

Sejalan dengan pernyataan FK di atas, sekretaris kelompok SPP Nurul Iman, UW juga berpendapat demikian, bahwa :

“Jika ada kesulitan dalam administrasi, saya dan bendahara tidak pernah menghubungi UPK, kami sendiri saja berusaha karena sebelumnya sudah punya ketrampilan dalam organisasi Wanita Islam. Biasanya yang menghubungi Fasilitator itu ketua, setelah itu baru ibu ketua menyampaikan pada kami” (UW, Juni 2011)

Begitu juga dengan YI salah satu anggota kelompok menceritakan bahwa ketika mengalami kesulitan dalam pelaksanaan administrasi kegiatan, anggota tersebut berkonsultasi dengan bendahara kelompok :

“Pernah sekali saya memikirkan tentang uang yang mereka kasih, saya kurang mengerti tentang pemotongan 50 itu. Tentang tanggung renteng. Lalu saya pergi ke bendahara lalu bertanya”. (YI, Juni 2011)

Pernyataan beberapa anggota kelompok sebagaimana disebutkan di atas didukung dengan pendapat Fasilitator Lapangan yaitu HF, yang menggambarkan bahwa proses pendampingan awal yaitu administrasi untuk pencairan dana seharusnya dilakukan oleh KPMD/K tetapi dalam pelaksanaannya kelompok lebih banyak menghubungi dirinya :

“Jadi kita sudah memberikan fasilitasi di desa sudah ada KPMD/K jadi ada format-format yang memang sudah disiapkan dari program ya jadi kita juga mensosialisasikan tentang format-format itu. Ya memang tidak memberatkan jadi KPMD/K itulah yang merupakan perpanjangan tangan dari fasilitator, jadi kelompok yang berminat itu berurusan dengan KPMD/K, KPMD/K yang menampung kelompok punya nama-nama dan sebagainya hingga membuat proposal jadi dengan formulir-formulir itu mereka mengisi masing-masing orang mengisi sesuai dengan kebutuhan permintaan dan usahanya diisi mengetahui dengan kepala dusun setempat kemudian diserahkan ke KPMD/K dan selanjutnya dibuat untuk proposal. Masalah yang terjadi dalam proses ini sih tidak ada, hanya saja mereka mengharapkan dana yang lebih, tapi pada dasarnya kelompok ini masih baru pertama menerima dana SPP dan anggotanya juga banyak. Usulan-usulan seperti itu disampaikan langsung kepada saya selaku FK, tetapi memang seharusnya melalui KPMD/K dulu.” (HF, Juni 2011)

Pendapat bahwa pendampingan awal dilakukan oleh KPMD/K ini juga disampaikan oleh Ketua UPK yaitu AK, yang menyatakan bahwa :

“kalau pendampingan itu kan biasanya mereka direkrut oleh KPMD/K, misalnya penggalian gagasan dan usul-usul seperti kemarin di kelompok dusun pohon mangga nah itu kan ada tawaran-tawaran dari KPMD/K bahwa kira-kira dari ibu-ibu atau kelompok perempuan karena waktu itu ada campuran kelompok perempuan, KPMD/K kemudian mensosialisasikan mengenai SPP, bahwa kira-kira mengenai ibu-ibu adakah yang ingin ambil pinjaman di PNPM berupa SPP itu, nah kebetulan ada kelompok Nurul Iman”. (AK, Juni 2011).

Secara umum temuan lapangan memperlihatkan bahwa dari 6 informan ini sebelum mengikuti kegiatan SPP telah memiliki usaha dan kegiatan SPP ini telah memberi mereka kesempatan untuk membantu suami lebih meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka.

Hal tersebut dinyatakan YI, bahwa:

”Pertama kali hidup kami masih susah dan anak masih kecil. Setelah berjualan dan ambil sedikit modal, syukur Alhamdulillah sudah ada modal sedikit jadi bisa mencukupi keperluan anak-anak sehingga kami tidak terlalu susah. Dan kuliah ini ibu pasti pernah merasakan tiap hari ada tugas, perlu uang, jadi kami harus banyak berusaha kalau tidak bisa parah”. (YI, Juni 2011)

Pernyataan lain disampaikan WJ yang hasil usahanya dapat membantu suami membangun pondasi rumah.

“Rumah dan tanah kami ini dipinjamkan orang kepada kami. Kami memiliki tanah pemberian orang tua, di daerah sebelah gunung tapi sementara ini baru mulai membangun pondasi”.

(WJ, Juni 2011)

Selain kegiatan SPP ini telah memberi kesempatan bagi ibu-ibu rumah tangga untuk membantu suami meningkatkan ekonomi rumah tangga, HL yang adalah seorang janda juga merasakan manfaat kegiatan SPP ini dengan mampu menghidupi anak angkatnya, walaupun hasil kiosnya hanya cukup untuk makan sehari.

“Semua sudah diolah untuk beli rokok, macam-macam, mainan anak-anak, sarimi. Kira-kira satu hari yah lumayan, dari pagi sampai malam 300 ribu lebih, cukup lumayan untuk makan sehari, walaupun saya berdua dengan anak angkat tapi cukuplah untuk makan berdua”

(HL, Juni 2011)

4.3.3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Kegiatan SPP yang pada kelompok Nurul Iman di desa Tulehu ini selain diharapkan memenuhi kedua tujuan jangka menengah di atas, tujuan lainnya yang harus dicapai yaitu melalui kegiatan SPP ini diharapkan terjadi penguatan lembaga simpan pinjam oleh kaum perempuan. Dalam pencapaian tujuan ketiga ini, *strategy objective* yang mempengaruhi pencapaiannya yaitu pelaksanaan pendampingan terhadap anggota kelompok SPP Nurul Iman perlu dicermati oleh peneliti.

Di lapangan ditemui beberapa hal sebagai berikut, jika terjadi permasalahan internal di dalam kelompok maka penyelesaiannya lebih banyak dilaksanakan pada saat pengajian rutin kelompok. Selain itu juga penyelesaiannya bisa juga dilaksanakan melalui konsultasi antara anggota dengan pengurus kelompok. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari DH yang juga merupakan bendahara kelompok SPP Nurul Iman, bahwa :

”Saya sendiri masih bisa atasi di dalam pengajian. Karena pengajian sering tiap malam, maka jika terjadi konflik kami masih bisa menyelesaikannya saat itu.” (DH, Juni 2011)

Salah seorang anggota kelompok, WJ juga menyatakan bahwa:

“Memang ada konflik waktu di awal, karena ada anggota yang mendapat sedikit dana dibandingkan yang lain, tapi kami tanyakan kepada pengurus dan diberi penjelasan sehingga tidak membuat anggota tersebut keluar dari kelompok.” (WJ, Juni 2011)

Selain hal yang disebutkan di atas, ternyata terdapat juga permasalahan yang tidak terselesaikan di dalam kelompok. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu anggota kelompok YI, bahwa:

“Waktu pembagian memang kebanyakan ibu-ibu yang mengeluh karena tidak merata. Ada yang menerima dana 1 juta, ada 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Pembagian itu yang mengatur adalah ketua dan bendahara sendiri. Memang mereka pernah usul, tapi menurut ketua, jumlah dana pinjaman ketua, bendahara dan sekretaris tidak bisa sama dengan anggota lainnya, mendengar itu ibu-ibu yang lain hanya diam saja”. (YI, Juni 2011)

Dalam hubungan dengan pelaksanaan pendampingan, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa selama pelaksanaan kegiatan SPP, menurut anggota kelompok SPP Nurul Iman dari pihak PNPM-MP tidak pernah melaksanakan kunjungan ataupun monitoring kepada masing-masing anggota kelompok guna mengetahui perkembangan usahanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh DH, bahwa :

“selama dari mulai awal hingga pencairan dana, serta pengembalian, intinya selama 1 tahun itu secara langsung itu memang beliau (pihak PNPM MP) tidak meninjau”. (DH, Juni 2011)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan WJ dan HL yaitu :

“Selama ini belum pernah ada kunjungan dari pihak PNPM atau pihak desa untuk melihat usaha saya” (WJ, Juni 2011)

“Belum pernah ada orang PNPM atau petugas desa datang untuk melihat kios saya.” (HL, Juni 2011)

DH, kemudian melanjutkan bahwa:

“Selama dari mulai awal hingga pencairan dana, serta pengembalian, intinya selama 1 tahun itu secara tidak langsung itu memang beliau (pihak PNPM MP) tidak meninjau. Tapi kami sering berkomunikasi tapi memang beliau tidak datang khusus untuk memberi arahan. Namun jika kami pergi karena dekat dengan kantor kecamatan karena tempat ini menjadi lokasi pesantren bulanan sehingga kami mendapat arahan disitu. Sebagai pengurus kami kemudian menyampaikan ke anggota.” (DH, Juni 2011)

Berbeda dengan pendapat anggota kelompok sebagaimana dinyatakan sebelumnya, pendamping lokal yaitu IK menyatakan bahwa :

“Sesekali saya ikut meninjau juga dengan FK, dan terkadang dengan UPK, maksudnya untuk melihat perkembangan pinjaman, tetapi lebih peninjauan dilakukan bersama FK dan FT, karena itu adalah tugas saya. Mendampingi mereka itu tugas saya, mengecek, tapi kalau dengan yang FT itu tugas saya yaitu mengawasi kegiatan fisik yaitu mengawasi bahan-bahan yang dikirim dari supplier, selanjutnya dengan FK, jika ada MDMB di desa saya turun tapi saya cuma sebagai moderator”. (IK, Juni 2011).

Terkait dengan pelaksanaan pendampingan, pendapat lain yang muncul adalah pelaksanaan pengawasan atau monitoring dilakukan oleh UPK. Hal ini diutarakan oleh Ketua TPK Negeri Tulehu, HT yang menyatakan bahwa :

“Iya biasanya itu, untuk tingkat pengawasan biasanya di UPK, kami ini biasanya berproses mengawal sampai proposal bisa diterima sebagai usulan dan bisa diberi pinjaman”. (HT, Juni 2011).

HF sebagai fasilitator lapangan juga berpendapat bahwa proses pendampingan dilakukan oleh UPK:

“Jadi dalam hal ini UPK sebagai unit pengelola itu memiliki juga fungsi pembinaan. Jadi tugas UPK selain menagih tapi dia juga turun melakukan pembinaan kepada kelompok bagaimana apakah usaha itu dana yang kami berikan itu bisa bermanfaat menambah modal bagi ibu itu atau tidak. Kami cuma sekedar turun melihat secara langsung karena tidak terlepas dari kemungkinan bahwa UPK ataupun bahkan kami selaku fasilitator bisa turun untuk melihat atau memberikan pendampingan, karena kelompok itu memang sudah menjadi kelompok binaan dari program jadi UPK dalam hal ini bisa setiap bulan atau mungkin jika terdapat rencana kerja. Pada saat peninjauan itulah ada bimbingan dengan wawancara langsung dan dapat terlihat jika memang mereka misalnya masih membutuhkan modal lagi. Jadi proses monitoring dilakukan oleh UPK itu rutin kemudian kita dari FK juga.” (HF, Juni 2011)

Pernyataan oleh HT dan HF di atas didukung oleh pernyataan AK sebagai ketua UPK Kecamatan Salahutu yang menerangkan bahwa pendampingan terhadap kelompok SPP ini dilakukan oleh UPK secara bersama dengan KPMD/K dan/atau TPK. Ditambahkan oleh AK bahwa pendampingan tersebut biasanya dilaksanakan bertepatan dengan proses penyetoran dana. Mengingat aktivitas anggota kelompok yang cukup tinggi maka biasanya kegiatan pendampingan dilaksanakan hanya kepada beberapa perwakilan kelompok saja.

“Pendampingan untuk kelompok SPP dilaksanakan oleh UPK. Saat pelaksanaan pendampingan di lapangan biasanya kami meminta bantuan dari KPMD/K atau TPK, karena mereka yang empunya masyarakat. Dalam proses pendampingan ini kadang-kadang ibu-ibu anggota kan aktivitasnya tinggi, maksudnya aktivitas tinggi dalam hal dagang, jualan,

dan sebagainya. Jadi kami memproses pendampingan ketika, mereka punya kesadaran sendiri datang setor dan kami monitor melalui KPMD/K. Kebetulan KPMD/K itu lumayan bisa koperatif, jika ada informasi dan mereka juga sering aktif datang tanya kalo ada masalah jadi kami tidak terlalu repot. Kalau ada masalah bisa via telpon atau bisa langsung tapi kadang-kadang kami mengadakan kunjungan langsung dengan mereka. Tapi memang tidak secara menyeluruh kami mengumpulkan mereka artinya bahwa kami tidak bisa mengikuti ego kami untuk mengumpulkan mereka pada saat waktu aktivitas usaha mereka, bisa repot juga. Akhirnya mereka bisa diwakilkan 1 atau 2 orang saja yaitu ketua, sekretaris atau bendahara. Itu yang bisa kami lakukan.” (AK, Juni 2011).

Sehubungan dengan kegiatan pendampingan, AT sebagai PJOK Kecamatan Salahutu menyampaikan bahwa pelaksanaan monitoring dilakukan di desa/negeri:

“Kami diberikan kewenangan dari pak camat selaku pembina untuk mengevaluasi realisasi kegiatan sedangkan untuk monitoring kegiatan dilakukan di negeri. Walau demikian kami tetap memantau pelaksanaan monitoring tersebut, apabila ada laporan dari masyarakat, kami menghubungi ketua TPK dan mengecek langsung kepada masyarakat. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut”. (AT, Juni 2011).

Menurut AW, pembinaan usaha kecil dalam kelompok SPP ini agak sulit karena kekuatiran akan macetnya kegiatan kredit, akan tetapi pembinaan atau pendampingan sangat diperlukan oleh kelompok sesuai dengan tujuan program yakni peningkatan usaha, bukan hanya pengembalian dana. Seperti yang dinyatakan berikut ini :

“Pembinaan usaha kecil dalam kelompok SPP ini agak sangat sulit sekali karena ibu bisa bayangkan saja bahwa kelompok-kelompok miskin yang sebetulnya menurut penilaian lembaga-lembaga keuangan formal maupun non formal, jangankan Bank tapi seperti koperasi simpan pinjam saja, menurut penilaian mereka orang-orang miskin seperti itu sudah tidak layak untuk dibiayai pinjaman karena dikawatirkan akan terjadi kredit macet. Tapi bagi program ini mereka-mereka itu yang harus layak diberikan pinjaman diberdayakan. Sehingga memang bisa dibayangkan menurut penilaian lembaga-lembaga lain sudah tidak bisa didanai tapi kita harus turun dengan melakukan pembinaan, pendampingan secara pelan-pelan walaupun dia pengembaliannya tapi karena memang program pengelolaan simpan pinjam ini memang target kita bukan pengembalian itu harus lancar tapi disamping pengembalian lancar ada peningkatan usaha”. (AW, Juni 2011)

Selanjutnya berdasarkan penelitian di lapangan dicermati beberapa temuan terkait pencapaian tujuan jangka menengah ketiga, temuan tersebut antara lain,

kegiatan SPP yang telah berakhir pada akhir 2009, bagi kelompok Nurul Iman telah dirasakan manfaatnya bagi perkembangan usaha anggota, akan tetapi hal lainnya yang dirasakan anggota bahwa sepanjang kurun waktu pelaksanaan kegiatan SPP selama 1 tahun, kelompok SPP Nurul Iman jarang melaksanakan pertemuan kelompok. Hal ini dikatakan YI, bahwa:

“Kalau pertemuan untuk kelompok SPP ini jarang sekali, satu bulan juga belum tentu. Kalau belajar mengaji tiap hari”.
(YI, Juni 2011)

Hal ini diperkuat dengan pendapat WJ, yaitu:

“Selama setahun kemarin, kami jarang melakukan pertemuan kelompok, hanya di awal-awal saja pada waktu pencairan dana, kami ada pertemuan. Setelah itu sepertinya jarang sekali. Memang ada pertemuan di pengajian tapi tidak membahas kelompok SPP ini.”
(WJ, Juni 2011)

Selanjutnya menurut DH selaku bendahara kelompok menginginkan ke depannya kelompok SPP ini dapat mengelola dana lebih, yang nantinya akan digunakan untuk membantu ibu-ibu lain di luar kelompok.

“Jadi kami berharap di tiga kelompok ini digabung satu dulu pada saat mendapatkan dana bantuan kemudian dikelola pembagiannya siapa dengan sejumlah uang berapa, sisanya kami simpan lagi untuk orang lain yang tidak menjadi anggota kelompok SPP. Memang kami pernah usul kepada kepada UPK untuk memberikan pinjaman sesuai dengan kemampuan anggota, sisanya misalnya ada 10 juta bisa kami simpan untuk dipinjam oleh masyarakat sekitar. Sehingga kelompok ini juga mendapat pemasukan dari bunga pinjaman tersebut yang bisa dibagi bersama”.
(DH, Juni 2011)

FK, selaku ketua kelompok SPP Nurul Iman berpendapat lain, bahwa ke depannya beliau menginginkan kelompok SPP ini dapat menjadi BMT yang terhindar dari riba. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

“Kami masih berpikir kalau kami sudah punya modal anggota, karena BMT berdasarkan syariat kami terhindar dari riba. Kami mau saja simpan pinjam ini karena ditangani oleh PNPM mandiri. Tapi jika kami mandiri dengan sistem seperti ini kami tidak berani karena kami berkecimpung di organisasi kerohanian yang sistem ini mengandung riba. Hal itu akan menyebabkan buah bibir di masyarakat. Jadi satu-satunya jalan, kalau BMT berarti bagi hasil, maka kami terhindar dari riba. Begitu rencana kami”. (FK, Juni 2011)

4.4. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman.

Dalam pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok Nurul Iman dicermati beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi kegiatan SPP tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

4.4.1. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan SPP yang didapatkan dari penelitian di lapangan yaitu, adanya semangat dari pengurus dan anggota yang pro aktif dalam proses pendanaan khususnya pada pelaksanaan pengembalian dana setiap bulannya bahkan dalam koordinasi dengan UPK. Hal ini disebutkan DH selaku bendahara kelompok, bahwa:

“Sudah disepakati bahwa setiap tanggal 5 bagi anggota untuk setor pinjaman, saya ini kan suka jalan menagih kadang dengan motor lalu saya sering singgah ke anggota”. (DH, Juni 2011)

AK, selaku ketua UPK juga mendukung pernyataan bahwa kelompok SPP Nurul Iman sangat pro aktif dalam pelaksanaan kegiatan SPP:

“Kalau untuk Nurul Iman tadi yang saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya karena mereka juga proaktif sehingga tidak ada kendala dan evaluasi kami tidak terlalu berat. Bisalah mereka proaktif, tapi tetap kami pantau dalam artian bahwa ketika ada rakor bulanan KPMD dengan UPK maka kami dapat berkoordinasi bagaimana perkembangan kelompok SPP, apakah ada masalah. Itu kadang kami monitoring lewat rakor atau kadang-kadang karena lokasi kelompok SPP yang dekat, kami dapat langsung turun atau kadang-kadang saat bertemu di jalan.”
(AK, Juni 2011)

Selain hal di atas, hubungan kedekatan antar sesama anggota sebagai anggota kelompok pengajian juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan SPP ini. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan DH yaitu:

“Jika ada masalah antar anggota, saya sendiri masih bisa atasi di dalam pengajian. Karena pengajian sering tiap malam, maka jika terjadi konflik kami masih bisa menyelesaikannya saat itu. Jadi jika saya sebagai bendahara mengarahkan tapi belum baik maka saya akan beritahu ibu ketua untuk turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi selama ini belum ada masalah yang terlalu sulit’. (DH, Juni 2011)

Dilanjutkan DH bahwa faktor pendukung lainnya yaitu, adanya semangat dari anggota kelompok Nurul Iman yang sebagian besar adalah pendatang (bukan penduduk asli desa Tulehu) untuk berusaha berhasil dalam kegiatan SPP ini.

“Terkadang ada hambatan pemerintahan yang sepertinya masih memikirkan perlu hadirnya orang pribumi. Tapi dalam kelompok PNPM ini tidak melihat hal itu. Justru banyak orang pribumi (dalam kelompok) yang macet dalam bantuan pinjaman ini. Sehingga mereka mencoba memberikan bantuan ini kepada kelompok kami. Alhasil kami mampu membuktikan bahwa sekalipun kami bukan orang pribumi namun kami mampu mengerjakan apa yang dikehendaki PNPM’. (DH, Juni 2011)

Terkait hal ini, AW selaku Konsultan di Provinsi berpendapat bahwa:

“Di beberapa lokasi-lokasi kecamatan tertentu yang dimana kecamatan itu ada masyarakat-masyarakat pendatang seperti orang Buton, orang Bugis bahkan orang Jawa juga. Itu memang mereka itu juga sudah punya mental dagang dan sejak awal mereka sudah punya usaha-usaha kecil. Sehingga ketika mereka menggunakan pinjaman dia tidak sia-siakan pinjaman itu. Dan memang masyarakat-masyarakat non lokal seperti itu memang mereka berpikir bahwa tanpa dia berusaha, usaha tidak berkembang dan dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan dan keluarga hidup dari usaha itu. Tetapi masyarakat pribumi ini memang betul bahwa dia memulai usaha itu setengah-setengah dan berpikir usaha tidak perlu berkembang karena dia bisa makan dari hasil-hasil lahannya seperti cengkeh, pala dan sagu dan sebagainya. Karena mereka dimanjakan dengan alamnya yang di dalamnya masih ada tanaman-tanaman pangan, sehingga memang mereka melihat pinjaman ini sebetulnya bukan merupakan sebuah target untuk mengembangkan usaha dalam keluarga. Tetapi ya hanya dilakukan kalo berkembang ya, kalo tidak palingan sebentar dalam pencicilan kembali kalo diusahakan tentunya dia akan bayar lagi dengan usaha-usaha yang lain.”

Selain faktor di atas, persyaratan untuk mendapatkan dana dari kegiatan SPP yang dirasakan anggota sangat mudah, yaitu dengan menggunakan KTP menjadi faktor pendukung kegiatan ini. Bahkan diakui HL yang sudah tidak bisa berjalan dan tidak memiliki KTP hanya menggunakan tanda tangan saja untuk memenuhi persyaratan dimaksud.

“Saya hanya tanda tangan, tidak pakai KTP. Tidak susah, gampang saja. karena saya tidak bisa berjalan, ibu YI yang bawa ke bendahara, kalau sudah dicairkan dananya saya siap terima.”
(HL, Juni 2011)

Hal ini dibenarkan oleh AT, selaku PJOK Kecamatan Salahutu yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan di kecamatan Salahutu ini saya nilai cukup baik, karena melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha sehingga dana 25% dari total dana 3 milyar yang diterima Salahutu, sangat membantu masyarakat. Akan tetapi yang diperlukan adalah kesadaran masyarakat untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Kegiatan ini juga membantu masyarakat karena hanya membutuhkan proposal kelompok dan KTP dari anggota untuk mencairkan dana.”
(AT, Juni 2011)

Selain persyaratan yang mudah, faktor pendukung lainnya yaitu faktor geografis yaitu dekatnya jarak rumah tinggal para anggota dan jarak dengan kantor UPK Salahutu. Disebutkan DH bahwa pengurus juga dapat berkoordinasi dengan UPK karena jarak yang dekat dengan kantor UPK:

“Namun jika kami pergi karena dekat dengan kantor kecamatan karena tempat ini menjadi lokasi pesantren bulanan sehingga kami mendapat arahan disitu. Sebagai pengurus kami kemudian menyampaikan ke anggota.” (DH, Juni 2011)

Selain itu karena dekatnya jarak rumah tinggal dengan fasilitator kecamatan, pengurus juga dapat berkomunikasi langsung ke rumahnya jika terjadi masalah atau ada hal-hal yang kurang dimengerti terkait kegiatan SPP. Hal ini disebutkan FK bahwa:

“Jika ada kesulitan maka kami langsung bertanya kepada fasilitator kecamatan yaitu Ibu HF Penjelasan mengenai SPP itu akan diperoleh di musyawarah, tapi jika ada kendala yang kurang dipahami maka saya datang ke rumah ibu HF dan tanya langsung kepada beliau.”
(FK, Juni 2011)

Selain itu jarak rumah tinggal anggota dengan pengurus juga menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan SPP. Hal ini disebutkan YI yang mendatangi rumah pengurus ketika tidak memahami tentang kegiatan SPP.

“Pernah sekali saya memikirkan tentang uang yang mereka kasih, saya kurang mengerti tentang pemotongan 50 ribu itu. Tentang tanggung renteng. Lalu saya pergi ke rumah bendahara lalu bertanya.”
(YI, Juni 2011)

4.4.2. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman

Selain faktor pendukung yang telah dipaparkan di atas, dalam pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok Nurul Iman ini terdapat pula faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Beberapa faktor penghambat pelaksanaan kegiatan SPP yang terlihat dari dalam kelompok yaitu, kurangnya pemahaman anggota kelompok tentang kegiatan SPP, mereka hanya memahami dalam hal pengembalian dana. Hal ini dinyatakan WJ tahun yaitu:

“Dalam pertemuan itu sebenarnya saya tidak terlalu paham materinya, karena mereka cuma menjelaskan secara umum tentang SPP, pokoknya itu untuk ibu-ibu dan kalau dikembalikan dengan lancar nantinya bisa diusulkan lagi untuk berikutnya. Setelah di kelompok baru saya tahu bunga uangnya sekian, harus kembali sekian”
(WJ, Juni 2011)

YI juga menyampaikan hal yang sama yaitu:

“Memang yang dijelaskan dalam pertemuan banyak. Mengenai PNPM dan masalah dana bergulir kami. Ini seperti di Mamokeng yang mana mereka tidak minta dana SPP. Jadi SPP penjelasannya sedikit saja, saya juga kurang memperhatikan.” (HL, Juni 2011)

Faktor penghambat lainnya yaitu pertemuan kelompok yang jarang dilakukan untuk membina anggota kelompok. Hal ini disebutkan YI bahwa:

“Kalau pertemuan untuk kelompok SPP ini jarang sekali, satu bulan juga belum tentu.” (YI, Juni 2011)

Faktor penghambat lainnya yaitu pada pelaksanaan kegiatan SPP dalam kelompok terdapat konflik antar anggota yang disebabkan karena jumlah dana pinjaman yang tidak sama. Hal ini disampaikan WJ, yaitu:

“Memang ada konflik waktu di awal, karena ada anggota yang mendapat sedikit dana dibandingkan yang lain.”
(WJ, Juni 2011)

Hal ini diakui juga oleh AW, selaku Konsultan di Provinsi yang menjelaskan bahwa terkait pertemuan kelompok dan adanya konflik dalam kelompok yang mempengaruhi penguatan kelompok ini bila tidak tercapai menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan kegiatan SPP:

“Karena memang dana pinjaman ini ada pada kekuatan kelembagaan, yaitu kelompok SPP, jadi apabila kelompok ini dia sudah pecah maka tentunya berdampak pada pengembalian pinjaman kelembagaan, jadi kita lebih banyak melakukan penguatan kelembagaan dalam kelompok ini, lebih banyak kita berhati-hati. Sehingga segala sesuatunya harus secara transparan dijelaskan kepada anggota supaya dia mengerti berapa besar dana yang sesungguhnya dia terima dari UPK sehingga dalam pengelolaan ini, kelembagaan ini betul-betul terbentuk. Tapi kenyataan yang terjadi ini bahwa memang kelihatannya kelembagaan kelompok ini tidak terlalu berkembang. Masyarakat hanya menggunakan kelompok agar mendapatkan pinjaman untuk usaha pribadi. Tapi dia tidak membesarkan kelompok. Jadi kelompok hanya dijadikan sebuah sarana, sebuah tempat berkumpul untuk dapat pinjaman. Dan setelah mendapat dana, anggota berjalan sendiri-sendiri. Padahal dalam ketentuan kelompok ini harus ada tanggung renteng dari setiap anggota, ada juga yang namanya itu uang iuran anggota yang masuk ke kas kelompok untuk pengadaan buku administrasi dan sebagainya. Ada pertemuan rutin kelompok setiap bulan atau setiap minggu dalam rangka mengevaluasi perkembangan kinerja setiap anggota harus perkembangan usaha anggota. Tapi semua ketentuan kelompok ini tidak berjalan secara maksimal di kecamatan dan di desa. Karena memang individualistis tiap anggota dalam kelompok terlalu tinggi, yang penting usaha dia yang maju saja. Tetapi kelompok itu dia tidak mau kembangkan. Hal ini tentu saja menghambat pelaksanaan kegiatan SPP”

Selain faktor penghambat di atas, proses pendampingan yang tidak maksimal terhadap anggota kelompok SPP sepanjang pelaksanaan kegiatan SPP ini juga menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini disampaikan WJ, yaitu:

“Selama ini belum pernah ada kunjungan dari pihak PNPM atau pihak desa untuk melihat usaha saya.” (WJ, Juni 2011)

Dalam proses pelaksanaan kegiatan SPP ada kunjungan dari UPK ke kelompok SPP Nurul Iman tetapi hanya kepada pengurus. Hal ini disebutkan YI, yaitu:

“Waktu dana sudah dicairkan, ada yang datang untuk kontrol dari staf ibu HF langsung di ketua.” (YI, Juni 2011)

Hal ini diakui oleh AK, selaku ketua UPK yaitu:

“Masalahnya tugas KPMD ini kan agak sulit, cakupan wilayah yang cukup luas yaitu masyarakat yang 15 ribu sekian di 14 dusun. Hal ini berarti kan tidak mungkin mereka harus intens ke Nurul Iman saja, mereka juga mesti ke kelompok-kelompok yang lain, terutama kelompok di desa lain yang mengalami penunggakan. Kalo PL, untuk pelaksanaan kegiatan SPP di 2009, waktu itu sempat sekitar 1-2 bulan ada kekosongan PL, sehingga PL yang baru ini karena baru diangkat belum mengusai program sepenuhnya. Sehingga ketika ada pertemuan-pertemuan kita di lapangan, PL baru ini

ikut saja sekalian belajar. Jadi mungkin dia belum terlalu baik dalam melakukan pendampingan.” (AK, Juni 2011)

Kepala Desa Tulehu, JO juga menyampaikan hal yang serupa:

“Ya, kendala memang dalam kegiatan fisik tidak terlalu banyak. Tapi dalam pemberian modal usaha ini, kan terkadang ada hambatan karena faktor kurangnya pembinaan dari pihak PNPM Mandiri Perdesaan kepada kelompok” (JO, Juni 2011)

VS, selaku PJO Provinsi, juga menekankan hal yang sama bahwa salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan SPP ini yaitu kurangnya pendampingan:

“Salah satunya yaitu SDM, yaitu bagaimana ibu-ibu ini harus diberi penguatan secara terus-menerus, dan juga harus didampingi oleh fasilitator baik kecamatan, kabupaten. Karena itu sangat penting utk mendampingi dan mengawal pelaksanaan di desa. Kegiatan SPP yang tidak berhasil misalnya karena di tingkat desa kurang pembinaan.”

(VS, Juni 2011)

Faktor penghambat lainnya yaitu pelaksanaan verifikasi yang tidak berjalan dengan maksimal sesuai ketentuan program, seperti yang dapat dicermati pada pelaksanaan kegiatan SPP pada tahap pengelolaan dana dimana tim verifikasi tidak langsung melakukan pengamatan terhadap usaha dan kondisi ekonomi anggota kelompok. tidak maksimalnya proses verifikasi ini juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan SPP. Hal ini disampaikan AW, selaku Konsultan Provinsi, yaitu:

“Di lapangan terkadang para fasilitator dan tim verifikasi yang tidak maksimal menjalankan tugasnya sehingga ada kejadian modal yang diberikan ke beberapa orang mencapai 4 sampai 5 juta. Anggota kelompok juga terdiri dari pensiun-pensiunan PNS yang sebetulnya dilihat dari ekonomi keluarga itu dia sudah mapan. Sebenarnya dia ini bukan target kita. Karena masih banyak orang miskin yang tidak punya jaminan tetap kepada merekalah dana SPP ini harusnya diberikan. Kriteria yang berlaku di program yaitu mengacu kepada kemiskinan menurut Bank Dunia atau menurut BPS, kau bisa tau satu pendapatan dibawah 2\$ (dolar) perhari sudah dikategorikan miskin. Artinya kalo berpendapatan Rp.25 ribu per hari saja berarti dia sudah tidak bisa membiayai kebutuhan pokok keluarga. Tetapi kalo BPS kan dia pakai kalori. Dari situlah fasilitator dan tim verifikasi dapat menentukan kriteria kelompok. Misalnya dilihat dari penampilan rumah. Kalau rumah memiliki dindingnya dan plafonnya sudah bagus, lalu orang seperti ini yang menerima pinjaman nah itu yang dipertanyakan. Disinilah faktor penghambat dalam kegiatan SPP dimana fasilitator ingin aman dengan mengejar pengembalian yang lancar, tapi disisi lain gagal memberdayakan masyarakat.”

BAB 5

ANALISIS

Berdasarkan hasil temuan lapangan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dilakukan analisis terhadap temuan-temuan lapangan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian evaluasi ini.

5.1. Penilaian hasil tujuan jangka menengah program sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

5.1.1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.

Tujuan khusus yang pertama ini akan dicermati dari pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha anggota dan pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasarnya. **(bab 2 hal 47-48)**. Berdasarkan temuan lapangan dicermati juga *strategy objective* yaitu pelaksanaan pendanaan yang dapat dilihat dari tahap pencairan dana dan pengembalian dana yang dilakukan oleh anggota kelompok.

Temuan lapangan yang penting terkait dengan pelaksanaan pendanaan yaitu sebelum dana diterima masing-masing anggota pada alur kegiatan SPP terdapat proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi. Temuan menyangkut proses verifikasi ini sangat menarik karena ada perbedaan pendapat yang dinyatakan oleh anggota kelompok dan pengurus yaitu, menurut ketua dan anggota kelompok, penetapan jumlah pinjaman untuk anggota kelompok SPP Nurul Iman ditentukan oleh pengurus karena adanya kepercayaan dari tim verifikasi terhadap pengurus. Sedangkan di lain kesempatan ketua dan fasilitator kecamatan menyebutkan bahwa penetapan jumlah pinjaman masing-masing anggota kelompok ditentukan oleh tim verifikasi. Selanjutnya ketua kelompok juga menceritakan kasus yang terjadi pada anggota kelompok pada saat pencairan dana ini, dimana ada salah satu anggota yang kemudian dikurangi dana bergulirnya oleh pengurus dengan mempertimbangkan beberapa hal, pengurangan dana tersebut dilakukan tanpa berkonsultasi dengan tim verifikasi.

Berdasarkan temuan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses penentuan jumlah pinjaman anggota kelompok ditetapkan oleh pengurus bersama dengan tim verifikasi, karena adanya kepercayaan tim verifikasi terhadap

pendapat dari pengurus kelompok sehingga tim tidak melibatkan anggota kelompok. Hal ini berarti bahwa tim verifikasi hanya memverifikasi anggota kelompok melalui pengurus kelompok saja, sehingga dalam hal ini pengurus kelompok memiliki kesempatan untuk menyarankan bahkan menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima masing-masing anggota.

Pada penjelasan alur kegiatan SPP yaitu pada proses verifikasi (**bab 3 hal 74-76**) dapat dicermati bahwa dalam pelaksanaan verifikasi terdapat tahapan kunjungan lapangan atau pemeriksaan lapangan yang mengharuskan tim verifikasi untuk melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat pengusul dan informan lainnya. Salah satu hal yang akan diketahui yaitu kebenaran daftar calon penerima manfaat (termasuk nilai kebutuhan yang diajukan untuk kegiatan simpan pinjam) selain itu dalam proses ini, tim verifikasi juga perlu melibatkan kelompok penerima manfaat pada waktu penulisan laporan. Tim juga memverifikasi pemanfaat SPP dengan cara membandingkan daftar calon pemanfaat dengan data RTM.

Tahapan ini tentu saja sangat penting dilakukan oleh tim verifikasi untuk mengetahui apakah penerima bantuan sesuai dengan kriteria penerima bantuan kegiatan SPP ini (**bab 3 hal 76**) yaitu diutamakan kepada kelompok yang memiliki calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Kunjungan lapangan yang dilakukan tim verifikasi ini juga agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat sehingga dana bergulir yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan. Berkaitan dengan hal ini jika kita mencermati profil informan (**bab 4 hal 84-85**) dimana dapat dilihat bahwa ada beberapa anggota kelompok yang memiliki pekerjaan tetap yaitu sebagai guru dan suaminya juga memiliki pekerjaan tetap atau pensiunan. Hal ini didukung dengan dokumentasi foto yang menunjukkan keadaan rumah tinggal beberapa anggota yang memiliki kondisi baik dengan struktur bangunan beton (**bab 4 hal 94**), tetapi beberapa anggota lainnya memiliki rumah tinggal yang dipinjamkan orang kepada mereka dengan kondisi memprihatinkan karena terbuat dari papan dengan lantai tanah. (**bab 4 hal 92-93**).

Dari dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam kelompok SPP Nurul Iman, terdapat anggota yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin jika dicermati dari kondisi rumah tinggalnya sesuai dengan ketentuan

program (**bab 3 hal 71**) dan juga sesuai dengan standar kemiskinan BPS (**bab 2 hal 25**) yang mengkategorikan rumah dengan kondisi kurang dari 8 m², lantai tanah/bambu, dinding bambu/rumbia, merupakan salah satu kriteria miskin. Pada sisi lain terdapat juga anggota yang berdasarkan kriteria kondisi rumah tinggal melebihi standar kemiskinan BPS. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kondisi perekonomian anggota, dimana ada beberapa anggota yang bukan rumah tangga miskin/ RTM dan ada juga anggota yang merupakan RTM. Ketimpangan kondisi ini, salah satunya diakibatkan karena tidak dijalankannya proses verifikasi dengan maksimal oleh tim verifikasi. Hal ini sangat mempengaruhi proses pendanaan dalam kegiatan SPP ini dimana penentuan calon pemanfaat yang akan menerima dana bergulir merupakan salah satu proses yang penting, karena pencapaian *goal* dari kegiatan SPP salah satunya dipengaruhi oleh *strategy objectives* yaitu pelaksanaan pendanaan. Pelaksanaan verifikasi oleh tim verifikasi sebagai salah satu pelaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan, perlu diawasi oleh para pelaku yang lain sehingga dana yang diberikan dapat tepat sasaran dan usulan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa terkait pelaksanaan pendanaan khususnya pelaksanaan verifikasi pada kelompok SPP Nurul Iman ini, tidak berjalan sesuai dengan ketentuan program. Dimana tim verifikasi tidak menjalankan tugasnya untuk memverifikasi masing-masing anggota, dan hanya memverifikasi kelompok secara umum melalui pengurus. Hal ini tentu saja mempengaruhi penilaian terhadap masing-masing anggota yang selanjutnya mengakibatkan ketidaksesuaian penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan program dan adanya penentuan jumlah pinjaman masing-masing anggota yang tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Selanjutnya pada tahap pencairan dana, temuan lapangan menunjukkan bahwa menurut anggota, proses pencairan dana memakan waktu lama dari pengurusan persyaratan anggota dan kelompok hingga dana diterima masing-masing anggota. Merujuk pada gambaran program (**bab 3 hal 80**) tentang mekanisme pencairan dana PNPM dari rekening UPK ke desa maka dapat dicermati bahwa proses penyerahan dana dari UPK ke desa/ TPK tidak melalui proses panjang. Kemudian penyaluran dana dari UPK ke TPK juga harus

dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan desa. Kemudian dari TPK menyerahkan kepada kelompok SPP. Temuan lapangan lainnya yang terkait hal ini yaitu persyaratan yang mudah untuk mendapatkan dana bergulir yang dirasakan anggota kelompok tentu saja memperlancar berlangsungnya proses pencairan. Hal ini sesuai dengan ketentuan program (**bab 3 hal 76**) yang menunjukkan bahwa dokumen usulan kegiatan SPP hanya perlu dilengkapi dengan KTP dan perjanjian pinjaman. Sehingga terkait pencairan dana ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan program.

Kemudahan dalam persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir dari kegiatan SPP ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses sumber daya kapital bagi kesejahteraannya (**bab 2 hal 39**). Hal ini sangat mendukung pencapaian tujuan kegiatan SPP.

Pada tahap pengelolaan dana, temuan di lapangan menunjukkan bahwa dana yang diterima oleh anggota digunakan untuk berbagai kepentingan yaitu, keseluruhan dana bergulir tersebut digunakan untuk pengembangan usaha yang telah ada sebelumnya dan ada juga anggota yang menggunakannya untuk memulai jenis usaha baru. Selain itu ada anggota yang membagi dana tersebut untuk modal usaha dan sebagian digunakan untuk simpanan di bank maupun di rumah yang kemudian akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pemeliharaan kesehatan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pendanaan ini, pada tahap pengembalian dana bergulir setiap bulannya, temuan lapangan menunjukkan bahwa anggota tidak merasa kesulitan dalam mengembalikan dana setiap bulannya. Dana tersebut disetor anggota secara langsung kepada bendahara kelompok dan kemudian bendahara menyampaikannya kepada bendahara UPK. Hal ini sesuai dengan pendapat Susy Cheston dan Lisa Khun (**bab 2 hal 44**) bahwa dalam industri keuangan mikro telah menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan menjadi kreditur yang lebih baik.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengembalian dana yang lancar dilakukan oleh anggota setiap bulannya, dikarenakan kecilnya dana bergulir yang diterima sehingga tidak memberatkan anggota dalam pengembaliannya. Hal lain yang juga berkaitan dengan itu yaitu

hubungan kedekatan antar anggota sebagai sesama anggota kelompok pengajian Nurul Iman membuat anggota kelompok memiliki rasa sungkan kepada pengurus kelompok SPP Nurul Iman yang juga merupakan pengurus kelompok pengajian Nurul Iman, sehingga membuat anggota tidak pernah terlambat dalam menyetor dana setiap bulannya kepada bendahara. Hasil wawancara dengan bendahara kelompok, DH juga mengungkapkan bahwa dalam kelompok sendiri telah disepakati batas tempo pengembalian pinjaman setiap bulannya, kemudian dicermati juga bahwa bendahara sangat pro aktif mendatangi anggota kelompok yang terlambat/ tidak menyetor. Hal ini tentu saja mendukung kelancaran pengembalian pinjaman kelompok SPP Nurul Iman setiap bulannya. Karena anggota merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman setiap bulannya.

Dari gambaran atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pendanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman dapat dikatakan berjalan dengan baik karena pada proses pencairan sampai pengembalian dana oleh anggota kelompok berlangsung dengan lancar, walaupun pada tahap awal sebelum pencairan yaitu pada tahap verifikasi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan program. Ke depannya perlu adanya pengawasan dari para pelaku lainnya, pihak desa dan kecamatan terhadap pelaksanaan verifikasi oleh tim, karena tim yang dipilih dari masyarakat lokal tentu saja mendukung pelaksanaan kegiatan SPP tetapi di lain pihak, hubungan kedekatan karena saling mengenal dapat membuat tim verifikasi tidak bekerja dengan optimal sesuai ketentuan program.

Selanjutnya penilaian terhadap bagian pertama yaitu pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha dapat dilihat dari tabel perkembangan usaha anggota kelompok yang membandingkan usaha awal sebelum menerima dana bergulir dan setelah menerima dana tersebut.

Tabel 5.1. Tabel Perkembangan Usaha
Anggota Kelompok SPP Nurul Iman

No	Informan	Usaha Awal sebelum menerima dana bergulir dari kegiatan SPP	Usaha setelah mendapat dana bergulir dari kegiatan SPP
1.	FK	Menjual minyak tanah eceran, es batu eceran	Menjual beras, minyak tanah, es batu eceran, pulsa telepon, pakaian, jasa pengetikan yang dikelola anak.
2.	UW	Menjual kue, menjahit	Penjualan kue semakin berkembang dengan keuntungan tiap hari yang bertambah
3.	DH	Menjual pulsa, mengikuti MLM	Ditambah dengan modal pribadi mulai menjual minyak tanah eceran, hasilnya dengan ditambah modal dari suami digunakan untuk membangun rumah kos
4.	WJ	Menjual roti, permen, biskuit dengan menaruhnya di meja kecil di depan rumah	Memiliki kios kecil yang menjual mi instan, rokok, biskuit. Hasilnya digunakan untuk membantu suami membangun pondasi rumah dan membayar cicilan motor
5.	YI	Menjual roti keliling dengan modal terigu kiloan	Usaha roti dan kue berkembang dengan keuntungan per hari kurang lebih Rp.100.000,-
6.	HL	Memiliki kios kecil yang menjual rokok, permen, mainan anak	Kios telah menjual rokok, mainan anak, mi instan dengan penghasilan per hari kurang lebih Rp. 300.000,-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum anggota kelompok SPP Nurul Iman mengalami perkembangan yang positif dalam pengelolaan usahanya, hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan usaha dan penambahan jenis usaha baru. Perkembangan usaha anggota ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap aktivitas usaha anggota kelompok. **(bab 4 hal 90-92).**

Selain temuan lapangan tentang perkembangan usaha anggota yang telah dibuat dalam tabel di atas, ada hal penting terkait pemenuhan pendanaan usaha ini, yaitu walaupun kegiatan SPP ini telah berakhir kurang lebih 1 tahun akan tetapi hasil dari dana bergulir tersebut masih tetap diolah anggota. Hal menunjukkan bahwa dampak positif dari pelaksanaan kegiatan SPP dapat terus dirasakan oleh anggota kelompok Nurul Iman.

Selanjutnya bagian kedua yang menunjukkan pencapaian tujuan khusus kegiatan SPP ini yaitu adanya pemenuhan kebutuhan sosial dasar para anggota kelompok SPP Nurul Iman, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan (pendidikan, kesehatan) **(bab 2 hal 48)**. Berdasarkan hasil temuan lapangan dicermati bahwa dana bergulir yang diterima anggota yang selanjutnya digunakan untuk modal usaha telah memberikan hasil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar keluarganya. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan akan pendidikan anak, kebutuhan makan sehari-hari dan kebutuhan untuk membangun rumah tinggal. Ada juga anggota yang menggunakan dana bergulir tersebut dengan membagi sebagian untuk modal dan sebagian lainnya untuk dana simpanan di bank maupun di rumah yang akan digunakan bagi kebutuhan pemeliharaan kesehatan anggota keluarganya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha dan sosial dasar dalam kegiatan SPP pada kelompok Nurul Iman dinilai berhasil.

5.1.2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

Dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah yang kedua ini, dalam program dilakukan *strategy objective* yaitu pendampingan yang mempengaruhi pencapaian tujuan jangka menengah kedua ini. Berdasarkan hasil temuan

lapangan pada penelitian ini maka diperoleh beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan pendampingan pada kelompok Nurul Iman sepanjang periode pelaksanaan kegiatan SPP di tahun 2009. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan kegiatan SPP, tidak semua anggota kelompok SPP Nurul Iman mengetahui informasi dan menghadiri musyawarah-musyawarah dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di dusun maupun di desa. Pemberitahuan tentang musyawarah tersebut dilakukan oleh fasilitator kecamatan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan SPP ini memiliki alur kegiatan yang dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pengembalian SPP (**Bab 3 hal 70**) dan di dalam alur tersebut dijelaskan juga kriteria peserta yang diharapkan mengikuti musyawarah-musyawarah tersebut. Alur tersebut menunjukkan bahwa pada musyawarah-musyawarah tersebut hanya melibatkan wakil perempuan/ wakil dari kelompok perempuan. (**Bab 3 hal 70-77**). Dijelaskan juga bahwa tugas dan tanggung jawab fasilitator kecamatan pada awal pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (**Bab 3 hal 61**) salah satunya yaitu menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan pada masyarakat dan aparat desa. Dicermati juga dalam ketentuan program bahwa PL dan KPMD/K pada tahapan kegiatan SPP, baru terpilih pada Musdes Sosialisasi dan kemudian mulai menjalankan tugasnya pada Musyawarah Penggalian Gagasan di dusun (**bab 3 hal 71**) sehingga pada pertemuan-pertemuan awal dalam kegiatan SPP ini, seluruh pemberitahuan informasi kegiatan masih dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan.

Tugas pendamping untuk memberi informasi kepada masyarakat merupakan tugas awal yang penting dalam sebuah kegiatan pemberdayaan, dimana masyarakat diberi kesempatan untuk mengikuti tahap-tahap kegiatan dalam sebuah program. Menurut *Ife*, tugas untuk memberikan informasi ini merupakan bagian dari salah satu peranan fasilitatif yaitu peran animasi sosial, dimana pendamping dapat memampukan masyarakat untuk bersedia terlibat aktif dalam proses perubahan dalam komunitasnya (**bab 2 hal 32**). Temuan lapangan menunjukkan bahwa Fasilitator Kecamatan dalam hal ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dimana ia selalu memberi informasi kepada pengurus mengenai pertemuan-pertemuan yang diadakan, bahkan pada awal pembentukan

kelompok pengajian menjadi kelompok SPP, Fasilitator Kecamatan sangat membantu dalam memfasilitasinya.

Berdasarkan penjelasan dari program tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberitahuan adanya pertemuan oleh Fasilitator Kecamatan sebagai wujud pendampingan dan kehadiran dari wakil kelompok perempuan yang mewakili keseluruhan anggota kelompok tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan program dan sesuai dengan teori pemberdayaan secara umum.

Selanjutnya berkaitan dengan tujuan khusus kedua ini, melalui temuan lapangan dapat dicermati bahwa, melalui kegiatan SPP ini anggota kelompok SPP Nurul Iman yang adalah kaum perempuan pengelola ekonomi rumah tangganya telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan dana/ modal bagi usahanya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga dan anggota mendapat kemudahan mengakses modal tersebut. (**bab 2 hal 48**). Hal ini dapat terlihat dari beberapa hasil wawancara dengan anggota kelompok yang merupakan ibu rumah tangga, mereka telah membantu suaminya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui usaha yang dikelolanya. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hubies (**bab 2 hal 44**) yang menerangkan bahwa dalam situasi kemiskinan, seorang wanita yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya terpaksa harus berusaha mencari nafkah, karena secara batin dan etos pengorbanan ibu, mereka akan memaksa diri bekerja untuk menghidupi anaknya.

Pernyataan lainnya oleh anggota kelompok yang merupakan seorang janda yang telah lanjut usia, menunjukkan bahwa melalui kegiatan SPP ini telah memberinya kesempatan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup seharusnya bersama seorang anak. Ibu ini juga melengkapi persyaratan untuk menerima dana bergulir dengan tanda tangan saja. Temuan ini menunjukkan bahwa anggota kelompok diberi kemudahan mengakses modal tersebut, kemudahan itu berupa administrasi dan persyaratan yang sangat mudah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan SPP ini telah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi anggota kelompok Nurul Iman yang adalah perempuan untuk dapat meningkatkan ekonomi rumah tangganya melalui pendanaan usahanya.

5.1.3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Pada tujuan jangka menengah ketiga ini, dicermati pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping yang secara langsung mempengaruhi penguatan kelembagaan simpan pinjam ini. Pada pelaksanaan kegiatan SPP berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok SPP Nurul Iman, jika anggota mengalami kesulitan atau tidak memahami dalam hal administrasi dan pembukuan, anggota biasanya berkonsultasi dengan pengurus kelompok atau bahkan langsung berkonsultasi dengan fasilitator kecamatan tanpa melalui pendamping lokal dan atau KPMD/K. Pada bab gambaran program (**bab 3 hal 64**) dijelaskan bahwa dalam PNPM Mandiri Perdesaan fasilitator kecamatan dan fasilitator kabupaten berperan sebagai fasilitator dari luar masyarakat yang dipahami sebagai pendamping masyarakat. Sedangkan pendamping lokal dan KPMD berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai kader pemberdayaan. Dalam hal ini tugas pendampingan yang dilakukan KPMD/K yaitu memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dari tahap perencanaan sampai tahap pemeliharaan (**bab 3 hal 59-61**). Penjelasan program ini menunjukkan bahwa pendamping lokal dan KPMD/K yang berasal dari masyarakat lokal, memiliki tugas untuk mendampingi kelompok karena merupakan perpanjangan tangan dari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten yang berasal dari luar masyarakat. Kedekatan hubungan KPMD/K dan PL dengan masyarakat merupakan poin penting bagi keberhasilan kegiatan SPP ini, dimana hal ini memudahkan anggota kelompok untuk melakukan komunikasi dan interaksi dengan mereka sebagai sesama anggota masyarakat setempat.

Dalam gambaran program telah dijelaskan bahwa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab KPMD/K, Pendamping Lokal dan Fasilitator Kecamatan, (**bab 3 hal 59**) terdapat fungsi fasilitator sebagai narasumber yang dituntut untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis maupun memberikan saran agar mudah diterapkan oleh anggota kelompok. Hal ini didukung dengan pendapat Iff (**bab 2 hal 33**) yang menjelaskan bahwa seorang

pendamping pada dasarnya memiliki peran sebagai pemberi dukungan yang selalu bersedia ketika dimintai pendapat atau diminta membicarakan dan membahas suatu permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa selain Fasilitator Kecamatan, KPMD/K dan PL juga memiliki tugas untuk memberikan informasi/ pemahaman kepada kelompok SPP Nurul Iman terkait PNPM Mandiri Perdesaan khususnya kegiatan SPP, sehingga berbagai kesulitan kelompok dapat teratasi dan pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan kegiatan SPP dimaksud. Akan tetapi temuan lapangan memperlihatkan bahwa kelompok SPP Nurul Iman selalu berkonsultasi langsung dengan Fasilitator Kecamatan selama pelaksanaan kegiatan SPP. Hal ini menunjukkan bahwa KPMD/K dan PL tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal, karena masyarakat tidak merasakan pendampingan dari kader pemberdayaan lokal ini. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat sendiri karena kader pemberdayaan lokal yang dipilih oleh masyarakat sendiri yaitu KPMD/K dan PL merupakan agen penting bagi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Dimana setelah berakhirnya periode kegiatan pemberdayaan, diharapkan mereka dapat terus mendukung proses pemberdayaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumodiningrat (**bab 2 hal 40**) bahwa akses langsung kepada sumber daya kapital/ penyediaan modal ekonomi penting dilengkapi dengan pendampingan oleh tokoh/ penggerak di kalangan masyarakat yang dapat mengembangkan prakarsa untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam PTO program dan teori tentang pendampingan dari Ife maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan program dengan kenyataan di lapangan, dimana Pendamping Lokal dan KPMD/K tidak optimal dalam melaksanakan pendampingan, terlebih khusus pada saat anggota kelompok memerlukan informasi yang berkaitan dengan kegiatan SPP.

Demikian pula dengan hasil temuan pada bagian lainnya ketika terjadi permasalahan di dalam kelompok maka penyelesaiannya dilakukan secara internal kelompok tanpa melibatkan pihak luar atau pendamping, sehingga di dalam kelompok terdapat permasalahan yang tidak terselesaikan. Pada gambaran program, salah satu fungsi dari fasilitator di masyarakat yaitu sebagai mediator

yang berfungsi untuk memediasi berbagai kepentingan, termasuk didalam/ internal kelompok. (**bab 3 hal 65**). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ife (**bab 2 hal 33**) yang menyebutkan salah satu peran pendamping yaitu peran fasilitatif untuk bertindak sebagai mediator dan negosiator dalam menghadapi konflik yang terjadi. Peran pendamping sebagai mediator merupakan salah satu peran yang penting dimana pendamping dapat membantu untuk menengahi dan mencari jalan keluar bagi konflik yang terjadi di dalam kelompok. Peran ini akan efektif dapat dilakukan jika pendamping memiliki hubungan/ komunikasi yang baik dengan anggota kelompok. (**bab 2 hal 34**). Akan tetapi berdasarkan temuan lapangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kelompok tidak memiliki hubungan/ interaksi dengan KPMD/K dan PL dan hubungan kelompok dengan Fasilitator Kecamatan selama ini hanya jika kelompok melakukan konsultasi berkaitan dengan pertemuan awal dan administrasi/ pembukuan kegiatan SPP. Hal ini kemudian membuat anggota kelompok SPP Nurul Iman tidak memiliki kedekatan dengan para pendamping sehingga ketika ada konflik internal yang terjadi dalam kelompok, mereka tidak melibatkan para pendamping.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi mediasi oleh para pendamping tidak dilaksanakan karena jika terjadi masalah, kelompok menyelesaikannya sendiri.

Selain hal di atas, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa selama pelaksanaan SPP, anggota kelompok tidak pernah mendapat kunjungan/ monitoring dari pendamping untuk melihat langsung perkembangan usahanya. Hal ini tidak sesuai dengan gambaran program (**bab 3 hal 59-61**) yang menyebutkan bahwa tugas pendampingan oleh KPMD dilakukan sepanjang tahapan PPM Mandiri perdesaan, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Pada tahap pelaksanaan salah satu tugas KPMD yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian mutu kegiatan SPP (**bab 3 hal 60**). Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Mayo (**bab 2 hal 38**) yaitu, salah satu ketrampilan pendamping yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi.

Tugas untuk mengadakan kunjungan untuk memantau perkembangan usaha anggota kelompok ini sangat diperlukan oleh kelompok SPP selama pelaksanaan kegiatan SPP yang merupakan sebuah kegiatan pemberdayaan,

dimana diharapkan bahwa hasil akhir dari kegiatan ini tidak hanya peningkatan volume usaha/ tingkat kesejahteraan anggota kelompok tetapi lebih dari itu pada kegiatan pemberdayaan yang ditekankan yaitu kemandirian. Hal ini sesuai pendapat Shardlow (**bab 2 hal 30**). Oleh karena itu pendampingan selama kegiatan SPP salah satunya berupa kunjungan dari pendamping kepada anggota kelompok, penting untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan dari kegiatan SPP yang dirasakan oleh para anggota. Kunjungan yang dilakukan oleh pendamping juga penting sebagai bentuk motivasi atau pemberian dukungan (**bab 2 hal 33**) dari pendamping kepada anggota kelompok terhadap usaha yang sedang dilakukannya sehingga pada akhirnya tidak hanya dapat mencapai tujuan dari kegiatan SPP ini tetapi diharapkan setelah kegiatan berakhir para anggota dapat lebih berdaya dan mandiri dalam mengembangkan usahanya.

Pada hasil temuan lapangan dicermati juga pendapat dari ketua TPK Negeri Tulehu, Fasilitator Kecamatan, Ketua UPK Kecamatan Salahutu dan PJOK Kecamatan Salahutu yang menerangkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan SPP tugas pendampingan yaitu pengawasan/ monitoring dilakukan oleh FK, UPK, TPK dan KPMD. Temuan ini sangat menarik karena jika kita mencermati temuan lapangan sebelumnya yaitu berdasarkan pernyataan anggota kelompok dapat disimpulkan bahwa selama pelaksanaan kegiatan SPP, tidak dijalankannya pengawasan/ *monitoring* berupa kunjungan kepada masing-masing anggota kelompok. Akan tetapi pernyataan dari pelaku PNPM Mandiri Perdesaan menunjukkan sebaliknya. Pernyataan oleh Ketua TPK Negeri Tulehu dan Fasilitator Kecamatan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan *monitoring* dilakukan oleh UPK menunjukkan bahwa yang dimaksud yaitu pelaksanaan *monitoring* yang dilakukan bersamaan dengan proses pengembalian dana bergulir oleh kelompok setiap bulannya atau ketika UPK melakukan kegiatan pembinaan lainnya. Pernyataan ini didukung oleh ketua UPK yang menyebutkan bahwa pendampingan dilakukan ketika kelompok datang untuk menyetor pengembalian dana setiap bulan. Bentuk pendampingan yang dimaksud ini tentu saja dalam pelaksanaannya tidak dapat secara komprehensif menggambarkan kemajuan masing-masing anggota kelompok dan kelompok SPP Nurul Iman, karena temuan lapangan menunjukkan bahwa penyetoran setiap bulannya biasa dilakukan

perwakilan dari kelompok SPP Nurul Iman saja, yaitu ketua dan bendahara kelompok. Sehingga informasi yang didapat dari mereka tidak menggambarkan secara jelas perkembangan usaha dan kemandirian masing-masing anggota kelompok.

Berdasarkan analisis terhadap temuan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan dalam kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman, secara umum dapat disimpulkan bahwa selama periode pelaksanaan kegiatan SPP pada tahun 2009, pendampingan yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan, Pendamping lokal dan KPMD/K kepada kelompok SPP Nurul Iman ini tidak maksimal dilaksanakan. Walaupun Fasilitator Kecamatan telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk memberikan informasi pertemuan-pertemuan awal dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan melakukan peran sebagai narasumber dengan baik, tetapi dalam tahap selanjutnya pendamping yaitu KPMD/K, PL dan Fasilitator Kecamatan tidak maksimal melakukan peran sebagai narasumber, peran mediator, dan melakukan pengawasan dan pengendalian mutu kegiatan SPP. Pendampingan yang tidak maksimal tentu saja mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan SPP, karena jika mencermati model perencanaan kegiatan SPP ini (**bab 1 hal 12**) maka terlihat bahwa proses pendampingan merupakan salah satu *strategy objective* untuk mencapai *goal* kegiatan SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Oleh karena itu pelaksanaan pendampingan sangat penting dilakukan dalam kegiatan SPP, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari para pelaku dalam program terhadap proses pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping.

Di dalam ketentuan program telah diatur berbagai hal terkait pendampingan tersebut yaitu para pelaku pendampingan (Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, PL dan KPMD/K), tugas dan tanggung jawab pendamping, fungsi dan kemampuan seorang pendamping, tahapan kegiatan SPP yang di dalamnya mencakup proses pendampingan. (**bab 3 hal 58-79**) Selain itu para pendamping ini sebelum menjalankan tugasnya, dilengkapi dengan pelatihan yang memberikan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab pendampingan kepada kelompok selama pelaksanaan kegiatan SPP. Hal ini menunjukkan bahwa program telah memfasilitasi para pendamping untuk memiliki kemampuan dan

ketrampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendampingan, akan tetapi di lapangan terlihat bahwa selama pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman, proses pendampingan tidak maksimal dirasakan oleh anggota kelompok. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pendamping untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pendamping yang berasal dari masyarakat sendiri yaitu PL dan KPMD/K juga tidak menjalin kedekatan dan memiliki hubungan yang baik dengan kelompok. Ke depannya perlu adanya pengawasan yang lebih dari Fasilitator Kabupaten terhadap proses pendampingan oleh para pendamping di tingkat kecamatan dan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas pendampingan yang telah dilakukan selama ini.

Selanjutnya tujuan khusus yang ketiga ini berkaitan dengan eksistensi kelompok SPP Nurul Iman sebagai lembaga simpan pinjam. Dari hasil temuan di lapangan dapat dicermati beberapa hal yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan khususnya terhadap kelompok Nurul Iman. Menurut anggota kelompok pada saat pelaksanaan kegiatan SPP selama kurun waktu 1 tahun, kelompok Nurul Iman jarang mengadakan pertemuan kelompok. Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi dan interaksi antara sesama anggota dan antara anggota dengan pengurus yang berujung pada tidak terselesaikannya berbagai masalah di dalam kelompok. Tentu saja hal tersebut berdampak bagi penguatan kelompok SPP Nurul Iman.

Pendapat lainnya dari salah seorang pengurus pada saat sebelum tahapan pencairan dana telah diusulkan kepada UPK agar kelompok diberikan tambahan dana yang akan digunakan untuk dana bergulir bagi non anggota kelompok SPP Nurul Iman. Selanjutnya ada juga keinginan ketua kelompok agar ke depannya kelompok SPP ini dapat menjadi BMT. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan program pada tahap pelestarian dan pengembangan kegiatan, dimana diharapkan pada akhir pelaksanaan kegiatan SPP, kelompok SPP tersebut telah mengalami pengembangan kelembagaan yang secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam (**bab 3 hal 79**).

Dari penjelasan hasil temuan lapangan yang merujuk pada ketentuan program maka dapat disimpulkan bahwa tujuan khusus kegiatan SPP yang ketiga yaitu terciptanya penguatan lembaga simpan pinjam tidak tercapai.

5.2. Gambaran Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman.

5.2.1. Gambaran Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan SPP pada Kelompok SPP Nurul Iman

Berdasarkan hasil temuan lapangan, dan untuk memudahkan pelaksanaan analisis maka peneliti mencermati faktor pendukung pelaksanaan kegiatan SPP dalam 2 bagian yaitu faktor yang berasal dari dalam kelompok atau faktor internal dan faktor yang berasal dari luar kelompok atau faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Beberapa faktor internal yang mendukung pelaksanaan kegiatan SPP berdasarkan temuan di lapangan yaitu, adanya semangat dari pengurus dan anggota yang pro aktif dalam pelaksanaan pengembalian dana setiap bulannya. Semangat untuk berusaha berhasil dalam kegiatan SPP ini juga timbul karena adanya tekanan dari desa pada awal kegiatan SPP ini karena status sebagian besar anggota kelompok Nurul Iman yang adalah pendatang (bukan penduduk asli desa Tulehu).

Selain hal di atas, hubungan kedekatan antar anggota sebagai sesama anggota kelompok pengajian Nurul Iman juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan SPP ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Hubies (**bab 2 hal 46**) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor keberhasilan pemberdayaan sumberdaya wanita yaitu adanya lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan sumberdaya wanita. Lingkungan yang kondusif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu lingkungan terdekat wanita misalnya sesama anggota kelompok SPP Nurul Iman yang juga merupakan sesama anggota di pengajian Nurul Iman. Interaksi yang telah terjalin di antara mereka sebelumnya dalam kelompok pengajian Nurul Iman telah mendukung proses kegiatan SPP. Hubungan kedekatan antar anggota ini membantu dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi dalam kelompok sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan SPP.

Selanjutnya faktor pendukung lainnya yaitu adanya motivasi dari anggota kelompok yang sebagian besar terdiri dari pendatang (bukan penduduk asli desa Tulehu) untuk dapat berhasil melaksanakan kegiatan SPP. Motivasi anggota kelompok karena pendatang didasari oleh keinginan mereka untuk maju dan

mampu bersaing dengan penduduk asli. Karena sebagai pendatang dalam aset ekonomi mereka tidak seperti penduduk asli yang memiliki lahan perkebunan untuk diolah, sehingga anggota kelompok SPP Nurul Iman termotivasi untuk berhasil dengan usaha-usaha yang mereka miliki sebelum menerima dana bergulir ini.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang mendukung pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok Nurul Iman, ada juga beberapa faktor eksternal yang berasal dari luar kelompok yang mendukung pelaksanaan kegiatan SPP yaitu, persyaratan untuk mendapatkan dana dari kegiatan SPP yang dirasakan anggota sangat mudah, yaitu dengan menggunakan KTP bahkan ada anggota yang tidak bisa berjalan dan tidak memiliki KTP hanya menggunakan tanda tangan saja untuk memenuhi persyaratan dimaksud. Kemudahan persyaratan ini sesuai dengan ketentuan dasar dari pendanaan BLM (**bab 3 hal 68**) dimana kemudahan ini berarti masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. Kemudahan persyaratan ini merupakan faktor yang mendukung kegiatan SPP karena anggota kelompok SPP Nurul Iman yang sebagian adalah RTM dapat dengan mudah mengakses dana bergulir.

Selain persyaratan yang mudah, faktor eksternal lainnya yang mendukung yaitu faktor geografis yaitu dekatnya jarak rumah tinggal antar anggota, jarak rumah tinggal anggota kelompok SPP Nurul Iman dengan kantor UPK dan rumah tinggal fasilitator kecamatan. Hal ini mempermudah proses komunikasi antar anggota, anggota dengan pengurus. Jika terdapat permasalahan yang perlu dibicarakan menyangkut kegiatan SPP, anggota dapat dengan mudah mendatangi rumah pengurus untuk membicarakan masalah tersebut, demikian sebaliknya. Dekatnya jarak rumah tinggal ini juga mempermudah koordinasi pengurus kelompok SPP Nurul Iman dengan UPK dan fasilitator kelompok.

Faktor geografis ini sangatlah penting dalam mendukung kegiatan SPP di negeri Tulehu dimana akses transportasi dan jarak rumah tinggal yang dekat dapat mendukung proses pendampingan yang dilakukan yang berujung pada pencapaian tujuan program.

Berdasarkan gambaran faktor pendukung internal dan eksternal di atas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor pendukung tersebut telah mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan pendanaan khususnya pengembalian dana bergulir anggota kelompok setiap bulannya. Faktor pendukung di atas juga secara langsung mempengaruhi pencapaian tujuan jangka menengah yang pertama yaitu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, dan mendukung pencapaian tujuan khusus yang kedua yaitu memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

5.2.2. Gambaran Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan SPP pada Kelompok SPP Nurul Iman

Selain faktor pendukung yang telah dipaparkan di atas, dalam pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok Nurul Iman ini terdapat pula faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Faktor penghambat ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu faktor internal yang berasal dari dalam kelompok dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar kelompok. Penjabaran faktor-faktor tersebut dapat dicermati di bawah ini.

a. Faktor Internal

Beberapa faktor penghambat pelaksanaan kegiatan SPP yang berasal dari dalam kelompok antara lain, pemahaman anggota kelompok yang kurang komprehensif tentang kegiatan SPP, mereka hanya memahami dalam hal pengembalian dana. Hal ini tentu saja diperkuat faktor penghambat lainnya yaitu jarangya pertemuan kelompok dimana dalam pertemuan tersebut anggota kelompok dapat menambah pemahamannya tentang kegiatan SPP.

Faktor penghambat lainnya yaitu pada pelaksanaan kegiatan SPP dalam kelompok terdapat konflik antar anggota yang disebabkan karena jumlah dana bergulir yang tidak sama. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh bagi penguatan kelembagaan kelompok SPP Nurul Iman, walaupun sebelumnya anggota telah menjalin hubungan kedekatan dalam pengajian namun pembentukan kelompok SPP ini merupakan hal yang baru dan membutuhkan perhatian yang lebih serius

dari pengurus untuk memberikan pemahaman terkait kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi konflik dalam kelompok.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor penghambat dari dalam kelompok SPP Nurul Iman, terdapat pula beberapa faktor penghambat dari luar kelompok yaitu, proses pendampingan yang tidak maksimal terhadap anggota kelompok SPP sepanjang pelaksanaan kegiatan SPP ini, walaupun dalam proses pelaksanaan kegiatan SPP ada kunjungan dari UPK ke kelompok SPP Nurul Iman tetapi hanya kepada pengurus.

Kurang maksimalnya pendampingan ini merupakan faktor penghambat yang cukup signifikan mempengaruhi kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman. Terjadinya konflik internal kelompok yang tidak terselesaikan, pemahaman anggota kelompok yang kurang komprehensif tentang kegiatan SPP, secara tidak langsung diakibatkan oleh kurangnya pendampingan. Pendampingan yang tidak dijalankan dengan baik pada akhirnya juga mempengaruhi pencapaian tujuan jangka menengah pada kegiatan SPP ini.

Berdasarkan gambaran faktor penghambat internal dan eksternal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun pada akhir kegiatan, kelompok SPP ini dinilai berhasil berdasarkan evaluasi berupa audit yang menilai pengembalian kelompok yang baik, dan berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat adanya perkembangan usaha anggota akan tetapi beberapa faktor penghambat di atas tentu saja mempengaruhi pencapaian tujuan jangka menengah khususnya tujuan yang ketiga yaitu, penguatan kelembagaan kelompok SPP Nurul Iman yang tidak berhasil.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kelompok SPP Nurul Iman di desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendanaan yang merupakan salah satu strategi pemberdayaan dalam kegiatan SPP pada kelompok SPP Nurul Iman yang berkaitan dengan tujuan pertama dapat dikatakan berjalan dengan baik dari proses pencairan dana dan pengembalian dana. Akan tetapi pada pelaksanaan verifikasi oleh tim verifikasi tidak berjalan sesuai ketentuan program. Selanjutnya penilaian terhadap hasil tujuan jangka menengah program sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat yaitu tujuan yang pertama, mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar dapat dinilai berhasil yang ditandai dengan meningkatnya hasil usaha anggota kelompok serta melalui kegiatan ini para anggota dapat memenuhi kebutuhan sosial dasar mereka.

Berkaitan dengan tujuan jangka menengah kedua dan ketiga, pada pelaksanaan kegiatan SPP selama kurun waktu 1 tahun pada tahun 2009, proses pendampingan yang dilakukan pendamping kepada kelompok SPP Nurul Iman tidak maksimal dilaksanakan

Selanjutnya penilaian terhadap hasil tujuan jangka menengah kedua yaitu, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha pada penelitian ini dinilai berhasil yang ditandai dengan pemenuhan kesempatan dan kemudahan anggota kelompok untuk mendapatkan dana untuk mengembangkan usaha demi meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Penilaian terhadap hasil tujuan jangka menengah ketiga yaitu, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

tujuan ini tidak tercapai karena kelompok SPP Nurul Iman tidak mengalami penguatan dalam kelembagaan dan peningkatan dalam pengelolaan simpan pinjam.

2. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan SPP yaitu faktor pendukung internal yang terdiri dari: semangat dari pengurus dan anggota yang pro aktif dalam pelaksanaan pengembalian dana setiap bulannya, semangat untuk berhasil karena sebagian besar anggota kelompok merupakan pendatang, hubungan kedekatan antar anggota sebagai sesama anggota kelompok pengajian Nurul Iman.

Faktor pendukung eksternal yaitu, persyaratan untuk mendapatkan dana dari kegiatan SPP sangat mudah, yaitu dengan menggunakan KTP atau dengan tanda tangan saja. Faktor geografis yaitu dekatnya jarak rumah tinggal antar anggota, jarak rumah tinggal anggota kelompok SPP Nurul Iman dengan kantor UPK dan rumah tinggal fasilitator kecamatan juga merupakan faktor pendukung lainnya.

Faktor pendukung ini secara langsung mempengaruhi pencapaian tujuan jangka menengah yang pertama yaitu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, dan mendukung pencapaian tujuan khusus yang kedua yaitu memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

Selain itu terdapat juga faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan SPP yang terdiri dari faktor internal antara lain pemahaman anggota kelompok yang kurang komprehensif tentang kegiatan SPP, jarang nya pertemuan kelompok, dan terdapat konflik antar anggota yang disebabkan karena jumlah dana pinjaman yang tidak sama. Sedangkan faktor penghambat eksternal yaitu, proses pendampingan yang tidak maksimal terhadap anggota kelompok SPP sepanjang pelaksanaan kegiatan SPP ini, walaupun dalam proses pelaksanaan kegiatan SPP ada kunjungan dari UPK ke kelompok SPP Nurul Iman tetapi hanya kepada pengurus.

Beberapa faktor penghambat di atas tentu saja mempengaruhi pencapaian tujuan jangka menengah khususnya tujuan yang ketiga yaitu, penguatan kelembagaan kelompok SPP Nurul Iman yang tidak berhasil.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran bagi perbaikan program ke depan yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Terkait dengan pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP maka perlu untuk mengoptimalkan proses pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan SPP, maka hal terpenting yang harus ditekankan adalah:
 - Perlunya **pemahaman akan tugas dan fungsi serta rasa memiliki terhadap kegiatan** oleh Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal, KPMD/K atau pihak-pihak yang terlibat didalam program/kegiatan.
 - Perlu adanya perbaikan dalam program dengan **menambahkan proses pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan** yang dapat dilakukan oleh fasilitator kabupaten, pemerintah kecamatan melalui PJOK, pemerintah desa, sehingga para pendamping dapat menjalankan tugas pendampingan kepada kelompok SPP dengan optimal.
 - Kemudian pada **tahapan verifikasi harus dilaksanakan secara serius dan sesuai dengan ketentuan program** sehingga tujuan akhir dari kegiatan ini dapat tercapai dengan tetap sasaran dan tepat guna yaitu kepada calon pemanfaat dari rumah tangga miskin.
 - Salah satu tujuan jangka menengah dari kegiatan SPP yaitu **penguatan terhadap kelembagaan perlu diperhatikan**. Hal ini sangat terkait erat dengan kelanjutan dari program PNPM Mandiri Perdesaan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Setiap **pelaku PNPM Mandiri Perdesaan seharusnya lebih menyadari akan tujuan akhir dari program ini**, seperti mata rantai yang

selalu terhubung antara satu dengan lainnya yang menggambarkan suatu kekuatan dan keberlanjutan program.

- Ke depannya perlu adanya perhatian khusus dari pembuat program khususnya kepada kegiatan non fisik salah satunya kegiatan SPP, **perlu adanya perbaikan dalam bentuk evaluasi yang menilai pencapaian tujuan jangka menengah/objective dan tujuan jangka penjang/goal pada kegiatan SPP ini.** Pencapaian tujuan umum dan khusus dari kegiatan SPP harusnya menjadi tujuan penting yang harus dicapai dalam kegiatan, bukan hanya pencapaian berupa pelaksanaan pengembalian modal dengan baik karena sebagai bagian dari program pemberdayaan diharapkan setelah kegiatan SPP berakhir, masyarakat dapat lebih mandiri dan berdaya dalam menggunakan semua potensi yang dimilikinya.
2. Terhadap berbagai **faktor pendukung harus dimanfaatkan secara baik** oleh para pelaku dalam kegiatan sehingga kualitas pemberdayaan terhadap kelompok penerima dana SPP benar-benar optimal. Selanjutnya terhadap **faktor-faktor penghambat perlu dibenahi, dengan cara memaksimalkan pelaksanaan pendampingan** untuk menghindari terjadinya konflik didalam kelompok serta memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh anggota.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alston, Margaret.,& Bowles, Wendy. (2003). *Research For Social Workers (An Introduction to Methods 2nd Edition)*. Australia: Allen & Unwin.
- Amartya, Sen. (1982). *Poverty and Famines: An Essay On Entitlement and Deprivation*. Oxford: Clarendon Press.
- Arikunto, Suharsimi. (1999). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan* (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksar.
- Bakhit, Izzedan., Von Ravensburg, Nicole Goler., Munkner, Hans H.,Walter, Victoria., & Walter, Thomas. (2001). *Menggempur akar-akar kemiskinan*. Jakarta: Yakoma PGI.
- Batubara, Marwan. (2008). *Skandal BLBI : Ramai-Ramai Merampok Negara*. Jakarta: Haekal Media Center.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis kebijakan publik* (edisi kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fink, Arlene., & Kosecoff, Jacqueline. (1988). *An evaluation primer. (7th printing)*. Beverly Hills London: Sage Publication.
- Friedlander, Walter A., & Apte, Robert Z. (1980). *Introduction to Social Welfare* (Fifth Edition). USA: Prentice-Hall, Inc.
- Hawe, Penelope, et.al. (1995). *Evaluating Health Promotion: A Health Worker's Guide*. Sidney: MacLennan and Petty Pty Limited.
- Hubeis, Aida Vitayala,S. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press
- Ife, J.W. (1995). *Community Development: creating community alternatives – vision analysis and practice*. Melbourne: Longman Australia Pty Ltd.
- _____ (2006). *Community Development- Community-based alternative in an age of globalisation* (Third Edition). Australia: Pearson Education Australia.
- Iskandar, Jusman dan Nitimihardjo, Carolina. (1990). *Pengantar Penelitian Pekerjaan Sosial*. Bandung: Kopma STKS.

- Midgley, James. (1995). *Social Development – The Development Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publications Ltd.
- Moleong, Lexy J. (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Neuman, Lawrence W. (2006). *Social Research Methods – Qualitative and Quantitative Approaches* (Sixth Edition). USA: Pearson Education.Inc.
- Noerdin, Erdiana., & Agustini,Erni., & Pakasi, Diana T., & Aripunami,Sita., & Hodijah, Siti Nurwati. (2006). *Potret Kemiskinan Perempuan*. Jakarta: Women Research Institute.
- Oakley, Peter., & Clayton, Andrew. (2001). *The Monitoring And Evaluation of Empowerment*. Oxford: Intrac.
- Patton, Michael Quinn. (1997). *Utilization-Focused Evaluation:The New Century Text*. United States of America: Sage Publications.
- Pietrzak,J., & Ramler,M., & Renner,T., & Ford,L., & and Gilbert,N. (1990). *Practical Program Evaluation: examples from child abuse prevention*. California: Sage Publication.
- Rossi, Peter H., & H.E. Freeman. (1982). *Evaluation: A Systematic Approach*. Beverly Hill,CA: Sage Publication.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Shaw, Ian F., & Greene, Jennifer C., & Mark, Melvin M. (2006). *The SAGE Handbook of Evaluation*. London: SAGE Publications Ltd.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua, Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Suharto, Edi. (2006). *Analisis Kebijakan Publik – Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik – Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Suhartono, Irwan. (2002). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

The Save The Children Fund. (2006). *Toolkits: A Practical Guide to Planning, Monitoring Evaluation and Impact Assessment*. London: The Save The Children Fund.

The World Bank. (2004). *International Program for Development Evaluation Training: Building Skills to Evaluate Development Intervention*. Netherlands: The World Bank Group Carleton University.

Peraturan Perundangan:

UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 - Keempat 2002).

Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Keputusan Mendagri no. 132 tahun 2003 tentang alokasi anggaran untuk pengarusutamaan gender

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

Jurnal dan Buletin:

Cahyono, Imam. "Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan." *Jurnal Perempuan* 43 – *Mengurai Kemiskinan, dimana Perempuan?*. 2005

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 – Akuntansi Dana Bergulir*. 2008

Krefting, L. Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Truthworthiness. Ontario: *Occupational Therapy Journal of Research* Vol.45 No.3. 1991

Sumber Internet:

Mutalima, Irene KB. "Microfinance and Gender Equality: Are We Getting There?." Christian Enterprise Trust of Zambia (CETZAM)
http://www.microcreditsummit.org/papers/Workshops/28_Mutalima.pdf

(diunggah pada Maret 2011)

Badan Pusat Statistik. "Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin, Garis kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) Menurut Provinsi"

http://www.bps.go.id/aboutus.php?tabel=1&id_subyek=23

(diunggah pada Desember 2010)

Sumber lain:

Kementerian Kesehatan RI. (2010). *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Satker PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Maluku. (2009). *Profil UPK Kecamatan Salahutu*. Ambon: Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku.

Tim Penyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. (2010). *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM-Mandiri. (2008). *Pedoman Umum PNPM Mandiri*. Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RI. (2009). *Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan 2009*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RI. (2009). *Penjelasan III Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan. PTO PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RI. (2009). *Penjelasan IV Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM*

Mandiri-Perdesaan. PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RI. (2009).

Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RI. (2009).

Penjelasan VI Penulisan Usulan dan Verifikasi. PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RI. (2009).

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir. PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



PEDOMAN WAWANCARA
Anggota kelompok SPP Nurul Iman

I. Tentang pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam pada kelompok SPP Nurul Iman dicermati dari proses pendampingan dan pendanaan yang dilakukan selama periode kegiatan tahun 2009.

A. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh KPMD/K selama pelaksanaan kegiatan SPP?

- Pada tahap musyawarah/ pertemuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan
 1. Apakah kader memotivasi anggota kelompok SPP untuk menghadiri pertemuan?
 2. Apakah Kader dapat memandu jalannya pertemuan dengan baik?
 3. Apakah Kader dapat memandu peserta dalam menyusun peta sosial dengan baik?
 4. Apakah Kader dapat menjelaskan PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik?
- Pada tahap pelaksanaan kegiatan SPP
 5. Bagaimana pendampingan yang dilakukan kader kepada anggota kelompok SPP dalam proses pencairan dana dan pengelolaan dana?
 6. Apakah kader menjalankan fungsinya sebagai narasumber yaitu dapat memberikan informasi tentang PNPM Mandiri perdesaan, kegiatan SPP dan yang terkait.
 7. Apakah kader menjalankan fungsinya sebagai pelatih jika diperlukan untuk melatih keterampilan tertentu pada anggota/kelompok SPP?
 8. Apakah kader menjalankan fungsinya sebagai mediator?
 9. Apakah kader menjalankan fungsinya sebagai penggerak?
 10. Bagaimana dengan kemampuan komunikasi kader?

B. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal selama pelaksanaan kegiatan SPP?

- a. Pada musyawarah dalam PNPM Mandiri Perdesaan
 11. Apakah Pendamping aktif terlibat membantu fasilitator dan kader mendampingi anggota kelompok SPP dalam pertemuan/musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan?
- b. Pada pelaksanaan kegiatan SPP
 12. Bagaimana pendampingan yang dilakukan Pendamping kepada anggota kelompok SPP dalam proses pencairan dana dan pengelolaan dana?
 13. Apakah pendamping menjalankan fungsinya sebagai narasumber yaitu dapat memberikan informasi tentang PNPM Mandiri perdesaan, kegiatan SPP dan yang terkait.
 14. Apakah pendamping menjalankan fungsinya sebagai pelatih jika diperlukan untuk melatih keterampilan tertentu pada anggota/kelompok SPP?
 15. Apakah pendamping menjalankan fungsinya sebagai mediator?
 16. Apakah pendamping menjalankan fungsinya sebagai penggerak?
 17. Bagaimana dengan kemampuan komunikasi pendamping?

- C. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan selama pelaksanaan kegiatan SPP?
- a. Pada tahap sosialisasi dan penyebarluasan informasi
 18. Apakah anggota mengetahui dan memahami penjelasan fasilitator tentang kondisi umum, kondisi sosial ekonomi dan masalah yang ada di lingkungannya?
 19. Apakah anggota memahami penjelasan fasilitator tentang PNPM Mandiri Perdesaan?
 - b. Fasilitasi dalam pertemuan masyarakat
 20. Apakah fasilitator dapat memandu jalannya pertemuan?
 21. Apakah fasilitator memotivasi peserta untuk mengemukakan pendapatnya?
 22. Apakah fasilitator dapat memandu masyarakat dalam mengambil keputusan?
 - c. Pelaksanaan kegiatan SPP
 23. Bagaimana pendampingan yang dilakukan fasilitator kepada anggota kelompok SPP dalam proses pencairan dana dan pengelolaan dana?
 24. Apakah fasilitator menjalankan fungsinya sebagai narasumber yaitu dapat memberikan informasi tentang PNPM Mandiri perdesaan, kegiatan SPP dan yang terkait.
 25. Apakah fasilitator menjalankan fungsinya sebagai pelatih jika diperlukan untuk melatih keterampilan tertentu pada anggota/kelompok SPP?
 26. Apakah fasilitator menjalankan fungsinya sebagai mediator?
 27. Apakah fasilitator menjalankan fungsinya sebagai penggerak?
 28. Bagaimana dengan kemampuan komunikasi fasilitator?

II. Tentang hasil sesuai tujuan jangka menengah dari kegiatan SPP yang dirasakan

- A. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
 1. Apakah pinjaman dana yang diterima dapat memenuhi kebutuhan modal usaha?
 2. Apakah pinjaman dana dapat memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan anak dan kesehatan keluarga?
- B. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
 3. Apakah anggota kelompok SPP mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam mendapatkan modal usaha dan mendapat kemudahan dalam administrasi untuk mengakses modal tersebut?
- C. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
 4. Apakah terjadi peningkatan dalam pelayanan simpan pinjam pada kelompok SPP Nurul Iman?
 5. Apakah kelompok SPP Nurul Iman mengalami penguatan dalam kelembagaan?

PEDOMAN WAWANCARA
Pendamping Lokal Kecamatan Salahutu

Pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal selama pelaksanaan kegiatan SPP pada tahapan:

- a. Pada musyawarah dalam PNPM Mandiri Perdesaan
 1. Bagaimana Pendamping aktif terlibat membantu fasilitator dan kader mendampingi anggota kelompok SPP dalam pertemuan/musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan?
 2. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses pendampingan pada tahapan musyawarah?
- b. Pada pelaksanaan kegiatan SPP
 3. Bagaimana pendampingan kepada anggota kelompok SPP dalam proses pencairan dana?
 4. Bagaimana pendampingan kepada anggota kelompok SPP dalam proses pengelolaan dana?
 5. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses pendampingan pada pelaksanaan kegiatan SPP?

PEDOMAN WAWANCARA
Fasilitator Kecamatan Salahutu

Pendampingan yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan selama pelaksanaan kegiatan SPP pada tahapan:

- a. Fasilitasi dalam pertemuan masyarakat
 1. Bagaimana fasilitator mendampingi anggota kelompok SPP dalam pertemuan/musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan?
 2. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses pendampingan pada tahapan musyawarah?
- b. Pelaksanaan kegiatan SPP
 3. Bagaimana pendampingan kepada anggota kelompok SPP dalam proses pencairan dana?
 4. Bagaimana pendampingan kepada anggota kelompok SPP dalam proses pengelolaan dana?
 5. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses pendampingan pada pelaksanaan kegiatan SPP?

PEDOMAN WAWANCARA
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Tulehu

1. Bagaimana pendapat tentang pelaksanaan kegiatan SPP khususnya pada kelompok SPP Nurul Iman?
2. Bagaimana pendapat tentang proses pengembalian dana oleh kelompok SPP Nurul Iman?
3. Bagaimana pendapat tentang partisipasi anggota kelompok SPP Nurul Iman dalam setiap pertemuan/ musyawarah yang dilaksanakan?
4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Tulehu?
5. Bagaimana pendapat tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan SPP?

PEDOMAN WAWANCARA
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Salahutu

1. Bagaimana pendapat tentang pelaksanaan kegiatan SPP khususnya pada kelompok SPP Nurul Iman?
2. Bagaimana pendapat tentang proses pengembalian dana oleh kelompok SPP Nurul Iman?
3. Bagaimana pendapat tentang partisipasi anggota kelompok SPP Nurul Iman dalam setiap pertemuan/ musyawarah yang dilaksanakan?
4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Tulehu?
5. Bagaimana pendapat tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan SPP?

PEDOMAN WAWANCARA
Aparat Pemerintahan

1. Bagaimana pendapat tentang pelaksanaan kegiatan SPP di desa Tulehu?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan yang dilakukan dalam program?
3. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program?
4. Bagaimana pendapat tentang faktor pendukung dan penghambat kegiatan SPP?
5. Apakah kegiatan SPP dirasakan telah signifikan mendukung pencapaian tujuan PNPM Mandiri perdesaan secara umum?

PEDOMAN WAWANCARA
Penanggungjawab Operasional Provinsi

1. Bagaimana pendapat tentang pelaksanaan kegiatan SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Maluku?
2. Apakah kegiatan SPP dirasakan telah signifikan mendukung pencapaian tujuan PNPM Mandiri perdesaan secara umum?
3. Bagaimana pendapat tentang faktor pendukung dan penghambat kegiatan SPP?
4. Bagaimana pendapat tentang pelaksanaan pemantauan dan supervisi yang selama ini dilaksanakan? Apakah telah menggambarkan dan mengefektifkan pelaksanaan program?

PEDOMAN WAWANCARA
Konsultan Provinsi

1. Bagaimana pendapat tentang pelaksanaan kegiatan SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Maluku?
2. Apakah kegiatan SPP dirasakan telah signifikan mendukung pencapaian tujuan PNPM Mandiri perdesaan secara umum?
3. Bagaimana pendapat tentang faktor pendukung dan penghambat kegiatan SPP?
4. Bagaimana pendapat tentang pelaksanaan pemantauan dan supervisi yang selama ini dilaksanakan? Apakah telah menggambarkan dan mengefektifkan pelaksanaan program?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Informasi tentang pelaksanaan pendampingan dalam kegiatan SPP, hambatan dan pencapaiannya.

No	Informan	Hasil Wawancara	
		Dalam Bahasa Melayu Ambon	Terjemahan dalam Bahasa Indonesia
1	2	3	4
1.	Ketua Kelompok SPP, FK, 56 tahun 8 Mei 2011	<p>Proses musyawarah di desa dan kecamatan SPP waktu 2009 itu yang dong tulis di papan data musyawarah desa itu dua dua kelompok itu dari dusun air panas satu itu jua dengan katong di sini satu dusun pohon mangga, waktu musyawarah desa yang dari aer panas tidak datang terus perwakilannya seng datang jadi a, jadi tinggal ibu dong di sini saja a, jadi waktu musyawarah tingkat kecamatan ibu dorang masyarakat tingkat desa lai tingkat kecamatan lai su seng ada persaingan a seng ada yang mau ganggu gugat lai. A, makanya hanya katong sandiri sa waktu tahun 2009.</p> <p>Pendampingan dalam kegiatan SPP Yang memberitahu ada pertemuan itu ibu HF (Fasilitator Kecamatan) lalu ketua, bendahara, sekretaris kadang kadang anggota satu dua orang mengikuti itukan ada akang pu musti rapat di tingkat desa, pertemuan di tingkat desa. Biar pertemuan (musyawarah) banyak, katong ni tarus tarus pigi saja. Malah di luar pertemuan itu selalu beta konsultasi deng ibu HF supaya minta akang pung administrasi itu penyusunan penyusunan kalo, yang seng mangarti tanya antua lai. Pigi tanya di antua pung rumah a, ibu HF bagus lai. Ibu HF layani katong bagus. La sampe dana kukur itu, samua...samua,e, anggota samua, hadir par saksikan Ibu HF (Fasilitator Kecamatan) hanya fasilitasi katong pertama katong maso saja kalo itu pertama tapi kalo su masyarakat desa su musyawarah itu langsung dia pung bendaharakan di pung ketuannya samua di desa katong berhubungan deng desa dan ketua UPK</p> <p>Pemahaman tentang kegiatan SPP katong pertama maso itukan katong belum talalu memahami ini prosedur pnpm ini to baru pertama setelah jalan jalan yang ke</p>	<p>Proses musyawarah di desa dan kecamatan Pada saat SPP 2009 itu, di papan data musyawarah desa ada 2 kelompok dari dusun Air Panas dan kami dari dusun Pohon Mangga. Akan tetapi, pada saat musyawarah desa, dusun Air Panas tidak datang sama halnya dengan perwakilannya. Jadi tinggal dusun kami saja. Jadi pada saat musyawarah desa tingkat kecamatan sudah tidak ada persaingan dan tidak ada yang dapat mengganggu gugat. Maka kelompok kami sendiri saja di tahun 2009 itu.</p> <p>Pendampingan dalam kegiatan SPP Yang memberitahu jika ada pertemuan itu ibu HF lalu ketua, bendahara, sekretaris terkadang juga satu atau dua anggota mengikuti rapat atau pertemuan di tingkat desa. Kami selalu datang walaupun pertemuan (musyawarah) banyak. Malah di luar pertemuan itu saya selalu berkonsultasi dengan ibu HF tentang penyusunan administrasi jika saya tidak mengerti. Saya sampai ke rumah ibu HF. Beliau melayani kami dengan baik. Bahkan sampai dana dicairkan, semua anggota hadir untuk mendapat penjelasan awal. Tapi jika sudah dalam musyawarah desa maka bendahara serta ketua kelompok akan berhubungan langsung dengan pihak desa dan ketua UPK.</p> <p>Pemahaman tentang kegiatan SPP Kami pertama kali masuk belum terlalu memahami prosedur PNPm ini karena baru pertama. Setelah berjalan, yang kedua kami sudah memahami perjanjian kontrak, persyaratan semuanya kami dapat dari ibu HF. Jika ada yang kurang kami mengerti, ibu HF akan memberikan hal-hal yang perlu dibaca. Tapi karena kami sudah orang tua kadang mau bekerja daripada hanya membaca saja. Jika ada kesulitan maka kami langsung bertanya kepada fasilitator</p>

	<p>dua ini katong su memahami akang sudah malah dia pung apa ini perjanjian kontrak dia pu persyaratan apa apa saja itu beta ambe dari ibu HF semua dari ibu HF semua.</p> <p>ada yang katong mangarti skrang lai kurang mangarti nanti memang ibu HF kasi lai akang pung itu e baca lai to tapi bagitu jua katong su orang tua kadang kadang labe banya bekerja bagitu daripada mo baca baca tarus. Kalau ada kesulitan langsung tanya ibu HF (FK) Penjelasan mengenai SPP itu ada yang kalo dikasih latih itu melalui musyawarah itu dikasih penjelasan tapi kalo diluar itu bisanya itu saya tanya kalo ada kendala yang kurang paham, saya datang ke rumah ibu HF dan tanya langsung ke ibu HF (FK). kan katong seng bisa tanya di muka forum banya lai to kan su waktu lai kalo su rapat rapat talalu lama apalai menyangkut deng fisik ibu menyangkut deng fisik itu katong bosan katong buang buang waktu. Di musyawarah ada pembahasan sedikit mengenai SPP tapi menyangkut administrasi seng seng bahas. setelah uang katong su dapa baru katong biking pendekatan par tanya tanya apa yang katong laporan laporan apa apa bagitu.</p> <p>Proses monitoring Seng ada di katong kelompok mangkali kelompok lain itu memang dong turun (untuk monitoring) karna kelompok lain dong tagih. Sedangkan katong tiap bulan antar langsung ke bendahara jadi katong seng ada masalah. Bahkan tim verifikasi tu sampe bilang ibu katong seng perlu turun lapangan lai ibu dua ni (ketua dan bendahara kelompok SPP Nurul Iman) katong su percaya.</p> <p>Masalah dalam kelompok Ada salah satu anggota yang oleh tim verifikasi, dong taruh dia dua juta. Tapi karna masukan dari anggota yang lain, bahwa anggota ini juga memiliki tunggakan pinjaman di tempat lain maka katong (pengurus) pending dia, kasih dia satu juta. Baru langkah awal. Katong kasih dia satu juta, katong, lia dolo to dia pung ini. Jang sampe datang bagini susah lai, lalu dia pi lapor ke kepala dusun dan tim verifikasi. Kemudian katong pengurus</p>	<p>kecamatan yaitu Ibu HF Penjelasan mengenai SPP itu akan diperoleh di musyawarah, tapi jika ada kendala yang kurang dipahami maka saya saya datang ke rumah ibu HF dan tanya langsung kepada beliau. Kami jarang bertanya di forum rapat karena keterbatasan waktu dan jika rapat terlalu lama maka jika berkaitan dengan kelelahan fisik maka kami juga bosan dan menganggap itu membuang waktu. Di musyawarah ada pembahasan sedikit mengenai SPP tapi menyangkut administrasi tidak dibahas. setelah uang sudah dicairkan dan kami peroleh maka kami melakukan pendekatan untuk menanyakan mengenai penyusunan laporan.</p> <p>Proses monitoring Tidak ada di kelompok kami, mungkin di kelompok lain dilaksanakan (monitoring) karena kelompok lain mendapat tagihan. Sedangkan kami tiap bulan kami antar langsung ke bendahara jadi kami tidak ada masalah. Bahkan tim verifikasi sampai mengatakan bahwa ibu kami tidak perlu turun lapangan lagi karena kedua ibu ini (ketua dan bendahara kelompok SPP Nurul Iman) sudah kami percayai.</p> <p>Masalah dalam kelompok Ada salah satu anggota yang oleh tim verifikasi, diberikan modal sebanyak dua juta rupiah. Tapi dikarenakan masukan dari anggota yang lain, bahwa anggota ini juga memiliki tunggakan pinjaman di tempat lain maka kita (pengurus) menunda pinjaman kepada dia, dan hanya memberikan satu juta sebagai langkah awal. Kita beri dia satu juta rupiah, dan lihat perkembangannya. Jangan sampai tambah sulit. Lalu dia (anggota tersebut) melapor kepada kepala dusun dan tim verifikasi. Kemudian kita pengurus laporkan ke TPK di desa, menurut TPK, Kepala dusun itu hanya perlu mengetahui. Sedangkan yang mengolah dana ini kami semua. Susah senangnya kami semua yang akan tanggung. Dari situlah, kalo kami anggap tidak dapat diberikan pinjaman dalam jumlah besar, maka kami tidak perlu berikan sejumlah itu.</p>
--	---	--

		laporkan ke TPK di desa, menurut TPK, Kepala dusun itu hanya mengetahui. Sedangkan yang mengolah dana ini ibu dong. Susah senangnya ni ibu dong rasa. Ya, disitu dong kalo ibu anggap ada anggota yang ibu seng yakin par kasih dong banya, jang ibu dong kasi dong banya.	
2.	Bendahara kelompok SPP, DH, 47 tahun 8 Mei 2010	<p>Proses awal kegiatan SPP Awal mulanya katong dipanggil mendadak ikuti rapat di kantor desa, ketemu deng tim verifikasi, ada yang dari kecamatan sendiri, ada juga dari Maluku Tengah, abis itu lagi dipanggil ke camat itu untuk kan disitu ada badan-badan ini lai apa iya gabungan badan tim verifikasi dari camat dengan desa, pokoknya kecamatanlah. Berikan arahan arahan seperti apa, kan waktu itu di dananya memang ada sekitar 50 juta tapi yang diperuntukan ada 1 kelompok saja untuk SPP ya, lalu katong biking rencana pembagian dana untuk anggota kelompok. pada saat itu katong sudah yang sudah ada beberapa pencalonan apa yang daftar, tapi katong yang diloloskan kamuka karna mungkin dilihat dari kelengkapan administarsi dan memang juga ada dilihat dari katong pung koperasi memang ada.</p> <p>Pendampingan dalam kegiatan SPP Pada musyawarah-musyawarah dalam tahapan PNPM MP, katong bisa memahami. kan banyak yang dijelaskan itu, diperuntukan untuk siapa, untuk yang ini nih, kelompok yang kaya katong. SPP ini yang untuk kelompok perempuan supaya mereka lebih maju bukan dalam arti bantu sekedar itu sa, tidak dilihat lagi, jadi setelah dikucurkan dananya mereka lihat ini, dia bilang kita harus ada tim itu pengawas dia di lapangan bahwa batul kadang dia putar dia pung modal ini, jang cuma sekedar dia ambil mungkin dia tutup dia pung utang, hah tiap bulan baru dia cari akal dia tutup. Hah itu tuh katong sudah diarahkan to untuk ibu ibu rumah tangga atau apa e untuk ibu ibu bagitu ada kesibukan.</p> <p>selama dari mulai awal sampe pencairan dana, sampe pengembalian, pokoknya selama 1 tahun itu secara tidak langsung itu memang dia (pihak PNPM MP) tidak</p>	<p>Proses awal kegiatan SPP Awal mulanya kita dipanggil mendadak ikuti rapat di kantor desa, ketemu dengan tim verifikasi. Ada yang dari pihak kecamatan sendiri, ada juga dari pihak kabupaten Maluku Tengah. Kemudian dipanggil lagi ke kecamatan. Disana ada badan apa yang gabungan dalam tim verifikasi dari kecamatan dengan desa, pokoknya kecamatanlah. Mereka memberikan arahan tentang dana yang pada saat itu memang ada sekitar 50 juta rupiah tapi yang diperuntukan bagi 1 kelompok SPP saja. Kemudian kami membuat rencana pembagian dana tersebut bagi anggota kelompok. Pada saat itu, kita sudah yang sudah ada beberapa calon yang daftar, tapi kami yang diloloskan duluan karena mungkin dilihat dari kelengkapan administrasi dan memang juga dilihat dari koperasi kami yang memang ada.</p> <p>Pendampingan dalam kegiatan SPP Pada musyawarah-musyawarah dalam tahapan PNPM MP, kami bisa memahami. Banyak yang dijelaskan, diperuntukan untuk kelompok seperti kami. SPP diperuntukan bagi kelompok perempuan agar mereka lebih maju bukan dalam arti membantu saja dan kemudian tidak diberi perhatian lagi. Tapi setelah dana dikucurkan, tim pengawas akan memantau dilapangan untuk mengetahui bahwa pinjaman ini betul dia pakai untuk modal usaha atau diambil sekedar untuk menutup hutang lalu setiap bulan akan mencari cara untuk menutupinya. Jadi kami sudah diarahkan sehingga sebagai ibu rumah tangga pun kami ada kesibukan (usaha).</p> <p>Selama dari mulai awal hingga pencairan dana, serta pengembalian, intinya selama 1 tahun itu secara tidak langsung itu memang beliau (pihak PNPM MP) tidak</p>

	<p>meninjau tapi sering-sering katong ini ada komunikasi tapi memang tidak datang khusus untuk arahan tapi kalo katong pi, maksudnya katong kan dekat saja di dekat kantor camat tempat ini pesantren bulanan itu langsung dikasih arahan disitu nanti sebagai katong pengurus katong harus sampaikan akang ke anggota.</p> <p>Masalah yang dialami dalam kelompok Kan su sepakat tanggal 5 datang sini untuk setor pinjaman, lalu beta antar setor ke bendahara UPK, pernah ada 2 orang, saya musti kunjungi mereka, lalu kalo kadang-kadang orangnya lagi stres, bahasa seng enak, beta anggap itu biasa saja karena memang ini sudah tugas beta sebagai pengurus, apapun resikonya, tanggung jawab di katong jadi katong tegas tapi dalam hal ini tidak harus paksa diambil, yang walaupun mereka itu, maksudnya ibu ibu itu su pada dewasa, katong ambil dia, maksudnya masuk dengan bujukan bujukan ini suda nah pada akhirnya mereka sadar bahwa oh iyo yang beta lakukan bulan lalu tuh salah. Akhirnya ada itu yang dia seng tau dia mau maki beta. akhirnya beta bilang ini ibu YI tolong sampaikan akang di mama ini. Mama IL bahwa rasanya beta, kayak tu enak, beta datang, antua ini tu tau dia, entah bilang par beta atau tu tau kesalnya karna mungkin ada dari pihak lain juga datang menagih, katong tu tau. Lalu mama ini kasi tau dia, mama ini memang batul beta kesal, lah datang minta maaf di ibu, ibu beta minta maaf jua kemarin tuh kayaknya beta stres di ana-ana, lah ibu pas datang lah sudah akhirnya katong klirkan masalah, tuh ada masalah yang penting tiap bulan depan jang bagini bagini lai, kalo beta nih orangnya betul beta tegas tapi beta juga ini kan manusia juga pung perasaan tuh artinya sudah apa e dana itu dibagi bae bae, sudah ada perjanjian bahwa tidak ada pake paksaan, tidak ada yang tage tage karena kebijakan beta pikir dia lapor dia pung diri bahwa ibu beta sibuk biking nasi kuning nih cape cape, yang sudah abis ini sudah ok. Kalo begitu kan beta nih orang yang tukang bajalang, lah sudah beta maen dengan motor lah betasinggah saja ambel, lah sudah katong</p>	<p>meninjau. Tapi kami sering berkomunikasi tapi memang beliau tidak datang khusus untuk memberi arahan. Namun jika kami pergi karena dekat dengan kantor kecamatan karena tempat ini menjadi lokasi pesantren bulanan sehingga kami mendapat arahan disitu. Sebagai pengurus kami kemudian menyampaikan ke anggota.</p> <p>Masalah yang dialami dalam kelompok Sudah disepakati bahwa setiap tanggal 5 bagi anggota untuk setor pinjaman. Dan saya kemudian langsung menyetornya ke bendahara UPK. Pernah ada anggota yang terlambat menyetor dan harus saya kunjungi. Kadang ketika orangnya sedang stres/banyak beban pikiran jadinya agak emosi, ucapannya tidak enak. Itu sudah saya anggap biasa karena memang itu sudah tugas saya sebagai pengurus apapun resikonya. Saya bertanggung jawab sehingga saya harus tegas tapi dalam hal ini tidak akan saya pakskan. Karena ibu-ibu itu adalah orang dewasa, jadi saya membujuk dengan halus sehingga mereka sadar bahwa bulan lalu itu mereka sudah melakukan kesalahan dengan tidak menyetor. Ada juga ibu yang memaki saya. Jadi saya laporkan ke YI tentang ibu IL bahwa saya merasa tidak enak ketika datang beliau mungkin sedang kesal ada ada pihak lain yang datang menagih juga. Kami tahu hal itu. Lalu ibu YI memberitahu beliau kalo kemarin saya sangat kesal. Ibu IL kemudian meminta maaf kepada saya dan menjelaskan bahwa kemarin beliau sedang stress tentang anak-anaknya. Lalu kami menyelesaikan masalahnya. Saya jelaskan bahwa yang penting tiap bulan depan, penagihannya jangan seperti ini lagi. Saya ini orangnya tegas tetapi saya juga manusia yang punya perasaan. Saya ingin agar dana yang sudah dibagi dengan baik ini dikembalikan dengan baik, dan sebelumnya di kelompok sudah ada perjanjian bahwa tidak ada paksaan (penagihan). Saya pikir beliau akan memberitahu bahwa beliau capek membuat nasi kuning sehingga saya tidak masalah. Saya ini kan suka jalan(menagih) kadang dengan motor lalu saya sering singgah ke beliau dan saya</p>
--	---	--

		<p>sepakat bagitu jadi itu beta termasuk istimewa dia tapi ternyata dia bikin masalah deng beta. Tapi itu beta anggap itu suatu e ini yang penting masih bisa diselesaikan. Dari katong yang 21 orang itu, itu 1, 2 itu seng yang laen tu alhamdulillah.</p> <p>Penanganan konflik kalo katong masih bisa, beta sendiri kalo masih bisa atasi kan katong pung pengajian, sering sering hampir tiap malam pi pengajian kalo tu ada halangan, ah disitu katong kayak konflik dalam hal gini gini hah sudah, katong selesaikan masih bisa selesaikan akang, jadi dong mereka masih dengar toh jadi kalo memangnya beta sebagai bendahara juga arahkan belum mapan jadi beta bilang ibu FK, ibu FK turun bantu do, lalu liat katong pung pengajian bagaimana bagaimana, sudah antua turun ada kasih ini la sudah, la su selesaikan, tapi selama ini balom ada talalu yang harus dari ini.</p>	<p>sepakat mengerti keadaan beliau dan saya sering istimewa. Tapi ternyata beliau membuat masalah dengan saya. Tapi sudahlah, yang penting masalah ini sudah selesai. dari kami 21 orang hanya satu atau dua orang saja seperti itu. Yang lain alhamdulillah tidak.</p> <p>Penanganan konflik Kalo kami bisa. Jika ada masalah antar anggota, saya sendiri masih bisa atasi di dalam pengajian. Karena pengajian sering tiap malam, maka jika terjadi konflik kami masih bisa menyelesaikannya saat itu. Jadi jika saya sebagai bendahara mengarahkan tapi belum baik maka saya akan beritahu ibu ketua untuk turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi selama ini belum ada masalah yang terlalu sulit.</p>
3.	<p>Sekretaris Kelompok SPP UW, 53 tahun 9 Mei 2011</p>	<p>Komunikasi dengan fasilitator/UPK Jika ada kesulitan dalam administrasi, saya dan bendahara tidak pernah menghubungi UPK, kami sendiri saja berusaha karena sebelumnya sudah punya ketrampilan dalam organisasi Wanita Islam. Biasanya yang menghubungi Fasilitator itu ketua, setelah itu baru ibu ketua menyampaikan pada kami.</p>	<p>Komunikasi dengan fasilitator/UPK Jika ada kesulitan dalam administrasi, saya dan bendahara tidak pernah menghubungi UPK, kami sendiri saja berusaha karena sebelumnya sudah punya ketrampilan dalam organisasi Wanita Islam. Biasanya yang menghubungi Fasilitator itu ketua, setelah itu baru ibu ketua menyampaikan pada kami.</p>
4.	<p>Anggota kelompok SPP WJ, 32 tahun</p>	<p>Pertemuan-pertemuan PNPM Rapat pertama kelompok dengan ibu HF (fasilitator kecamatan) saya tidak ikut, cuma pengurus saja yang ikut, nanti pas uangnya sudah turun baru kami semua anggota ikut. Waktu pertemuan pertama di kecamatan saya tidak ikut, katanya kumpul di kantor camat. Pertemuan kedua saya ikut, di kantor camat juga. Waktu itu kami ditanya-tanya di dalam ruangan, ambil modal untuk usaha apa gitu. Ada sekitar 40 orang yang datang, dari kelompok yang lain juga, yang berbicara waktu itu pegawai dari kecamatan, saya lupa namanya. Dalam pertemuan itu sebenarnya saya tidak terlalu paham materinya, habisnya mereka cuma menjelaskan secara umum tentang SPP, pokoknya itu untuk ibu-ibu</p>	<p>Pertemuan-pertemuan PNPM Rapat pertama kelompok dengan ibu HF (fasilitator kecamatan) saya tidak ikut, cuma pengurus saja yang ikut, nanti setelah uangnya sudah dicairkan kami semua anggota ikut rapat. Waktu pertemuan pertama di kecamatan saya tidak ikut, katanya kumpul di kantor camat. Pertemuan kedua saya ikut, di kantor camat juga. Waktu itu kami ditanyakan di dalam ruangan, ambil modal ini untuk usaha apa. Ada sekitar 40 orang yang datang, dari kelompok yang lain juga, yang berbicara waktu itu pegawai dari kecamatan, saya lupa namanya. Dalam pertemuan itu sebenarnya saya tidak terlalu paham materinya, karena mereka cuma menjelaskan secara umum tentang SPP, pokoknya itu untuk ibu-ibu</p>

		<p>dan kalau dikembalikan bagus nantinya bisa diusulkan lagi gitu.</p> <p>Setelah di kelompok baru saya tahu bunga uangnya sekian, harus kembali sekian.</p> <p>Konflik dalam kelompok</p> <p>Memang ada konflik waktu awal, karena ada anggota yang dapat sedikit dari yang lain, tapi katong pi tanya ke pengurus lalu itu seng biking dorang keluar dari kelompok.</p> <p>Pendampingan oleh pihak PNPM MP</p> <p>Selama ini belum pernah ada kunjungan untuk lihat usaha saya dari orang PNPM atau desa.</p>	<p>dan kalau dikembalikan dengan lancar nantinya bisa diusulkan lagi untuk berikutnya.</p> <p>Setelah di kelompok baru saya tahu bunga uangnya sekian, harus kembali sekian.</p> <p>Konflik dalam kelompok</p> <p>Memang ada konflik waktu di awal, karena ada anggota yang mendapat sedikit dana dibandingkan yang lain, tapi kami tanyakan kepada pengurus dan diberi penjelasan sehingga tidak membuat anggota tersebut keluar dari kelompok.</p> <p>Pendampingan oleh pihak PNPM MP</p> <p>Selama ini belum pernah ada kunjungan dari pihak PNPM atau pihak desa untuk melihat usaha saya.</p>
5.	<p>Anggota Kelompok SPP YI, 38 tahun</p>	<p>Proses awal pertemuan PNPM</p> <p>waktu itu ada info dari kepala dusun, katong penggajian itu ada dari kantor desa di bawah kan datang usul par katong di penggajian bahwa mau adakan rapat dolo par mau bentuk ini to, kelompok ini, adakan rapat dolo, termasuk dengan ibu HF dan pak Baim. Lalu disitu katong bakumpul di kapala dusun pung rumah, bakumpul di kapala dusun pung rumah lalu disitu ibu HF kasih pengarahan par katong ibu-ibu deng bapak-bapak disitu. Lalu ibu HF tanya bagaimana dengan ibu-ibu dong pung pendapat, lalu beta ni langsung, beta sandiri yang bicara waktu itu ibu-ibu lain seng ada yang mau bicara. Beta bilang, Ibu saya mau bicara dulu, maksudnya kita ini pedagang kecil-kecil, apa bisa kalo kita minta dana saja buat kita modal saja. Lalu ibu HF angkat jempol, bagus ibu, ini yang kita cari yang bagini. Bilang bagitu to. Beta bilang iya ibu kasian katong ini badagang kacil-kacil katong pung anak-anak kan sudah mau kuliah baru katong kan kasian pung penghasilan ada kalanya dapat ada kalanya seng, kalo bisa katong ni perlu modal saja dari ibu dong tambah katong pung modal sadiki lai, kalo mau liat skarang ini katong pung kondisi jua seng sama deng orang, langsung ibu HF bilang, ibu punya permintaan nanti kita bantu ibu punya permintaan untuk SPP. Disitu lansung ibu-ibu yang lain dong setuju samua, lalu dong tanya jadi ibu dong disini ibu ibu dong pung kegiatan sehari-</p>	<p>Proses awal pertemuan PNPM</p> <p>Waktu itu ada informasi dari kepala dusun, pengajian kami mendapat usul dari kantor desa untuk membuat rapat dalam rangka pembentukan kelompok ini, termasuk didalamnya ibu FH. Lalu kami berkumpul di rumah kepala dusun, kemudian ibu FH memberikan pengarahan kepada para bapak dan ibu disana. Ibu FH meminta pendapat kepada kami lalu saya sendiri yang bicara karena ibu-ibu yang lain tidak mau bicara. Lalu saya jelaskan bahwa kami adalah pedagang kecil. Apakah kami dimungkinkan untuk mendapat dana sebagai modal usaha. Lalu ibu HF memberikan jempol dan mengatakan bagus sekali. Inilah usul yang mereka cari. Saya bilang bahwa kami ini pedagang kecil dan anak-anak kami akan kuliah sementara penghasilan kami ada kalanya ada dan adapula yang tidak. Kalo bisa kami perlu modal sedikit dari ibu karena kondisi kami sendiri berbeda dengan orang lain. Kemudian ibu HF menyetujui permintaan kami untuk SPP dan langsung saja disambut dengan kesepakatan setuju dari ibu-ibu yang lain. Lalu ibu HF bertanya tentang kegiatan sehari-hari kami, sekiranya ada kelompok bentukan. Lalu saya menjawab kalau disini kami kelompok Wanita Islam, saya lupa memberitahu tentang Majelis Nurul Iman. Kemudian seorang teman saya mengatakan bahwa kalau Wanita Islam terlalu luas, bukan hanya di RT 1 ini saja.</p>

	<p>hari tu apa maksudnya macam ada bentuk apa ka? Langsung beta sendiri bilang bu kalo macam kegiatan katong disini tu katong pung wanita islam beta seng inga majelis Nurul Iman ini beta sendiri bilang wanita islam. Lalu abis bilang yang teman satu bilang kalo se bilang wanita islam itu akang luas karna wanita islam ni samua bukan hanya katong di RT 1 sini saja bukan, iyo lai memang batul. Lalu beta bilang ibu bisa ganti ka seng beta minta usul minta ganti ke katong pung penggajian Nurul Iman barang itu RT 1 punya. Waktu itu katong rapat itu, ibu Haji Dar dong seng ada, ibu FK seng ada dong waktu itu masih sekolah waktu itu masih jam 9 pagi. Disitu ibu HF tanya ibu disini ibu dong pung kelompok pengajian yang ketua sapa, bendahara sapa. Jadi beta jujur-jujur lagi, biar pegawai pun beta jujur-jujur saja beta bilang katong pung ketua Ibu FK, sementara katong bendahara Ibu DH. Akhirnya katong dapat pinjaman dari ibu hesty itu, la adakan rapat di Tulehu, beta su pi rapat dengan ibu FK, beta, katong jaga mewakili dibawah to, satu kali katong rapat dengan kapala dusun. Waktu itu banyak dari sini, katong banyak rapat, setiap kelompok setiap RT dong rapat to, jadi waktu itu, usulan dana itu ada 2 kelompok, dari katong disini kelompok pohon mangga deng di air panas. Waktu katong rapat di kapala desa di kantor desa dari air panas tu seng ada seng hadir, disitu dong nyatakan air panas seng dapa cuma katong disini.</p> <p>Pemahaman tentang kegiatan SPP Memang bicara talalu banyak, mengenai PNPM itu masalah katong pung dana bergulir ini dengan ada kan banyak to. deng ini macam kaya dong di Mamokeng ini, dong kan seng minta dana bergulir. Jadi SPP penjelasan sedikit saja, beta kurang perhatikan juga.</p> <p>Proses monitoring Waktu dana su cair ada yang datang kontrol bagitu, dari ibu HF dong pung orang-orang to. Langsung di Ketua, maksudnya waktu itu kan rencananya katong mau bikin katong pung koperasi. Bentuk katong pung koperasi supaya kalo dari kecamatan turun saksikan katong pung pengambilan kelompok itu, ada</p>	<p>Lalu kami mengusulkan kepada ibu HF agar kiranya diganti dengan pengajian Nurul Iman RT 1. Akhirnya kami mendapat pinjaman dari HF. Lalu diadakan rapat di Tulehu yang dihadiri oleh FK dan saya mewakili teman-teman, juga rapat dengan kepala dusun. Waktu itu banyak yang ikut rapat dari sini, ada juga setiap kelompok dari setiap RT ikut rapat juga. Jadi waktu itu ada usulan dana bagi dua kelompok. Kami kelompok pohon mangga dan kelompok air panas. Karena kelompok dari air panas tidak hadir waktu kami rapat dengan kepala desa, maka mereka tidak mendapat bantuan pinjaman.</p> <p>Pemahaman tentang kegiatan SPP Memang yang dijelaskan dalam pertemuan banyak. Mengenai PNPM dan masalah dana bergulir kami. Ini seperti di Mamokeng yang mana mereka tidak minta dana SPP. Jadi SPP penjelasannya sedikit saja, saya juga kurang memperhatikan.</p> <p>Proses monitoring Waktu dana sudah dicairkan, ada yang datang untuk kontrol dari staf ibu HF langsung di ketua. Maksudnya waktu itu kan rencana awal kami hendak membuat koperasi. Sehingga jika kecamatan turun meninjau tentang pengambilan dana untuk kelompok itu, maka ada bukti koperasi. Tapi karena tidak ada tempat, maka kami tidak jadi buat.</p> <p>Proses Pendampingan Pernah sekali saya memikirkan tentang uang yang mereka kasih, saya kurang mengerti tentang pemotongan 50 ribu itu. Tentang tanggung renteng. Lalu saya pergi ke rumah bendahara lalu bertanya.</p> <p>Konflik dalam kelompok Waktu pembagian memang kebanyakan ibu-ibu yang mengeluh karena tidak merata. Ada yang terima 1 juta, ada 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Pembagian tersebut yang mengatur adalah ketua dan bendahara. Memang anggota pernah mengeluhkan tapi menurut ketua, jumlah pinjaman ketua, bendahara dan sekretaris tidak bisa sama dengan anggota, ibu-ibu yang lain hanya diam saja.</p>
--	--	--

		<p>akang pung bukti koperasi. Tapi kan seng ada tempat, kalo seng katong su bikin.</p> <p>Proses Pendampingan ada satu kali beta pikiran masalah katong pung uang yang dong kasih itu, yang pemotongan beta kurang mangarti dengan hitungan 50 itu. Tanggung renteng itu. jadi beta pernah pi di bendahara la tanya to la oo</p> <p>Konflik dalam kelompok Waktu pembagian itu memang kebanyakan banyak ibu-ibu yang mengeluh karena itu pembagian seng merata. Ada yang kasih 1 juta, ada 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Itu pembagian itu yang atur bendahara deng ketua sendiri. Memang dong pernah usul to, tapi karena ketua bilang ketua, bendahara, deng sekretaris dapa seng bisa sama deng anggota. Tapi di situ ibu-ibu diam lai.</p>	
6.	<p>Anggota kelompok SPP HL, 80 tahun</p>	<p>Informasi awal tentang pinjaman melalui kegiatan SPP Dari ibu YI, kan saya tidak bisa bajalang, jadi dong datang bilang bagaimana ose mau iko ka seng, kan pertama kan saya pinjam orang pung uang Rp.200.000,- dong ini su datang, bagaimana ose mau ikut kelompok kaseng. Ya kalau kamong mau beta ya beta ikut, kalau seng mau ya katong mau biking bagaimana. La beta bilang ya ikut jua. Lama kelamaan sudah keluar, sudah dibagi uang la dong kasih Rp.500.000, beta bilang eh Rp.500.000, itu saya mau beli apa. Lalu dong su tambah Rp.1.000.000,-</p> <p>Pendampingan Belum pernah ee ada orang PNPM atau desa kamari parliat toko ni, seng ada. Beta ini kan seng bisa bajalang jadi kalau ada apa-apa dia (ibu YI) ini yang tanggung jawab, pangkat anak ini. Itu hari tu dong kasih bilang jang kasih banya, jang kasih banya nanti su tua itu meninggal sapa yang tanggung jawab.</p>	<p>Informasi awal tentang pinjaman melalui kegiatan SPP Dari ibu YI, kan saya tidak bisa berjalan. Jadi mereka datang dan tanya apa saya mau ikut. Sebelumnya saya ada pinjam uang dari orang sebesar Rp.200.000,- Lalu mereka tanya, saya bilang, kalau mereka bersedia mengikutkan saya, ya saya ikut, kalau tidak ya saya bisa buat apa. Tapi saya bilang saya mau ikut. Lama kelamaan setelah dana keluar dan dibagi, mereka kasih saya Rp.500.000, lalu saya bilang uang itu untuk beli apa. Lalu mereka menambahkannya menjadi Rp.1.000.000,-</p> <p>Pendampingan Belum pernah ada orang PNPM atau petugas desa datang untuk lihat toko. Saya ini tidak bisa jalan, jadi kalau terjadi apa-apa dia (ibu YI) yang bertanggung jawab, karena sudah seperti anak bagi saya. Hari itu, mereka bilang jangan kasih banyak, karena saya sudah tua, jika saya meninggal maka siapa yang bertanggung jawab.</p>
7.	<p>Pendamping Lokal IK, 29 tahun</p>	<p>Pendampingan Palingan saya itu skali-skali saya turun juga, secara keseluruhan kan belum begitu artinya kalau untuk turun ke desa-desa,</p>	<p>Pendampingan Sesekali saya ikut meninjau juga dengan FK, dan terkadang dengan UPK, maksudnya untuk melihat perkembangan</p>

		<p>maksudnya mau lihat perkembangan pinjaman, Saya turun ia kadang dengan FK, kadang-kadang dengan UPK jadi artinya begitu. Tapi banyak kan saya lakukan dengan FK dan FT yang itu tugas saya kan mendampingi mereka.</p> <p>Mendampingi mereka itu tugas saya, mengecek, tapi kalau dengan yang FT itu tugas saya yaitu mengawasi kalau kegiatan fisik saya mengawasi itu apa bahan-bahan yang dikirim dari supplier saya awasi dengan baik, trus kalau dengan FK ini kan biasa kalau ada MDMB di desa saya turun tapi saya cuma sebagai moderator.</p>	<p>pinjaman, tetapi lebih peninjauan dilakukan bersama FK dan FT , karena itu adalah tugas saya.</p> <p>Mendampingi mereka itu tugas saya, mengecek, tapi kalau dengan yang FT itu tugas saya yaitu mengawasi kegiatan fisik yaitu mengawasi bahan-bahan yang dikirim dari supplier, selanjutnya dengan FK, jika ada MDMB di desa saya turun tapi saya cuma sebagai moderator.</p>
8.	<p>Fasilitator Kecamatan HF, 37 tahun</p>	<p>Proses awal masuknya Kelompok SPP Nurul Iman dalam PNPM</p> <p>Jadi prosesnya itu dari dusun jadi kelompok Nurul iman itu kan dia berawal dari proses pengambilan gagasan di tingkat dusun kebetulan di dusun Nangka situ, jadi kemudian prosesnya karna KPMDnya juga baru jadi kita juga membantu untuk mendampingi dengan fasilitator pada saat itu Ketua UPK jadi katong juga hadir memberikan penjelasan pada saat KPMD melakukan pengambilan gagasan dengan kelompok ibu-ibu yang notabene juga ada dari simpan pinjam Nurul iman itu. Jadi bagaimana prosesnya mereka mengusulkan ya membentuk sesuai persyaratan-persyaratan yang dari pogram, pembentukan dari kelompok, kemudian mengisi formulir dan sebagainya sampai pembuatan proposal.</p> <p>Pendampingan awal (administrasi untuk pencairan)</p> <p>Jadi eee kita sudah memberikan fasilitasi di desa sudah ada KPMD jadi ada format-format yang memang sudah disiapkan dari program ya jadi kita juga mensosialisasikan tentang format-format itu. Ya memang tidak memberatkan jadi KPMD itulah yang merupakan perpanjangan tangan dari katong jadi kelompok yang berminat itu berurusan dengan KPMD, KPMD yang menampung kelompok punya nama-nama dan sebagainya hingga membuat proposal jadi dengan formulir-formulir itu mereka mengisi masing-masing orang mengisi sesuai dengan kebutuhan permintaan dan</p>	<p>Proses awal masuknya Kelompok SPP Nurul Iman dalam PNPM</p> <p>Jadi prosesnya itu dari dusun, jadi kelompok Nurul Iman itu kan dia berawal dari proses pengambilan gagasan di tingkat dusun kebetulan di dusun Mangga, jadi karena KPMDnya juga masih baru jadi kita juga membantu untuk mendampingi, dengan ketua UPK juga hadir memberikan penjelasan pada saat KPMD melakukan pengambilan gagasan dengan kelompok ibu-ibu yang notabene juga ada dari Pengajian Nurul iman itu. Jadi bagaimana prosesnya mereka mengusulkan ya membentuk sesuai persyaratan-persyaratan yang dari pogram, pembentukan dari kelompok, kemudian mengisi formulir dan sebagainya sampai pembuatan proposal. Kemudian menerima dana.</p> <p>Pendampingan awal (administrasi untuk pencairan)</p> <p>Jadi kita sudah memberikan fasilitasi di desa sudah ada KPMD jadi ada format-format yang memang sudah disiapkan dari program ya jadi kita juga mensosialisasikan tentang format-format itu. Ya memang tidak memberatkan jadi KPMD itulah yang merupakan perpanjangan tangan dari katong jadi kelompok yang berminat itu berurusan dengan KPMD, KPMD yang menampung kelompok punya nama-nama dan sebagainya hingga membuat proposal jadi dengan formulir-formulir itu mereka mengisi masing-masing orang mengisi sesuai dengan kebutuhan permintaan dan</p>

	<p>usahnya diisi mengetahui dengan bpk kepala dusun setempat kemudian diserahkan ke KPMD dan selanjutnya dibuat untuk proposal.</p> <p>Penentuan RTM di desa Ya katong memang mengacu kepada apa kriteria dari BPS itu kan tentang kriteria nah itulah yang dipakai jadi patokan atau ukuran pada saat bagaimana penggagasan KPMD itukan dia menyampaikan kriteria itu untuk dibahas bersama-sama didalam dengan masyarakat didusun atau di desa setempat situ untuk menentukan kriterianya itu. Misalnya anaknya putus sekolah atau misalnya apa namanya makannya sehari paleng 2 kali, jadi hal-hal itu yang memang menentukan bahwa memang betul-betul dikatakan rumah tangga miskin.</p> <p>Pendampingan selama pengelolaan dana jadi kita kan bukan cuma dalam hal ini memberikan dana tapi bagaimana dana itu dia bisa bermanfaat bagi dalam hal ini ibu-ibu dan pengembangan usahanya jadi dalam hal ini UPK sebagai unit pengelola itu kan dia yang berfungsi sebagai apa namanya fungsi pembinaan jadi ada yang UPK itu dia selain bukan cuma menagih tapi dia juga turun pembinaan kepada kelompok bagaimana apakah usaha itu dana yang katong berikan itu bisa bermanfaat menambah modal bagi ibu itu atau tidak. Jadi seperti mungkin kalau selesai sudah lunas 1 tahun mungkin yang katong lihat bahwa ada sedikit-sedikit kenaikan dari modal awal yang dorang punya atau apakah mereka masih membutuhkan tambahan modal ataukah tidak untuk pengembangan usaha. katong cuma sekedar turun melihat secara langsung karna tidak terlepas kemungkinan bahwa UPK ataupun bahkan katong fasilitator bisa turun untuk melihat atau memberikan pendampingan, karena kelompok itu memang sudah menjadi kelompok binaan dari program jadi UPK dalam hal ini bisa setiap bulan atau mungkin dia punya rencana kerja. ya katong turun liat itu pada saat bimbingan, wawancara langsung atau bisa kelihatan</p>	<p>usahnya diisi mengetahui dengan bpk kepala dusun setempat kemudian diserahkan ke KPMD dan selanjutnya dibuat untuk proposal.</p> <p>Penentuan RTM di desa Ya katong memang mengacu kepada apa kriteria dari BPS itu kan tentang kriteria nah itulah yang dipakai jadi patokan atau ukuran pada saat bagaimana penggagasan KPMD itukan dia menyampaikan kriteria itu untuk dibahas bersama-sama didalam dengan masyarakat didusun atau di desa setempat situ untuk menentukan kriterianya itu. Misalnya anaknya putus sekolah atau misalnya apa namanya makannya sehari paleng 2 kali, jadi hal-hal itu yang memang menentukan bahwa memang betul-betul dikatakan rumah tangga miskin.</p> <p>Pendampingan selama pengelolaan dana Jadi kegiatan SPP ini kan bukan hanya dalam hal pemberian dana tapi bagaimana dana itu bisa bermanfaat bagi, dalam hal ini, ibu-ibu dan pengembangan usahanya. Jadi dalam hal ini UPK sebagai unit pengelola itu memiliki juga fungsi pembinaan. Jadi tugas UPK selain menagih tapi dia juga turun melakukan pembinaan kepada kelompok bagaimana apakah usaha itu dana yang kami berikan itu bisa bermanfaat menambah modal bagi ibu itu atau tidak. Jadi seperti mungkin kalau selesai sudah lunas 1 tahun mungkin yang kami lihat bahwa ada sedikit kenaikan dari modal awal yang mereka punya atau apakah mereka masih membutuhkan tambahan modal ataukah tidak untuk pengembangan usaha. Kami cuma sekedar turun melihat secara langsung karena tidak terlepas dari kemungkinan bahwa UPK ataupun bahkan kami selaku fasilitator bisa turun untuk melihat atau memberikan pendampingan, karena kelompok itu memang sudah menjadi kelompok binaan dari program jadi UPK dalam hal ini bisa setiap bulan atau mungkin jika terdapat rencana kerja. Pada saat peninjauan itulah ada bimbingan dengan wawancara langsung dan dapat terlihat jika memang</p>
--	--	--

		<p>kalau memang mereka misalnya masih membutuhkan modal lagi. Jadi proses monitoring dilakukan oleh UPK itu rutin kemudian kita dari FK juga.</p> <p>Masalah-masalah dalam kelompok Ya kesulitan dalam hal ini sih tidak cuma paling mereka mengharapkan bahwa kalau bisa masih membutuhkan, tapi pada dasarnya karna baru pertama juga trus karna anggotanya kan banyak. usulan itu langsung ke katong FK tapi memang dia harus melalui KPMD.</p>	<p>mereka misalnya masih membutuhkan modal lagi. Jadi proses monitoring dilakukan oleh UPK itu rutin kemudian kita dari FK juga</p> <p>Masalah-masalah dalam kelompok Masalah yang terjadi dalam proses ini sih tidak ada, hanya saja mereka mengharapkan dana yang lebih, tapi pada dasarnya kelompok ini masih baru pertama menerima dana SPP dan anggotanya juga banyak. Usulan-usulan seperti itu disampaikan langsung kepada saya selaku FK, tetapi memang seharusnya melalui KPMD dulu.</p>
9.	<p>Ketua TPK Negeri Tulehu HT,43 tahun</p>	<p>Partisipasi masyarakat dalam musyawarah di desa Ya cukup positiflah, tapi sebelum musyawarah perencanaan biasanya musyawarah itu untuk menentukan program apa yang diusulkan itu pada musyawarah perencanaan di desa tapi sebelumnya itu ada penggalian gagasan di kampung maupun di dusun, dalam penggalian itulah TPK bersama KPMD itu melaksanakan musyawarah di dusun untuk mencari usulan apa di dusun untuk dibawa pada musyawarah perencanaan di desa sekaligus katong mengundang masyarakat ada perwakilan di dusun untuk berpartisipasi dalam perencanaan di desa. Sehingga dalam proses perencanaan itu semua usul dari dusun harus hadir untuk bisa mempresentasikan kira-kira dari dusun mana yang layak diusulkan dalam musyawarah perencanaan sehingga bisa dibawa dalam musyawarah berikutnya di tingkat kecamatan merupakan usulan desa.</p> <p>Konflik dalam proses musyawarah Selama ini namanya dinamika rapat, ya tapi untuk sampe ke tingkat konflik itu tidak ada. Hanya dinamika bagaimana memperjuangkan usulan-usulan dari dusun itu saja tapi tidak sampai konflik, dapat diselesaikan dengan cukup baik.</p> <p>Monitoring terhadap kegiatan SPP Iya biasanya itu, untuk tingkat pengawasan biasanya di UPK, katong ini biasanya berproses mengawal sampe bisa di terima sebagai usulan dan bisa diberi pinjaman. Untuk proses pengawasan penyimpanannya itu lebih banyak porsinya di UPK.</p>	<p>Partisipasi masyarakat dalam musyawarah di desa Ya cukup positiflah, tapi sebelum musyawarah perencanaan biasanya ada penggalian gagasan di kampung maupun di dusun, dalam penggalian itulah TPK bersama KPMD melaksanakan musyawarah di dusun untuk mencari usulan apa di dusun untuk dibawa pada musyawarah perencanaan di desa sekaligus kami mengundang perwakilan masyarakat di dusun untuk berpartisipasi dalam perencanaan di desa. Sehingga dalam proses perencanaan itu semua usul dari dusun harus hadir untuk bisa mempresentasikan kira-kira dari dusun mana yang layak diusulkan dalam musyawarah perencanaan sehingga bisa dibawa dalam musyawarah berikutnya di tingkat kecamatan merupakan usulan desa.</p> <p>Konflik dalam proses musyawarah Selama ini namanya dinamika rapat, ya tapi untuk sampe ke tingkat konflik itu tidak ada. Hanya dinamika bagaimana memperjuangkan usulan-usulan dari dusun itu saja tapi tidak sampai konflik, dapat diselesaikan dengan cukup baik.</p> <p>Monitoring terhadap kegiatan SPP Iya biasanya itu, untuk tingkat pengawasan biasanya di UPK, kami ini biasanya berproses mengawal sampe bisa di terima sebagai usulan dan bisa diberi pinjaman. Untuk proses pengawasan penyimpanannya itu lebih banyak porsinya di UPK.</p> <p>Pengaduan/saran dari kelompok SPP Untuk 2010 ini, kasus-kasus tunggakan</p>

		<p>Pengaduan/saran dari kelompok SPP Untuk 2010 ini, kasus-kasus tunggakan dianggap kecil. Justru yang mereka kehendaki kalo bisa pinjaman mereka diperbesar karena mereka melihat mangkali volume usaha mereka meningkat barangkali kalo bisa ada peningkatan nilai pinjamannya. kalo yang hanya satu orang satu juta kalo bisa satu orang dua juta atau tiga juta.</p>	<p>dianggap kecil. Justru yang mereka kehendaki kalo bisa pinjaman mereka diperbesar karena mereka melihat kemungkinan volume usaha mereka meningkat sekiranya jika bisa ada peningkatan nilai pinjamannya. kalau yang hanya satu orang satu juta jika dimungkinkan bisa satu orang dua juta atau tiga juta.</p>
10.	<p>Ketua UPK Kec. Salahutu AK, 31 tahun</p>	<p>Proses awal kelompok SPP Nurul Iman Proses Nurul Iman nya kan kan sebenarnya berkasnya su masuk cuman dipending sampai brapa bulan lah begitu, nah akhirnya, sebenarnya prosesnya sama dengan kelompok-kelompok yang lain, yang sering yang sekarang-sekarang ini. Artinya setelah diverifikasi oleh tim verifikasi karena awalnya dong memang dong su diverifikasi oleh tim verifikasi pada saat tahun kegiatan 2009, aah, cuman dong belum masuk dalam pengucuran dana, tapi dong sudah diverifikasi dulu. Antri, masuk daftar antri. Nah setelah tahun 2009 itu baru katong pengucuran dana. Ya persyaratannya cuman, waktu itu persyaratannya belum terlalu ini mendetil kaya skarang. Dulu mungkin rencana usaha anggota dengan, surat perjanjian kelompok dengan surat tanggung renteng itu saja. Yang bikin jadi proposal yang dong buat.</p> <p>Pendampingan awal kalo pendampingan itu kan biasanya kalo dong itu, direkrut oleh KPMD, misalnya penggalian gagasan dan usul-usul kaya kemaren dong dusun pohon mangga nah itu kan ada tawaran-tawaran dari KPMD bahwa kira-kira dari ibu-ibu eh kelompok perempuan karena waktu itu ada campuran kelompok perempuan, KPMD kemudian mensosialisasikan mengenai SPP, bahwa kira-kira mengenai ibu-ibu ada yang ingin ambil pinjaman di PNPM seng yang SPP itu, nah kebetulan Nurul Iman ini, waktu itu ada percobaan kelompok SPP sebenarnya sudah ada, sudah dicoba satu kelompok di Waai ini cuma ada kendala sekarang ada tunggakan lah nah Nurul Iman ini kelompok yang kedua, ketiga lah kalo seng salah ingat, jadi dikategorikan barulah untuk</p>	<p>Proses awal kelompok SPP Nurul Iman Proses Nurul Iman sebenarnya berkasnya sudah masuk hanya ditunda sampai beberapa bulan begitu, nah akhirnya, sebenarnya prosesnya sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Artinya setelah diverifikasi oleh tim verifikasi karena awalnya mereka memang sudah diverifikasi pada saat tahun kegiatan 2009, hanya mereka belum masuk dalam kelompok yang dikucurkan dana, walaupun sudah diverifikasi dulu. Mereka masuk daftar antri. Nah setelah tahun 2009 itu baru kami mengucurkan dana. Waktu itu persyaratannya belum terlalu ini mendetil seperti sekarang. Dulu mungkin rencana usaha anggota dengan, hanya memerlukan surat perjanjian kelompok dan surat tanggung renteng itu saja. Dan yang membuat lolos juga proposal yang mereka telah buat.</p> <p>Pendampingan awal kalau pendampingan itu kan biasanya mereka direkrut oleh KPMD, misalnya penggalian gagasan dan usul-usul seperti kemarin di kelompok dusun pohon mangga nah itu kan ada tawaran-tawaran dari KPMD bahwa kira-kira dari ibu-ibu eh kelompok perempuan karena waktu itu ada campuran kelompok perempuan, KPMD kemudian mensosialisasikan mengenai SPP, bahwa kira-kira mengenai ibu-ibu adakah yang ingin ambil pinjaman di PNPM berupa SPP itu, nah kebetulan ada kelompok Nurul Iman. Waktu itu sudah ada percobaan kelompok SPP sebenarnya sudah dicoba satu kelompok di Waai ini cuma ada kendala sekarang ada tunggakan. Nah Nurul Iman ini kelompok yang kedua, ketiga atau ketiga kalau tidak salah ingat, jadi dikategorikan baru untuk percobaan SPP, ooh, tapi</p>

	<p>percobaan SPP, ooh, tapi setelah itu ada stagnan pendanaan untuk pengucurann SPP ditahan karena waktu itu katong punya pendanaan BLM ada sekitar 2008 sekitar 900 juta saja.</p> <p>Pendampingan UPK kepada kelompok SPP</p> <p>Kalo kelompok SPP itu UPK tapi kan kadang-kadang kalo misalnya katong turun di lapangan biasanya katong minta bantuan KPMD atau TPK, maksudnya dong yang punya masyarakat. Yang lebih tau si ini, si itu artinya katong dulu dari kecamatan tujuannya berkordinasi dengan di desa.</p> <p>Kalo proses pendampingannya biasa yang kemaren itu katong kerahkan kadang-kadang ibu-ibu ni kan aktivitasnya tinggi, maksudnya aktivitas tinggi dalam hal dagang, jualan, dan sebagainya. Jadi katong proses pendampingan ketika, kalo dorang pung kesadaran sendiri datang stor tapi katong monitornya melalui KPMD. Kebetulan KPMD itu lumayan bisa kooperatif kalo ada info dan dong juga sering aktif datang tanya kalo ada masalah jadi katong seng talalu repot kalo soal artinya kalo katong ada ketemu masalah bisa via telpon bisa langsung tapi kalo misalnya kadang-kadang ingin katong kunjungan katong kunjungan juga. Katong kunjungna juga. katong langsung ketemu dengan dong. Tapi memang seng secara menyeluruh katong kumpul dong artinya bahwa katong juga seng bisa harus iko katong pung ego kumpul dong pada saat dong sedang aktivitas yang menyakut dengan dong punya usaha misalnya itu kan repot juga. Akhirnya katong bisa diwakilkan 1 atau 2 orang dari dong. Dong pung ketua, sekertaris atau bendahara. Itu yang bisa katong lakukan.</p> <p>Pelatihan administrasi terhadap kelompok SPP</p> <p>kalo administrasi dari awal program di maksudkan sebenarnya sudah diatur, memang dia dong (kelompok) punya buku kas sendiri ada.</p> <p>Kelompok, jadi katong bikin format, formatnya format PNPM. Buku kas tersendiri ada, aaah waktu itu kalo untuk sekarang yang kemaren-kemaren masih sederhana, maksudnya buku kasnya masih</p>	<p>setelah itu ada stagnan pendanaan untuk pengucurann SPP yang ditahan karena waktu itu kami punya pendanaan BLM ada sekitar sekitar 900 juta saja di tahun 2008.</p> <p>Pendampingan UPK kepada kelompok SPP</p> <p>Pendampingan untuk kelompok SPP dilaksanakan oleh UPK. Saat pelaksanaan pendampingan di lapangan biasanya kami meminta bantuan dari KPMD atau TPK, karena mereka yang empunya masyarakat. Yang lebih tau si ini, si itu artinya kami mulai dulu dari kecamatan tujuannya berkordinasi dengan di desa. Dalam proses pendampingan ini kadang-kadang ibu-ibu anggota kan aktivitasnya tinggi, maksudnya aktivitas tinggi dalam hal dagang, jualan, dan sebagainya. Jadi kami memproses pendampingan ketika, mereka punya kesadaran sendiri datang setor dan kami monitor melalui KPMD. Kebetulan KPMD itu lumayan bisa kooperatif, jika ada informasi dan mereka juga sering aktif datang tanya kalo ada masalah jadi kami tidak terlalu repot. Kalau ada masalah bisa via telpon atau bisa langsung tapi kadang-kadang kami mengadakan kunjungan langsung dengan mereka. Tapi memang tidak secara menyeluruh kami mengumpulkan mereka artinya bahwa kami tidak bisa mengikuti ego kami untuk mengumpulkan mereka pada saat waktu aktivitas usaha mereka, bisa repot juga. Akhirnya mereka bisa diwakilkan 1 atau 2 orang saja yaitu ketua, sekretaris atau bendahara. Itu yang bisa kami lakukan.</p> <p>Pelatihan administrasi terhadap kelompok SPP</p> <p>Kalo adimistrasi dari awal program sudah diatur agar kelompok punya buku kas sendiri. Jadi kami buat format dari PNPM. Buku kas kelompok sendiri ada, tapi masih sederhana masih buku biasa, jadi kami arahkan dengan tabungan kelompok tapi yang detilnya sudah saya gambarkan kemarin itu, 13 sampai 3% itu, yang 18 % baru-baru ini kami terapkan tapi dulu masih sangat sederhana, belum terlalu mendetil pembinaannya.</p> <p>Pengarahan khusus untuk administrasi dilakukan dalam pertemuan kelompok</p>
--	--	---

		<p>sederhana masih buku biasa, kemudian katong arahkan dengan tabungan kelompok tapi yang detail beta yang kemaren beta gambarkn 13 sampai 3 % itu, yang 18 % itu blom itu yang kesini-sini baru katong terapkan tapi dulu itu masih simple maksudnya belum terlalu mendetail pembinaannya.</p> <p>Pengarahan khusus untuk administrasi dilakukan dalam pertemuan kelompok saja, langsung di kelompok tidak dalam forum khusus.</p> <p>Pengaduan masalah dalam kelompok SPP</p> <p>kalo yang bisa sebenarnya eee, UPK ooh langsung ke UPK karna KPMD itu cuman istilahnya sumbang suara saja, mungkin bagaimana e...kalo misalnya dong ada masalah dong titip bahwa nanti katong mau ketemu masalah ini-ini, kadang-kadang tu e,kadang-kadang saja maksudnya bukan setiap saat, maksudnya KPMD datang ada perlu baru sampaikan ternyata di kelompok Nurul Iman ada bagini-bagini aah baru, tapi kadang-kadang dong sendiri atau via hape.</p> <p>Kalo KPMDnya, KPMD dan UPK memang setiap saat berkordinasi deng dong ketika ada masalah yang tadi beta ada masalah tapi sejauh ini kan kelompok Nurul Iman seng terlalu inilah, masalahnya memang ketua kelompoknya adalah bisa mengurus anggotanya dengan baik jadi seng terlalu repot.</p>	<p>saja, langsung di kelompok, tidak dalam forum khusus.</p> <p>Pengaduan masalah dalam kelompok SPP</p> <p>Kalo yang sebenarnya, langsung ke UPK karena KPMD hanya sumbang suara saja. Misalnya jika mereka ada masalah nanti mereka beritahu kami bahwa ada masalah, kadang-kadang saja dan tidak sering, KPMD datang dan menyampaikan bahwa ternyata kelompok Nurul Iman ada ini dan itu. Tapi kadang-kadang mereka datang sendiri atau lewat telepon.</p> <p>Kalau KPMD dan UPK memang setiap saat berkordinasi dengan mereka jika ada masalah, tapi sejauh ini kelompok Nurul Iman tidak terlalu karena ketua kelompoknya bisa mengurus anggotanya jadi tidak terlalu repot.</p>
--	--	--	--

2. Informasi tentang pendanaan (pencairan, pengelolaan dan pengembalian dana) dalam kegiatan SPP

No	Informan	Hasil Wawancara	
		Dalam Bahasa Melayu Ambon	Terjemahan Bahasa Indonesia
1	2	3	4
1.	Ketua Kelompok SPP, FK, 56 tahun 8 Mei 2011	<p>Proses pencairan dana</p> <p>Proses sampai dana cair itu agak susah, tapi ibu HF (FK) membantu dengan informasi melalui buku-buku. Lalu selanjutnya dari PNPM mandiri kasih arahan banya lai. tapi secara umum begitu. Lalu terakhir, saat dana, su turun. Bendahara PNPM dari Maluku Tengah datang kasih, penjelasan lagi, minta dibuatkan sanksi. Sanksi bagi</p>	<p>Proses pencairan dana</p> <p>Proses sampai dana cair itu agak susah, tapi ibu HF (FK) membantu memberikan informasi melalui buku-buku. Lalu selanjutnya dari PNPM mandiri kasih arahan juga secara umum. Lalu terakhir, saat dana sudah dikucurkan. Bendahara PNPM dari Maluku Tengah datang untuk memberikan penjelasan serta meminta</p>

		<p>anggota yang nanti tidak bayar itu bagaimana. Minta supaya ketua itu ajukan sanksi. Karna su pengalaman, yang lalu-lalu itu kan, itu, tidak bayar. Jadi waktu sebelum pembagian uang barang uangnya bendahara di, dari PNPM kan kasih ke bendahara. Saksinya semua tapi bendahara yang tarima. Setelah bendahara tarima, pulang katong rapat samua anggota. Tapi tim verifikasi sudah menentukan anggota ini dapat pinjaman sekian dan yang ini sekian. Jadi katong, bayar berdasarkan catatan dari tim verifikasi.</p> <p>Pengelolaan dana a,, lalu, datang di sini, kerusuhan itu katong su zeng bajual lai. Karja apa saja yang bisa par bisa menghasilkan. Sampe tahun 2009 kemarin itu, baru katong dapat bantuan sedikit menyangkut dengan PNPM Mandiri. Lalu, di situ mulai katong e...usaha sedikit ada beli beras sedikit jual. Karna beras kalo datang langsung orang beli. beli habis, katong beli dari Kopisonta. Lalu ibu ada lia di atas situ ada jual pulsa sasadiki, ana-ana, kasi satu-satu modal sadiki. Lalu ada dong pung komputer ada tarima-tarima ketik-ketk gitu. A...Lalu kebetulan ada kulkas presser, biking es sadiki.</p> <p>Pengembalian Dana Setiap bulan katong antar langsung ke bendahara UPK.</p> <p>Saran Bunga itu kalo bisa dari pnpm mandiri tu, kasi untuk katong kelompok untuk katong kelompok itu bunganya agak turun. Supaya, katong pung kelompok itu bisa dapat faedahny sadiki to..berarti selain dari pinjaman itu dengan kelebihan itu mungkin katong bisa kasih pinjam lagi untuk e,,anggota anggota yang tidak bergabung di dalam kelompok tapi dong, apa...punya kebutuhan bagitu karna banyak punya kebutuhan tapi dana terbatas.</p>	<p>agar dibuatkan sanksi. Sanksi bagi anggota yang tidak membayar. beliau meminta ketua usulkan sanksi karena pengalaman lalu ada yang tidak membayar. PNPM memberikan uangnya ke bendahara dengan saksinya semua anggota. Setelah bendahara menerima maka diadakan rapat anggota. Tim verifikasi sebelumnya sudah menentukan jumlah pinjaman tiap anggota jadi pembayaran dilakukan nanti berdasarkan catatan dari tim verifikasi.</p> <p>Pengelolaan dana Ketika kerusuhan kemarin kami tidak berdagang lagi, sampai di tahun 2009 setelah mendapat bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan, lalu kami mulai berjualan beras eceran yang kami beli dari pulau Seram. Kami juga menjual es batu eceran. Lalu modal itu juga kami bagi ke anak-anak untuk digunakan menjual pulsa telepon, dan karena ada komputer anak juga menerima pengetikan.</p> <p>Pengembalian Dana Setiap bulan kami antar langsung ke bendahara UPK.</p> <p>Saran Bunga itu kalo bisa dari PNPM mandiri yang langsung kepada kami di kelompok sehingga bunganya kecil. Supaya kelompok kami bisa mendapat sedikit faedah selain pinjaman itu yaitu kelebihan mungkin bisa kami pinjamkan ke masyarakat yang tidak bergabung dalam kelompok ini arena mereka upnya kebutuhan tetapi kesulitan modal/dana.</p>
2.	Bendahara kelompok	Proses pencairan dana agak agak lama karna termasuk	Proses pencairan dana agak lama karena kelompok di sini

	<p>SPP, DH, 47 tahun 8 Mei 2010</p>	<p>kelompok di sini kelompok istilahnya kan di setiap desa dia punya sistem sistemnya ada jadi e katong ini kan orang orang dagang ya, jadi kebetulan kelompok katong orang Buton dan beta sebagai orang Bugis, juga ibu FK sebagai orang Arab, jadi orang Tulehu, mungkin 1, 2 orang saja, melalui itu, itu juga kalo mau pikir itu hambatannya ada dari bawah itu, katong punya perkembangan pemerintahan itu skarang ini yang kayaknya masih memikirkan bahwa ini apa pribumi dulu, tapi dari kelompok PNPM ini tidak melihat hal itu, justru yang pribumi yang banya mandek itu e anu bantuan bantuannya itu makanya mereka coba di katong pung kelompok ini, ah ternyata katong bisa buktikan bahwa katong orang yang bukan asli tuh bisa, bisa juga, bisa kerja apa yang diharapkan oleh dari PNPM sendiri tuh dari.. pokoknya ini tuh, Cuma yang katong kendala dari tadi nih dari karena dia harus melalui desa, dan ini langsung. Karna ini kamareng, anggota bilang, ini ada persaingan, ada dong pung beberapa kelompok yang dong baru biking lagi setelah katong sudah berhasil, ah mereka kira ini dapat bantuan ini tidak dikembalikan terus kepala dusun, itu RT ada lagi kayaknya biking 1 apa e, seakan-akan dia musuhi katong, padahal dia tidak berpikir bahwa ini bantuan tuh siapapun punya hak dapat yang penting amanah maksudnya ada pengembalinya toh. Kan mereka dapat tu hadiah saja nanti sama akang mati di dong mangkali yang beberapa kelompok kan dibawah itu seperti itu jadi mereka anggap itu uang pemerintah buat apa mau dikembalikan. Hah itu kan, akhirnya dia mandek. Mandeknya di itu, di PNPMnya sendiri dan yang lain juga kan kelompok yang lain yang baru ini yang mo dapa seng bisa banya, karena modalnya udah banyak yang kandas.</p> <p>Pengelolaan dana Setelah terima dana, beta pake untuk modal bajual minyak tanah, karena disini cari minyak tanah susah. Untungnya lumayan bisa baku tambah deng paitua untuk bangun kos-kosan.</p>	<p>termasuk kelompok yang istilahnya kan di setiap desa punya sistem yang ada jadi kami kan hanya pedagang yang terdiri dari orang Buton dan saya sendiri orang Bugis. Ada juga ibu FK orang Arab dan orang Tulehu mungkin hanya satu atau dua orang saja.</p> <p>Terkadang ada hambatan pemerintahan yang sepertinya masih memikirkan perlu hadirnya orang pribumi. Tapi dalam kelompok PNPM ini tidak melihat hal itu. Justru banyak orang pribumi (dalam kelompok) yang macet dalam bantuan pinjaman ini. Sehingga mereka mencoba memberikan bantuan ini kepada kelompok kami. Alhasil kami mampu membuktikan bahwa sekalipun kami bukan orang pribumi namun kami mampu mengerjakan apa yang dikehendaki PNPM. Hanya kendala yang kami temui, karena bantuan ini harus melalui desa. Kemarin ada anggota yang memberitahu bahwa terjadi persaingan. Ada kelompok baru yang dibuat setelah melihat kami berhasil. Mereka berpikir bahwa bantuan ini tidak perlu dikembalikan. Kemudian ada juga kepala dusun dan RT ada juga membuat sesuatu dan seolah-olah memusuhi kami tanpa berpikir bahwa siapa yang berhak atas bantuan ini serta amanah untuk mengembalikannya. Jadi mereka pikir bantuan ini semacam hadiah yang hanya untuk mereka. Dan mereka pikir ini uang pemerintah jadi untuk apa dikembalikan. Sehingga hal itu menyebabkan macet di PNPM sendiri dan kelompok lain tidak bisa mendapatkan modal yang lebih banyak karena modalnya banyak yang sudah habis/macet.</p> <p>Pengelolaan dana Setelah menerima dana, saya memakainya sebagai modal untuk usaha menjual minyak tanah eceran karena di daerah sekitar sini, kadang kesulitan mendapatkan minyak tanah. Hasil dari usaha minyak ini lumayan untuk menambah modal dengan suami untuk membangun usaha kos-kosan.</p>
--	---	--	---

3.	Sekretaris Kelompok SPP UW, 53 tahun 9 Mei 2011	<p>Pengelolaan dana Modal yang diberikan par beta agak kurang karena sebenarnya beta mau membeli mesin obras. Tapi keuntungan karena modal dari SPP ini lumayanlah.</p> <p>Pengembalian dana Setiap bulannya tanggal jatuh tempo pengembalian modal di bank itu tanggal 7, katong selalu menyeter di bawah tanggal itu misalnya pada tanggal 1.</p>	<p>Pengelolaan dana Modal yang diberikan pada saya agak kurang karena sebenarnya saya mau membeli mesin obras. Tapi keuntungan karena modal dari SPP ini lumayanlah.</p> <p>Pengembalian dana Setiap bulannya tanggal jatuh tempo pengembalian modal itu tanggal 7, saya selalu menyeter sebelum tanggal tersebut misalnya pada tanggal 1.</p>
4.	Anggota kelompok SPP WJ, 32 tahun	<p>Pencairan dana Waktu itu urus pencairan tidak susah karena cuma fotokopi KTP saja, hanya menunggunya yang lama. Saya selalu diberitahu anggota yang lain kalau harus fotokopi dan urus yang lain. Waktu itu saya mendapat langsung 2 juta walaupun saya pertama minta 3 juta tapi saya terima sajalah. Mungkin 2 juta karena kios kecil. Kalau saya pinjam ke orang juga tidak mungkin semudah di kelompok ini.</p> <p>Pengelolaan dana Uang itu dipotong renteng 50 ribu, langsung 1 juta saya simpan di bank, lalu sisa 950 ribu saya beli rokok macam-macam merek masing-masing setengah slop, lalu beli sarimi. Saya juga buat roti dan jual biskuit-biskuit.</p> <p>Pengembalian dana Setiap bulan saya setor Rp.205.000,- yang 5 ribu itu untuk uang administrasi kelompok. Saya belum pernah kesulitan dalam melunasi setoran tiap bulan, karena tiap hari saya sisip uang 3 ribu sampai 5 ribu jadi kalau misalnya 3 hari lagi mau penyeteran, saya buka dan hitung kalau kurang saya ambil dari keuntungan belanja hari itu dulu.</p>	<p>Pencairan dana Waktu itu urus pencairan tidak susah karena cuma fotokopi KTP saja, hanya menunggunya yang lama. Saya selalu diberitahu anggota yang lain kalau harus fotokopi dan urus yang lain. Waktu itu saya langsung mendapat 2 juta walaupun saya pada awalnya saya minta 3 juta tapi saya terima sajalah. Mungkin 2 juta karena kios kecil. Kalau saya pinjam ke orang juga tidak mungkin semudah di kelompok ini.</p> <p>Pengelolaan dana Uang itu dipotong untuk tanggung renteng 50 ribu, langsung 1 juta rupiah saya simpan di bank, lalu sisa 950 ribu rupiah saya membeli rokok macam-macam merek masing-masing setengah slop, lalu saya membeli sarimi juga. Saya juga membuat roti dan menjual biskuit-biskuit.</p> <p>Pengembalian dana Setiap bulan saya setor Rp.205.000,- yang 5 ribu rupiah itu untuk uang administrasi kelompok. Saya belum pernah kesulitan dalam melunasi setoran tiap bulan, karena tiap hari saya sisipkan uang 3 ribu rupiah sampai 5 ribu rupiah jadi kalau misalnya 3 hari lagi mau penyeteran, saya ambil dan hitung jika kurang saya ambil dari keuntungan belanja hari itu dulu.</p>
5.	Anggota Kelompok SPP YI, 38 tahun	<p>Pencairan dana Ya pertama tu susah, bula bale urus. Iya, katong bula-bale di kantor desa bukan satu dua kali. Sampe mau dapa cair uang saja katong masih dudu di</p>	<p>Pencairan dana Pertama kali itu susah, bolak-balik urus di kantor desa bukan hanya sekali. Sampai pada pencairan uang saja kami harus duduk menunggu di baileo.</p>

		<p>baileo bawah lai, tunggu lai. Syarat-syarat itu katong bikin katong pung KTP, pokoknya ktp katong musti isi formulir itu samua, salah satu, katong perbaiki ulang lai.</p> <p>Pengelolaan dana waktu blom dapat tu bisa beli tarigu kilo-kilo dolo, sadiki-sadiki tu, tapi dapa itu su bisa beli dia pung mentega 1 karto, terigu 1 sak, minyak kelapa su angka gen. Modal 1,5 juta tuh beta seng kasabis, taruh lagi katong ada kurang apa katong harus tambah akang. Belum tentu katong bajual katong sehat tarus, kalo seng setoran tiap bulan bagaimana, katong pikir-pikir. Sekarang setelah dapat modal kalau beli 1 bantal, 3 hari su habis. syukurlah alhamdulillah penghasilan roti bagus. Kalo beta jual pagi deng sore ibu, beta pung penghasilan 300 ribu lebih untung bersih 100 ribu lebih. Kalo su cape berarti 1 hari bikin 1 kali lai dolo nanti su ini lai baru hantam 2 kali. Itu tiap hari. Bisa kalo lebaran itu dapa sampe 2 juta lebih bisa, paling kurang tu beta tolak itu saparu paling kurang itu beta dapat 1 juta lebih beta dapa.</p> <p>Saran kalo katong perlu tambah modal mangkali katong buka usaha lain kan, macam bikin tambah besar katong pung jualan roti ka, macam pokoknya yang mana katong dapa saja katong bisa bikin to, yang penting akang jalan lancar, cepat.</p>	<p>Syarat-syaratnya yaitu KTP kami, kami harus mengisi semua formulir. Jika salah kami harus diperbaiki kembali.</p> <p>Pengelolaan dana Waktu belum mendapat dana kami hanya bisa membeli terigu kiloan, tapi setelah mendapat dana bantuan, kami sudah bisa membeli terigu 1 kardus, terigu 1 sak dan minyak kelapa 1 gen. Modal 1,5 juta itu tidak saya habiskan, saya simpan jika ada yang kurang maka bisa ditambahkan. Belum tentu pada waktu berjualan kami selalu sehat. Kalau kami tidak setor tiap bulan itu kira-kira bagaimana, kami pikir-pikir lagi. Sekarang setelah mendapat modal, kalau beli 1 sak, 3 hari sudah habis. syukurlah Alhamdulillah penghasilan roti bagus. Kalau saya jualan pagi dan sore, penghasilan saya 300 ribu dengan keuntungan 100 ribu lebih. Kalau sudah capek, saya menjual roti sehari 1 kali saja. Kalau sudah sehat maka saya jual roti 2 kali sehari. Itu tiap hari. Bisa kalo pas lebaran dapat sampai 2 juta lebih paling sedikit. Biasanya saya tolak separuhnya, sehingga saya bisa dapat 1 juta lebih.</p> <p>Saran Kalo kami perlu tambahan modal, agar bisa membuka usaha lain seperti memperluas usaha roti kami, apa saja usaha yang dapat kami buat yang penting lancar dan cepat.</p>
6.	<p>Anggota kelompok SPP HL, 80 tahun</p>	<p>Pencairan dana Saya hanya tanda tangan, seng pake KTP. Seng susah, senang-senang saja. ibu YI yang bawa ke bendahara, kalau su cukup sudah angkat, katong seng bisa jalan jadi bagaimana.</p> <p>Pengelolaan dana Su olah akang, beli rokok, apa saja, anak-anak pung mainan-mainan, sarimi-sarimi. Kira-kira satu hari yah lumayan, dari pagi sampai malam 300 ribu lebih, cukup lumayan par makang tiap hari, biar 2 orang dg anak tapi makan cukup</p>	<p>Pencairan dana Saya hanya tanda tangan, tidak pakai KTP. Tidak susah, gampang saja. karena saya tidak bisa berjalan, ibu YI yang bawa ke bendahara, kalau sudah dicairkan dananya saya siap terima.</p> <p>Pengelolaan dana Semua sudah diolah untuk beli rokok, macam-macam, mainan anak-anak, sarimi. Kira-kira satu hari yah lumayan, dari pagi sampai malam 300 ribu lebih, cukup lumayan untuk makan sehari, walaupun saya berdua dengan anak angkat tapi cukuplah untuk makan</p>

		<p>jua.</p> <p>Pengembalian dana Biasa setor Rp.105.000 katong biasa bayar sebelum tanggal 8, biasanya tanggal 5, Seng pernah mau gantong (utang), pokoknya bulan bayar itu tetap bayar saja, ada juga lebih</p>	<p>berdua.</p> <p>Pengembalian dana Biasa setor Rp.105.000, kami biasa bayar sebelum tanggal 8. Biasanya tanggal 5, tidak pernah mau utang, pokoknya tiap bulan bayar, kadangada juga lebih.</p>
7.	Fasilitator Kecamatan HF, 37 tahun	<p>Proses pencairan dana setelah proposal masuk kan ada verifikasi. Kita bentuk tim dari kecamatan beranggotakan orang-orang yang paham dari sisi verifikasi ke kelompok-kelompok itu orang-orang yang sekaligus kelayakannya itu layak sesuai dengan modal yang diminta ataukah tidak. Setelah verifikasinya dinyatakan layak, kemudian dimusyawarahkan diantara musyawarah antar desa kedua atau musyawarah desa perantingan disitu kelompok dinyatakan layak dan siap didanai. Jadi setelah rencana penggunaan dana itu masuk ke rekening kecamatan kita fasilitator dengan UPK lalu siap untuk dicairkan kemudian kita mengambil dana di BRI sesuai dengan permintaan itu, lalu kita serahkan dari UPK dari kecamatan dan FK bersama sama ke desa disaksikan masyarakat dan kelompok kita serahkan ke PPK, PPK menyerahkan ke kelompok selanjutnya kelompok menyerahkan ke bendahara, bendahara menyerahkan ke anggota sesuai yang dibutuhkan.</p> <p>Penentuan besar pinjaman anggota Mereka sendiri karena, karena mereka sendiri yang mengisi Ruang, rencana usaha anggota masing-masing itu, misalnya ibu A dia jual nasi kuning mungkin dia Cuma minta 500 ribu untuk tambahan modal, kalau ibu yang B misalnya dia jibu-jibu ikan misalnya, mungkin dia butuh 1 juta, karena dia punya kemampuan mengembalikan bisa lebih. Jadi diukur dengan dia punya modal dan keuntungan eee perbulan misalnya jadi pada saat tim verifikasi turun dia memverifikasi eeee hal-hal seperti itu.</p>	<p>Proses pencairan dana setelah proposal masuk, akan ada verifikasi. Kita bentuk tim dari kecamatan beranggotakan orang-orang yang paham dari sisi verifikasi ke kelompok-kelompok itu, kelayakan orang-orang itu sesuai dengan modal yang diminta ataukah tidak. Setelah verifikasinya dinyatakan layak, kemudian dimusyawarahkan diantara musyawarah antar desa kedua atau musyawarah desa perantingan. Disitulah kelompok dinyatakan layak dan siap didanai. Jadi setelah rencana penggunaan dana itu masuk ke rekening kecamatan kita fasilitator dengan UPK lalu siap untuk mencairkan. Kemudian kita mengambil dana di BRI sesuai dengan permintaan itu, lalu kita serahkan dari UPK dari kecamatan dan FK bersama sama ke desa disaksikan masyarakat dan kelompok. Kita serahkan ke PPK, PPK menyerahkan ke kelompok selanjutnya kelompok menyerahkan ke bendahara, bendahara menyerahkan ke anggota sesuai yang dibutuhkan.</p> <p>Penentuan besar pinjaman anggota Mereka sendiri yang mengisi Ruang, rencana usaha anggota masing-masing itu, misalnya ibu A, dia jual nasi kuning mungkin dia cuma minta 500 ribu untuk tambahan modal, kalau ibu B misalnya dia jibu-jibu(penjual) ikan, mungkin dia butuh 1 juta, karena dia punya kemampuan mengembalikan bisa lebih. Jadi diukur dengan modal dan keuntungan perbulan misalnya jadi pada saat tim verifikasi turun dia memverifikasi hal-hal seperti itu.</p>

3. Informasi tentang hasil SPP

No	Informan	Hasil Wawancara	
		Dalam bahasa Melayu Ambon	Terjemahan bahasa Indonesia
1	2	3	4
1.	Ketua kelompok SPP, FK, 56 tahun 8 Mei 2011	<p>Perkembangan Usaha modal awal empat juta, alhamdulillah ibu, ada bisa tamba sedikit. Jadi, katong pinjam dari dua ribu sembilan, cicilan satu tahun. Jadi cicilan itu karna modal tadi katong putar jadi cicilannya berasa ringan. Setelah selesai cicilan stop su mangkali su tujuh bulan ka apa ni. Tapi modal tadi itu katong berputar deng akang. Masih berputar deng akang (modal dari SPP) terus. Pinjaman dari PNPM MP ini membantu dan, ya rasanya ada peningkatan kalo yang lalu lalu itu, memang ya, katong mau usaha, tapi mungkin, e, tuhan mungkin belum izinkan untuk, katong pu hidup ini, mau, ada..baik, ya ibu. Karena memang, ana-ana sekolah, kuliah, to ibu to. Jadi, dengan adanya pinjaman ini, membantu skali.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan keluarga Jadi setelah PNPM Mandiri ini katong biar ada bagitu, bisa ada membangun itu, lalu ana-ana su karja to ibu, jadi bisa..dong, su bisa mandiri kan, berarti tanggung jawab sebagai orang tuanya su berkurang. Banya to ibu. Sebab, menerima lima orang ana to ibu. e, ampat orang su selesai kuliah. Yang satu bongso masih kuliah.</p> <p>Penguatan dan Peningkatan Kelompok SPP Di ranting itu dong pu ketua ketua Wanita Islam ranting tial ada usaha ini badan hukum di koperasi untuk mau jadikan BMT ini a,,karna islam pusat kan sudah ada adanya badan ini BMT ini.....itu ada rencana bagitu. Kemarin itu ada konfearensi wilayah a,,ada dari pusat ada kasih arahan la,,bagitu hanya saja katong di Maluku ibu masih deng uang uang pinjaman ini resiko paling berat, kasi enak tapi tagih ini,..masi pikir pikir kalo katong suada pung modal anggota yang jujur a...BMT</p>	<p>Perkembangan Usaha modal awal empat juta, alhamdulillah ibu, ada bisa untuk tambahan. Jadi, kami pinjam dari dua ribu sembilan, cicilan selama satu tahun. Karena modalnya kami putar maka terasa ringan. Setelah selesai cicilan sekitar lebih tujuh bulan ini. Tapi modalnya (modal dari SPP) masih tetap kami putar terus. Pinjaman dari PNPM MP ini membantu dan sepertinya ada peningkatan. Kalau sebelumnya, memang ya, kami mau usaha, tapi mungkin Tuhan belum izinkan untuk hidup kami lebih baik. Karena anak-anak sekolah, kuliah. Jadi, dengan adanya pinjaman ini, sangat membantu sekali.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan keluarga Jadi setelah PNPM Mandiri ini kami bisa merenovasi rumah, anak-anak saya sudah kerja jadi mereka sudah bisa mandiri, berarti tanggung jawab orang tua sudah berkurang. Banyak kan ibu punya 5 anak. 4 orang sudah selesai kuliah tinggal yang bungsu saja masih kuliah.</p> <p>Penguatan dan Peningkatan Kelompok SPP Di ranting tial, ketua wanita islam memiliki usaha dengan badan hukum di koperasi untuk mau jadikan ini BMT juga. Karena islam pusat sudah ada badan BMT ini, seperti itu rencana awal. Kemarin ada konferensi wilayah, dan dari pusat memberi arahan. Hanya saja kita di Maluku ini, memberikan uang pinjaman itu, resikonya berat. Enak pada saat diberi tetapi kesulitan pada saat ditagih. Kami masih berpikir kalau kami sudah punya modal anggota, karena BMT berdasarkan syariat kami terhindar dari riba. Kami mau saja simpan pinjam ini karena ditangani oleh PNPM mandiri. Tapi jika kami mandiri dengan sistem seperti ini kami tidak berani</p>

		<p>karna berdasarkan syariat berarti katong terhindar dari riba. skarang katong kalo mau simpan pinjam seperti ini, juga ini karna ditangani oleh pnpn mandiri. Tapi kalo katong mandiri katong sistem ini, seng barani ibu karna pertama katong sudah berkecimpung di kerohanian, to ibu to...ha.....baru katong jalankan uang bagini tetap taunya riba to...seng mau tau itu. Bagaimana ka bagaimana to di masyarakat kan su jadi buah bibir. Ha...jadi sat satunya jalan kalo BMT bararti itu bagi hasil, terhindar dari riba, rencananya bagitu</p>	<p>karena kami berkecimpung di organisasi kerohanian yang sistem ini mengandung riba. Hal itu akan menyebabkan buah bibir di masyarakat. Jadi satu-satunya jalan, kalao BMT berarti bagi hasil, maka kami terhindar dari riba. Begitu rencana kami.</p>
2.	<p>Bendahara kelompok SPP, DH, 47 tahun 8 Mei 2011</p>	<p>Perkembangan Usaha Sebelum beta dapa bantuan PNPM ini kan beta ini belum jual minya tanah kan, nah setelah beta dapat itu su ada jual itu. Cuma beta jaga modalnya itu jangan sampai dia abis. Ah tapi untuk keuntungan memang sih belum talalu diliat karena dia masih berputar kan, tapi yang penting su ada ini, kalo beta ada modal pribadi sadiki katong tamba tamba sekedar mendampingi modal yang tadi itu supaya jang dia mati, jangan dia diperjalanan langsung e hilang, e habis.</p> <p>Penguatan dan Peningkatan Kelompok SPP Nurul Iman Skarang anggota yang terdiri dari 21 orang diperkecil jadi 3 kelompok. Di kelompok satu ada yang dapa 6 anggota ada yang dapa 7 anggota. Hah jadi e katong harap maksudnya 3 kelompok ini katong dapa uang dolo digabung jadi 1 nanti baru katong kelola akang maksudnya sudah sapa yang mau ambil brapa brapa sisanya katong simpan pinjam lagi buat orang lain yang tidak maso anggota tadi. Nah supaya ada tambahan par katong hah kalo yang begini kan balom ada nyata karena langsung diperuntukan dari sana, beta dapa berapa juta, katong balom bisa ada cela cela sadiki untuk kasih bantuan, banyak yang mau pinjam di beta, tapi seng bisa karna nanti nama-namanya seng adil. Memang pas untuk katong, lah katong pernah katong usul bahwa</p>	<p>Perkembangan Usaha Sebelum saya mendapatkan bantuan PNPM ini, saya belum menjual minyak tanah. Setelah saya memperolehnya, saya sudah bisa menjual minyak tanah. Hanya saya perlu tetap mengolah modalnya agar tidak habis. Tapi untuk keuntungan belum terlalu terlihat karena modal masih diputar. Tapi yang penting sudah ada pinjaman ini. Kalau saya ada sedikit modal pribadi, saya akan tambahkan sekedar untuk melengkapi modal yang sudah berjalan agar tidak habis di tengah jalan.</p> <p>Penguatan dan Peningkatan Kelompok SPP Nurul Iman Sekarang, anggota yang terdiri dari 21 orang yang diperkecil menjadi 3 kelompok. Ada yang dapat 6 dan 7 anggota. Jadi kami berharap di tiga kelompok ini digabung satu dulu pada saat mendapatkan dana bantuan kemudian dikelola pembagiannya siapa dengan sejumlah uang berapa, sisanya kami simpan lagi untuk orang lain yang tidak menjadi anggota kelompok SPP. Nah, ini supaya ada tambahan bagi kami, kalau begini belum ada yang terlihat karena langsung dicairkan dari sana, misalnya saya dapat berapa juta, sehingga tidak ada tambahan bagi kami untuk dapat memberikan sedikit bantuan bagi ibu-ibu lainnya. Banyak yang mau pinjam dari saya tapi tidak bisa karena nanti tidak adil bagi yang lain. Memang kami pernah usul kepada kepada UPK untuk memberikan</p>

		<p>begini pa, sudah jangan liat katong anggota brapa brapa nanti katong kasi sesuai dengan dong punya kebutuhan kalo memang dong seng ini ya ada 10 juta, bisa katong bikin simpan pinjam lai buat e masyarakat sekitar katong to, hah supaya ada usaha, ada untungnya bisa dibagi dengan kelompok kelompok lain, yang ada ini, hah bikin dia seperti itu. Nah dari tim bilang, dari itu pengelola bilang nanti katong liat katong punya ini dolo, skarang ini ada banya yang berminat ada banya. Kasi maso proposal tapi balom dilayani. Katong kan punya yang lama. Yang baru beberapa kelompok. Yang sudah yang penting su liat bahwa katong punya. Karena perjanjian bahwa memang dilihat dan di coba pertama dolo kalo memang berhasil ya bisa dilanjutkan lagi tapi melalui tim verifikasi lagi. Karena katong sudah dilihat bahwa katong sudah berhasil, berhasil dalam arti bukan berhasil kas pulang uang saja, tapi samua kan dilihat oleh sudah ada usahanya biar sasadiki ada</p> <p>Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapat modal memang untuk bantuannya yang memang jalan lebih kesempatan ke perempuan cuma yang masalah tadi kan belum sampai ke tingkat itu bahwa harus perempuan tuh yang lebih ini toh lebih, dia memimpin apa, memang cuma diarahkan tapi dalam kelompok tuh katong balom bisa nampak bahwa ia katong harus e perempuan tuh dia musti pimpin juga, memang e ada arahan dari sana juga seperti itu tapi keliatannya yang dari katong pung anggota itu mereka butuh modal. Itu kan samua dikasih pengarahan seperti itu. Agar katong bisa bergerak sendiri tanpa nanti ada suami mendampingi, katong sudah bisa mandiri. Biar umpama suami ada musibah ataukah cerai, kan katong sudah tau berusaha, kita sudah bisa olah ini ada modal. Katong su atu bagaimana caranya cari uang. Hah itu kasih pengertian seperti itu. Cuma sampe di katong kelompok balom ada yang,</p>	<p>pinjaman sesuai dengan kemampuan anggota, sisanya misalnya ada 10 juta bisa kami simpan untuk dipinjam oleh masyarakat sekitar. Sehingga kelompok ini juga mendapat pemasukan dari bunga pinjaman tersebut yang bisa dibagi bersama. Tetapi dari pengelola mengatakan bahwa mereka mau melihat perkembangan kelompok kami dulu, karena sebenarnya ada banyak kelompok yang berminat untuk mendapat pinjaman, tetapi belum dilayani. Jadi untuk sementara kami jalan dulu, karena perjanjiannya di awal yaitu kelompok ini akan dinilai dulu, jika berhasil maka akan dilanjutkan pada periode program selanjutnya tapi melalui tim verifikasi. Berhasil ini dalam artian bukan saja dalam pengembalian pinjaman tetapi juga dalam kemajuan usaha masing-masing anggota kelompok.</p> <p>Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapat modal Memang dalam hal pemberian bantuan sudah sangat memberikan kesempatan bagi perempuan, akan tetapi dalam hal pemberdayaan misalnya kepemimpinan belum terlihat. Misalnya dalam kelompok kami bisa diberi arahan untuk dapat lebih berdaya mengelola usaha tanpa bergantung pada suami, sehingga kami sebagai perempuan lebih mandiri. Sehingga ketika misalnya suami kami terkena musibah atau menceraikan kami, kami sebagai perempuan sudah bisa mengelola usaha sendiri. Hal seperti inilah yang belum diarahkan dalam pembinaan kepada kami. Kami kan baru sekali mendapat bantuan modal, sehingga belum terlalu nampak perputaran modalnya ketika program selesai, kadang saya masih dibantu suami. Misalnya saja dalam kelompok Nurul Iman ini ada 3 anggota penerima bantuan modal yang berstatus janda, sebelumnya dia memang sudah punya usaha, dan kemudian menerima bantuan modal, akan tetapi bagaimana setelah program ini selesai, mungkin dia akan kesulitan.</p>
--	--	---	---

		<p>heem.. katong diterapkan kan balom dapa liat karena memang baru 1 kali nih. Balom nampak. Ujung ujungnya tuh kan nanti di dong pung modal, putar putar beta pung modal nih e. Suami masih dampingi bantu. Jadi yang ambe nih ada dua orang yang tiga tiga nih lai yang su janda ka seng. Hah itu mereka memang mandiri sebelum e itu karena punya modal sedikit. Hah sudah usaha memang. Tapi setelah itu bantu, rasanya lebih sadikit dia punya itu usahanya.</p>	
3.	<p>Sekretaris Kelompok SPP UW, 53 tahun 9 Mei 2011</p>	<p>Perkembangan usaha Dulu beta seng bisa beli terigu 1 sak, sekarang bisa beli sekali 2 sak, sisanya untuk membeli gula dan bahan lain. Hasilnya juga lumayan untuk tambah-tambah uang sekolah anak.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan keluarga Anak ada 5 satu di jakarta, di universitas Harapan Bangsa. Alhamdulillah mau wisuda sudah ini. Yang nomor dua alhamdulillah bulan kemaren lolos di kantor PU. Iya, itu lulusan sarjana juga. Trus yang ketiga jadi tentara di ternate. Iya, yang keempat ini tadi Ci masih lagi Akper. Alhamdulillah dia sebelum kuliah dia bikin jualan dulu baru saya baronda pagi. Untung sudah masak sekali, bisa pulang jualan saya sudah jahit. Yang bungsu baru kelas 5 SD, bapak ada usaha di Bula.</p>	<p>Perkembangan usaha Dulu saya tidak bisa membeli terigu 1 sak, sekarang saya bisa beli sekali 2 sak, sisanya untuk membeli gula dan bahan lain. Hasilnya juga lumayan untuk menambah uang sekolah anak.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan keluarga Anak ada 5. Satu ada di jakarta, di universitas Harapan Bangsa. Alhamdulillah mau segera wisuda. Yang nomor dua alhamdulillah bulan kemarin lolos di kantor PU. Iya, itu lulusan sarjana juga. Terus yang ketiga jadi tentara di ternate. Iya, yang keempat ini tadi Ci masih lagi kuliah di Akper. Alhamdulillah dia sebelum kuliah dia bikin jualan dulu baru saya jalan pagi jual. Untung saya sudah masak sbelumnya, sepulang saya jualan , saya bis menjahit. Yang bungsu baru kelas 5 SD, bapak mereka ada usaha di Bula.</p>
4.	<p>Anggota kelompok SPP WJ, 32 tahun</p>	<p>Perkembangan usaha Sebelum ada bantuan dari PNPM beta mulai usaha roti, permen deng biskuit, beta taruh akang dalam toples dan taruh di meja kecil di depan rumah. Lalu pas bantuan modal ini datang waktu itu beta mulai jualan mi instan, rokok dan alhamdulillah, bisa bantu bapak untuk beli bahan untuk bangun pondasi rumah. Hasil kios bisa untuk tambah uang sekolah anak (2 orang), lalu keuntungan dari roti untuk beli ikan, jajan anak-anak.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan keluarga beta biking-biking roti tu par harga ikan,</p>	<p>Perkembangan usaha Sebelum ada bantuan dari PNPM saya mulai usaha roti, permen dan biskuit, saya taruh di dalam toples dan taruh di meja kecil di depan rumah. Lalu bantuan modal dimulai ketika itu saya mulai jualan mi instan, rokok dan alhamdulillah, bisa membantu bapak untuk beli bahan untuk bangun pondasi rumah. Hasil kios bisa untuk tambah uang sekolah anak (2 orang), lalu keuntungan roti untuk beli ikan, jajan anak-anak.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan keluarga Saya buat jualan roti untuk beli ikan,</p>

		<p>ana-ana pung jajan, kalau beras abis beta tinggal bilang eee katong pung beras abis.</p> <p>Katong pung rumah ni orang kaspinjam, orang pung rumah, orang pung tanah. Katong pung tanah dong kasih dari dia (paitua) pung papa orang Tulehu di atas, beta baru biking pondasi sa</p> <p>Untuk tabungan ya Alhamdulillah, sadiki sadiki beta sisip tapi kalau kapepet lai turun ambil dibawah saja (di bank). tapi selama beta taru ini baru satu kali ambil. Itu katong kapepet dia pung papa tar mencari dua minggu, saki lai, ambil par kascukup cicilan motor.. alhamdulillah motor su abis par tiga bulan lalu.</p> <p>Penguatan Kelompok</p> <p>1 tahun kamareng katong jarang pertemuan, pas awal-awal mau cair dana saja, setelah itu kayanya seng pernah. Paling sering itu di pengajian tapi seng bahas kelompok SPP ini.</p>	<p>jajan anak-anak, kalau beras habis saya akan bilang ke suami kalau beras kami sudah habis.</p> <p>Rumah dan tanah kami ini dipinjamkan orang kepada kami. Kami memiliki tanah pemberian orang tua, di daerah sebelah gunung tapi sementara ini baru mulai membangun pondasi.</p> <p>Untuk tabungan, Alhamdulillah, biasanya saya menyisihkan sedikit dari hasil jualan tiap hari, tapi jika perlu banyak, biasanya saya ambil di bank. Misalnya saja ketika suami sakit selama 2 minggu sehingga tidak bisa mengojek, lalu saya memakai tabungan untuk membayar cicilan motor dan Alhamdulillah motor kami sudah lunas 3 bulan yang lalu.</p> <p>Penguatan Kelompok</p> <p>Selama setahun kemarin, kami jarang melakukan pertemuan kelompok, hanya di awal-awal saja pada waktu pencairan dana, kami ada pertemuan. Setelah itu sepertinya jarang sekali. Memang ada pertemuan di pengajian tapi tidak membahas kelompok SPP ini.</p>
5.	<p>Anggota Kelompok SPP YI, 38 tahun</p>	<p>Perkembangan usaha</p> <p>Iya ibu, pertama-tama katong pung hidop masih susah deng anak-anak masih kecil, nah setelah su bajual dan su ambe modal syukur alhamdulillah katong su ada modal sadiki, jadi bisa anak-anak pung keperluan katong seng talalu susah. Dan kuliah ni ibu pernah rasa tiap hari tugas, tiap hari uang, jadi katong musti banyak usaha kalong seng parah. Pas terakhir kas kembali dana sampe sekarang ini usaha masih lumayan lancar dibandingkan sebelum dapa pinjaman.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan keluarga</p> <p>Mulai badagang itu dari kacil yang tua masih kelas dua SMA mulai badagang, biasa mengharapn laki ojek-okek tapi lia keadaan seng bisa lai, anak anak su mau lanjut lai akhirnya buka usaha begini, Dia skarang su semester enam, 5 tahun mangkali tahun 2006. syukur alhamdulillah, katong su bisa urus anak-anak par kuliah.</p>	<p>Perkembangan Usaha</p> <p>Iya ibu, pertama kali hidup kami masih susah dan anak masih kecil. Setelah berjualan dan ambil sedikit modal, syukur alhamdulillah sudah ada modal sedikit jadi bisa mencukupi keperluan anak-anak sehingga kami tidak terlalu susah. Dan kuliah ini ibu pasti pernah merasakan tiap hari ada tugas, perlu uang, jadi kami harus banyak berusaha kalau tidak bisa parah.</p> <p>Kemarin setelah mengembalikan dana, sampai sekarang usaha masih lumayan lancar dibandingkan sebelum mendapat pinjaman.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan keluarga</p> <p>Mulai berdagang sejak anak tertua masih kecil sejak kelas 2 SMA sekitar 5 tahun yang lalu sekitar tahun 2006, biasanya mengharapn penghasilan suami untuk ojek tapi sepertinya keadaan tidak memungkinkan, anak-anak sudah mau lanjut sekolah akhirnya</p>

		<p>Kalo sakit, Alhamdulillah ada biar sadiki katong ada simpanan di BRI lai.</p> <p>Akses dan kemudahan mendapat dana Awal-awal itu susah, lama, katong bula-bale di kantor desa bukan satu dua kali. Sampe mau dapa cair uang saja katong masih dudu di baileo bawah lai, tunggu lai. Syarat-syarat itu katong bikin katong pung KTP, pokoknya ktp katong musti isi formulir itu samua, salah satu, katong perbaiki ulang lai. Jadi yang ibu ketua pung tukang suruh-suruh ni beta. Iya, nanti kalo ibu-ibu mau bakumpul, haa, mama YI tolong bilang ibu-ibu sudah gampang nanti biar mama YI. Iya sudah nanti beta pi kasi tau. Jadi ibu ketua dong apa samua mama YI dolo.</p> <p>Penguatan kelompok SPP Kalo pertemuan untuk kelompok SPP ni jarang paskali ya satu bulan itu jua belum lai, kalo tiap katong mo pi di apa, belajar mengaji tiap hari.</p>	<p>buka usaha ini. Dia sekarang sudah semester 6. Syukur alhamdulillah kami sudah bisa mengurus anak-anak untuk kuliah. Kalau sakit, alhamdulillah ada walaupun hanya sedikit ada simpanan di Bank.</p> <p>Akses dan kemudahan mendapat dana Pada awal itu susah, kami bolakibalik kantor desa bukan hanya sekali dua kali. Sampai pencairan uang saja kami harus duduk di baileo untuk menunggu. Syaratnya yaitu kami harus kasih ktp, isi formulir semua, jika salah satu maka kami harus perbaiki ulang. Jadi saya yang menjadi suruhan ibu ketua. Nanti kalau ibu-ibu mau berkumpul “Mama YI tolong bilang ibu-ibu mau berkumpul atau sudah gampang nanti biar mama YI”, iya sudah, nanti saya beri tahu. Jadi ibu ketua kalo ada apa-apa semua ke mama YI.</p> <p>Penguatan kelompok SPP Kalau pertemuan untuk kelompok SPP ini jarang sekali, satu bulan juga belum tentu. Kalau belajar mengaji tiap hari.</p>
6.	<p>Anggota kelompok SPP HL, 80 tahun</p>	<p>Perkembangan usaha Iya su lama stop dapat pinjaman dari SPP tapi ini masih bisa olah lagi. Kasian ambil lai dari koperasi karena sekarang ikan mahal. 2 orang tapi makan hebat.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan keluarga Anak piara ini sekolah dua tahun, di kelas dua, tapi di kelas dua itu juga kas naik deng paksa saja, kan dia bodo-bodo (anak autis) lalu su berhenti, guru yang kasberhenti bukan dia. Kalo beta sakit ini (ibu YI) yang layani, dia memasak, bawa untuk saya. Beta ada juga simpan-simpan uang. Itu hari simpan di bank tapi su ambil, tidak sanggup. Karena suka sakit jadi kalau tiba-tiba sakit susah kalau urusan di bank, nanti lama lai. Hanya simpan sendiri di rumah. Jadi pinjaman di kelompok ini cuma untuk makan sehari-hari, lumayan.</p>	<p>Perkembangan usaha Iya, sudah lama berhenti dapat pinjaman dari SPP tapi tetap masih bisa dikelola. Kasihan apabila diambil lagi dari koperasi karena sekarang ikan mahal. 2 orang tapi makan banyak.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan keluarga Anak angkat ini sekolah dia tahun di kelas 2, tapi juga dipaksa naik kelas karena dia Autis akhirnya berhenti, karena guru yang memberhentikan dia. Kalo saya yang sakit ini dilayani ibu YI. Dia yang masak dan bawa untuk saya. Saya juga mempunyai simpanan uang. Pernah simpan di bank, tapi sudah diambil karena tidak sanggup. Karena saya suka sakit jadi kalau tiba-tiba sakit bakal susah kalau mengurusnya di bank, nanti lama. Jadi saya simpan saja di rumah. Jadi pinjaman kelompok ini Cuma untuk makan sehari-hari saja. Lumayan.</p>

	Akses kemudahan mendapat dana Beta hanya tanda tangan, seng pake KTP.	Akses kemudahan mendapat dana Saya hanya tanda tangan, tidak pakai KTP.
--	---	---

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok Nurul Iman

No	Informan	Hasil Wawancara	
		Dalam Bahasa Melayu Ambon	Terjemahan Bahasa Indonesia
1	2	3	4
1.	Fasilitator Kecamatan HF,37 tahun	<p>Kesulitan yang dihadapi pada kelompok SPP Ya kesulitan yang katong hadapi sebenarnya ya minat dari masyarakat ini kan besar sebenarnya, tapi belum juga belum ada kesadaran dari masyarakat ya dalam hal ini bahwa ini merupakan dana pinjaman, dana bantuan yang diberikan untuk bagaimana masyarakat bisa mengelola dan memperbaiki kehidupannya sesuai dengan arah program, jadi ya memang masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa ini dana bantuan pemerintah diberikan cuma-cuma padahal sosialisasi yang katong berikan itu tidak pernah katong menyampaikan bahwa dana ini dikasi cuma-cuma kepada hiba, ya namanya juga dana pinjaman cuma itulah masih ada masyarakat-masyarakat yang berpikir bahwa ini uang pemerintah kasi cuma-cuma yaaaa masih ada juga yang cuek, tidak mau peduli, tidak mau membayar sama sekali. Ya tapi bersyukur di kelompok Nurul Iman ni ya karena katong pung pendampingan dan mungkin mereka sudah memahami dan sebagainya jadi ya tidak ada masalah.</p> <p>Proses pendampingan Katong selalu menyampaikan bahwa pendampingan itu sudah maksimal 100% ya, ada yang memang masih kurang tetapi koordinasi katong pendampingan dari pogram sendiri menjadi fasilitator untuk katong di kecamatan ya mungkin sudah terasa cukup untuk pendampingan ya. masyarakat dalam hal ini kelompok juga sudah bisa memahami sampai tidak terjadi kredit macet dan sebagainya, berarti kan sudah ada pemahaman sesuai dengan pendampingan.</p>	<p>Kesulitan yang dihadapi pada kelompok SPP Ya kesulitan yang kami hadapi sebenarnya minat dari masyarakat ini kan besar,tapi belum juga belum ada kesadaran dari masyarakat ya dalam hal ini bahwa ini merupakan dana pinjaman, dana bantuan yang diberikan untuk bagaimana masyarakat bisa mengelola dan memperbaiki kehidupannya sesuai dengan arah program, jadi memang masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa ini dana bantuan pemerintah berikan cuma-cuma padahal sosialisasi yang kami berikan itu tidak pernah kami menyampaikan bahwa dana ini diberikan cuma-cuma kepada hiba, ya namanya juga dana pinjaman. Cuma itulah masih ada masyarakat-masyarakat yang berpikir bahwa ini uang pemerintah berikan cuma-cuma, masih ada juga yang cuek, tidak peduli, tidak mau membayar sama sekali. Ya tapi bersyukur di kelompok Nurul Iman ini karena pendampingan kami dan mungkin mereka sudah memahami dan sebagainya jadi ya tidak ada masalah.</p> <p>Proses pendampingan Kami selalu menyampaikan bahwa pendampingan itu sudah maksimal 100% ya, ada yang memang masih kurang tetapi koordinasi pendampingan kami dari pogram sendiri sebagai fasilitator untuk kecamatan ya mungkin sudah terasa cukup untuk pendampingan ya. masyarakat dalam hal ini kelompok juga sudah bisa memahami sampai tidak terjadi kredit macet dan sebagainya, berarti sudah ada pemahaman sesuai dengan pendampingan.</p> <p>Proses penentuan peta sosial desa KPMD kembali lagi ini kan</p>

		<p>Proses penentuan peta sosial desa KPMD yaaa kembali lagi ini kan pengambilan gagasan kan di tingkat dusun jadi tidak mungkinlah kita dari fasilitator kecamatan yang ini. itu KPMD di desa itu kan dia yang turun ke dusun-dusun dalam hal ini untuk SPP membuat peta sosial yang menggambarkan betul-betul rumah tangga miskin itu seperti apa. Jadi bukan KPMD yang membuat peta tapi mengajak masyarakat setempat itu yang nanti mereka sendiri yang akan membuat peta sosial mereka sendiri jadi masing-masing mereka sendiri yang menentukan bahwa beta ini yang miskin atau beta ini yang menengah dan beta ini yang kaya. Dengan memang yang disepakati itu dari masyarakat juga dengan kriteria-kriteria yang menentukan bahwa dari sisi kesehatannya, sisi pendidikannya ya kehidupan sehari-harinya ya mereka sendiri yang menentukan. Di situ nah setelah peta sosialnya dibuat sudah tahu bahwa misalnya di dusun A misalnya itu ada ternyata nanti kan terbentuk dalam peta sosial berapa rumah disitu tergambar bahwa rumah yang memang sangat miskin itu sebenarnya memang ada berapa rumah. Nah disitu berdasarkan peta itu juga yang menjadikan data untuk KPMD dia melihat apakah di dalam rumah itu, rumah tanga miskin itu ada berapa ada KK,kalo seng ibu-ibu ada keseng usahanya yang memang membutuhkan modal. Nah dari situlah baru dana program SPP itu diberikan.</p>	<p>pengambilan gagasan kan di tingkat dusun jadi tidak mungkinlah kita dari fasilitator kecamatan yang atur. itu KPMD di desa yang turun ke dusun-dusun dalam hal ini untuk SPP membuat peta sosial yang menggambarkan betul-betul rumah tangga miskin itu seperti apa. Jadi bukan KPMD yang membuat peta tapi mengajak masyarakat setempat itu yang nanti mereka sendiri yang akan membuat peta sosial mereka. Jadi masing-masing mereka sendiri yang menentukan bahwa saya ini yang miskin atau saya ini yang menengah atau yang kaya. Dan memang yang disepakati itu dari masyarakat juga dengan kriteria-kriteria yang menentukan bahwa dari sisi kesehatannya, sisi pendidikannya kehidupan sehari-harinya mereka sendiri yang menentukan. Di situ nah setelah peta sosialnya dibuat, maka diketahui bahwa misalnya di dusun A ternyata terbentuk dalam peta sosial berapa rumah disitu tergambar bahwa rumah yang memang sangat miskin itu sebenarnya ada berapa rumah. Nah disitu berdasarkan peta itu juga yang memberikan masukan data bagi KPMD agar dia melihat apakah di dalam rumah itu, rumah tanga miskin itu ada berapa KK,apakah ada ibu-ibu yang membutuhkan modal untuk usahanya. Nah dari situlah baru dana program SPP itu diberikan.</p>
2.	Ketua UPK Kecamatan Salahutu AK, 31 tahun	<p>Penilaian terhadap kinerja KPMD Masalahnya kan KPMD ini kan agak-agak sulit, cakupan wilayah yang cukup luas dan masyarakat yang 15 ribu sekian dan dusunnya yang 14 sekian karna memang agak-agak sulit kalo cuma mau liat artinya dong harus intens ke Nurul Iman sendiri kan seng mungkin, dong juga mesti ke kelompok-kelompok yang lain, katong bisa pergunakan dong par yang mungkin tunggakan juga. Pada akhirnya dong bagitu. Kalo PL tu yaa, untuk kemaren kan waktu itu kan ada</p>	<p>Penilaian terhadap kinerja KPMD Masalahnya tugas KPMD ini kan agak sulit, cakupan wilayah yang cukup luas yaitu masyarakat yang 15 ribu sekian di 14 dusun. Hal ini berarti kan tidak mungkin mereka harus intens ke Nurul Iman saja, mereka juga mesti ke kelompok-kelompok yang lain, terutama kelompok di desa lain yang mengalami penunggakan. Kalo PL, untuk pelaksanaan kegiatan SPP di 2009,waktu itu sempat sekitar 1-2 bulan ada kekosongan PL, sehingga PL yang baru</p>

		<p>sekitar 1-2 bulan lebih lah setelah dia terpilih ada kekosongan PL belum ada pengganti, karena baru diangkat aah jadi dia belum kuasai sepenuhnya. Maksudnya arahannya, jadi dia ikut saja kalau misalnya ada eee arahan kita ketemu dengan kelompok ya dia ikut saja, ikut nimbrung saja skalian pelajari. Jadi mungkin belum terlalu baik dalam pendampingan.</p> <p>Evaluasi dan monitoring ke kelompok SPP Nurul Iman Kalau untuk Nurul Iman tadi yang beta sudah sampaikan bahwa sebenarnya evaluasinya karena dong juga proaktif jadi kendala dan katong evaluasi seng talalu artinya beratlah. Artinya bisalah dong proaktif artinya, tapi katong tetap pantau dalam artian bahwa ketika ada KPMD yang rakor barang katong ada rakor bulanan KPMD, UPK katong sharing bagaimana kelompok SPP ini ada hadapi masalah apa, itu kadang-kadang katong monitoring lewat itu atau kadang-kadang karena dekat katong turun saja atau kadang-kadang dijalan-jalan ketemu main-main jadi sistemnya memang untuk saat skarang yang beta bilang par ibu kan katong ada bimbingan. Sebenarnya bimbingan kelompok itu sebenarnya ada Cuma kelompok sendiri katong seng bisa pungkiri bahwa kadang-kadang su himbau bagitu ada juga mungkin karena faktor kesibukan, ada juga kurang perhatian tapi untuk tahun sekarang katong pas jaga evaluasi itu.</p>	<p>ini karena baru diangkat belum menguasai program sepenuhnya. Sehingga ketika ada pertemuan-pertemuan kita di lapangan, PL baru ini ikut saja sekalian belajar. Jadi mungkin dia belum terlalu baik dalam melakukan pendampingan.</p> <p>Evaluasi dan monitoring ke kelompok SPP Nurul Iman Kalau untuk Nurul Iman tadi yang saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya karena mereka juga proaktif sehingga tidak ada kendala dan evaluasi kami tidak terlalu berat. Bisalah mereka proaktif, tapi tetap kami pantau dalam artian bahwa ketika ada rakor bulanan KPMD dengan UPK maka kami dapat berkoordinasi bagaimana perkembangan kelompok SPP, apakah ada masalah. Itu kadang kami monitoring lewat rakor atau kadang-kadang karena lokasi kelompok SPP yang dekat, kami dapat langsung turun atau kadang-kadang saat bertemu di jalan. jadi sebenarnya bimbingan kelompok itu ada,cuma tidak bisa kami pungkiri bahwa kadang-kadang walaupun sudah ada himbauan, tetapi mungkin karena faktor kesibukan, ada juga kurang perhatiannya maka evaluasi kurang berjalan dengan baik.</p>
3.	Raja Tulehu JO, 55 tahun	<p>Pelaksanaan PNPM di Tulehu Dari PPK tahun 2005, sebelum itu juga sudah ada. Sebelum kerusuhan. Tahun 1998 ya..itu kan sudah ada di Tulehu tapi karna kerusuhan akhirnya kegiatan itu tidak jalan. Dia Cuma jalan pada saat tahun 1998. Dengan kegiatan fisiknya pasar ikan. Trus terjadi gejolak kemanusiaan itu dia terhenti dan tahun 2005 baru jalan lagi. Saya kira kegiatan-kegiatan PPK pada saat itu dan sampai pada PNPM ini tentunya dia akan memberikan nilai positif bagi masyarakat khususnya masyarakat</p>	<p>Pelaksanaan PNPM di Tulehu Dari PPK tahun 2005, sebelum itu juga sudah ada. Sebelum kerusuhan. Tahun 1998 ya..itu kan sudah ada di Tulehu tapi karna kerusuhan akhirnya kegiatan itu tidak jalan. Kegiatan itu cuma jalan pada saat tahun 1998. Dengan kegiatan fisiknya pasar ikan. Lalu terjadi gejolak kemanusiaan itu lalu terhenti dan tahun 2005 baru jalan lagi. Saya kira kegiatan-kegiatan PPK pada saat itu dan sampai pada PNPM ini tentunya akan memberikan nilai positif bagi masyarakat khususnya masyarakat</p>

		<p>Tulehu. Dia merupakan pasar, dan ibu kota kecamatan, pasar di kecamatan saluhutu, begitu juga masyarakat dari Haruku, Seram Bagian Barat. Yah, semua tumpah disini....disini adalah basis ekonomi yang perlu dikembangkan. Dengan bantuan kegiatan PNPM sangat memberikan respon yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Koordinasi pihak desa dengan pihak PNPM</p> <p>Saya kira tentunya positif, PPK bantuan kepada ibu-ibu sangat tinggi kita udah lupa ya, tahun anggaran 2005-2006 itu sangat antusias masyarakat khususnya ibu-ibu karena disini juga ya karna daerah pasar ya, mreka membutuhkan bantuan modal. Alhamdulillah dengan kehadiran PPK itu dapat memberikan modal pada masyarakat. Pada saat itu lebih dari 300 orang kalo tidak salah, ada berapa banyak kelompok dari bantuan PPK itu sehingga ada ibu-ibu jibu-jibu, ibu-ibu palele ikan ini, trus ada yang jual makanan kan ini mereka membutuhkan modal ya. Ketimbang mereka ambil di ijon, kita sebut perkreditan ini apa bunganya juga agak sedikit tinggi dibandingkan PPK. Alhamdulillah dengan itu ya, masyarakat bisa memanfaatkan bantuan PPK itu.</p> <p>Hambatan-hambatan</p> <p>Ya, kendala memang dalam kegiatan fisik tidak terlalu banyak. Tapi dalam pemberian modal usaha ini, kan terkadang ada hambatan karena faktor kurangnya pembinaan dari pihak PNPM Mandiri Perdesaan kepada kelompok. sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pengembalian, tetapi Alhamdulillah di Tulehu ini masih lancar saja.</p>	<p>Tulehu. Yang adalah merupakan pasar, dan ibu kota kecamatan, pasar di kecamatan saluhutu, begitu juga masyarakat dari Haruku, Seram Bagian Barat. Yah, semua tumpah disini....disini adalah basis ekonomi yang perlu dikembangkan. Dengan bantuan kegiatan PNPM sangat memberikan respon yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Koordinasi pihak desa dengan pihak PNPM</p> <p>Saya kira tentunya positif, PPK bantuan kepada ibu-ibu sangat tinggi kita udah lupa ya, tahun anggaran 2005-2006 itu masyarakat sangat antusias khususnya ibu-ibu karena disini juga ya karena daerah pasar ya, mreka membutuhkan bantuan modal. Alhamdulillah dengan kehadiran PPK itu dapat memberikan modal pada masyarakat. Pada saat itu lebih dari 300 orang kalo tidak salah, ada berapa banyak kelompok dari bantuan PPK itu sehingga ada ibu-ibu jibu-jibu, ibu-ibu palele ikan ini, trus ada yang jual makanan kan ini mereka membutuhkan modal ya. Ketimbang mereka ambil di ijon, kita sebut perkreditan ini apa bunganya juga agak sedikit tinggi dibandingkan PPK. Alhamdulillah dengan itu ya, masyarakat bisa memanfaatkan bantuan PPK itu.</p> <p>Hambatan-hambatan</p> <p>Ya, kendala memang dalam kegiatan fisik tidak terlalu banyak. Tapi dalam pemberian modal usaha ini, kan terkadang ada hambatan karena faktor kurangnya pembinaan dari pihak PNPM Mandiri Perdesaan kepada kelompok, sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pengembalian, tetapi Alhamdulillah di Tulehu ini masih lancar saja.</p>
4.	PJOK Salahutu AT, 45 tahun	<p>Pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Salahutu</p> <p>Terkait dengan keberadaan SPP di salahutu ini beta berpikir cukup baik juga artinya karena beta liatdi kondisi sosial ekonomi di saat ini kan dengan potensi-potensi ini kan harus butuh modal untuk usaha, jadi e dari 25% dari</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Salahutu</p> <p>Pelaksanaan di kecamatan Salahutu ini saya nilai cukup baik, karena melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mebutuhkan bantuan modal usaha sehingga dana 25% dari total dana 3 milyar yang diterima Salahutu, sangat</p>

	<p>total dana 3 milyar itu modal SPP jadi menurut beta pung pengamatan terkait dengan SPP ini e sangat membantu masyarakat, ini sangat baik. Cuma itu nah itu yang beta bilang apakah mereka bisa punya kesadaran untuk bisa mengembalikan itu atau tidak tapi yang jelas sangat membantu masyarakat. Karena hanya butuh proposal dan tinggal kita kasi masuk KTP saja trus sudah bisa cair.</p> <p>Proses monitoring evaluasi Katong diberikan kewenangan dari pa camat selaku pembina. Cuma monitoring realisasi kegiatan itu di negeri. Seng masih taraf pelaksanaan itu katong su mulai ada monitoring. Sehingga kalau misalnya ada jadi katong sistim monitoring itu, itu katong cek masyarakat, kira-kira dengan keberadaan program ini dengan kegiatan ini kalau misalnya ada kendala katong hubungi ketua TPKnya. Ada laporan masyarakat seperti begini. Apa benar sehingga katong bisa panggil masyarakat itu sehingga katong bisa selesaikan persoalan ini.</p> <p>Penyelesaian konflik/ pengaduan Surat dibuat itu ditujukan ke UPK, surat keberatan dari negeri itu ditujukan ke UPK, tembusannya ke UPK e PJOK, atas dasar surat itu beta surati, surati UPK dan e, ketua TPK dan anggota, ketua saniri dan raja, beta suru undang samua di sana lalu beta selesaikan persoalan dan yang tadi beta bilang tu alhamdulillah katong sudah bisa teratasi tapi yang sesungguhnya setiap ada kegiatan monitoring itu beta laporkan ke pa camat, beta selalu laporkan ke UPK e ke UPK maupun FK, FT. dan istilah katong harus lapor ke sini, katong seng bisa iya kan dia punya kesulitan seperti itu. Nanti ini sebagai katong punya referensi, referensi kecamatan untuk ketia ada pertanyaan dari kabupaten katong bisa sampaikan secara tertulis.</p> <p>Penilaian terhadap kegiatan SPP Sebenarnya SPP itu baik karena dia menyentuh langsung masyarakat tapi kadang juga ya itulah kadang juga masyarakat berasumsi bahwa dana ini kan tidak perlu ada pengembalian karena</p>	<p>membantu masyarakat. Akan tetapi yang diperlukan adalah kesadaran masyarakat untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Kegiatan ini juga membantu masyarakat karena hanya membutuhkan proposal kelompok dan KTP dari anggota untuk mencairkan dana.</p> <p>Proses monitoring evaluasi Kami diberikan kewenangan dari pak camat selaku pembina untuk mengevaluasi realisasi kegiatan sedangkan untuk monitoring kegiatan dilakukan di negeri. Walau demikian kami tetap memantau pelaksanaan monitoring tersebut, apabila ada laporan dari masyarakat, kami menghubungi ketua TPK dan mengecek langsung kepada masyarakat. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut.</p> <p>Penyelesaian konflik/ pengaduan Surat dibuat itu ditujukan ke UPK, surat keberatan dari negeri itu ditujukan ke UPK, tembusannya ke UPK e PJOK, atas dasar surat itu saya menyurati UPK dan ketua TPK dan anggota, ketua saniri dan raja, saya suruh untuk mengundang semua di sana lalu saya selesaikan persoalan dan yang tadi saya bilang itu alhamdulillah kami sudah bisa atasi. tapi yang sesungguhnya setiap ada kegiatan monitoring itu beta laporkan ke bapak camat, sayaselalu laporkan ke UPK maupun FK, FT. dan istilahnya kami harus lapor ke sini, kami tidak bisa iya kan dia punya kesulitan seperti itu. Nanti ini sebagai referensi kami, referensi kecamatan untuk ketika ada pertanyaan dari kabupaten kami bisa sampaikan secara tertulis.</p> <p>Penilaian terhadap kegiatan SPP Sebenarnya SPP itu baik karena dia menyentuh langsung masyarakat tapi kadang juga ya itulah masyarakat berasumsi bahwa dana ini kan tidak perlu ada pengembalian karena itu kan secara fisik tidak ada pengembalian dari negeri kok dana SPP harus dikembalikan? Seperti begitu tapi setelah saya kroscek di PPK ternyata ada mekanisme SPP yang tidak sama dengan prasarana fisik karena pengembalian itu bisa berputar, bergulir. Jadi tahun ini</p>
--	--	---

		<p>itu kan secara fisik tidak ada pengembalian dari negeri kok dana SPP harus dikembalikan? Seperti begitu tapi setelah beta kros cek di PPK ternyata itu ada mekanisme SPP tidak sama dengan prasarana fisik karena pengembalian itu dia bisa berputar ya, iya dia bergulir jadi tahun ini kelompok ini dia selesai mungkin bisa bergulir ke kelompok yang lain lagi makanya tadi tapi sebagian besar mereka berasumsi seperti itu mereka berasumsi bahwa ah kok dana ini kan sebetulnya tidak perlu ada pengembalian ini kan dana pemerintah mereka bikin perbandingan dengan prasarana fisik yang tadi beta bilang.</p> <p>Penilaian terhadap kelompok SPP di Tulehu</p> <p>Dari kelompok-kelompok itu kelompok SPP yang usaha ini itu sebagian besar, sebagian besar ada keberhasilan. Yang tadi beta bilang Cuma sebagian kecil, sebagian kecil kelompok yang, tapi di 6 negeri yang ada di kecamatan salahutu ini, ini sangat sangat e, riskan sekali di tulehu persoalannya banyak masyarakatnya, tapi potensi-potensi sumberdaya itu kan ada, jadi e kalo 5 negeri yang ada di ini tidak terlalu seperti tulehu, karna tulehu ini faktor utamanya itu, jumlah wilayahnya juga besar kemudian jumlah penduduknya banyak, jadi ada kan di tulehu ini kan tidak aslinya orang tulehu saja kan ada berbagai macam suku di sini jadi karakter-karakter itu, tapi ada keberhasilan juga, ada keberhasilan kelompok-kelompok itu dalam e menata usahanya seperti itu.</p>	<p>kelompok ini selesai mungkin bisa bergulir ke kelompok yang lain lagi, makanya tadi tapi sebagian besar mereka berasumsi seperti itu mereka berasumsi bahwa kok dana ini kan sebetulnya tidak perlu ada pengembalian. Ini kan dana pemerintah mereka membuat perbandingan dengan prasarana fisik yang tadi saya jelaskan.</p> <p>Penilaian terhadap kelompok SPP di Tulehu</p> <p>Dari kelompok-kelompok itu kelompok SPP yang usaha ini itu sebagian besar ada keberhasilan. Yang tadi saya bilang cuma sebagian kecil kelompok. Tapi di 6 negeri yang ada di kecamatan Salahutu ini sangat, riskan sekali di Tulehu persoalannya banyak dalam masyarakatnya, tapi potensi-potensi sumberdaya itu kan ada, jadi kalau 5 negeri yang ada di ini tidak terlalu seperti Tulehu, karna Tulehu ini faktor utamanya itu, jumlah wilayahnya juga besar kemudian jumlah penduduknya banyak, dan di Tulehu ini penduduknya banya bukan orang asli, ada berbagai macam suku di sini jadi ada berbagai karakter-karakter itu, tapi ada keberhasilan juga, ada keberhasilan kelompok-kelompok itu dalam menata usahanya seperti itu.</p>
5.	PJO Provinsi Maluku VS, 50 tahun	<p>Pelaksanaan kegiatan SPP di Maluku</p> <p>SPP merupakan suatu usaha pemerintah utk mendorong usaha pengentasan kemiskinan terutama utk perempuan dalam rangka mengurangi beban-beban pengeluaran keluarga dan ini sangat membantu karena tidak mempunyai proses yang berbelit-belit yang formal, namundlm pelaksanaannya yang harus ditingkatkan adalah pembinaan terhadap kelompok-kelompok itu sendiri terutama di tingkat UPK dan desa. Karena terkait dengan dana perguliran,</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan SPP di Maluku</p> <p>SPP merupakan suatu usaha pemerintah utk mendorong usaha pengentasan kemiskinan terutama utk perempuan dalam rangka mengurangi beban-beban pengeluaran keluarga dan ini sangat membantu karena tidak mempunyai proses yang berbelit-belit yang formal, namundlm pelaksanaannya yang harus ditingkatkan adalah pembinaan terhadap kelompok-kelompok itu sendiri terutama di tingkat UPK dan desa. Karena terkait dengan dana perguliran,</p>

	<p>maka dana itu harus baik dimanfaatkan oleh kelompok yang baru, tetapi jika dana sudah bertumpukdi UPK tingkat kecamatan, selain bergulir memang di petunjuk bisa digunakan utk keg yang lain, tapi harus dilihat, satu kecamatan sejak SPP masuk itu sampai sekarang totalnya sdh berapa, misalnya 500 juta, maka 500 juta ini pengembangannya bagaimana.</p> <p>Faktor penghambat kegiatan SPP Salah satunya yaitu SDM, yaitu bagaimana ibu-ibu ini harus diberi penguatan secara terus-menerus, dan juga harus didampingi oleh fasilitator baik kecamatan, kabupaten maupun micro finance seperti pak AW di tingkat provinsi. Karena itu sangat penting utk mendampingi dan mengawal pelaksanaan di desa.</p> <p>Kegiatan SPP yang tidak berhasil misalnya karena di tingkat desa kurang pembinaan, atau karena kelompok tersebut jauh dari pusat pertumbuhan atau pasar. Jadi kelompok itu sudah membuat produksi tapi pasar sangat diperlukan. Yang masih kurang juga dibentuknya sebuah jejaring, misalnya 1 desa memiliki 1 jenis produksi sehingga jejaring saling menukar dan saling membeli antar desa. Hal lain yang ingin digalakan yaitu kita ingin menjual hasil produksi kepada SKPD yang lain agar terkait dengan hasil produk itu mereka mendapat pembinaan.</p> <p>Memang secara tupoksi punya PMD dan konsultan tetapi secara fungsional itu tugas semua SKPD, misalnya bagaimana agar produk itu punya kualitas, bagaimana supaya produk ini memiliki ijin/label sampai kepada hak paten dan bagaimana produk itu tidak berputar di 1 kecamatan, tetapi ke kabupaten, ke provinsi malah bisa ke provinsi yang lain. Terobosan ini yang belum dilakukan, misalnya di Banda, produknya abon ikan, kue dari pala, kue dari kenari itu hanya dijual di Ambon dan ke daerah sesuai jalur kapal. Padahal harapan kita yaitu bagaimana produk itu bisa menembus pasar yang lebih luas.</p> <p>Pelaksanaan Monitoring evaluasi Monev oleh Satker sendiri, kita juga</p>	<p>maka dana itu harus baik dimanfaatkan oleh kelompok yang baru, tetapi jika dana sudah bertumpukdi UPK tingkat kecamatan, selain bergulir memang di petunjuk bisa digunakan utk keg yang lain, tapi harus dilihat, satu kecamatan sejak SPP masuk itu sampai sekarang totalnya sdh berapa, misalnya 500 juta, maka 500 juta ini pengembangannya bagaimana.</p> <p>Faktor penghambat kegiatan SPP Salah satunya yaitu SDM, yaitu bagaimana ibu-ibu ini harus diberi penguatan secara terus-menerus, dan juga harus didampingi oleh fasilitator baik kecamatan, kabupaten maupun micro finance seperti pak AW di tingkat provinsi. Karena itu sangat penting utk mendampingi dan mengawal pelaksanaan di desa.</p> <p>Kegiatan SPP yang tidak berhasil misalnya karena di tingkat desa kurang pembinaan, atau karena kelompok tersebut jauh dari pusat pertumbuhan atau pasar. Jadi kelompok itu sudah membuat produksi tapi pasar sangat diperlukan. Yang masih kurang juga dibentuknya sebuah jejaring, misalnya 1 desa memiliki 1 jenis produksi sehingga jejaring saling menukar dan saling membeli antar desa. Hal lain yang ingin digalakan yaitu kita ingin menjual hasil produksi kepada SKPD yang lain agar terkait dengan hasil produk itu mereka mendapat pembinaan.</p> <p>Memang secara tupoksi punya PMD dan konsultan tetapi secara fungsional itu tugas semua SKPD, misalnya bagaimana agar produk itu punya kualitas, bagaimana supaya produk ini memiliki ijin/label sampai kepada hak paten dan bagaimana produk itu tidak berputar di 1 kecamatan, tetapi ke kabupaten, ke provinsi malah bisa ke provinsi yang lain. Terobosan ini yang belum dilakukan, misalnya di Banda, produknya abon ikan, kue dari pala, kue dari kenari itu hanya dijual di Ambon dan ke daerah sesuai jalur kapal. Padahal harapan kita yaitu bagaimana produk itu bisa menembus pasar yang lebih luas.</p> <p>Pelaksanaan Monitoring evaluasi Monev oleh Satker sendiri, kita juga</p>
--	---	---

	<p>terbatas, misalnya utk 1 kabupaten, pada dana murni hanya 4 kali, pada dana ABT misalnya hanya 2-3 kali. Terbatas karena misalnya 1 kabupaten total dalam 1 tahun hanya 7 kali dimonev, tetapi di kabupaten itu terdapat beberapa kecamatan, sehingga dalam pelaksanaannya belum menyentuh semua desa dan UPK.</p> <p>Pendampingan memang kalau pendampingan itu masih minim. Misalnya yang dekat yang bisa dijangkau dengan transportasi darat saja masih sulit. ada kelompok yang tidak pernah mendengar info untuk mengelola, karena dia hanya mendapat modal saja. yang lebih parah lagi yaitu administrasi kartu kreditnya tidak ada. Di antara pengurus kelompok atau TPK tidak memiliki catatan/ administrasi yang lengkap. Jadi memang yang harus dikuatkan yaitu pengelola di tingkat desa dulu yaitu TPK. Kemudian kalau pengelola itu kuat maka ia akan rutin membina kelompok-kelompok di desa. Apakah sebulan sekali ada pertemuan/tidak, apakah ada kendala dll..ini yang belum dilakukan oleh TPK. di Mandiri Perdesaan jika orang melihat kegiatan fisik maka akan jelas terlihat, tapi utk kegiatan SPP maka tidak terlihat perkembangan yang terlalu menonjol. Misalnya di 1 desa ada 30 orang anggota pengelola, maka didapati bahwa 5 orang itu baik, 5 orang lagi sedang dan sisanya tidak baik. Maka identifikasi penyehatan kelompok itu perlu karena SPP ini modal abadi untuk desa, dan modal ini tidak dikembalikan. Sebenarnya ini peluang besar.</p> <p>Penguatan lembaga Sebenarnya ada berbagai pelatihan dan semuanya dibiayai. Selain dana umum ada juga dana pelatihan masyarakat dan dana pelatihan perencanaan. DOK (dana operasional kegiatan), bagaimana masyarakat dilatih untuk menggunakan dana tersebut, sedangkan pelatihan perencanaan, masyarakat dilatih bagaimana membuat perencanaan yang berkualitas seperti misalnya di 2010 ada beberapa kabupaten di Ina mendapat</p>	<p>terbatas, misalnya utk 1 kabupaten, pada dana murni hanya 4 kali, pada dana ABT misalnya hanya 2-3 kali. Terbatas karena misalnya 1 kabupaten total dalam 1 tahun hanya 7 kali dimonev, tetapi di kabupaten itu terdapat beberapa kecamatan, sehingga dalam pelaksanaannya belum menyentuh semua desa dan UPK.</p> <p>Pendampingan memang kalau pendampingan itu masih minim. Misalnya yang dekat yang bisa dijangkau dengan transportasi darat saja masih sulit. ada kelompok yang tidak pernah mendengar info untuk mengelola, karena dia hanya mendapat modal saja. yang lebih parah lagi yaitu administrasi kartu kreditnya tidak ada. Di antara pengurus kelompok atau TPK tidak memiliki catatan/ administrasi yang lengkap. Jadi memang yang harus dikuatkan yaitu pengelola di tingkat desa dulu yaitu TPK. Kemudian kalau pengelola itu kuat maka ia akan rutin membina kelompok-kelompok di desa. Apakah sebulan sekali ada pertemuan/tidak, apakah ada kendala dll..ini yang belum dilakukan oleh TPK. di Mandiri Perdesaan jika orang melihat kegiatan fisik maka akan jelas terlihat, tapi utk kegiatan SPP maka tidak terlihat perkembangan yang terlalu menonjol. Misalnya di 1 desa ada 30 orang anggota pengelola, maka didapati bahwa 5 orang itu baik, 5 orang lagi sedang dan sisanya tidak baik. Maka identifikasi penyehatan kelompok itu perlu karena SPP ini modal abadi untuk desa, dan modal ini tidak dikembalikan. Sebenarnya ini peluang besar.</p> <p>Penguatan lembaga Sebenarnya ada berbagai pelatihan dan semuanya dibiayai. Selain dana umum ada juga dana pelatihan masyarakat dan dana pelatihan perencanaan. DOK (dana operasional kegiatan), bagaimana masyarakat dilatih untuk menggunakan dana tersebut, sedangkan pelatihan perencanaan, masyarakat dilatih bagaimana membuat perencanaan yang berkualitas seperti misalnya di 2010 ada beberapa kabupaten di Ina mendapat</p>
--	---	---

	<p>pilot integrasi. Maksudnya integrasi yaitu, pola PNPM itu bisa diadopsi ke pembangunan APBD, dan yang ditekankan pada perencanaan. Misalnya ketika datang di desa masyarakat mampu menjawab apa itu perencanaan, yang dimulai dari pertemuan sosialisasi, survei lokasi, menentukan permasalahan desa, kalender musim dan sampai pada memutuskan apa yang menjadi prioritas pembangunan. Maka sebenarnya dari penguatan kelembagaan, sebenarnya program telah menyediakan. Dana juga ada, dan yang harus berperan yaitu fasilitator dibawah pengawasan Satker di kabupaten, karena secara berjenjang Satker di kabupaten itu BPM kabupaten, di tingkat kecamatan itu Camat sebagai ketua tim koordinasi di tingkat kecamatan, dan itu harus diawasi dan didampingi juga. Jadi misalnya fasilitator provinsi turun utk mengecek sudah melaksanakan apa saja, pelatihan yang diikuti apa saja, sudah berapa kali mengikuti. Hal-hal seperti itu yang ditanyakan terkait realisasi. Kadang ada memang pelaksanaan pelatihan tidak sesuai yang diharapkan karena rentang kendali, misalnya di Aru/MBD ini satu kecamatan tapi desanya bersebaran di beberapa pulau, untuk berkumpul antar desa saja susah. Jadi dari penguatan lembaga dalam program ada tetapi bagaimana kita melaksanakan penguatan tersebut, karena dananya sudah tersedia.</p> <p>Partisipasi perempuan Perempuan sangat antusias, di Tulehu itu khususnya sudah banyak yang mengantri, menunggu untuk mendapat giliran bantuan dana berikut, karena tidak perlu agunan/surat jaminan, tidak perlu KTP, kemudian mereka senang karena terjadi interaksi di antara mereka dan kelompok, dengan pengurus di tingkat desa, kecamatan. Yang paling enak itu adalah, kredit pertama dikembalikan, tetapi belum selesai waktu pengembalian, nah itu dia bisa di tambah lagi modalnya. Yang penting kriteria yang utama, penerima bukan penerima gaji tetap/ pegawai, kedua apakah usahanya cocok dengan desa</p>	<p>pilot integrasi. Maksudnya integrasi yaitu, pola PNPM itu bisa diadopsi ke pembangunan APBD, dan yang ditekankan pada perencanaan. Misalnya ketika datang di desa masyarakat mampu menjawab apa itu perencanaan, yang dimulai dari pertemuan sosialisasi, survei lokasi, menentukan permasalahan desa, kalender musim dan sampai pada memutuskan apa yang menjadi prioritas pembangunan. Maka sebenarnya dari penguatan kelembagaan, sebenarnya program telah menyediakan. Dana juga ada, dan yang harus berperan yaitu fasilitator dibawah pengawasan Satker di kabupaten, karena secara berjenjang Satker di kabupaten itu BPM kabupaten, di tingkat kecamatan itu Camat sebagai ketua tim koordinasi di tingkat kecamatan, dan itu harus diawasi dan didampingi juga. Jadi misalnya fasilitator provinsi turun utk mengecek sudah melaksanakan apa saja, pelatihan yang diikuti apa saja, sudah berapa kali mengikuti. Hal-hal seperti itu yang ditanyakan terkait realisasi. Kadang ada memang pelaksanaan pelatihan tidak sesuai yang diharapkan karena rentang kendali, misalnya di Aru/MBD ini satu kecamatan tapi desanya bersebaran di beberapa pulau, untuk berkumpul antar desa saja susah. Jadi dari penguatan lembaga dalam program ada tetapi bagaimana kita melaksanakan penguatan tersebut, karena dananya sudah tersedia.</p> <p>Partisipasi perempuan Perempuan sangat antusias, di Tulehu itu khususnya sudah banyak yang mengantri, menunggu untuk mendapat giliran bantuan dana berikut, karena tidak perlu agunan/surat jaminan, tidak perlu KTP, kemudian mereka senang karena terjadi interaksi di antara mereka dan kelompok, dengan pengurus di tingkat desa, kecamatan. Yang paling enak itu adalah, kredit pertama dikembalikan, tetapi belum selesai waktu pengembalian, nah itu dia bisa di tambah lagi modalnya. Yang penting kriteria yang utama, penerima bukan penerima gaji tetap/ pegawai, kedua apakah usahanya cocok dengan desa</p>
--	--	--

	<p>tersebut. Banyak penerima yang minta supaya PNPM terus dilanjutkan. Yang saya inginkan dalam laporan tentang SPP ini tidak hanya umum, tapi secara rinci per desa kelompok SPP melakukan jenis usaha apa saja, per usaha tersebut supaya dapat menjadi contoh dan dorongan bagi desa lainnya yang baru menerima bantuan modal.</p> <p>Koordinasi antar pelaku Hubungan antar pelaku harus kuat karena saling terikat antara satu dengan yang lain. Misalnya di salah satu kelompok SPP, setiap bulannya melakukan interaksi kepada UPK untuk pengembalian dana tiap bulannya. Sepanjang kelompok tersebut mau berusaha untuk semakin berkembang/modal menjadi bertambah, maka akan terus terjadi interaksi dengan FK dan UPK. Tetapi jika ada kelompok yang pincang, maka tugas UPK untuk melihat hal tersebut.</p> <p>Sementara hubungan TPK dengan UPK tetap harus kuat, karena setiap kali mau mencairkan dana harus ke UPK, UPK memvalidasi laporan dulu (fisik dan non fisik) misalnya laporan pengembalian SPP. Hubungan dengan kecamatan (PJO) juga harus kuat karena PJO harus monitoring kegiatan PNPM di kecamatan tersebut. Dan Camat selaku penanggung jawab juga harus serius, camat yang sudah memahami PNPM biasanya sangat antusias, karena dia mengerti bahwa PNPM ini sangat membantu masyarakat dengan berbagai jenis kegiatannya.</p> <p>Terkait dengan satker kabupaten, pelaku inilah yang penting karena dia yang menilai konsultan di tingkat bawah, dia juga yang mendistribusi dana ke rekening UPK di kecamatan. Tetapi kendala di satker kabupaten ini yaitu dana PAP, misalnya PAP harus disediakan minimal 5% dari BLM APBD dan BLM APBN, tetapi kadang dikembalikan ke kabupaten masing-masing apakah dananya mencukupi. Jika Bupati dan Bappedanya memahami tentang PNPM maka dana PAPnya akan mendekati 5%. Jika dananya kurang makanya kesulitannya dana tidak</p>	<p>tersebut. Banyak penerima yang minta supaya PNPM terus dilanjutkan. Yang saya inginkan dalam laporan tentang SPP ini tidak hanya umum, tapi secara rinci per desa kelompok SPP melakukan jenis usaha apa saja, per usaha tersebut supaya dapat menjadi contoh dan dorongan bagi desa lainnya yang baru menerima bantuan modal.</p> <p>Koordinasi antar pelaku Hubungan antar pelaku harus kuat karena saling terikat antara satu dengan yang lain. Misalnya di salah satu kelompok SPP, setiap bulannya melakukan interaksi kepada UPK untuk pengembalian dana tiap bulannya. Sepanjang kelompok tersebut mau berusaha untuk semakin berkembang/modal menjadi bertambah, maka akan terus terjadi interaksi dengan FK dan UPK. Tetapi jika ada kelompok yang pincang, maka tugas UPK untuk melihat hal tersebut.</p> <p>Sementara hubungan TPK dengan UPK tetap harus kuat, karena setiap kali mau mencairkan dana harus ke UPK, UPK memvalidasi laporan dulu (fisik dan non fisik) misalnya laporan pengembalian SPP. Hubungan dengan kecamatan (PJO) juga harus kuat karena PJO harus monitoring kegiatan PNPM di kecamatan tersebut. Dan Camat selaku penanggung jawab juga harus serius, camat yang sudah memahami PNPM biasanya sangat antusias, karena dia mengerti bahwa PNPM ini sangat membantu masyarakat dengan berbagai jenis kegiatannya.</p> <p>Terkait dengan satker kabupaten, pelaku inilah yang penting karena dia yang menilai konsultan di tingkat bawah, dia juga yang mendistribusi dana ke rekening UPK di kecamatan. Tetapi kendala di satker kabupaten ini yaitu dana PAP, misalnya PAP harus disediakan minimal 5% dari BLM APBD dan BLM APBN, tetapi kadang dikembalikan ke kabupaten masing-masing apakah dananya mencukupi. Jika Bupati dan Bappedanya memahami tentang PNPM maka dana PAPnya akan mendekati 5%. Jika dananya kurang makanya kesulitannya dana tidak</p>
--	---	---

		<p>mencukupi untuk melakukan proses monitoring. Tetapi dalam hubungan antar pelaku, harusnya kuat karena penyelesaian masalah diselesaikan dari tingkat bawah dulu.</p> <p>Satker provinsi dengan konsultan provinsi hubungannya sebagai mitra, setiap waktu melakukan interaksi/koordinasi. misalnya ada masalah maka konsultan harus berkoordinasi dengan satker provinsi selaku penanggung jawab utama, karena konsultan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. dan untuk menembusi ke birokrasi di tingkat bawah, konsultan harus berkoordinasi dengan satker. Misalnya jika ada desa yang bermasalah maka konsultan dapat berkoordinasi dengan satker sehingga mungkin saja untuk tahun berikut dana tidak lagi dikucurkan kepada desa bersangkutan.</p>	<p>mencukupi untuk melakukan proses monitoring. Tetapi dalam hubungan antar pelaku, harusnya kuat karena penyelesaian masalah diselesaikan dari tingkat bawah dulu.</p> <p>Satker provinsi dengan konsultan provinsi hubungannya sebagai mitra, setiap waktu melakukan interaksi/koordinasi. misalnya ada masalah maka konsultan harus berkoordinasi dengan satker provinsi selaku penanggung jawab utama, karena konsultan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. dan untuk menembusi ke birokrasi di tingkat bawah, konsultan harus berkoordinasi dengan satker. Misalnya jika ada desa yang bermasalah maka konsultan dapat berkoordinasi dengan satker sehingga mungkin saja untuk tahun berikut dana tidak lagi dikucurkan kepada desa bersangkutan.</p>
6.	<p>Micro Finance dan Micro Credit FMS AW, 50 tahun</p>	<p>Perkembangan kegiatan SPP di Maluku</p> <p>Pengelolaan simpan pinjam di Maluku memang dari awal itu dari tahun ke tahun, tahun anggaran itu memang terjadi peningkatan BLM khusus untuk dana SPP ini. Kalau data saya sampai dengan data SPP untuk sampai dengan bulan Juni memang ada di laporan saya. Saya belum liat total memang sudah mencapai diatas 10 milyar. Itu memang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu berada itu tersebar di 36 kecamatan dana SPP ini di provinsi Maluku dari 42 kecamatan yang mendapatkan alokasi dana PNPM ini dari 2000. Terakhir di 2010 kemarin. Itu menyangkut dia punya perkembangan pengembalian. Secara keseluruhan dari 36 ini, itu sampai dengan bulan Mei kemarin itu, tingkat kolektibilitas mencapai 76%. Ini menunjukkan bahwa pengembalian masih berada dibawah target program. Karena target program harus mencapai minimal 80%. Nah itu baru dianggap cukup bagus. Dan memang kredit macet di Maluku ini agak kesulitan bagi kita dalam melakukan pembinaan SPP ini. Karena ada memang kelompok-kelompok usaha</p>	<p>Perkembangan kegiatan SPP di Maluku</p> <p>Pengelolaan simpan pinjam di Maluku memang dari awal itu dari tahun ke tahun, tahun anggaran itu memang terjadi peningkatan BLM khusus untuk dana SPP ini. Kalau data saya sampai dengan data SPP untuk sampai dengan bulan Juni memang ada di laporan saya. Saya belum liat total memang sudah mencapai diatas 10 milyar. Itu memang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu berada itu tersebar di 36 kecamatan dana SPP ini di provinsi Maluku dari 42 kecamatan yang mendapatkan alokasi dana PNPM ini dari 2000. Terakhir di 2010 kemarin. . Itu menyangkut perkembangan pengembalian. Secara keseluruhan dari 36 ini, itu sampai dengan bulan Mei kemarin itu, tingkat kolektibilitas mencapai 76%. Ini menunjukkan bahwa pengembalian masih berada dibawah target program. Karena target program harus mencapai minimal 80%. Nah itu baru dianggap cukup bagus. Dan memang kredit macet di Maluku ini agak kesulitan bagi kita dalam melakukan pembinaan SPP ini. Karena ada memang kelompok-kelompok usaha</p>

	<p>kecil di masyarakat ini memang ada di beberapa kecamatan yang kegiatan ekonominya bagus yang dekat dengan pusat kota kabupaten dan provinsi. Memang kegiatan SPP nya berkembang cukup bagus. Tetapi bagi kelompok-kelompok kecil yang berada di kecamatan-kecamatan terisolir dari kabupaten apalagi provinsi, itu kegiatan ekonomi kurang berkembang di ibu kota kecamatan dan desa. Sehingga memang faktor penyebab kredit macet lebih banyak disitu pada kegiatan ekonomi masyarakat yang belum berkembang. Sehingga itu yang biasa memberikan kontribusi kredit macet terbesar untuk kolektibilitas provinsi Maluku ini. Memang di satu sisi kita kalo menurut sebetulnya lokasi-lokasi, kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang tidak masuk dalam wilayah-wilayah tidak produktif yaitu seharusnya tidak perlu didanai. Memang program ini mengharuskan bahwa keputusan ada di masyarakat. Sehingga walaupun kecamatan itu kegiatan ekonomi masyarakat tidak begitu bagus tapi kalo masyarakat membutuhkan maka tetap program akan diserahkan/ disalurkan. Akan tetapi, konsekuensi sebentar itu, ketika dia ambil tapi pengelolaannya, pasarnya tidak berkembang dan kegiatan ekonomi tidak berkembang di kecamatan atau di desa itu maka konsekuensinya akan terjadi juga kemacetan. Dan ibu perlu tahu bahwa pembinaan usaha kecil dalam kelompok SPP ini agak sangat sulit sekali karena ibu bisa bayangkan saja bahwa kelompok-kelompok miskin yang sebetulnya menurut penilaian lembaga-lembaga keuangan formal maupun non formal, jangankan Bank tapi seperti koperasi simpan pinjam saja, menurut penilaian mereka orang-orang miskin seperti itu sudah tidak layak untuk dibiayai pinjaman karena dikawatirkan akan terjadi kredit macet. Tapi bagi program ini mereka-mereka itu yang harus layak diberikan pinjaman diberdayakan. Sehingga memang bisa dibayangkan menurut penilaian lembaga-lembaga lain sudah tidak bisa</p>	<p>kecil di masyarakat ini memang ada di beberapa kecamatan yang kegiatan ekonominya bagus yang dekat dengan pusat kota kabupaten dan provinsi. Memang kegiatan SPP nya berkembang cukup bagus. Tetapi bagi kelompok-kelompok kecil yang berada di kecamatan-kecamatan terisolir dari kabupaten apalagi provinsi, itu kegiatan ekonomi kurang berkembang di ibu kota kecamatan dan desa. Sehingga memang faktor penyebab kredit macet lebih banyak disitu pada kegiatan ekonomi masyarakat yang belum berkembang. Sehingga itu yang biasa memberikan kontribusi kredit macet terbesar untuk kolektibilitas provinsi Maluku ini. Memang di satu sisi kita kalo menurut sebetulnya lokasi-lokasi, kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang tidak masuk dalam wilayah-wilayah tidak produktif yaitu seharusnya tidak perlu didanai. Memang program ini mengharuskan bahwa keputusan ada di masyarakat. Sehingga walaupun kecamatan itu kegiatan ekonomi masyarakat tidak begitu bagus tapi kalo masyarakat membutuhkan maka tetap program akan diserahkan/ disalurkan. Akan tetapi, konsekuensi sebentar itu, ketika dia ambil tapi pengelolaannya, pasarnya tidak berkembang dan kegiatan ekonomi tidak berkembang di kecamatan atau di desa itu maka konsekuensinya akan terjadi juga kemacetan. Dan ibu perlu tahu bahwa pembinaan usaha kecil dalam kelompok SPP ini agak sangat sulit sekali karena ibu bisa bayangkan saja bahwa kelompok-kelompok miskin yang sebetulnya menurut penilaian lembaga-lembaga keuangan formal maupun non formal, jangankan Bank tapi seperti koperasi simpan pinjam saja, menurut penilaian mereka orang-orang miskin seperti itu sudah tidak layak untuk dibiayai pinjaman karena dikawatirkan akan terjadi kredit macet. Tapi bagi program ini mereka-mereka itu yang harus layak diberikan pinjaman diberdayakan. Sehingga memang bisa dibayangkan menurut penilaian lembaga-lembaga lain sudah tidak bisa</p>
--	---	---

	<p>didanai tapi kita harus turun dengan melakukan pembinaan, pendampingan secara pelan-pelan walaupun dia pengembaliannya tapi karena memang program pengelolaan simpan pinjam ini memang target kita bukan pengembalian itu harus lancar tapi disamping pengembalian lancar ada peningkatan usaha. Nah itulah beda kita dengan lembaga-lembaga keuangan lain, dia gak pusing. Masalah pinjamannya harus kembali, usahanya mau maju atau tidak maju urusan pribadi dia. Yang penting pinjamannya kembali dengan bunga. Tapi kita kan terbalik tidak seperti itu. Kita ni kan disatu sisi target kita dana kembali tapi disisi lain ada peningkatan volume usaha. Itu baru dianggap program ini sukses. Apalagi walaupun dia mengembalikan pinjaman lancar tetapi usaha tidak berkembang maka kita dianggap gagal melakukan pembinaan terhadap kelompok itu. Sehingga memang inilah yang menjadi dasar bagi kita.</p> <p>Jadi kita di provinsi harus tetap melakukan pembinaan secara berjangka baik dari kabupaten secara berjenjang ke kecamatan terutama dalam penguatan-penguatan kapasitas fasilitator kecamatan dan pengurus UPK terkait dengan pengelolaan dana bergulir ini sehingga mereka betul-betul bisa mengawal dana ini sampai di tingkat pemanfaatan kembali dalam keadaan baik dan juga ada peningkatan usaha. Mungkin secara umum seperti itu.</p> <p>Faktor pendukung dan penghambat Di lapangan terkadang para fasilitator dan tim verifikasi yang tidak maksimal menjalankan tugasnya sehingga ada kejadian modal yang diberikan ke beberapa orang mencapai 4 sampai 5 juta. Anggota kelompok juga terdiri dari pensiun-pensiunan PNS yang sebetulnya dilihat dari ekonomi keluarga itu dia sudah mapan. Sebenarnya dia ini bukan target kita. Karena masih banyak orang miskin yang tidak punya jaminan tetap kepada merekalah dana SPP ini harusnya diberikan. Kriteria yang berlaku di program yaitumengacu kepada kemiskinan menurut Bank Dunia</p>	<p>didanai tapi kita harus turun dengan melakukan pembinaan, pendampingan secara pelan-pelan walaupun dia pengembaliannya tapi karena memang program pengelolaan simpan pinjam ini memang target kita bukan pengembalian itu harus lancar tapi disamping pengembalian lancar ada peningkatan usaha. Nah itulah beda kita dengan lembaga-lembaga keuangan lain, dia gak pusing. Masalah pinjamannya harus kembali, usahanya mau maju atau tidak maju urusan pribadi dia. Yang penting pinjamannya kembali dengan bunga. Tapi kita kan terbalik tidak seperti itu. Kita ni kan disatu sisi target kita dana kembali tapi disisi lain ada peningkatan volume usaha. Itu baru dianggap program ini sukses. Apalagi walaupun dia mengembalikan pinjaman lancar tetapi usaha tidak berkembang maka kita dianggap gagal melakukan pembinaan terhadap kelompok itu. Sehingga memang inilah yang menjadi dasar bagi kita.</p> <p>Jadi kita di provinsi harus tetap melakukan pembinaan secara berjangka baik dari kabupaten secara berjenjang ke kecamatan terutama dalam penguatan-penguatan kapasitas fasilitator kecamatan dan pengurus UPK terkait dengan pengelolaan dana bergulir ini sehingga mereka betul-betul bisa mengawal dana ini sampai di tingkat pemanfaatan kembali dalam keadaan baik dan juga ada peningkatan usaha. Mungkin secara umum seperti itu.</p> <p>Faktor pendukung dan penghambat Di lapangan terkadang para fasilitator dan tim verifikasi yang tidak maksimal menjalankan tugasnya sehingga ada kejadian modal yang diberikan ke beberapa orang mencapai 4 sampai 5 juta. Anggota kelompok juga terdiri dari pensiun-pensiunan PNS yang sebetulnya dilihat dari ekonomi keluarga itu dia sudah mapan. Sebenarnya dia ini bukan target kita. Karena masih banyak orang miskin yang tidak punya jaminan tetap kepada merekalah dana SPP ini harusnya diberikan. Kriteria yang berlaku di program yaitumengacu kepada kemiskinan menurut Bank Dunia</p>
--	--	--

	<p>atau menurut BPS, kau bisa tau satu pendapatan dibawah 2\$ perhari sudah dikategorikan miskin. Artinya kalo berpendapatan Rp.25 ribu per hari saja berarti dia sudah tidak bisa membiayai kebutuhan pokok keluarga. Tetapi kalo BPS kan dia pakai kalori. Dari situlah fasilitator dan tim verifikasi dapat menentukan kriteria kelompok. Misalnya dilihat dari penampilan rumah. Kalau rumah memiliki dindingnya dan plafonnya sudah bagus, lalu orang seperti ini yang menerima pinjaman nah itu yang dipertanyakan. Disinilah faktor penghambat dalam kegiatan SPP dimana fasilitator ingin aman dengan mengejar pengembalian yang lancar, tapi disisi lain gagal memberdayakan masyarakat</p> <p>Di beberapa lokasi-lokasi kecamatan tertentu yang dimana kecamatan itu ada masyarakat-masyarakat pendatang seperti orang Buton, orang Bugis bahkan orang Jawa juga. Itu memang mereka itu juga sudah punya mental dagang dan sejak awal mereka sudah punya usaha-usaha kecil. Sehingga ketika mereka menggunakan pinjaman dia tidak sia-siakan pinjaman itu. Dan memang masyarakat-masyarakat non lokal seperti itu memang mereka berpikir bahwa tanpa dia berusaha, usaha tidak berkembang dan dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan dan keluarga hidup dari usaha itu. Tetapi masyarakat pribumi ini memang betul bahwa dia memulai usaha itu setengah-setengah dan berpikir usaha tidak perlu berkembang karena dia bisa makan dari hasil-hasil lahannya seperti cengkeh, pala dan sagu dan sebagainya. Karena mereka dimanjakan dengan alamnya yang di dalamnya masih ada tanaman-tanaman pangan, sehingga memang mereka melihat pinjaman ini sebetulnya bukan merupakan sebuah target untuk mengembangkan usaha dalam keluarga. Tetapi ya hanya dilakukan kalo berkembang ya, kalo tidak palingan sebentar dalam pencicilan kembali kalo diusahakan tentunya dia akan bayar lagi dengan usaha-usaha yang lain.</p> <p>Penguatan Lembaga</p>	<p>atau menurut BPS, kau bisa tau satu pendapatan dibawah 2\$ perhari sudah dikategorikan miskin. Artinya kalo berpendapatan Rp.25 ribu per hari saja berarti dia sudah tidak bisa membiayai kebutuhan pokok keluarga. Tetapi kalo BPS kan dia pakai kalori. Dari situlah fasilitator dan tim verifikasi dapat menentukan kriteria kelompok. Misalnya dilihat dari penampilan rumah. Kalau rumah memiliki dindingnya dan plafonnya sudah bagus, lalu orang seperti ini yang menerima pinjaman nah itu yang dipertanyakan. Disinilah faktor penghambat dalam kegiatan SPP dimana fasilitator ingin aman dengan mengejar pengembalian yang lancar, tapi disisi lain gagal memberdayakan masyarakat.</p> <p>Di beberapa lokasi-lokasi kecamatan tertentu yang dimana kecamatan itu ada masyarakat-masyarakat pendatang seperti orang Buton, orang Bugis bahkan orang Jawa juga. Itu memang mereka itu juga sudah punya mental dagang dan sejak awal mereka sudah punya usaha-usaha kecil. Sehingga ketika mereka menggunakan pinjaman dia tidak sia-siakan pinjaman itu. Dan memang masyarakat-masyarakat non lokal seperti itu memang mereka berpikir bahwa tanpa dia berusaha, usaha tidak berkembang dan dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan dan keluarga hidup dari usaha itu. Tetapi masyarakat pribumi ini memang betul bahwa dia memulai usaha itu setengah-setengah dan berpikir usaha tidak perlu berkembang karena dia bisa makan dari hasil-hasil lahannya seperti cengkeh, pala dan sagu dan sebagainya. Karena mereka dimanjakan dengan alamnya yang di dalamnya masih ada tanaman-tanaman pangan, sehingga memang mereka melihat pinjaman ini sebetulnya bukan merupakan sebuah target untuk mengembangkan usaha dalam keluarga. Tetapi ya hanya dilakukan kalo berkembang ya, kalo tidak palingan sebentar dalam pencicilan kembali kalo diusahakan tentunya dia akan bayar lagi dengan usaha-usaha yang lain.</p> <p>Penguatan Lembaga</p>
--	--	---

	<p>Karena memang dana pinjaman ini ada pada kekuatan kelembagaan, yaitu kelompok SPP, jadi apabila kelompok ini dia sudah pecah maka tentunya berdampak pada pengembalian pinjaman kelembagaan, jadi kita lebih banyak melakukan penguatan kelembagaan dalam kelompok ini, lebih banyak kita berhati-hati. Sehingga segala sesuatunya harus secara transparan dijelaskan kepada anggota supaya dia mengerti berapa besar dana yang sesungguhnya dia terima dari UPK sehingga dalam pengelolaan ini, kelembagaan ini betul-betul terbentuk. Tapi kenyataan yang terjadi ini bahwa memang kelihatannya kelembagaan kelompok ini tidak terlalu berkembang. Masyarakat hanya menggunakan kelompok agar mendapatkan pinjaman untuk usaha pribadi. Tapi dia tidak membesarkan kelompok. Jadi kelompok hanya dijadikan sebuah sarana, sebuah tempat berkumpul untuk dapat pinjaman. Dan setelah mendapat dana, anggota berjalan sendiri-sendiri. Padahal dalam ketentuan kelompok ini harus ada tanggung renteng dari setiap anggota, ada juga yang namanya itu uang iuran anggota yang masuk ke kas kelompok untuk pengadaan buku administrasi dan sebagainya. Ada pertemuan rutin kelompok setiap bulan atau setiap minggu dalam rangka mengevaluasi perkembangan kinerja setiap anggota harus perkembangan usaha anggota. Tapi semua ketentuan kelompok ini tidak berjalan secara maksimal di kecamatan dan di desa. Karena memang individualistis tiap anggota dalam kelompok terlalu tinggi, yang penting usaha dia yang maju saja. Tetapi kelompok itu dia tidak mau kembangkan. Hal ini tentu saja menghambat pelaksanaan kegiatan SPP</p>	<p>Karena memang dana pinjaman ini ada pada kekuatan kelembagaan, yaitu kelompok SPP, jadi apabila kelompok ini dia sudah pecah maka tentunya berdampak pada pengembalian pinjaman kelembagaan, jadi kita lebih banyak melakukan penguatan kelembagaan dalam kelompok ini, lebih banyak kita berhati-hati. Sehingga segala sesuatunya harus secara transparan dijelaskan kepada anggota supaya dia mengerti berapa besar dana yang sesungguhnya dia terima dari UPK sehingga dalam pengelolaan ini, kelembagaan ini betul-betul terbentuk. Tapi kenyataan yang terjadi ini bahwa memang kelihatannya kelembagaan kelompok ini tidak terlalu berkembang. Masyarakat hanya menggunakan kelompok agar mendapatkan pinjaman untuk usaha pribadi. Tapi dia tidak membesarkan kelompok. Jadi kelompok hanya dijadikan sebuah sarana, sebuah tempat berkumpul untuk dapat pinjaman. Dan setelah mendapat dana, anggota berjalan sendiri-sendiri. Padahal dalam ketentuan kelompok ini harus ada tanggung renteng dari setiap anggota, ada juga yang namanya itu uang iuran anggota yang masuk ke kas kelompok untuk pengadaan buku administrasi dan sebagainya. Ada pertemuan rutin kelompok setiap bulan atau setiap minggu dalam rangka mengevaluasi perkembangan kinerja setiap anggota harus perkembangan usaha anggota. Tapi semua ketentuan kelompok ini tidak berjalan secara maksimal di kecamatan dan di desa. Karena memang individualistis tiap anggota dalam kelompok terlalu tinggi, yang penting usaha dia yang maju saja. Tetapi kelompok itu dia tidak mau kembangkan. Hal ini tentu saja menghambat pelaksanaan kegiatan SPP</p>
--	--	--

Monitoring dan Supervisi

Kegiatan dana bergulir adalah suatu kegiatan masyarakat yang sepenuhnya menjadi kerja dan tanggung jawab seluruh masyarakat sebagai pemilik kegiatan tersebut. Kegiatan Dana Bergulir adalah suatu kegiatan berbasis masyarakat yang dimulai dari perencanaan yang disusun oleh masyarakat, pembentukan struktur organisasi/kelembagaan yang berasal dari masyarakat, penetapan dan mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan kesepakatan masyarakat, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat, dan pengawasan oleh masyarakat.

Kegiatan monitoring dan supervisi diperlukan untuk menjamin implementasi dan kualitas kegiatan. Beberapa pakar manajemen mengemukakan bahwa fungsi monitoring mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. Conor (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Pada umumnya, manajemen menekankan terhadap pentingnya kedua fungsi ini, yaitu perencanaan dan pengawasan (monitoring). (POAC)

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Berdasarkan kegunaannya, William Travers Jerome menggolongkan monitoring dan supervise menjadi delapan macam, sebagai berikut:

1. Monitoring dan Supervisi digunakan untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekan biaya pelaksanaan dalam hal ini kegiatan dana bergulir.
2. Monitoring dan Supervisi digunakan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan.
3. Monitoring yang digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana.
4. Monitoring dan Supervisi digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh sebuah struktur organisasi dalam sebuah lembaga.
5. Monitoring dan Supervisi digunakan untuk mengukur pencapaian tugas pelaksana.
6. Monitoring dan Supervisi digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan kegiatan dana bergulir.
7. Monitoring dan Supervisi digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga.
8. Monitoring dan Supervisi digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana.

Monitoring pada umumnya dilakukan baik pada waktu sebelum kegiatan pembinaan maupun bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan (pengawasan atau supervisi). Monitoring, pengawasan, dan supervisi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola kegiatan dana bergulir. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dana bergulir, sedangkan monitoring dilakukan terhadap komponen-komponen kegiatan dana bergulir. Monitoring selain berkaitan dengan pengawasan dan supervisi, mempunyai hubungan erat dengan penilaian kegiatan dana bergulir.

Monitoring sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengikuti suatu kegiatan dan pelaksanaannya secara mantap, teratur dan terus-menerus dengan cara mendengar, melihat dan mengamati, serta mencatat keadaan serta perkembangan kegiatan tersebut.

Khusus pada kegiatan dana bergulir monitoring dan supervisi dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh seluruh pihak, mulai dari pengamatan kegiatan di kelompok sampai tingkat kecamatan.

Lembar Monitoring dan Supervisi dimaksudkan untuk mempermudah dalam melihat kegiatan pengelolaan dana bergulir, khusus bagi fasilitator monitoring dan supervisi dilakukan guna melihat implementasi dan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang.

I. Desa dan Kelompok SPP/UEP

Monitoring dan Supervisi pada tingkat kelompok pemanfaat dana bergulir dilakukan untuk ;

1. Melihat sejauh mana hasil pendampingan peningkatan kapasitas kelompok.
2. Memastikan seluruh ketentuan yang diatur dalam Penjelasan PTO X (10) dapat diterapkan dengan baik.
3. Memastikan keberpihakan kepada orang miskin
4. Apakah pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha dapat terpenuhi

No	Uraian kegiatan	Data/Informasi Pendukung	Kondisi saat kunjungan	Rekomendasi
1.	Kelengkapan Administrasi Kelompok a. Apakah kelompok mengetahui fungsi dari sebuah administrasi b. Apakah kelompok memiliki Kartu Kontrol/Kartu Pinjaman c. Kelompok memiliki Buku Kas Umum/Operasional d. Kelompok memiliki daftar anggota e. Mempunyai buku Bimbingan f. Apakah kelompok telah dapat dan mengerti membuat proposal pinjaman dengan baik dan benar			
2.	Kelembagaan Kelompok a. Adakah pengurus kelompok b. Berapa prosentase anggota RTM dalam kelompok tersebut c. Mempunyai aturan kelompok dalam bentuk tertulis d. Mempunyai AD/ART kelompok e. Apakah kelompok tersebut mempunyai iuran atau tabungan rutin			
3.	Ketaatan pada aturan a. Siapa yang menjadi penerima manfaat b. Siapa yang menjadi anggota kelompok c. Berapa orang RTM yang menjadi pemanfaat dalam kelompok			

	<p>tersebut</p> <p>d. Apakah pengurus menyampaikan laporan atau pertanggung jawaban secara rutin</p> <p>e. Apakah pinjaman yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum pada proposal</p>			
4.	<p>Pembinaan dan Penguatan</p> <p>a. Apakah kelompok pernah mendapat pembinaan atau penguatan</p> <p>b. Berapa kali dalam 1 tahun kelompok mendapat kunjungan pembinaan baik langsung maupun melalui pelatihan</p> <p>c. Siapa yang pernah melakukan pembinaan</p>			
5.	<p>Informasi dan Pengembangan Jaringan</p> <p>a. Bagaimana anggota kelompok memperoleh informasi tentang kegiatan dana bergulir</p> <p>b. Pernahkan kelompok mendapat informasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha, permodalan, pelatihan</p> <p>c. Apakah kelompok pernah melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam hal peningkatan usaha atau peningkatan kapasitas</p>			
6.	<p>Aktivitas</p> <p>a. Pertemuan rutin</p> <p>b. Berapa kali dalam 1 bulan kelompok mengadakan pertemuan</p> <p>c. Prosentase kehadiran anggota dalam pertemuan tersebut</p> <p>d. Apakah pengurus kelompok dapat membantu penyelesaian permasalahan dari para</p>			

	anggotanya terkat dengan pinjaman e. Apakah pengurus kelompok dapat menunjukan rasa tanggung jawab atas permasalahan kelompok			
--	--	--	--	--



E. Lembar Kerja Audit Proses Pelaksanaan Kegiatan SPP

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Sampel Desa :

Fokus Audit :

No.	URAIAN KEGIATAN	Catatan Temuan	T M	K M	C M	M	S M
1.	Periksa dan berikan penilaian tentang jenis kegiatan yang didanai telah sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan oleh Kelompok Perempuan (lihat hasil Musyawarah Desa Khusus Perempuan dan Musyawarah Antar Desa).						
2.	Periksa dan berikan penilaian tentang Kelompok Perempuan penerima bantuan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Lakukan klarifikasi langsung ke kelompok.						
3.	Periksa dan berikan penilaian tentang sasaran program/penerima manfaat sesuai kriteria yang ditentukan dalam PNPM MP. Lakukan klarifikasi langsung kepada pemanfaat.						

No.	URAIAN KEGIATAN	Catatan Temuan	T M	K M	C M	M	S M
4.	Periksa dan berikan penilaian tentang mekanisme Penyaluran Dana BLM telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Lakukan klarifikasi kepada UPK, TPK dan Kelompok.						
5.	Periksa buku kas harian kolektif BPNPM MP di UPK, cek nilai-nilai pada kolom pengeluaran untuk penyaluran dana SPP ke setiap desa dan cocokkan dengan kuitansinya. Cocokkan jumlah yang dikeluarkan oleh UPK dengan yang diterima TPK dengan melakukan cek terhadap buku kas TPK. Lakukan hal yang sama untuk mekanisme penyaluran dari TPK ke kelompok dan dari kelompok ke pemanfaat. Lakukan klarifikasi kepada beberapa pemanfaat berkaitan dengan jumlah dana yang diterima apakah tidak ada pemotongan dan sesuai dengan yang dikeluarkan UPK dan usulannya.						
6.	Periksa dan berikan penilaian tentang pengelolaan kegiatan pada tingkat Kelompok telah mencakup : (1) Data peminjam (2) Dokumen pendanaan/kuitansi baik di kelompok maupun pemanfaat. (3) Administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK. (4) Administrasi penyaluran dan pengembalian/ Kartu pinjaman pemanfaat. (5) Administrasi pinjaman pemanfaat.						

No.	URAIAN KEGIATAN	Catatan Temuan	T M	K M	C M	M	S M
7.	Periksa dan berikan penilaian tentang ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala baik di tingkat TPK kepada masyarakat desa maupun di tingkat kelompok kepada anggota khusus untuk pengelolaan SPP. Apakah hal tersebut juga ditempel di papan informasi yang ada di desa.						

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan SPP di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan :

$$\frac{\text{Total nilai dari parameter 1 - 7}}{7}$$

Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan SPP di kecamatan tertentu mendapat penilaian **sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai**, juga dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi.

Terhadap parameter nomor 6, selain diberikan nilai secara kuantitatif seperti parameter yang lainnya, apabila terjadi pemotongan dana atau ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan dan dana yang diterima, maka dapat disimpulkan ada indikasi penyalahgunaan dana yang kemungkinan perlu diklarifikasi lagi lebih detail sampai ketemu jumlah yang pasti dan pelaku yang jelas. Laporan terjadinya penyalahgunaan dana merupakan laporan dalam bentuk naratif yang melengkapi laporan hasil audit yang menguraikan berapa jumlah dana yang disalahgunakan dan siapa pelakunya.

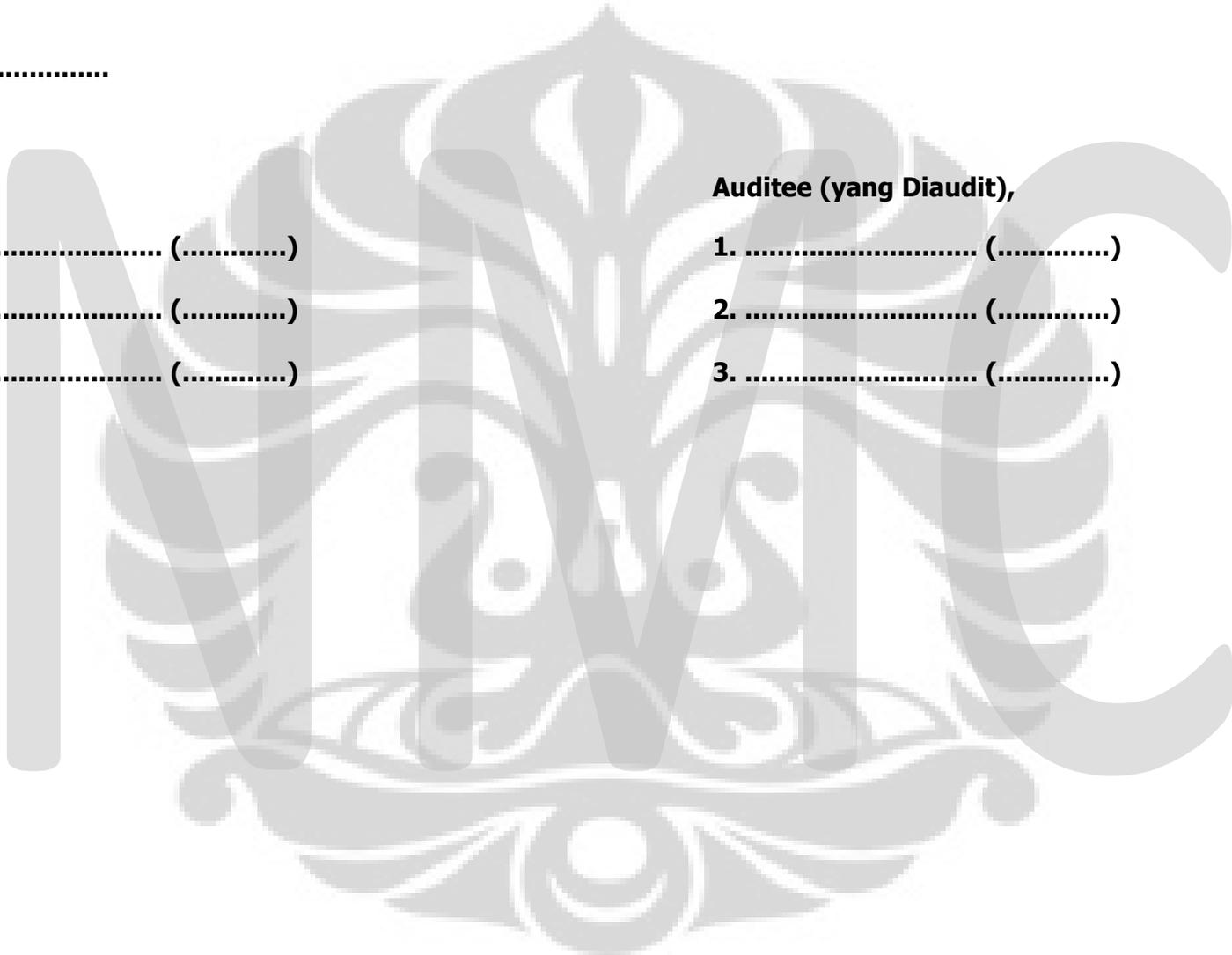
Tanggal.....

Auditor,

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Auditee (yang Diaudit),

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)



UNIT PENGELOLA KEGIATAN
LAPORAN PERKEMBANGAN PINJAMAN SPP PPK III
Per 25 SEPTEMBER 2010



KECAMATAN : Salahutu
KABUPATEN : Maluku Tengah
PROVINSI : Maluku

No.	KELOMPOK DESA	ALOKASI PINJAMAN	TARGET PENGEMBALIAN KUMULATIF S/D BULAN INI		REALISASI PENGEMBALIAN S/D BULAN LALU		REALISASI PENGEMBALIAN BULAN INI		REALISASI PENGEMBALIAN S/D BULAN INI		SALDO PINJAMAN BULAN INI	% PENGEMBALIAN	TUNGGAKAN PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	
			POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA			POKOK	BUNGA
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (3-11)	14 = (11/5)	POKOK	BUNGA
1	DESA TULEHU CATERING LATING	24,000,000	24,000,000	3,120,000	14,860,000	2,590,000			14,860,000	2,590,000	9,140,000	62 %	(9,140,000)	(530,000)
2	SPP NURUL IMAN 2010	50,000,000	33,333,336	4,333,336	29,166,900	3,792,600	4,166,700	541,800	33,333,600	4,334,400	16,666,400	100 %	264	1,064
	DESA WAAI	30,500,000	30,500,004	3,985,004	9,689,332	1,321,668			9,689,332	1,321,668	20,810,668	32 %	(20,810,672)	(2,643,336)
	DESA TIAL	15,000,000	15,000,000	1,950,000	15,000,000	1,950,000			15,000,000	1,950,000	-	100 %	-	-
	DESA SULI	9,500,000	9,500,040	1,710,000	1,341,500	427,500			1,341,500	427,500	8,158,500	14 %	(8,158,540)	(1,282,500)
	TOTAL	129,000,000	112,333,380	15,078,340	70,057,732	10,081,768	4,166,700	541,800	74,224,432	10,623,568	54,775,568	66.1 %	(38,108,948)	(4,454,772)

Diketahui dan setuju oleh:

Dibuat oleh:

(Hesti A. Fadirubun, SE.)
FK.P

(Abdul Kadir Uburo, ST.)
FK.T

(Armin Kunio, SE.)
Ketua UPK

(L.A. Ohorella, SE.)
Bendahara UPK

UNIT PENGELOLA KEGIATAN
LAPORAN KOLEKTIBILITAS PINJAMAN PERGULIRAN SPP
KECAMATAN SALAHUTU, KAB. MALUKU TENGAH, MALUKU



BULAN : SEPTEMBER 2010

NO.	KELOMPOK/DESA	SALDO PINJAMAN BULAN INI	ANGSURAN					ANGSURAN POKOK MENUNGGAK DI ATAS 6 KALI ANGSURAN KOLEKTIBILITAS V
			POKOK LANCAR (TANPA TUNGGAKAN) KOLEKTIBILITAS I	1 S/D 2 KALI ANGSURAN KOLEKTIBILITAS II	3 S/D 4 KALI ANGSURAN KOLEKTIBILITAS III	5 S/D 6 KALI ANGSURAN KOLEKTIBILITAS IV	ANGSURAN POKOK MENUNGGAK	
I	TULEHU	25,806,400	24,193,600				1,612,800	
II	WAAI	20,810,668	9,689,332				11,121,336	
III	TIAL	-						
IV	SULI	8,158,500	1,341,500				6,817,000	
TOTAL I + II + III + IV			35,224,432	-	-	-	19,551,136	-

TINGKAT KOLEKTIBILITAS	CADANGAN RESIKO PENGHAPUSAN (1)	JUMLAH PINJAMAN (2)	JUMLAH CADANGAN PENGHAPUSAN (3) = (1) X (2)
KOLEKTIBILITAS II	10	-	-
KOLEKTIBILITAS III	25	-	-
KOLEKTIBILITAS IV	50	-	-
KOLEKTIBILITAS V	100	19,551,136	19,551,136.0
TOTAL		54,775,568	19,903,380.3
RASIO CADANGAN PENGHAPUSAN (TOTAL (3) / TOTAL (2))			36.34

Diketahui dan Disetujui oleh,

Dibuat oleh,

(Hesti A. Fadribun, SE.)
FK.P

(Abdul Kadir Ubro, ST.)
FK.T

(Armin Kunio, SE.)
Ketua UPK

(I.A. Chorella, SE.)
Bendahara UPK

UNIT PENGELOLA KEGIATAN
LAPORAN PERKEMBANGAN PINJAMAN SPP PPK III
Per 25 SEPTEMBER 2010



KECAMATAN : Salahutu
KABUPATEN : Maluku Tengah
PROVINSI : Maluku

No.	KELOMPOK DESA	ALOKASI PINJAMAN	TARGET PENGEMBALIAN KUMULATIF S/D BULAN INI		REALISASI PENGEMBALIAN S/D BULAN LALU		REALISASI PENGEMBALIAN BULAN INI		REALISASI PENGEMBALIAN S/D BULAN INI		SALDO PINJAMAN BULAN INI	% PENGEMBALIAN	TUNGGAKAN PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	
			POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA			POKOK	BUNGA
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (3-11)	14 = (11/5)	POKOK	BUNGA
1	DESA TULEHU CATERING LATING	24,000,000	24,000,000	3,120,000	14,860,000	2,590,000			14,860,000	2,590,000	9,140,000	62 %	(9,140,000)	(530,000)
2	SPP NURUL IMAN 2010	50,000,000	33,333,336	4,333,336	29,166,900	3,792,600	4,166,700	541,800	33,333,600	4,334,400	16,666,400	100 %	264	1,064
	DESA WAAI	30,500,000	30,500,004	3,985,004	9,689,332	1,321,668			9,689,332	1,321,668	20,810,668	32 %	(20,810,672)	(2,643,336)
	DESA TIAL	15,000,000	15,000,000	1,950,000	15,000,000	1,950,000			15,000,000	1,950,000	-	100 %	-	-
	DESA SULI	9,500,000	9,500,040	1,710,000	1,341,500	427,500			1,341,500	427,500	8,158,500	14 %	(8,158,540)	(1,282,500)
	TOTAL	129,000,000	112,333,380	15,078,340	70,057,732	10,081,768	4,166,700	541,800	74,224,432	10,623,568	54,775,568	66.1 %	(38,108,948)	(4,454,772)

Diketahui dan setuju oleh:

Dibuat oleh:

(Hesti A. Fadirubun, SE.)
FK.P

(Abdul Kadir Uburo, ST.)
FK.T

(Armin Kunio, SE.)
Ketua UPK

(L.A. Ohorella, SE.)
Bendahara UPK

UNIT PENGELOLA KEGIATAN
LAPORAN KOLEKTIBILITAS PINJAMAN PERGULIRAN SPP
KECAMATAN SALAHUTU, KAB. MALUKU TENGAH, MALUKU



BULAN : SEPTEMBER 2010

NO.	KELOMPOK/DESA	SALDO PINJAMAN BULAN INI	ANGSURAN					ANGSURAN POKOK MENUNGGAK DI ATAS 6 KALI ANGSURAN KOLEKTIBILITAS V
			POKOK LANCAR (TANPA TUNGGAKAN) KOLEKTIBILITAS I	1 S/D 2 KALI ANGSURAN KOLEKTIBILITAS II	3 S/D 4 KALI ANGSURAN KOLEKTIBILITAS III	5 S/D 6 KALI ANGSURAN KOLEKTIBILITAS IV	ANGSURAN POKOK MENUNGGAK	
I	TULEHU	25,806,400	24,193,600				1,612,800	
II	WAAI	20,810,668	9,689,332				11,121,336	
III	TIAL	-						
IV	SULI	8,158,500	1,341,500				6,817,000	
TOTAL I + II + III + IV			35,224,432				19,551,136	

TINGKAT KOLEKTIBILITAS	CADANGAN RESIKO PENGHAPUSAN (1)	JUMLAH PINJAMAN (2)	JUMLAH CADANGAN PENGHAPUSAN (3) = (1) X (2)
KOLEKTIBILITAS II	10	-	-
KOLEKTIBILITAS III	25	-	-
KOLEKTIBILITAS IV	50	-	-
KOLEKTIBILITAS V	100	19,551,136	19,551,136.0
TOTAL		54,775,568	19,903,380.3
RASIO CADANGAN PENGHAPUSAN (TOTAL (3) / TOTAL (2))			36.34

Diketahui dan Disetujui oleh,

Dibuat oleh,

(Hesti A. Fadirubun, SE.)
FK.P

(Abdul Kadir Ubro, ST.)
FK.T

(Armin Kunio, SE.)
Ketua UPK

(I.A. Chorella, SE.)
Bendahara UPK



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN SALAHUTU
NEGERI TULEHU

Jl. Sahutian No. 19 Tulehu. Km 25 Ambon

SURAT - KETERANGAN

NO:070:27/VII/2011.

Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : STELLA .A. TANASALE
N I M : 090 650 12000
Pekerjaan : Mahasiswa IPS Ilmu Kesejahteraan -
Sosial FISIP-UI DEPOK

Tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian di Negeri Tulehu pada 6 Juli 2011 dengan Judul : Evaluasi Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP)dalam PMPM MANDIRI Perdesaan (Studi Kasus pada Kelompok SPP Nurul Inam di Desa Tulehu UKK - Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakanseperlunya.

Tulehu 06 Juli 2011.

A.n Raja Negeri Tulehu

KAUR/BANG

M. ZEN WAHUMARURY